



LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA JAMBI

TAHUN 2020





DR. H. SYARIF FASHA, ME

WALIKOTA JAMBI

DR. dr. H. MAULANA, MKM

WAKIL WALIKOTA JAMBI





WALIKOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2020 ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Tahun 2020 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020 ini sudah banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang. Untuk itu patut kiranya kita semua terus memperkuat komitmen pembangunan untuk mewujudkan target-target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, instansi vertikal, masyarakat, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kedepannya. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. *Amin ya robbal alamin.*

Terima kasih.

 **WALIKOTA JAMBI**

H. SYARIF FASHA, ME

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Hukum	I-1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-3
1.2.1. Visi dan Misi	I-3
1.2.2. Tujuan dan Sasaran.....	I-5
1.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan	I-10
1.3. Data Umum Daerah.....	I-21
1.3.1. Data Geografis Wilayah	I-21
1.3.2. Jumlah Penduduk	I-22
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk	I-23
1.3.4. Jumlah PNS	I-24
1.3.5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	I-26
1.3.6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja	I-35
1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan	I-40
1.3.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	I-41
1.3.9. Kondisi Inflasi	I-44
1.3.10. Indeks Pembangunan Manusia	I-47
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	II-1
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III-1
3.1.1. URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR).....	III-1
3.1.1.1. Urusan Pendidikan.....	III-1
3.1.1.2. Urusan Kesehatan	III-4
3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-5
3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	III-9
3.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	III-10
3.1.1.6. Urusan Sosial.....	III-20
3.1.1.7. Urusan Tenaga Kerja.....	III-21
3.1.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-23
3.1.1.9. Urusan Pangan	III-25
3.1.1.10. Urusan Lingkungan Hidup	III-28
3.1.1.11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-30
3.1.1.12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-32
3.1.1.13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III-33
3.1.1.14. Urusan Perhubungan.....	III-35
3.1.1.15. Urusan Komunikasi dan Informatika	III-37

3.1.1.16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	III-39
3.1.1.17. Urusan Penanaman Modal.....	III-41
3.1.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga.....	III-43
3.1.1.19. Urusan Kebudayaan	III-44
3.1.1.20. Urusan Perpustakaan	III-45
3.1.1.21. Urusan Kearsipan	III-46
3.1.2. URUSAN PILIHAN	III-48
3.1.2.1. Urusan Pariwisata.....	III-48
3.1.2.2. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III-49
3.1.2.3. Urusan Pertanian	III-51
3.1.2.4. Urusan Perdagangan.....	III-54
3.1.2.5. Urusan Perindustrian	III-56
3.1.3. URUSAN PENUNJANG	III-59
3.1.3.1. Inspektorat	III-59
3.1.3.2. Perencanaan.....	III-61
3.1.3.3. Keuangan.....	III-64
3.1.3.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	III-67
3.1.4. URUSAN PENDUKUNG	III-69
3.1.4.1. Sekretariat Daerah.....	III-69
3.1.4.2. Sekretariat DPRD	III-71
3.1.5. URUSAN KEWILAYAHAN	III-71
3.1.5.1. Kecamatan	III-71
3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	III-74
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2019)	III-83
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV-1
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	V-1
5.2. Saran	V-2
LAMPIRAN I Indikator Tujuan RPJMD Kota Jambi	
LAMPIRAN II Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi	
LAMPIRAN III Tabel Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2020	
1. Tabel Capaian Urusan Wajib (Pelayanan Dasar Dan Non Pelayanan Dasar) Tahun 2020	
2. Tabel Capaian Urusan Pilihan Tahun 2020	
3. Tabel Capaian Urusan Penunjang Tahun 2020	
4. Tabel Capaian Urusan Pendukung Tahun 2020	
5. Tabel Capaian Urusan Kewilayahan Tahun 2020	
LAMPIRAN IV Daftar Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2020	
LAMPIRAN V Daftar Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi..... I-7
Tabel.1.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi..... I-11
Tabel 1.3	Arah Kebijakan I-15
Tabel 1.4	Peraturan Daerah Kota Jambi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I-26
Tabel 1.5	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI) I-28
Tabel 1.6	Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI) I-29
Tabel 1.7	Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI) I-32
Tabel 1.8	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI) I-34
Tabel 1.9	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI) I-36
Tabel 1.10	Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI) I-38
Tabel 1.11	Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI) I-39
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI) I-40
Tabel 1.13	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Jambi Bulan Desember 2020, Inflasi Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100) I-46
Tabel 1.14	Nilai Inflasi dan Rata-Rata Inflasi Kota Jambi Tahun 2016 s.d 2020 I-46
Tabel 1.15	Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2019-2020 I-48
Tabel 2.1	Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2020 dan Perubahan Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2020 II-5
Tabel 3.1.	Keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 III-1
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi pada Tahun 2020..... III-2
Tabel 3.3.	Keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 III-4
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi pada Tahun 2020..... III-5
Tabel 3.5	Keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 III-6
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPUPR Kota Jambi pada Tahun 2020 III-6
Tabel 3.7.	Keterkaitan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 III-9

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPRKP Kota Jambi pada Tahun 2020.....	III-10
Tabel 3.9. Keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-11
Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran Srategis Satpol PP pada Tahun 2020.....	III-12
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Tahun 2020.....	III-14
Tabel 3.12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada Tahun 2020.....	III-19
Tabel 3.13. Keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	III-21
Tabel 3.14. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial pada Tahun 2020.....	III-21
Tabel 3.15. Keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-22
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2020.....	III-23
Tabel 3.17. Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.....	III-24
Tabel 3.18. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2020.....	III-24
Tabel 3.19. Keterkaitan Urusan Pangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-25
Tabel 3.20. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada Tahun 2020.....	III-26
Tabel 3.21. Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-28
Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DLH Kota Jambi pada Tahun 2020....	III-29
Tabel 3.23. Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-31
Tabel 3.24. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun 2020.....	III-32
Tabel 3.25. Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-33
Tabel 3.26. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2020.....	III-33
Tabel 3.27. Keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.....	III-34
Tabel 3.28. Capaian Kinerja Sasaran Strategis PD DPPKB Kota Jambi pada Tahun 2020.....	III-34
Tabel 3.29. Keterkaitan Urusan Perhubungan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-35
Tabel 3.30. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi pada Tahun 2020.....	III-36
Tabel 3.31. Keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-37
Tabel 3.32. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada Tahun 2020.....	III-38
Tabel 3.33. Keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-39

Tabel 3.34. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2020	III-40
Tabel 3.35. Keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-41
Tabel 3.36. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi pada Tahun 2020	III-42
Tabel 3.37. Keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	III-43
Tabel 3.38. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispora Kota Jambi pada Tahun 2020	III-43
Tabel 3.39. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kebudayaan pada Tahun 2020	III-44
Tabel 3.40. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan pada Tahun 2020	III-46
Tabel 3.41. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kearsipan pada Tahun 2020 ..	III-47
Tabel 3.42. Keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-48
Tabel 3.43. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pariwisata pada Tahun 2020 ..	III-48
Tabel 3.44. Capaian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2020	III-50
Tabel 3.45. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2020 ..	III-51
Tabel 3.46. Capaian Program/Kegiatan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2020	III-52
Tabel 3.47. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2020	III-54
Tabel 3.48. Keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	III-54
Tabel 3.49. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perdagangan pada Tahun 2020	III-55
Tabel 3.50. Keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-57
Tabel 3.51. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perindustrian pada Tahun 2020	III-58
Tabel 3.52. Keterkaitan Inspektorat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 ...	III-60
Tabel 3.53. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi tahun 2020 ...	III-60
Tabel 3.54. Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Inspektorat Kota Jambi Tahun 2020	III-61
Tabel 3.55. Keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-62
Tabel 3.56. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi pada tahun 2020	III-62
Tabel 3.57. Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-64
Tabel 3.58. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Jambi pada tahun 2020	III-65
Tabel 3.59. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2019	III-66
Tabel 3.60. Keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-67

Tabel 3.61. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPSDMD Kota Jambi pada Tahun 2020	III-68
Tabel 3.62. Keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-70
Tabel 3.63. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Setda Kota Jambi pada Tahun 2020 .	III-70
Tabel 3.64. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2020.....	III-71
Tabel 3.65. Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023...	III-72
Tabel 3.66. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2020.....	III-72
Tabel 3.67. Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2020.....	III-73
Tabel 3.68. Kebijakan Strategis yang Diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2020	III-74
Tabel 3.69. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2019 Lalu.....	III-83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020	I-23
Gambar 1.2 Umlah Penduduk Kota Jambi menurut Kelompok Umur pada Tahun 2020	I-23
Gambar 1.3 Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2016-2020	I-24
Gambar 1.4 Komposisi ASN Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2020	I-24
Gambar 1.5 Jumlah ASN berdasarkan Golongan 2020	I-25
Gambar 1.6 Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan Eselon	I-25
Gambar 1.7 Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan Tingkat Pendidikan	I-26
Gambar 1.8 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2020	I-28
Gambar 1.9 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2020	I-29
Gambar 1.10 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020	I-31
Gambar 1.11 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020	I-31
Gambar 1.12 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020	I-33
Gambar 1.13 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020	I-33
Gambar 1.14 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020	I-34
Gambar 1.15 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020	I-34
Gambar 1.16 Komposisi Besaran antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2020	I-36
Gambar 1.17 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020	I-37
Gambar 1.18 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020	I-37
Gambar 1.19 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2020	I-38
Gambar 1.20 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020	I-39
Gambar 1.21 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020	I-40
Gambar 1.22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi dan Kota Jambi Tahun 2016-2020	I-43
Gambar 1.23 Trend Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2016-2020	I-47
Gambar 1.24 Perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2016-2020	I-49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1040);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020;
26. Perwal Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Walikota Jambi Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. Visi dan Misi

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi periode 2018-2023, telah ditetapkan Visi Kota Jambi, yaitu:

**“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA
BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN
MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”**

Batasan konsep yang terdapat dalam visi di atas adalah sebagai berikut:

- **Pusat Perdagangan dan Jasa:** berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
- **Berbasis Masyarakat:** berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- **Berakhlak:** Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- **Berbudaya:** Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- **Pelayanan Prima:** upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;

3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya penguatan UMKM dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan serta peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

1.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Pada Misi ke-1, terdapat 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut melalui beberapa sasaran yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Tramtibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pada Misi ke-2, terdapat 2 (dua) tujuan. Pertama, Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: yang dapat diukur dari 2 (dua) indikator ialah (1) Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan (2) penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan. Tujuan kedua, Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan. Adapun sasaran dari kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL.

Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan.

Sasaran 3 : Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat

Sasaran 4 : Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pada Misi ke-3, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu: Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan yang dilihat dari indikator tujuan yakni, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan

sasaran 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pada misi ke-4, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dari 2 (dua) indikator yakni (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (2) Tingkat pengangguran terbuka. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan
- Sasaran 3 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
- Sasaran 4 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Sasaran 5 : Meningkatkan realisasi investasi.
- Sasaran 6 : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja.
- Sasaran 7 : Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Pada Misi ke-5, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan indikator (1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) Indeks Pembangunan Gender, (3) Kriteria Kota Layak Anak, (4) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, (5) Persentase Penduduk Miskin. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan;
- Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- Sasaran 3 : Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk;
- Sasaran 4 : Meningkatkan kesetaraan gender;
- Sasaran 5 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;
- Sasaran 6 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Sasaran 7 : Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan;
- Sasaran 8 : Menurunkan angka PMKS.

Tabel. 1.1
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	2,77	
					Indeks Profesionalitas ASN	55	56	57,5	59	60,5	62	62	
					Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A	
					Indeks survey persepsi Korupsi	N/A	3,65	3,69	3,73	3,75	3,8	3,8	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28	85,5%	86%	87%	87,5%	88,5%	88,5%	
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82%	82%	80%	75%	66%	60%	60%	
			Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
				Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan Utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	50,59%	53,07%	60,77%	70,61%	78,25%	85,79%	85,79%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,30	38,50	38,65	38,75	38,75
					Indeks Kualitas Udara	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78	80,78
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,30	41,70	42,00	42,30	42,50	42,50
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	20	36	52	68	84	100	100
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,2	90,5	91	91,5	92	92,5	9,25
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,37%	2,38%	2,39%	2,40%	2,41%	2,41%
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430,5 M	430,5 M	474,62 M	498,35 M	523,37 M	523,37 M
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	65%	65,25%	65,50%	65,75%	66%	66%
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,00%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	4,3	4,3	5,35	6,5	7,5	8,3	8,3
					Persentase koperasi berkualitas	13%	16,06%	19,27%	23,85%	29,82%	36,70%	36,70%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	72,35	72,36	72,36	72,37	72,37
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	14,60	14,61	14,62	14,63	14,64	14,64
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	21,32	21,32	17,32	12,32	8,32	4,32	4,32
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,70	10,71	10,72	10,72
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,01
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	97,15%
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,89	94,90	94,91	94,93	94,94	94,95	94,95
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,07	68,10	68,20	68,30	68,40	68,50	68,50
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	60,23	61,43	63	64	66	66
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,5	51	51,5	52	52
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60	6	70	75	80	85	85

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

1.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya. Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi dan sasaran pembangunan, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi

VISI: MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		
T.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	S1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
		Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
		Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
		Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat		
T.2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S.2. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
	S3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
T.3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	S.4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
	S5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan		
T.4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang	S.6. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana perhubungan yang handal	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Berkelanjutan	S.7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan
	S.8. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
		Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
		Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
		Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
	S.9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan
S.10. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan	
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
T.5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	S.11. Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
	S.12. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	S.13. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Penguatan daya saing kepariwisataan
	S.14. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	S.15. Meningkatkan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi
	S.16. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha
Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan		

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.17. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan		
T.6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	S.18. Meningkatkan Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare) Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.19. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
		Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.20. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
	S.21. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Peningkatan Pengarusutamaan Gender
	S.22. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak
	S.23. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	S.24. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
	S.25. Menurunkan angka PMKS	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.3
Arah Kebijakan**

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK
Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi , Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan
Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan
Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
Pengendalian dan pengawasan lingkungan				
Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan				
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran	Meningkatkan manajemen tataniaga	Meningkatkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal
Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi	Pengembangan Koperasi
Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
Menekan angka putus sekolah	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas
Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan
Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
		Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Batuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 88 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.887 Ha yang terdiri dari:

a. Kecamatan Alam Barajo	36.909	Ha	21,73%
b. Kecamatan Danau Sipin	7.278	Ha	4,28%
c. Kecamatan Danau Teluk	13.444	Ha	7,91%
d. Kecamatan Jambi Selatan	12.267	Ha	7,22%
e. Kecamatan Jambi Timur	13.684	Ha	8,05%
f. Kecamatan Jelutung	7.617	Ha	4,48%
g. Kecamatan Kotabaru	29.937	Ha	17,62%
h. Kecamatan Paal Merah	19.571	Ha	11,52%
i. Kecamatan Pasar Jambi	1.670	Ha	0,98%
j. Kecamatan Pelayangan	10.689	Ha	6,29%
k. Kecamatan Telanaipura	16.822	Ha	9,90%
	169.887	Ha	100%

Sumber: DPUPR Kota Jambi

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°31'27,19" BT sampai 103°40'51,80" BT dan 01°32'48" LS sampai 01°41'46,07" LS. Berdasarkan data DEM Nasional, wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 5 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Danau Sipin, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Paal Merah, Alam Barajo dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut. Secara umum, kondisi topografi Kota Jambi disajikan sebagai berikut:

<u>Topografi</u>	<u>Kemiringan (%)</u>	<u>Persentase</u>
Datar	0-8	61.529%
Landai	8-15	28.570%
Agak Curam	15-25	8.599%
Curam	25-45	1.302%

Sumber: DPUPR Kota Jambi

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat).

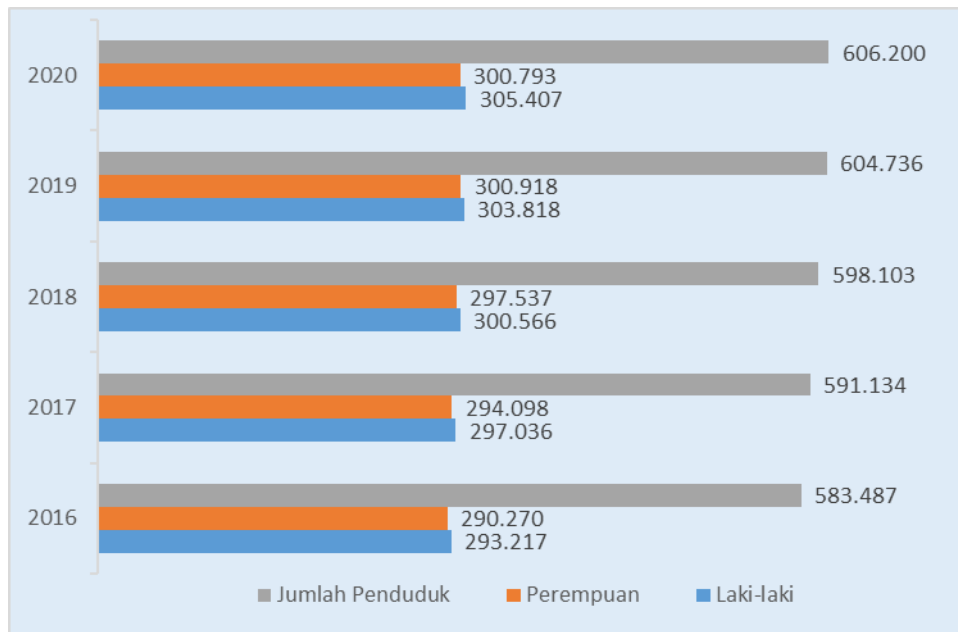
Selama tahun 2020, keadaan suhu di Kota Jambi antara 24,1°C - 32,1°C, dengan suhu rata-rata 27,4°C. Adapun kelembaban antara 54% - 97%, dengan kelembaban rata-rata 83%. Kecepatan angin antara 1,6m/detik – 9,6m/detik, dengan kecepatan rata-rata 2m/detik. Tekanan udara antara 1005,4mb – 1009,6mb, dengan tekanan udara rata-rata 1007,4mb. Selama tahun 2020, jumlah curah hujan di Kota Jambi 2323,7mm, dengan jumlah hari hujan 209 hari dalam setahun dan penyinaran matahari 57%.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan data dari BPS Kota Jambi tercatat sebanyak 606.200 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk bulan September 2020), dengan kepadatan penduduk 2.949 orang/km². Kepadatan penduduk menurut Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Alam Barajo = 2.596 orang/Km²
- b. Kecamatan Danau Sipin = 5.504 orang/Km²
- c. Kecamatan Danau Teluk = 817 orang/Km²
- d. Kecamatan Jambi Selatan = 4.989 orang/Km²
- e. Kecamatan Jambi Timur = 4.148 orang/Km²
- f. Kecamatan Jelutung = 7.505 orang/Km²
- g. Kecamatan Kotabaru = 2.217 orang/Km²
- h. Kecamatan Paal Merah = 3.904 orang/Km²
- i. Kecamatan Pasar Jambi = 2.784 orang/Km²
- j. Kecamatan Pelayangan = 846 orang/Km²
- k. Kecamatan Telanaipura = 2.186 orang/Km²

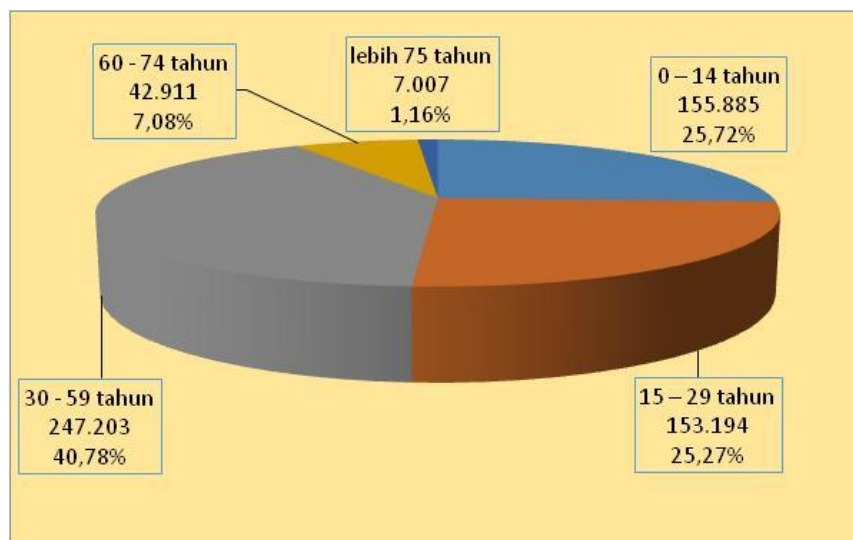
Berdasarkan data dari BPS Kota Jambi, jumlah penduduk Kota Jambi berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan *sex ratio* : 101,53. Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Kota Jambi menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS Kota Jambi, jumlah penduduk Kota Jambi pada Tahun 2020 berjumlah 606.200 jiwa terdiri dari 300.793 jiwa berjenis kelamin perempuan dan 305.407 jiwa berjenis kelamin laki-laki (data hasil Sensus Penduduk pada bulan September 2020).

Adapun jumlah penduduk Kota Jambi menurut kelompok umur pada Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Kota Jambi menurut Kelompok Umur pada Tahun 2020

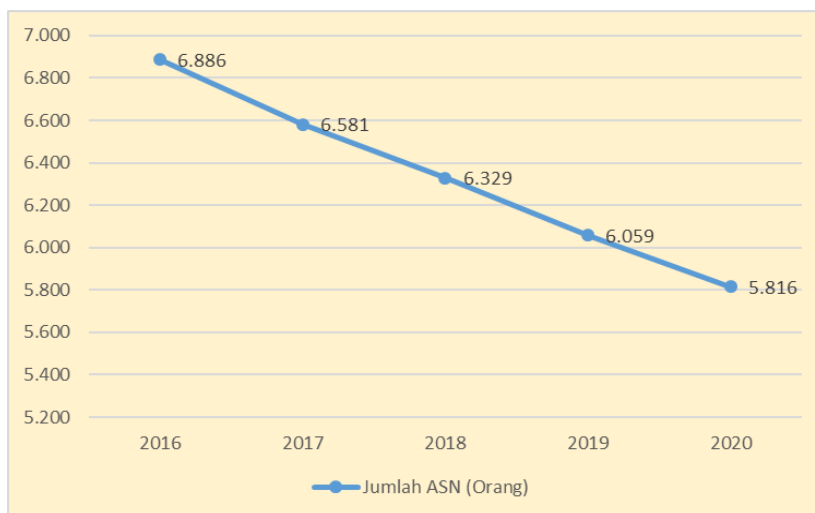
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan data dari BPS Kota Jambi tercatat sebanyak 606.200 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk bulan September

2020), dengan kepadatan penduduk 2.949 orang/km². Namun BPS Kota Jambi belum merilis secara resmi data pertumbuhan penduduk Kota Jambi pada Tahun 2020.

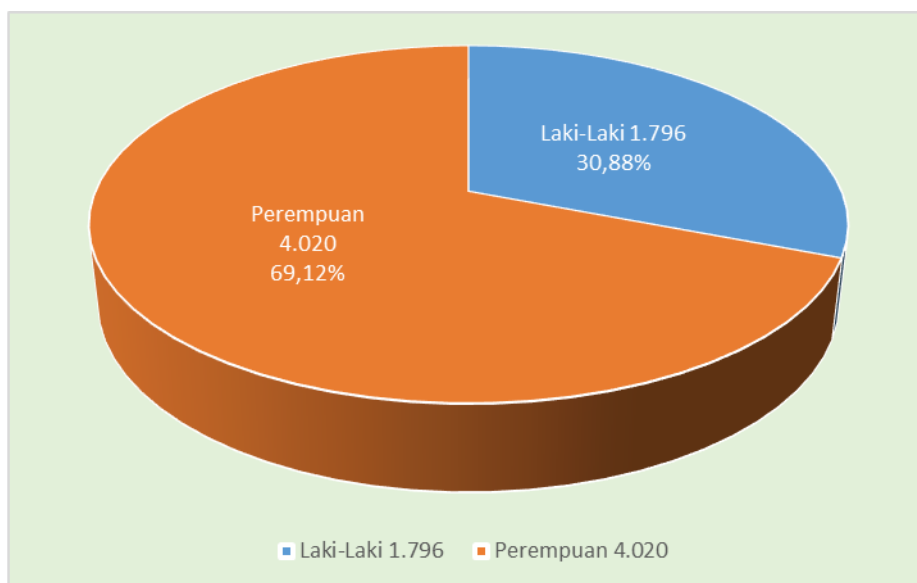
1.3.4. Jumlah PNS

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi per Desember 2020 adalah sebanyak 5.816 orang. Jumlah ASN sejak tahun 2016 cenderung menurun dikarenakan banyak ASN yang pensiun dan rekrutmen ASN baru tidak lebih banyak dari ASN yang pensiun. Berikut ditampilkan gambar jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2016-2020.



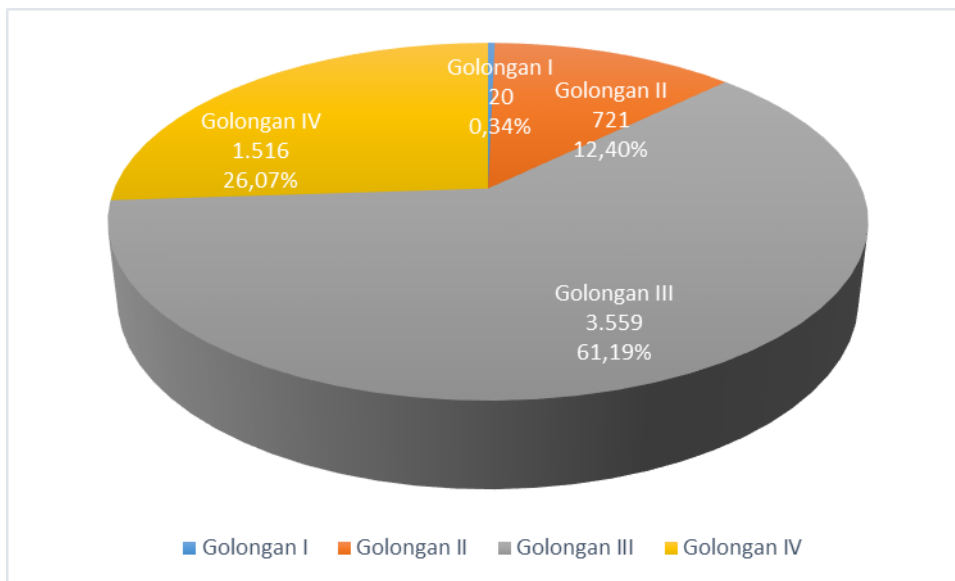
Gambar 1.3
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2016-2020.

Untuk melihat komposisi ASN laki-laki dan perempuan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



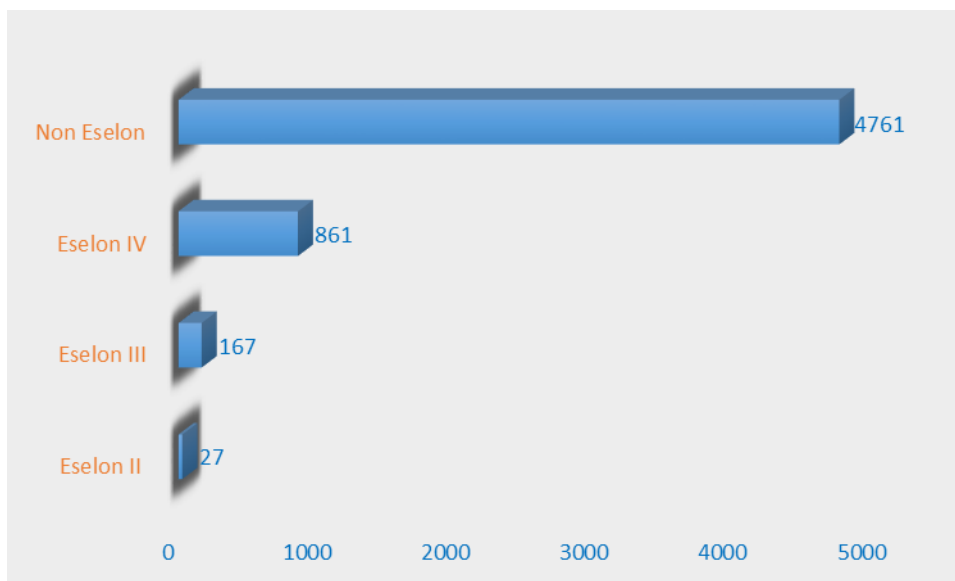
Gambar 1.4
Komposisi ASN Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2020.

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



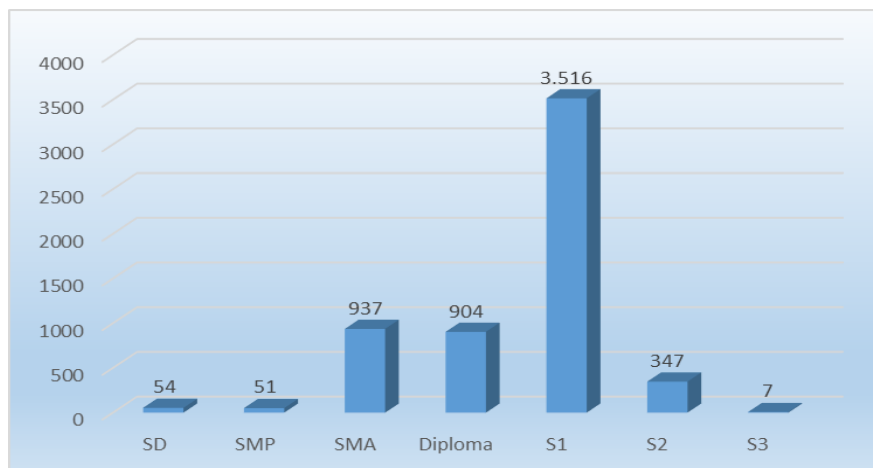
Gambar 1.5
Jumlah ASN berdasarkan Golongan 2020.

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan eselon dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.6
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan Eselon

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.7
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2020 berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.3.5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.617.658.414.714,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.559.194.791.889,83 (96,39%).

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan tahun 2020 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/ pengelolannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Peraturan Daerah Kota Jambi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)
1.	BPHTB	Perda No. 5 Tahun 2019
2.	Pajak Daerah	Perda No. 6 Tahun 2019
3.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No. 7 Tahun 2020
4.	Retribusi Jasa Umum	Perda No. 6 Tahun 2020
5.	Retribusi Tertentu	Perda No.13 Tahun 2017

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2021

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi berupa optimalisasi penerimaan, dengan memperkuat pelayanan dan proses pemungutan, meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi, efisiensi administrasi dan menekan biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatkan Pelayanan Perpajakan;
- Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah;
- Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah;
- Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
- Mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Daerah;
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
- Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
- Mengevaluasi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang - Undang yang berlaku;
- Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
- Koordinasi lintas Organisasi Perangkat daerah;
- Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari:

- Hasil Pajak Daerah;
- Hasil Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2020 mencapai Rp.355.505.051.145,93 atau 96,19% dari target penerimaan sebesar Rp.369.594.193.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 22,8% terhadap total Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2019, yakni sebesar Rp.393.429.795.383,99, maka PAD Tahun 2020 menurun -9,64% atau turun sebesar Rp.37.924.744.238,06. Penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 dikarenakan aktivitas ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

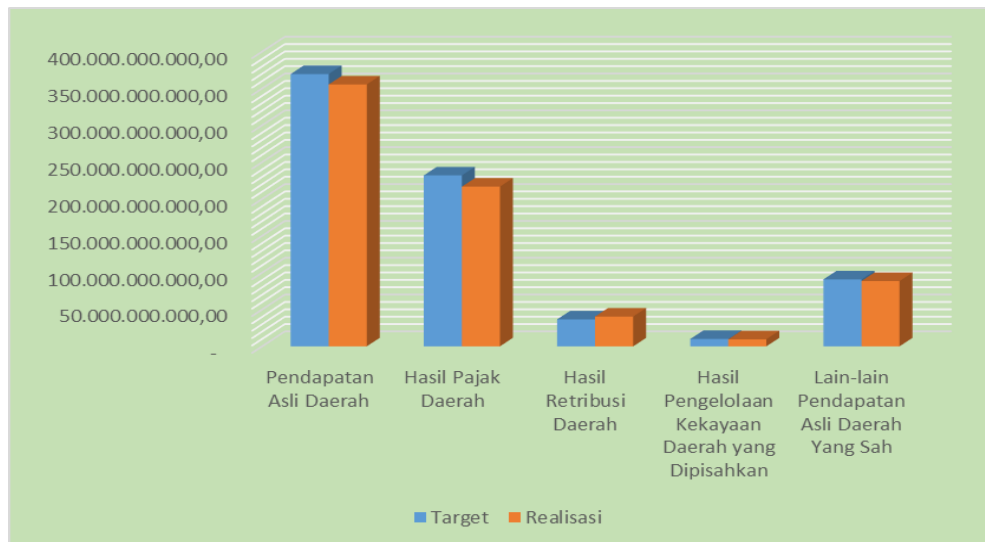
Tabel 1.5
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi	Target 2020 (000)	Realisasi 2020 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	242.090.000	255.915.037,5	105,71	232.060.000	216.815.393,5	93,43
2.	Retribusi Daerah	45.068.647	38.540.603,6	85,52	36.618.000	40.479.596,1	110,55
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.700.000	9.783.144,6	100,86	10.000.000	9.602.267,4	96,02
4.	Lain-lain PAD yang sah	84.885.038	89.191.009,8	105,07	90.916.193	88.607.794,2	97,46
TOTAL		381.743.685	393.429.795,4	103,06	369.594.193	355.505.051,1	96,19

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 232.060.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.216.815.393.479,00 atau 93,43%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp.36.618.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.40.479.596.103,50 atau 110,55%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.602.267.383,48 atau 96,02%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.90.916.193.000,00 terealisasi sebesar Rp.88.607.794.179,95 atau 97,46%.

Gambar berikut menunjukkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 1.8
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.9
 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2020

b. Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

Sumber penerimaan daerah dari Dana Perimbangan terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
- Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Tahun 2020 target penerimaan Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.1.033.221.759.182,00 dan realisasinya mencapai Rp.1.036.458.974.832,00 atau 100,31%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

Tabel 1.6
 Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
 TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi	Target 2020 (000)	Realisasi 2020 (000)	% Realisasi
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	137.965.056	132.185.357,7	95,81	87.667.936	99.720.170,9	113,75
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	757.404.051	757.404.051	100,00	690.724.772	687.484.664	99,53
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.950.785	220.587.624,7	93,89	254.829.051,1	249.254.139,8	97,81
TOTAL		1.130.319.892	1.110.177.033,3	98,22	1.033.221.759,1	1.036.458.974,8	100,31

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

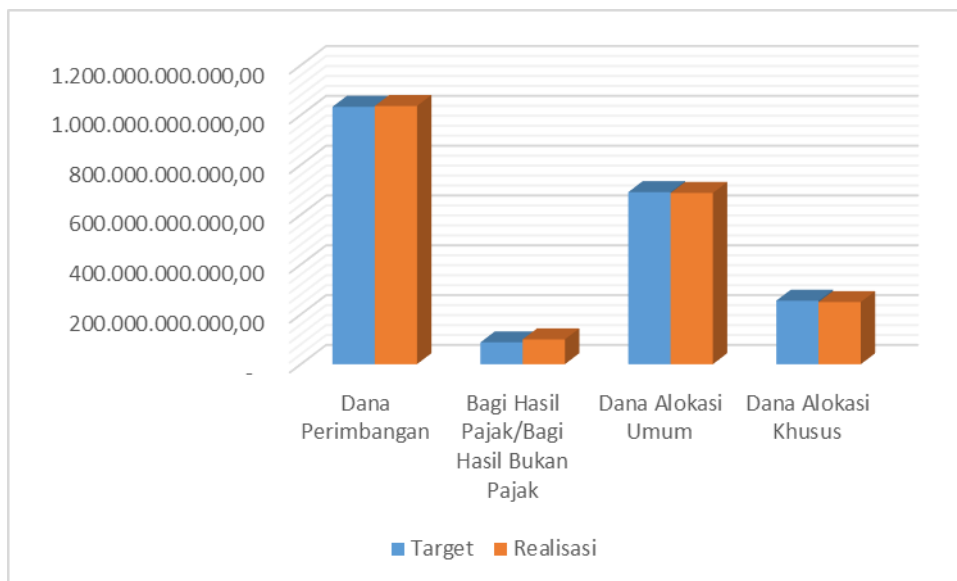
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.
2. DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. – PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
3. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Penggunaan DBH Pajak bersifat *blockgrant*, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak berasal dari Sumber Daya Alam, seperti dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

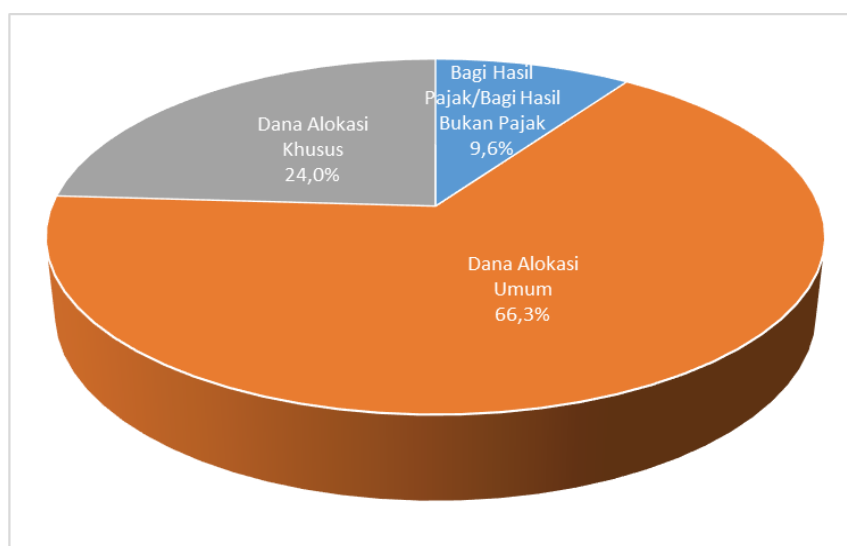
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak adalah sebesar Rp.87.667.936.000,00 realisasinya mencapai Rp.99.720.170.995,00 atau 113,75%. Target penerimaan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.690.724.772.000,00 terealisasi sebesar Rp.687.484.664.000,00 atau 99,53%. Target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.254.829.051.182,00 terealisasi sebesar Rp.249.254.139.837,00 atau 97,81%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 1.10
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.11
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020

c. Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.214.842.462.532,00 terealisasi sebesar Rp.167.230.765.911,90 atau 77,84%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

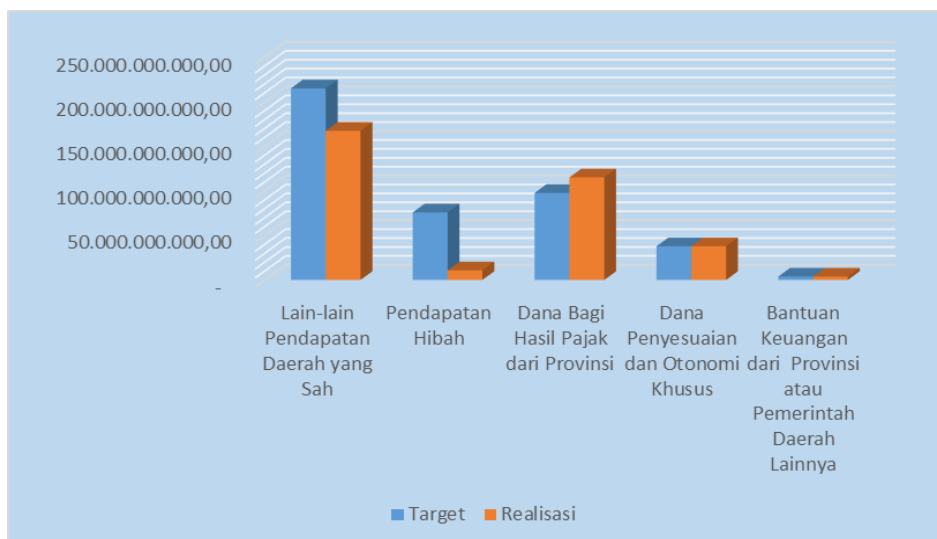
Tabel 1.7
Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi	Target 2020 (000)	Realisasi 2020 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	58.911.800	60.013.627,9	101,87	75.761.804,5	10.745.942,1	14,18
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.347.485	114.911.044	141,26	97.614.609	115.018.774,8	117,83
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11.291.209	11.291.209	100,00	37.746.049	37.746.049	100,00
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.720.000	9.720.000	100,00	3.720.000	3.720.000	100,00
TOTAL		161.270.494	195.935.881	121,50	214.842.462,5	167.230.765,9	77,84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

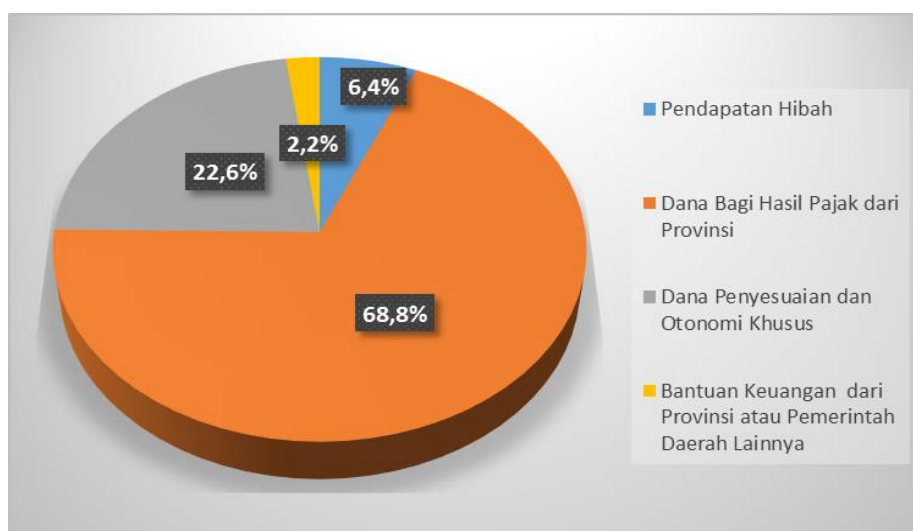
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target penerimaan Pendapatan Hibah adalah sebesar Rp.75.761.804.500,00 terealisasi sebesar Rp.10.745.942.128,00 atau 14,18%. Target penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.97.614.609.032,00 terealisasi sebesar Rp.115.018.774.783,90 atau 117,83%. Target penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.37.746.049.000,00 terealisasi sebesar Rp.37.746.049.000,00 atau 100%. Target penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.3.720.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.720.000.000,00 atau 100%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 1.12
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.13
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020

Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020 adalah Rp.1.559.194.791.889,83 atau terealisasi 96,39% dari target sebesar Rp.1.617.658.414.714,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI)

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	369.594.193.000,00	355.505.051.145,93	96,19
2	Dana Perimbangan	1.033.221.759.182,00	1.036.458.974.832,00	100,31
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	214.842.462.532,00	167.230.765.911,90	77,84
	Total	1.617.658.414.714,00	1.559.194.791.889,83	96,39

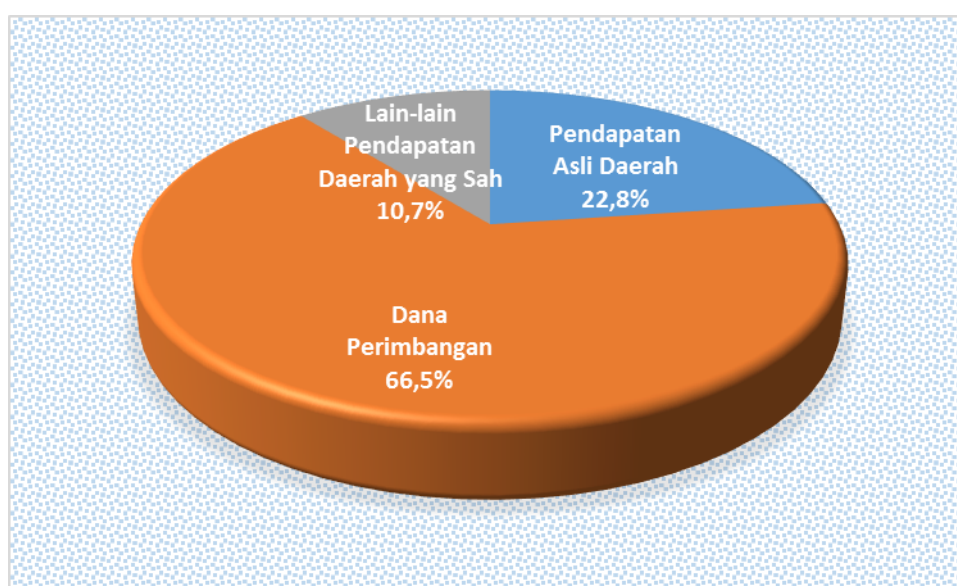
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 1.14
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 1.15
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 22,8% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020. Adapun Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 66,5% dan sisanya sebesar 10,7% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1.3.6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.828.835.334.125,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.638.511.401.928,45 (89,59%) yang terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung; dan
- Belanja Langsung.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun 2020.

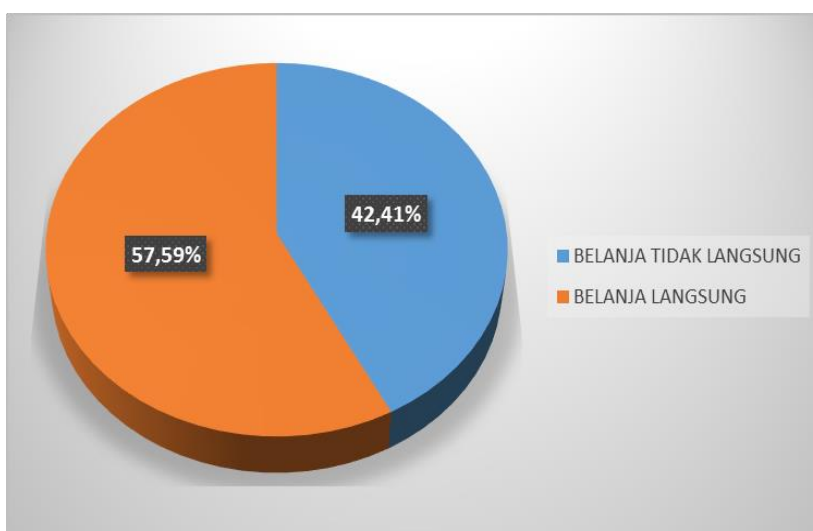
Tabel 1.9
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dengan TA 2020
(Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi	Target 2020 (000)	Realisasi 2020 (000)	% Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	806.303.727,6	695.898.324,4	86,31	775.565.398	694.999.439,2	89,61
2.	Belanja Langsung	1.039.954.489,2	965.465.479,7	64,86	1.053.269.936	943.511.962,7	89,58
Total Belanja Daerah		1.846.258.216,9	1.661.363.804,1	89,99	1.828.835.334	1.638.511.401,9	89,59

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.775.565.398.117,00 terealisasi sebesar Rp.694.999.439.218,53 atau 89,61%. Target Belanja Langsung pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.053.269.936.008,00 terealisasi sebesar Rp.943.511.962.709,92 atau 89,58%.

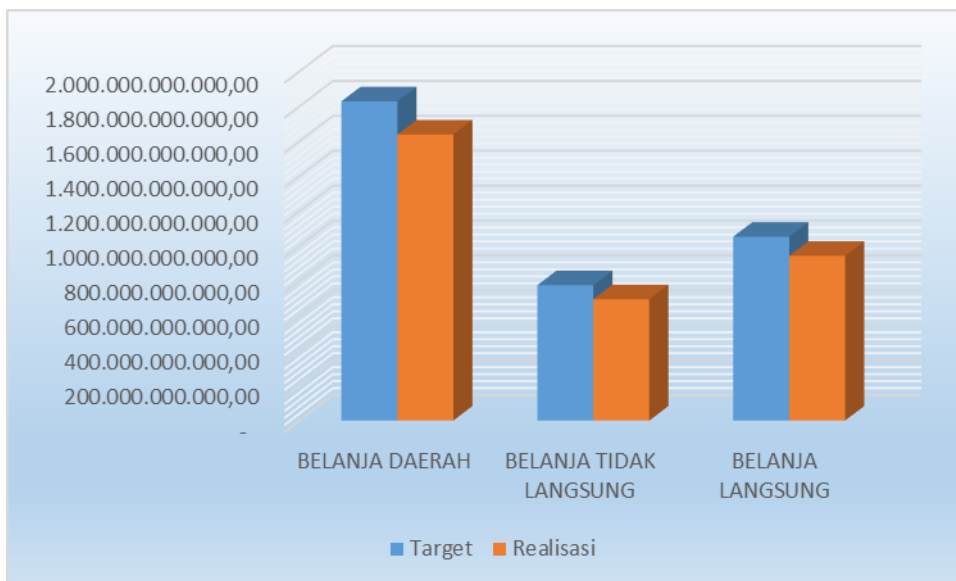
Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2020, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.16
Komposisi Besaran antara Belanja Tidak Langsung
dengan Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2020

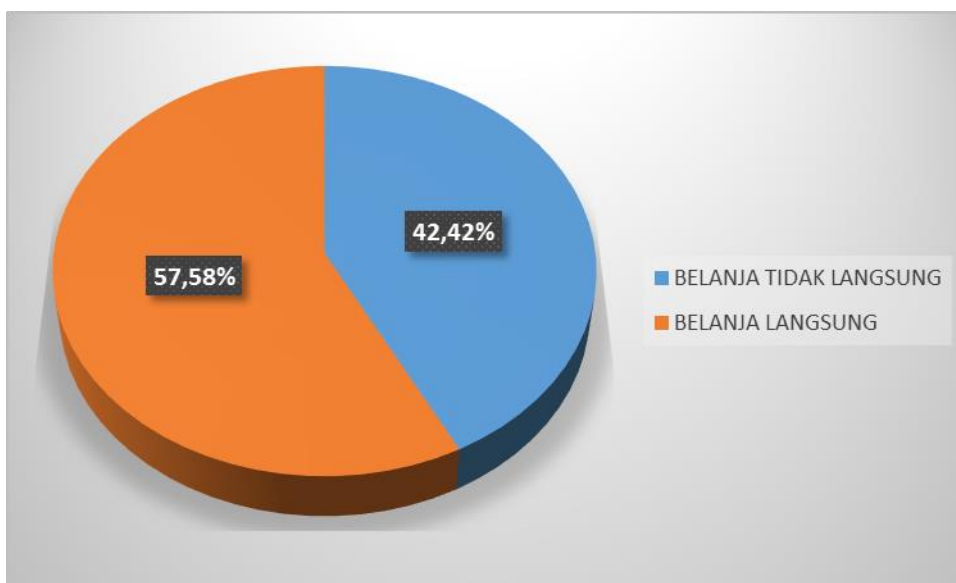
Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase besaran Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 sebesar 57,59% jauh berada di atas Belanja Tidak langsung dengan nilai sebesar 42,41%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 1.17
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.18
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.775.565.398.117,00 dengan realisasi sebesar Rp.694.999.439.218,53 atau 89,61% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.10
Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian Belanja	Belanja Tidak Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	680.603.063.244,00	628.395.170.421,00	92,33
2.	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	-	-
3.	Belanja Hibah	25.985.781.492,00	19.888.786.667,53	76,54
4.	Belanja Bantuan Sosial	7.637.723.000,00	5.671.400.000,00	74,26
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	100.000.000,00	-	-
6.	Belanja Tidak Terduga	60.238.830.381,00	41.044.082.130,00	68,14
Total Belanja Tidak Langsung		775.565.398.117,00	694.999.439.218,53	89,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.680.603.063.244,00 terealisasi sebesar Rp.628.395.170.421,00 atau 92,33%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp.1.000.000.000,00 tidak terealisasi. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.25.985.781.492,00 terealisasi sebesar Rp.19.888.786.667,53 atau 76,54%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.7.637.723.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.671.400.000,00 atau 74,26%. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa sebesar Rp.100.000.000,00 tidak terealisasi. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.60.238.830.381,00 terealisasi sebesar Rp. 41.044.082.130,00 atau 68,14%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 1.19
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2020

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Langsung pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.053.269.936.008,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.943.511.962.709,92 atau 89,58%. Adapun perincian Belanja Langsung pada T.A. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

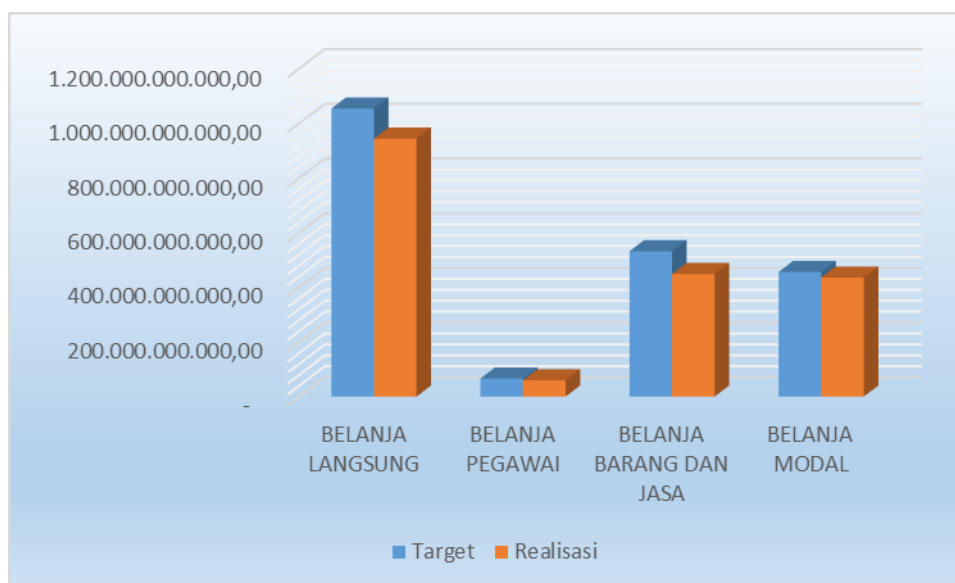
Tabel 1.11
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	66.106.459.381,00	59.787.279.570,00	90,44
2.	Belanja Barang dan Jasa	531.635.283.032,00	448.351.268.568,00	84,33
3.	Belanja Modal	455.528.193.595,00	435.373.414.571,92	95,58
Total Belanja Langsung		1.053.269.936.008,00	943.511.962.709,92	89,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

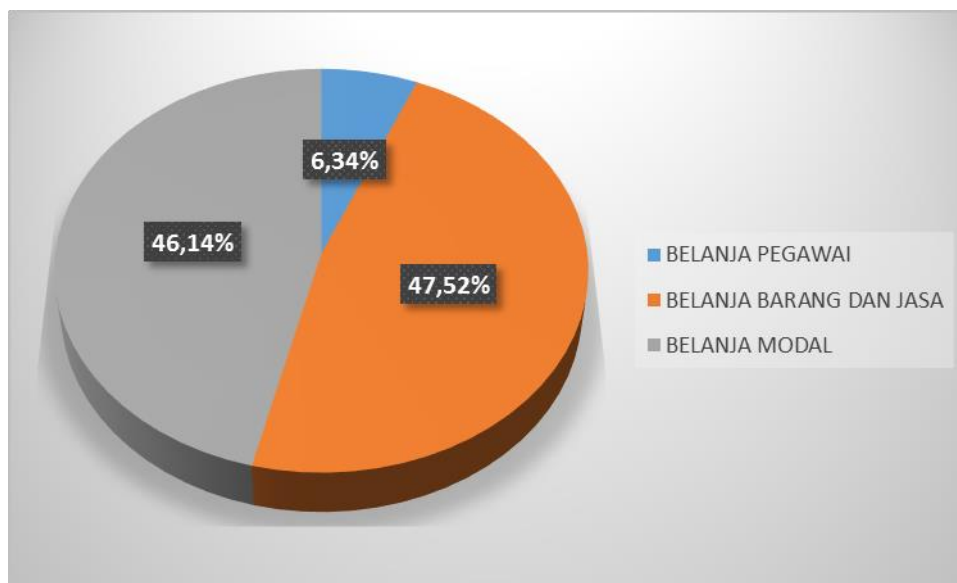
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.66.106.459.381,00 terealisasi sebesar Rp.59.787.279.570,00 atau 90,44%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.531.635.283.032,00 terealisasi sebesar Rp.448.351.268.568,00 atau 84,33%. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.455.528.193.595,00 terealisasi sebesar Rp.435.373.414.571,92 atau 95,58%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 1.20
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.21
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020

1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah disebut dengan Pembiayaan Netto

Pada tahun 2020, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020
Penerimaan Pembiayaan Daerah	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
SURPLUS/(DEFISIT)	211.176.919.411,00	(79.316.610.038,62)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		83.159.837.377,38

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

1.3.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan membaik pada 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan antarotoritas dan kembali pada lintasan meningkat dalam jangka menengah. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju. (*Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2020*).

Covid-19 juga memberikan tekanan kuat kepada perekonomian Indonesia 2020 dengan sumber gejolak yang belum pernah dialami sebelumnya. Sebagaimana kondisi dunia, gejolak bersumber dari permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, yang kemudian merambat ke permasalahan ekonomi. Respons segera Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui PSBB tidak dapat dihindari menurunkan kinerja perekonomian. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan segera akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, dan menahan upaya percepatan menjadi negara maju. (*Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2020*).

Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen. (*Berita Resmi Statistik, BPS Indonesia 2021*).

Ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 berkontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha. Kontraksi terdalam dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,43 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,83 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,48 persen. Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. (*Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jambi 2021*)

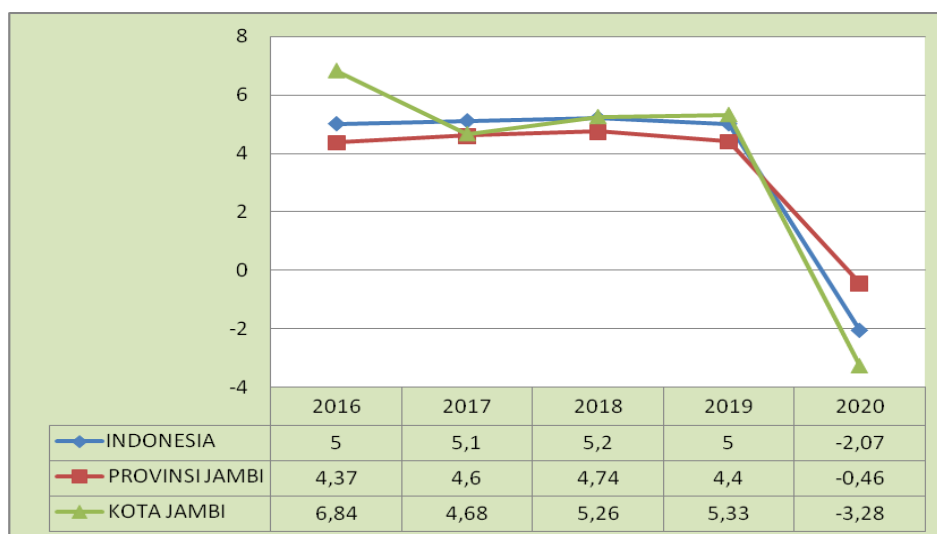
Sebagai ibukota Provinsi Jambi dan juga kota perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Ekonomi Kota Jambi tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,28 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,60 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,59 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,58 persen; Jasa Lainnya sebesar 3,48 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,23 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 8,98 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,43 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,91 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,75 persen; Jasa Pendidikan sebesar 3,3 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,52 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah, bekerja serta mobilitas yang mengakibatkan turunnya aktivitas ekonomi di Kota Jambi, seperti sektor transportasi terutama angkutan udara, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seperti perhotelan, restoran, pariwisata.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi pada Tahun 2020, juga berdampak pada sedikit pergeseran struktur ekonomi Kota Jambi, yakni sektor Transportasi dan Pergudangan bergeser menjadi unggulan ke-lima dalam pembentuk angka PDRB. Dimana sebelumnya pada Tahun 2019, sektor Transportasi dan Pergudangan berada pada unggulan ke-dua. Untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Adapun struktur ekonomi Kota

Jambi yang menjadi sektor potensi unggulan daerah pada tahun 2020 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (31,85 %);
2. Industri Pengolahan (10,72%);
3. Konstruksi (9,38%);
4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (9,04%).
5. Transportasi dan Pergudangan (8,68%).

Berikut disajikan gambar Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi dan Kota Jambi selama lima tahun terakhir.



*Gambar 1.22
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi dan Kota Jambi
Tahun 2016-2020*

Dampak akibat pandemi Covid-19 lainnya yang juga sangat terasa bagi Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah berkurangnya Pendapatan Daerah dari Transfer Pusat, PAD, dan lain-lain sebesar 9,8%; terhambatnya Belanja Pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan untuk karena kebijakan pengetatan; dan koreksi target pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian ini juga berdampak bagi masyarakat dan dunia usaha, dimana daya beli masyarakat menurun; berkurangnya kohesi sosial; perlambatan aktivitas ekonomi; serta meningkatnya jumlah pengangguran.

Adapun strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2020 dalam menghadapi kondisi pandemi tersebut, diantaranya adalah mengurangi (rasionalisasi) Belanja Daerah pada kegiatan yang tidak efektif pada fase pandemi; memastikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan daerah; meningkatkan sosialisasi, diseminasi dan komunikasi publik melalui berbagai media cetak elektronik dan media sosial.

Pemerintah Kota Jambi juga menyusun berbagai kebijakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan anggaran;

Re-focussing APBD Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 58.211.923.000,00.

2. Kebijakan Stimulus bagi Dunia Usaha dan Masyarakat;

- Kebijakan pembebasan tagihan air minum Perumda Tirta Mayang Pembayaran bulan Mei dan Juni;
- Membebaskan 4 jenis pajak dari pelaku usaha. Jenis pajak tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah;
- Memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga 31 Desember 2020.

3. Kebijakan Ekonomi Sosial Kemasyarakatan

- Melibatkan UMKM dalam penyediaan masker dan APD serta konsumsi dan transportasi untuk tetap menjaga produktivitas dunia usaha;
- Melakukan berbagai agenda dan aturan (Perwal, instruksi, edaran dan himbauan termasuk SKB) dalam rangka mencegah penyebaran covid19 dan diikuti dengan kegiatan implementatif di wilayah Kota Jambi;
- Menyiapkan program-program padat karya yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak covid19.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga menyusun kebijakan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Pemberian relaksasi di bidang ekonomi dilakukan kepada usaha yang mendapatkan penutupan dan atau penundaan kegiatan usaha pariwisata termasuk kepada UMKM (kuliner) yang terdampak karena pembatasan diberikan kelonggaran (buka) dan UMKM kuliner terdampak diberikan perpanjangan operasional unit usaha dengan memberlakukan aturan-aturan dan persyaratan yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, Edaran Walikota dan SOP. Pemberian relaksasi di bidang sosial kemasyarakatan dilakukan dengan memberikan kelonggaran dan pembatasan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, namun tetap diberlakukan aturan dan persyaratan.

1.3.9. Kondisi Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Desember 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

Kondisi inflasi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020, inflasi Kota Jambi sebesar 3,09% berada di atas inflasi tahun 2019 sebesar 1,27%. Inflasi di Kota Jambi pada tahun 2020 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,33 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,46 persen. Tabel berikut menunjukkan kondisi inflasi Kota Jambi pada Tahun 2020.

Tabel 1.13
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Jambi Bulan Desember 2020,
Inflasi Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun
menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	Tingkat Inflasi Desember 2020 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Desember 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum (Headline)	106,23	0,72	3,09	3,09	0,7200
Makanan, Minuman dan Tembakau	107,51	2,33	6,29	6,29	0,6945
Pakaian dan Alas Kaki	104,00	0,02	-1,56	-1,56	0,0013
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,41	-0,02	0,86	0,86	-0,0037
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,60	0,04	2,31	2,31	0,0024
Kesehatan	111,80	0,01	5,41	5,41	0,0002
Transportasi	104,30	0,46	2,65	2,65	0,0548
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	102,49	-0,20	2,15	2,15	-0,0105
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	119,75	0,00	5,26	5,26	0,0000
Pendidikan	104,50	0,00	-0,38	-0,38	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,66	0,00	2,10	2,10	0,0000
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,35	-0,27	4,65	4,65	-0,0170

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jambi 2021.

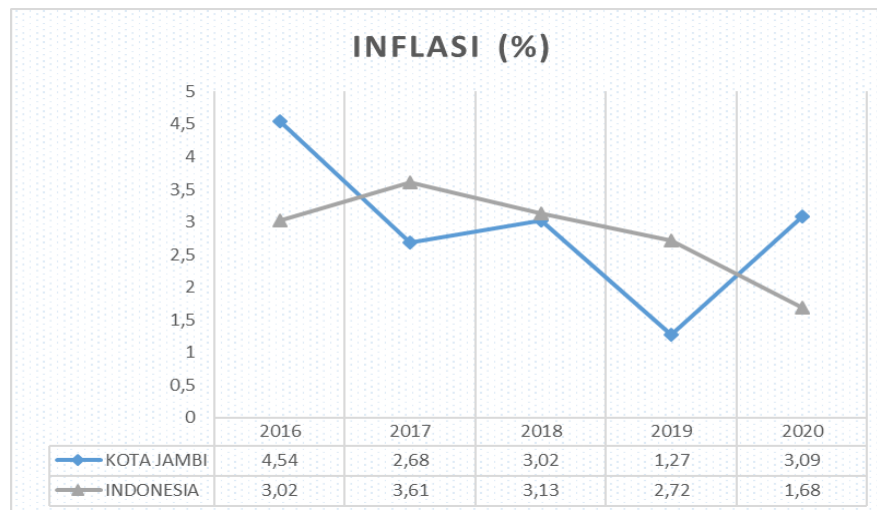
Adapun nilai inflasi dan rata-rata nilai inflasi di Kota Jambi selama tahun 2016-2020 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.14
Nilai Inflasi dan Rata-Rata Inflasi Kota Jambi Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Inflasi (%)	4,54	2,68	3,02	1,27	3,09	2,92

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2021

Secara umum dari Tahun 2016-2020 kondisi inflasi di Kota Jambi mengalami fluktuasi namun relatif terkendali. Untuk melihat trend inflasi Kota Jambi dan Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.23
Trend Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2016-2020

1.3.10. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. (Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jambi 2021)

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). (Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jambi 2021)

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian (*Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jambi 2021*)

Untuk melihat komponen pembentuk IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15
Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi,
Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2019-2020

URAIAN	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp 000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019-2020
Kota Jambi	72,57	72,65	14,9	15,1	10,91	10,92	12.205	12.056	78,26	78,37	0,14
Provinsi Jambi	71,06	71,16	12,93	12,98	8,45	8,55	10.592	10.392	71,26	71,29	0,04
Indonesia	71,34	71,47	12,95	12,98	8,34	8,48	11.299	11.013	71,92	71,94	0,03

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jambi 2021

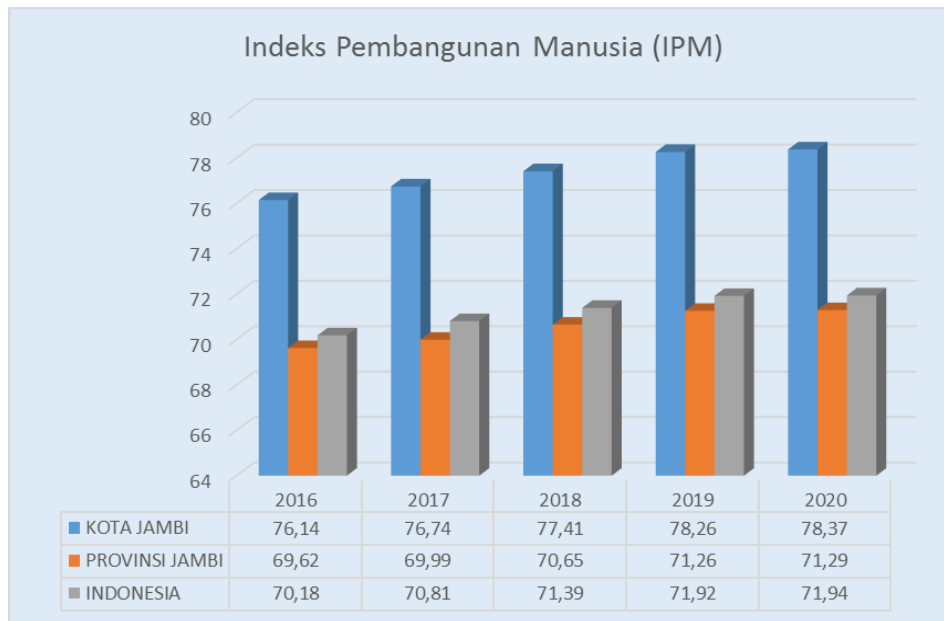
Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Adapun perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2016-2020 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.24
Perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia
Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kota Jambi berada jauh di atas IPM Provinsi Jambi maupun IPM Indonesia.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Mempedomani peraturan tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Jambi, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020. Dan juga Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, (2) Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, (3) Pembiayaan Daerah yang terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan membaik pada 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan antarotoritas dan kembali pada lintasan

meningkat dalam jangka menengah. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju. (Sumber: *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*).

Covid-19 juga memberikan tekanan kuat kepada perekonomian Indonesia 2020 dengan sumber gejolak yang belum pernah dialami sebelumnya. Sebagaimana kondisi dunia, gejolak bersumber dari permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, yang kemudian merambat ke permasalahan ekonomi. Respons segera Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui PSBB tidak dapat dihindari menurunkan kinerja perekonomian. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan segera akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, dan menahan upaya percepatan menjadi negara maju. (Sumber: *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*).

Keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Dampak yang sangat terasa bagi Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah berkurangnya Pendapatan Daerah dari Transfer Pusat, PAD, dll sebesar 9,8%; terhambatnya Belanja Pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan untuk karena kebijakan pengetatan; dan koreksi target pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian ini juga berdampak bagi masyarakat dan dunia usaha, dimana daya beli masyarakat menurun; berkurangnya kohesi sosial; perlambatan aktivitas ekonomi; serta meningkatnya jumlah pengangguran.

Adapun strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2020 dalam menghadapi kondisi pandemi tersebut, diantaranya adalah mengurangi (rasionalisasi) Belanja Daerah pada kegiatan yang tidak efektif pada fase pandemi; memastikan upaya pencegahan dan penanganan Covid19 dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan daerah; meningkatkan sosialisasi, diseminasi dan komunikasi publik melalui berbagai media cetak elektronik dan media sosial.

Pemerintah Kota Jambi juga menyusun berbagai kebijakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah:

1. Kebijakan anggaran;

Re-focussing APBD Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 58.211.923.000,00.

2. Kebijakan Stimulus bagi Dunia Usaha dan Masyarakat;
 - Kebijakan pembebasan tagihan air minum Perumda Tirta Mayang Pembayaran bulan Mei dan Juni;
 - Membebaskan 4 jenis pajak dari pelaku usaha. Jenis pajak tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah;
 - Memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga 31 Desember 2020.
3. Kebijakan Ekonomi Sosial Masyarakat
 - Melibatkan UMKM dalam penyediaan masker dan APD serta konsumsi dan transportasi untuk tetap menjaga produktivitas dunia usaha;
 - Melakukan berbagai agenda dan aturan (Perwal, instruksi, edaran dan himbauan termasuk SKB) dalam rangka mencegah penyebaran covid19 dan diikuti dengan kegiatan implementatif di wilayah Kota Jambi;
 - Menyiapkan program-program padat karya yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak covid19.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga menyusun kebijakan relaksasi ekonomi dan sosial masyarakat. Pemberian relaksasi di bidang ekonomi dilakukan kepada usaha yang mendapatkan penutupan dan atau penundaan kegiatan usaha pariwisata termasuk kepada UMKM (kuliner) yang terdampak karena pembatasan diberikan kelonggaran (buka) dan UMKM kuliner terdampak diberikan perpanjangan operasional unit usaha dengan memberlakukan aturan-aturan dan persyaratan yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, Edaran Walikota dan SOP. Pemberian relaksasi di bidang sosial masyarakat dilakukan dengan memberikan kelonggaran dan pembatasan pada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, namun tetap diberlakukan aturan dan persyaratan.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi pada Tahun 2020, tentu juga berdampak pada APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali mengalami perubahan guna *relokasi* dan *refocusing* anggaran dalam pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dilindungi Pemerintah Daerah merupakan beberapa peraturan yang menjadi pijakan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam melakukan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Berikut disajikan tabel penjabaran APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 dan perubahan penjabaran APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.1
Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2020 dan
Perubahan Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		RINGKASAN PERUBAHAN APBD Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.745.507.222.930,00	1.597.369.067.032,00	(148.138.155.898,00)	(8,49)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	403.484.193.000,00	369.594.193.000,00	(33.890.000.000,00)	(8,40)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	255.000.000.000,00	232.060.000.000,00	(22.940.000.000,00)	(9,00)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	47.568.000.000,00	36.618.000.000,00	(10.950.000.000,00)	(23,02)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	90.916.193.000,00	90.916.193.000,00	-	-
4.2.	Dana Perimbangan	1.126.863.703.930,00	1.029.782.416.000,00	(97.081.287.930,00)	(8,62)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	102.028.814.930,00	87.667.936.000,00	(14.360.878.930,00)	(14,08)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	763.018.217.000,00	690.724.772.000,00	(72.293.445.000,00)	(9,47)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	261.816.672.000,00	251.389.708.000,00	(10.426.964.000,00)	(3,98)
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	215.159.326.000,00	197.992.458.032,00	(17.166.867.968,00)	(7,98)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	58.911.800.000,00	58.911.800.000,00	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	131.000.000.000,00	97.614.609.032,00	(33.385.390.968,00)	(25,49)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.527.526.000,00	37.746.049.000,00	19.218.523.000,00	103,73
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.720.000.000,00	3.720.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(44,64)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.745.507.222.930,00	1.597.369.067.032,00	(148.138.155.898,00)	(8,49)
5	BELANJA DAERAH	2.212.680.342.930,00	1.808.545.986.443,00	(404.134.356.487,00)	(18,26)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	753.881.710.930,00	768.061.391.117,00	14.179.680.187,00	1,88
5.1.1.	Belanja Pegawai	721.563.236.930,00	680.603.063.244,00	(40.960.173.686,00)	(5,68)
5.1.2.	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	21.553.843.619,00	18.481.774.492,00	(3.072.069.127,00)	(14,25)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7.637.723.000,00	7.637.723.000,00	-	-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.026.907.381,00	60.238.830.381,00	58.211.923.000,00	2.871,96

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		RINGKASAN PERUBAHAN APBD Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.458.798.632.000,00	1.040.484.595.326,00	(418.314.036.674,00)	(28,68)
5.2.1.	Belanja Pegawai	64.787.962.108,00	65.844.649.381,00	1.056.687.273,00	1,63
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	567.399.452.976,00	526.265.813.332,00	(41.133.639.644,00)	(7,25)
5.2.3.	Belanja Modal	826.611.216.916,00	448.374.132.613,00	(378.237.084.303,00)	(45,76)
	JUMLAH BELANJA	2.212.680.342.930,00	1.808.545.986.443,00	(404.134.356.487,00)	(18,26)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(467.173.120.000,00)	(211.176.919.411,00)	255.996.200.589,00	(54,80)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	467.173.120.000,00	211.176.919.411,00	(255.996.200.589,00)	(54,80)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	467.173.120.000,00	211.176.919.411,00	(255.996.200.589,00)	(54,80)
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67.173.120.000,00	211.176.919.411,00	144.003.799.411,00	214,38
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	400.000.000.000,00	-	(400.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	467.173.120.000,00	211.176.919.411,00	(255.996.200.589,00)	(54,80)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	467.173.120.000,00	211.176.919.411,00	(255.996.200.589,00)	(54,80)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1. URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR)

3.1.1.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan. Adapun keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,61	15,10
				Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	17,32	17,32
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,69	10,92

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi 2021

Indikator Sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki target sebesar 14,61 pada tahun 2020, dan mencapai realisasi sebesar 15,10. Perhitungan HLS dilaksanakan dengan menggunakan formulasi jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t dibagi dengan jumlah penduduk usia i pada tahun t dikali dengan faktor koreksi pesantren.

Indikator Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan memiliki target sebesar 17,32 pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 17,32. Perhitungan indikator tersebut dilaksanakan dengan menggunakan formulasi jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan pendidikan dibagi dengan jumlah masyarakat miskin yang bersekolah dikali seratus persen. Sedangkan indikator Rata-rata lama Sekolah (RLS) memiliki target sebesar 10,69 pada tahun 2020, dengan realisasi

sebesar 10,92. Perhitungan RLS dilaksanakan dengan menggunakan formulasi lama sekolah penduduk ke i di suatu wilayah dibagi jumlah penduduk.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 125.456.962.574	Rp. 93.329.147.732	(74,39%)
Belanja Tidak Langsung	Rp. 319.183.041.379	Rp. 292.527.848.250	(91,64%)
Total Anggaran	<u>Rp. 444.640.003.953</u>	<u>Rp. 385.856.995.982</u>	(86,77%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan Kota Jambi pada Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan PNF	71,43%	72%
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dan PNF	59,21%	60%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD dan PNF	61,90%	61%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	114,34%	104,77
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,68%	99,48
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	100,48%	100,48%
		Rerata UAS SD	100%	100%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	112,08%	99,01
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	95,12%	81,65
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	83%	83%
		Rerata UN SMP	100%	100%
		Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan PNF dengan target 71,43% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 72% Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid Paud/PNF/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dan PNF dengan target 59,21% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 60%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Murid Paud/PNF/Sederajat usia 3-6 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi;

3. Angka Partisipasi Sekolah (APK) PAUD dan PNF dengan target 61,9% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 61%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah penduduk usia 3-6 Tahun yang masih bersekolah di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi;
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat dengan target 114,34% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 104,77%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid SD/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi.;
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dengan target 97,68% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 99,48%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Murid SD/Sederajat usia 7-12 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi;
6. Angka Partisipasi Sekolah (APK) SD/Sederajat dengan target 100,48% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 100,48%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi;
7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat dengan target 112,08% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 99,01%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid SMP/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi;
8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat dengan target 95,12% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 81,65%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Murid SMP/Sederajat usia 13-15 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi;
9. Angka Partisipasi Sekolah (APK) SMP/Sederajat dengan target 83% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 83%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun yang masih bersekolah di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi;
10. Rerata UAS SD dengan target 100% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 100%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Siswa SD/Sederajat yang lulus UAS terhadap Jumlah Siswa SD/Sederajat yang mengikuti Ujian UAS SD;
11. Rerata UN SMP dengan target 100% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 100%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Siswa SD/Sederajat yang lulus UAS terhadap Jumlah Siswa SD/Sederajat yang mengikuti Ujian UAS SD;
12. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan target 100% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 100%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus jumlah pendidik dan tenaga

kependidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan terhadap total jumlah guru sekota Jambi.

Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 1 (satu) program urusan yakni Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan.

3.1.1.2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Derajat Kesehatan. Adapun keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,35	72,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi 2021

Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72,35 dengan realisasi sebesar 72,65. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2019 yakni 72,57. Realisasi Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan formulasi total umur orang yang meninggal pada tahun 2020 dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun 2020.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp.222.646.804.810	Rp.194.324.154.492	(87,27%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp.109.482.316.079</u>	<u>Rp.107.971.968.326</u>	(98,62%)
Total Anggaran	Rp.332.129.120.889	Rp. 302.296.122.818	(91,01%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Peningkatan Jaminan masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang tidak mampu yang dijamin kesehatannya	100%	100%
2	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang terakreditasi	100%	100%
		Terpenuhinya standar sarana prasarana dan alat kesehatan pada rumah sakit pemerintah dan puskesmas	30%	30%
3	Peningkatan status kesehatan masyarakat	Menurunkan Jumlah Kasus Kematian ibu melahirkan	0	3
		Menurunkan Jumlah Kasus Kematian bayi baru lahir	0	10
4	Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi dan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Persentase masyarakat yang tidak mampu yang dijamin kesehatannya pada Tahun 2020 dengan target 100% dan realisasi 100%. Perhitungan realisasi diukur dengan rumusan formulasi jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target di kali 100%;
2. Persentase puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi pada Tahun 2020 dengan target 100% dan realisasi 100%. Perhitungan realisasi ini di diukur dengan rumusan formulasi jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target di kali 100%;
3. Terpenuhinya standar sarana prasarana dan alat kesehatan pada rumah sakit pemerintah dan puskesmas pada Tahun 2020 dengan target 30%, dan realisasi 30%. Perhitungan diukur dengan rumus formulasi melihat capaian pada aplikasi ASPAK (aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan) yang menjadi indikator SPA;
4. Indikator menurunkan kasus kematian Ibu melahirkan pada Tahun 2020 dengan target 0 realisasi 3. Perhitungan realisasi ini diukur dengan jumlah kematian ibu melahirkan di Kota Jambi;
5. Indikator menurunkan Jumlah kasus kematian bayi baru lahir pada tahun 2020 dengan target 0 dan realisasi 10. Perhitungan realisasi ini diukur dengan menghitung jumlah kematian bayi yang baru lahir di Kota Jambi;
6. Indikator menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular pada Tahun 2020 dengan target 100% dan realisasi 100%. Perhitungan ini diukur dengan menggunakan rumus jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target dikali 100%.

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu

pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan, dimana indikator tujuan tersebut adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,67 dan terealisasi sebesar 7,44. Adapun keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	60,77%	65,56%

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi 2021

Dalam pencapaian sasaran RPJMD, dimana indikator sasarannya adalah Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas, pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 60,77% dan terealisasi sebesar 65,56%. Indikator sasaran RPJMD ini menjadi tanggung jawab 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah, yaitu DPUPR, DPRKP dan Dinas Perhubungan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 299.913.518.000	Rp. 295.995.764.867,9	(98,69%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 8.490.023.239</u>	<u>Rp. 7.681.615.297</u>	(90,47%)
Total Anggaran	Rp. 308.403.541.239	Rp. 303.677.380.164,9	(98,46%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPUPR Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatkan cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Kota Yang Terpadu Dan Berkelanjutan	Rasio jalan kota dalam kondisi baik	91,79	87.54
		Rasio jembatan dalam Kondisi Baik	97.30	97.30
		Rasio Pelayanan Air Minum	69.39	70.99
		Rasio Pelayanan Air Limbah	1.56	1.30
		Rasio Bangunan dalam kondisi baik	61.46	69.54
		Rasio Dokumen Perencanaan yang Diimplementasikan	84	63
		Pengurangan titik genangan	3	6
2	Terkendalinya Pemanfaatan Lahan	Rasio ketaatan RTRW	95.20	92.20

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 91,79% atau sepanjang 468.56 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510,452 km pada tahun 2020 baru mencapai 87,54 % atau sepanjang 446.844 km. Kegiatan yang dilakukan hanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, tidak ada penambahan jalan. Kendala yang dihadapi sampai saat ini masih sama yaitu terbatasnya anggaran perbaikan jalan;
2. Panjang jembatan dalam kondisi baik di Kota Jambi = 646 m, dan total panjang jembatan di Kota Jambi = 654 m. Persentase target panjang jembatan dalam kondisi baik ditentukan berdasarkan perbandingan Panjang jembatan dalam kondisi baik dan panjang seluruh jembatan, realisasi capaian kinerja persentase panjang jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 97,30%, dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 97,30%, Pencapaian sebesar 100%.
3. Target cakupan pelayanan air minum di Kota Jambi sebesar 69,39% dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2020 sebesar 70,99%, Jumlah SR Air Minum yang terlayani tahun 2020 = 85.809 SR. Jumlah penduduk di Kota Jambi = 604.378 (Data dari BPS). 1 KK = 5 orang;
4. Target Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Jambi sebesar 1,56% dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2020 sebesar 1,30% dengan Jumlah SR Air Limbah yang terlayani tahun 2020 = 1.520 SR. Jumlah KK yang terlayani = 583.487. Kendala yang dihadapi sampai saat ini dikarenakan refofusing/rasionalisasi pendanaan anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga target tahun 2020 tidak tercapai 100%;
5. Target Bangunan dalam kondisi baik di Kota Jambi sebesar 61,46% direalisasikan pada tahun 2020 sebesar 69,54 % dari total Jumlah bangunan dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 216 unit. Jumlah gedung yang dilaksanakan di tahun 2020 sebanyak 258 unit. Dan total jumlah gedung di Kota Jambi sebanyak 371 unit;
6. Target dokumen perencanaan yang diimplementasikan sebesar 84%. Dapat direalisasikan pada tahun 2020 sebesar 63%, terdapat penambahan dokumen perencanaan untuk tahun 2020 sebanyak 88 dokumen perencanaan. Jumlah dokumen perencanaan yang di implementasikan di tahun 2020 sebanyak 80 dokumen dari jumlah total dokumen perencanaan menjadi 141 dokumen dengan jumlah stok produk 61 dokumen pada Tahun 2020.
7. Target rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 100% dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km dan terealisasi sesuai target 100% atau sepanjang 127,2 km. Pada tahun 2019 bidang Sumber Daya air menangani Pengurangan titik

genangan, Jumlah total titik genangan adalah 19 titik. Target untuk tahun 2020 adalah 3 titik genangan dan terealisasi 6 titik pada tahun 2020, dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Kota Jambi sehingga mengakibatkan beberapa wilayah tergenang banjir. Adapun penanganan yang telah dilakukan yaitu dilaksanakannya normalisasi pembersihan, pengerukan sedimen dan pemeliharaan sungai yang menjadi titik terjadinya banjir yang mengakibatkan aliran sungai terhambat karena sampah dan sedimentasi. Beberapa pembangunan infrastruktur drainase juga telah dilakukan untuk mengurangi genangan banjir yang terjadi dan terus meningkatkan kualitas pembangunan dengan mengawasi pembangunan infrastruktur sesuai teknis pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang telah disepakati;

8. Rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini diwujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun demikian, berdasarkan pantauan peta citra 2013 diperoleh ratio kesesuaian ruang adalah sebesar 95% atau masih terdapat margin sebesar 5% margin bangunan yang harus ditertibkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya pembangunan yang dilakukan tanpa melalui proses pengajuan rekomendasi kesesuaian ruang.

Kesesuaian Tata Ruang lebih menekankan kepada kawasan sempadan Danau dan Sungai, seberapa jauh pemerintah Kota Jambi mempertahankan fungsi sempadan danau dan sungai yang sesuai dengan luas di RTRW Kota Jambi 2013-2033. Dari hasil interpretasi Citra Worldview-4 tahun 2018, didapatkan data hitungan sebagai berikut : Luas bangunan yang berada di sempadan Sungai dan Danau adalah seluas = 48,78 Ha. Luas realisasi sempadan danau dan sungai = 576,22 HA dari Luas sempadan Sungai dan Danau sesuai RTRW Kota Jambi adalah 625 Ha. Persentase bangunan yang melanggar adalah sebesar = $(48,78/625) \times 100\% = 7,80\%$ Sehingga Luas Sempadan Sungai dan Danau yang masih sesuai dengan tata ruang adalah 92,2%.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 5 (lima) program urusan yakni:

1. Program Perencanaan Teknis Ke-Pu an;
2. Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/Sungai;
3. Program Pembangunan, Pemeliharaan Dan Perluasan Utilitas Perkotaan;
4. Program Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan; dan
5. Program Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan Dan Keterpaduan Tata Ruang.

3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan, dimana indikator tujuan tersebut adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,67 dan terealisasi sebesar 7,44. Adapun keterkaitan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Keterkaitan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	49,34%	60,77%	65,56%

Sumber: DPRKP Kota Jambi 2021

Dalam pencapaian sasaran RPJMD, dimana indikator sasarannya adalah Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas, pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 60,77% dan terealisasi sebesar 65,56%. Indikator sasaran RPJMD ini menjadi tanggung jawab 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah, yaitu DPUPR, DPRKP dan Dinas Perhubungan. Dalam menunjang sasaran RPJMD, indikator sasaran yang menjadi tanggungjawab DPRKP dalam pembentuk indikator sasaran tersebut adalah Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum dengan target pada Tahun 2020 sebesar 73,98% dan terealisasi sebesar 77,56%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 33.009.495.000	Rp. 32.377.245.485	(98,08%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 4.997.227.765</u>	<u>Rp. 4.484.400.161</u>	(89,73%)
Total Anggaran	Rp. 38.006.722.765	Rp. 36.861.645.646	(96,98%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPRKP Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Persentase Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	86,11%	84,90%
		Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	80,91%	84,03%
		Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	73,98%	77,56%

Sumber: DPRKP Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Target Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani sampai tahun 2020 sebesar 86,11% atau sekitar 849,52 Ha dan terealisasi sebesar 837,57 Ha atau sekitar 84,90%, tidak tercapainya penanganan kawasan permukiman kumuh ditahun 2020 dikarenakan ada beberapa program yang diusulkan penanganannya melalui APBN belum dapat terlaksana sehingga menyebabkan capaian luasan yang ditangani sampai tahun 2020 tidak dapat tercapai;
2. Target Persentase Pemenuhan Rumah Bagi MBR sampai tahun 2020 sebesar 80,91% atau sebanyak 35.600 KK dengan realisasi sebanyak 36.975 KK atau sebesar 84,03%, Pencapaian target ini diperoleh melalui fasilitasi, koordinasi dan kerjasama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder yang bergerak dibidang Perumahan, dengan tetap memperhatikan regulasi dan peruntukan ruang dalam penyediaannya;
3. Target Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum sampai tahun 2020 sebanyak 16.400 titik LPJU dan 62 Lokasi makam yang dipelihara atau sebesar 73,98% dengan realisasi sebesar 77,56% dengan total LPJU yang telah terpasang dan dalam kondisi baik sebanyak 17.832 Titik dan Makam yang dipelihara sebanyak 62 Lokasi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 3 (tiga) program urusan yakni:

1. Program Pengembangan Dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan;
2. Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan;
3. Program Peningkatan, Pemeliharaan Dan Penataan Utilitas Umum.

3.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD, yakni Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 2, yaitu Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat. Adapun keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	80%	75%
		Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	93,63%
	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%
			Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	48,71%

Sumber: Satpol PP, Disdamkar dan Badan Kesbangpol Kota Jambi 2021

Keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan sasaran RPJMD, yaitu Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL, dengan indikator sasaran Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL. Pada tahun 2020 indikator ini ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 75%. Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020 memiliki 2 (dua) program urusan yakni Program Penyelenggaraan Trantibum, Serta Penegakan Regulasi Daerah; serta Program Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat. Total anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 7.066.207.390	Rp. 6.725.712.633	(95,18%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 5.351.364.685</u>	<u>Rp. 4.872.753.519</u>	(91,05%)
Total Anggaran	Rp 12.417.572.075	Rp.11.598.466.152	(93,40%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Satpol PP pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2020

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Menurunkan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap PERDA dan PERWAL	Jumlah Kasus atau Pelanggaran Perda dan Perwal	80	75

Sumber: Satpol PP Kota Jambi 2021

Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah. Di era reformasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, sejumlah kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kota Jambi adalah:

- a. Tidak seimbang jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan penambahan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tingkat pelanggaran Perda dan Perwal yang terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga rasio penanganan dan penyelesaian kasus baik jumlah maupun kualitasnya tidak dapat dicapai secara optimal;
- b. Kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam upaya penegakkan perda dan Perwal yang telah direncanakan sehingga sulit untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal dan mengakomodir sistem penyelenggaraan trantibum dan penegakkan Perda dan Perwal yang baik;
- c. Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur personil Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam hal teknis tertentu;
- d. Masih rendahnya dedikasi, loyalitas personil, dan kemampuan teknis (administrative, yuridis, dan operasional) SDM dalam penyelesaian dan penanganan kasus pelanggaran yang ditemui. Hal ini sebagai akibat karena kurangnya pemahaman terhadap tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja, rendahnya pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan terhadap bidang tugas yang dihadapi, dan adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh sebagian oknum personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memenuhi rendahnya tingkat kesejahteraan yang diperoleh karena tidak seimbang volume pekerjaan dan resiko pekerjaan yang dihadapi;

- e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung tugas operasional di lapangan guna memperluas cakupan jangkauan pelayanan yang semakin besar seiring dengan perkembangan Kota;
- f. Masih rendahnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, dan penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota yang bermuara pada peningkatan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah dan keputusan walikota seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
- g. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik lintas sektoral maupun lintas vertikal dalam upaya Ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan Peraturan walikota;
- h. Kurangnya komitmen dari pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengacu kepada Renstra dan Renja yang telah dibuat;
- i. Kurang tertatanya manajemen dan administrasi pelaporan dan hasil pelaksanaan tugas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diketahui tingkat pencapaian target yang telah diperoleh;
- j. Kurangnya SDM yang diperlukan di bidang perencanaan program dan kegiatan, sehingga selalu terlambat dalam penyelesaian pelaporan sebagai bahan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain :

- a. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
- b. Budaya dan Tata Krama dalam masyarakat Kota Jambi yang masih terpelihara dengan baik;
- c. Intensifikasi rapat koordinasi internal di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas.;
- d. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.;
- e. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emptif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Jambi dengan upaya penambahan SDM dari segi kuantitas;
- f. Mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Pol PP ke Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat.

Keterkaitan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dengan sasaran RPJMD, yaitu meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan, dengan indikator sasaran Cakupan pelayanan pemadam

kebakaran. Pada tahun 2020 indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 93,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan akan rasa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Jambi sudah mendekati baik. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian sasaran strategis maupun tujuan pada Tahun 2020 diantaranya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi berjalannya kegiatan, sehingga beberapa kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran dan tujuan tidak berjalan maksimal.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 10.941.494.500	Rp. 10.548.409.619	(96,40%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 6.570.101.776</u>	<u>Rp. 6.041.572.924</u>	(91,95%)
Total Anggaran	Rp. 17.511.596.276	Rp. 16.589.982.543	(94,73%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Tercapainya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dan Pelayanan Operasi Pemadaman Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Respon Time Rate)	18 Menit	17 Menit
2	Tercapainya Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran, Pelayanan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran/ Operasi Darurat Non Kebakaran/ Operasi Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran, Pelayanan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran/ Operasi Darurat Non Kebakaran/ Operasi Non Kebakaran	100%	100%
3	Tercapainya Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran dan kebencanaan	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendataan Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran dan Kebencanaan	100%	100%
4	Tercapainya Standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran Dan Kebencanaan	Persentase Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran Dan Kebencanaan	100%	100%
5	Tercapainya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Prakebakaran dan Prakebencanaan	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pra kebakaran dan pra kebencanaan	100%	68.18%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dan Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran sebesar 100%, artinya seluruh indikator yang menjadi tolak ukur dalam indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Ada 2 sub indikator dalam indikator ini, yaitu :
 - a) Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) untuk Tahun 2020 targetnya 18 menit dan dari pemadaman kebakaran yang dilakukan selama Tahun 2020 rata-rata di

angka 17 menit. Ini berarti Tingkat Waktu Tanggap sudah tercapai bahkan melebihi target yang ada.

- b) Jumlah warga Kota Jambi yang memperoleh layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama Tahun 2020 sebanyak 184 KK, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 85 KK, dengan begitu ketercapaian bagian ini sebesar 100%
- 2) Pelayanan Operasi Pemadam Kebakaran, Pelayanan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran/ Operasi Darurat Non Kebakaran/ Operasi Non Kebakaran di Tahun 2020 sebesar 100% sedangkan target ketercapaian sebesar 100%. Berikut rincian sub indikatornya :
 - a) Jumlah Operasi Pemadam Kebakaran selama Tahun 2020 sebanyak 54 Kali sedangkan target operasi pemadaman kebakaran di Tahun 2020 sebanyak 80 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2020 yaitu sebanyak 54, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayannya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2020 sebesar 100%.
 - b) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran sebanyak 54 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 54 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2020 yaitu sebanyak 54, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayannya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2020 sebesar 100%.
 - c) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Operasi Darurat Non Kebakaran) : Bencana Banjir, Puting Beliung, Tanah Longsor, Orang tenggelam, Orang Masuk Sumur, Bunuh Diri, dsb di tahun 2020 sebanyak 33 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 25 kali. Banyaknya operasi penyelamatan dan evakuasi darurat non kebakaran yang melebihi target yang ditetapkan dapat terlayani dengan maksimal oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dengan begitu ketercapaian subindikator ini sebesar 100%
 - d) Jumlah Operasi Penyelamatan dan Evakuasi (Non Kebakaran) : evakuasi sarang tawon, penangkapan ular, penangkapan anjing liar, dsb di tahun 2020 sebanyak 97 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 25 kali. Banyaknya operasi penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang melebihi target yang ditetapkan dapat terlayani dengan maksimal oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kota Jambi, dengan begitu ketercapaian subindikator ini sebesar 100%.

- 3) Tercapainya Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran dan Kebencanaan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi di Tahun 2020 sebesar 100%. Ini didukung oleh beberapa subindikator yaitu :
 - a) Jumlah Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan investigasi pasca kebakaran dan kebencanaan selama Tahun 2020 sebanyak 54 Kali sedangkan target Pelayanan Pendataan, Inspeksi dan investigasi pasca kebakaran dan kebencanaan di Tahun 2020 sebanyak 85 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2020 yaitu sebanyak 54 kali, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayannya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2020 sebesar 100%.
 - b) Pelayanan Jumlah warga Kota Jambi yang menerima dana bantuan korban kebakaran/ bencana lainnya, selama Tahun 2020 sebanyak 70 KK sedangkan target Pelayan Jumlah warga Kota Jambi yang menerima dana bantuan korban kebakaran/ bencana lainnya di Tahun 2020 sebanyak 150 KK. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka kebakaran di Tahun 2020 yaitu sebanyak 54 kali, ini mengindikasikan bahwa kegiatan preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah maksimal sehingga angka kebakaran di Kota Jambi menurun. Terlayannya seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, sehingga pencapaian di subindikator ini di Tahun 2020 sebesar 100%.
- 4) Tercapainya Standarisasi Sarana dan Prasarana Kebakaran Dan Kebencanaan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi di Tahun 2020 sebesar 100%. Ini didukung oleh beberapa subindikator yaitu :
 - a) Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Pemadam Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3.000-5.000 liter di Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dengan adanya rekomendasi dari DPRD Kota Jambi maka ada penambahan anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sehingga pengadaan mobil pemadam kebakaran di Tahun 2020 sebanyak 3 unit. Jadi ketercapaian di sub indikator ini sebesar 100%.
 - b) Jumlah Standarisasi Sarana dan Sarana Kebakaran dan Kebencanaan di Tahun 2020 sebanyak 1 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.

- c) Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Peralatan dan Kendaraan Fire Truk di Tahun 2020 sebanyak 12 kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.
 - d) Jumlah Kegiatan Pendistribusian/ Pergudangan di Tahun 2020 sebanyak 12 Laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.
 - e) Jumlah Kegiatan Pengendalian Sarana/ Prasarana di Tahun 2020 sebanyak 12 Laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.
- 5) Tercapainya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Prakebakaran dan Prakebencanaan di Tahun 2020 sebesar 68.18% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, ada beberapa subindikator yang tidak mencapai target, yang akan dijelaskan sebagai berikut :
- a) Jumlah Pelayanan Pemeriksaan APK dan Sarana Proteksi Kebakaran di Tahun 2020 sebanyak 500 gedung atau bangunan, tetapi terealisasi sebanyak 299 kali pemeriksaan gedung dan bangunan lainnya. Hal ini disebabkan oleh pandemic COVID-19 sehingga menghambat berjalannya pemeriksaan ini. Ketercapaian dan subindikator ini sebesar 45.8%
 - b) Jumlah Wilayah Kota Jambi yang memperoleh pelayanan informasi rawan kebakaran dan kebencanaan di Tahun 2020 sebanyak 20 Lokasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan begitu ketercapaian subindikator ini terealisasi sebesar 100%.
 - c) Jumlah kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di tahun 2020 sebanyak 40 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 30 kali. Banyaknya kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang melebihi target yang ditetapkan dapat terlayani dengan maksimal oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dengan begitu ketercapaian subindikator ini sebesar 100%.
 - d) Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Relawan kebakaran di masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan terlaksana di Tahun 2020 yang targetkan ada 12 Relawan, dan terealisasi sebanyak 132 relawan. Sehingga realisasi di subindikator ini sebesar 100%.
 - e) Jumlah Kegiatan Mitigasi Bencana tidak terlaksana di Tahun 2020 yang targetkan ada 1 kali Kegiatan, ini disebabkan pandemi COVID-19 yang terjadi di Tahun 2020. Sehingga realisasi di subindikator ini sebesar 0%.
 - f) Jumlah kegiatan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ditahun 2020 terealisasi sebanyak 19 orang sedangkan ditetapkan sebanyak 30 orang.

Tidak maksimalnya subindikator ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan yang tersedia selama Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic COVID-19.

Dinas Pekerjaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 1 (satu) program urusan yaitu Program Peningkatan Kesiagaan Dini Dan Manajemen Logistik Kebencanaan, yang dijabarkan dengan 11 (sebelas) kegiatan, antara lain:

1. Bimbingan Teknis, Diklat Dan Sosialisasi Penanganan Bencana
2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan
4. Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana
5. Pencegahan Dan Pengendalian Kebencanaan
6. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran
7. Kemitraan Asuransi Jiwa Dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan
8. Rekrutment Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana
9. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Kebencanaan
10. Penyusunan Norma, Strandar, Pedoman Dan Manual Kebencanaan
11. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Keterkaitan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan 2 (dua) sasaran RPJMD, yaitu 1) Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan indikator sasaran Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila. Pada tahun 2020 indikator ini ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 20%. Sasaran RPJMD yang kedua adalah Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan, dengan indikator sasaran Persentase Orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat. Pada tahun 2020 indikator ini ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 48,71%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam melaksanakan 2 (dua) program urusan, yakni program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; dan program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol. Anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kesbangpol pada tahun 2020 sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 2.118.029.500	Rp. 1.776.128.586	(83,85%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 2.998.632.276</u>	<u>Rp. 2.788.995.412</u>	(93,00%)
Total Anggaran	Rp. 5.116.661.776	Rp. 4.565.123.998	(89,22%)

Adapun capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap forum kemasyarakatan terkait Ideologi Pancasila	20%	20%
2	Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	48,71%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi 2021

Formulasi/cara pengukuran dari indikator kinerja Persentase Pembinaan terhadap Masyarakat terkait Ideology Pancasila dengan target 20% yang terealisasi 20% atau dengan capaian 100%, dimana :

Jumlah forum kemasyarakatan yang akan dibina sebanyak 230 forum

Jumlah forum kemasyarakatan yang terdaftar sebanyak 230 forum

Sehingga dapat dirumuskan sbb :

$$\left[\left(\frac{\text{Jumlah forum kemasyarakatan yang akan dibina}}{\text{Jumlah forum kemasyarakatan yang terdaftar}} \right) \times 100\% \right] \text{ atau } \left[\frac{230}{230} \times 100\% \right] = 100\%$$

Rumusan diatas diartikan bahwa selama kurun waktu 5 tahun (periode Renstra Badan Kesbangpol yaitu 2018-2023), target capaian pembinaan terhadap forum kemasyarakatan sebesar 100% dari seluruh jumlah forum kemasyarakatan yang terdaftar.

Adapun target pertahunnya adalah 230 forum dibagi 5 (lima) tahun yaitu sebanyak 46 forum kemasyarakatan, dapat dirumuskan sbb :

$$\left[\frac{46}{230} \times 100\% \right] = 20\%$$

Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase Orkemas dan Parpol yang berperan Aktif di Masyarakat dimaksudkan bahwa Badan Kesbangpol akan melihat dan memantau peran aktif organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam mengisi pembangunan dengan kegiatan dan kreativitas sesuai tujuan organisasinya masing-masing yang dapat bermanfaat dan berguna banyak bagi masyarakat. Hal ini dapat kami rumuskan atau diformulasikan sebagai berikut : $\left[\left(\frac{\text{Jumlah ormas dan parpol yang aktif}}{\text{Jumlah ormas dan parpol yang terdaftar}} \right) \times 100\% \right]$.

Target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 20% dan terealisasi sebesar 48,71% atau dengan capaian 243% dimana jumlah orkemas dan parpol yang aktif sebanyak 113 dibagi dengan jumlah Orkemas dan Parpol yang terdaftar di Database Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Jambi sebanyak 232, sehingga tercapai 48,71 persen melebihi target yang ditetapkan.

Adapun beberapa capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai sarana dalam memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah dan masalah keagamaan lainnya yang terkait dengan kerukunan umat beragama;
2. Melaksanakan sosialisasi, memberikan pembinaan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan Ormas yang ada di Kota Jambi, dan juga memberikan rekomendasi untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar terhadap Ormas dengan melaporkan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun serta meregistrasi ulang SKT nya;
3. Melakukan pemantauan akan perkembangan politik di Kota Jambi untuk melihat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi;
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing, dengan mengunjungi tempat-tempat keberadaan dari orang-orang asing dan lembaga-lembaga asing yang berada di Kota Jambi;
5. Melakukan pemantauan dalam kegiatan Penanganan Konflik Sosial (PKS) dengan melakukan deteksi dini agar tidak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat dan apabila telah terjadi maka dengan tim PKS dapat menekan dan menghilangkan sumber konflik serta menyelesaikan masalah yang mengakibatkan konflik tersebut;
6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi melalui kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) dengan memberikan pembekalan khususnya kepada generasi muda untuk lebih mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat kebangsaan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
7. Memfasilitasi kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul atau yang sudah ada sebelumnya terkait dengan kegiatan pembangunan disegala bidang yang ada di Kota Jambi, melalui rapat koordinasi pimpinan daerah melalui kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang biasa langsung dipimpin oleh Bapak Walikota Jambi.

3.1.1.6. Urusan Sosial

Urusan Sosial merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Menurunkan angka PMKS. Adapun indikator sasaran RPJMD urusan ini adalah Persentase PMKS yang tertangani. Adapun keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%	67,2%

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2021

Indikator sasaran RPJMD untuk Persentase PMKS yang tertangani pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 67,2%, sehingga didapatkan angka capaiannya sebesar 96%.

Total alokasi anggaran Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 4.445.773.250	Rp. 4.238.038.712	(95,32%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.507.422.461</u>	<u>Rp. 3.310.599.640</u>	(94,38%)
Total Anggaran	Rp. 7.953.195.711	Rp. 7.548.638.352	(94,91%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Sosial pada tahun 2020 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial pada Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	100%	100%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar Di Luar Panti	Persentase PMKS Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani	70%	67,2 %

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2021

Pada tahun 2020, Dinas Sosial Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.1.1.7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (DTKK,UKM) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja. Adapun keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,25%	64,12%

Sumber: DTKK, UKM Kota Jambi 2021

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, dengan sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2020 TPAK ditargetkan sebesar 65,25% terealisasi sebesar 64,12%. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Jambi, pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja yang tercatat sebanyak 296.275 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja sejumlah 462.029 orang, sehingga diperoleh angka TPAK dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% = \frac{296.275}{462.029} \times 100\% = 64,12\%$$

Dapat dijelaskan bahwa Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang aktif mencari pekerjaan atau yang bekerja. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja maupun yang tidak bekerja (tidak bekerja : pelajar, Ibu rumah tangga, kelompok penerima pendapatan seperti lansia). Penduduk usia kerja akan terus bertambah setiap tahun seiring dengan penambahan penduduk.

Pandemi covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dikarenakan menurunnya jumlah angkatan kerja akibat dampak banyaknya terjadinya PHK dan penutupan usaha, sementara jumlah penduduk usia kerja bertambah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk usia kerja.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 2.860.907.050	Rp. 2.356.915.932	(82,38%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.792.102.332.</u>	<u>Rp. 3.307.343.801</u>	(87,22%)
Total Anggaran	Rp. 6.653.009.382	Rp. 5.664.259.733	(85,14%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2020

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial yang Harmonis	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,25%	64,12%
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	57%	61,85%

Sumber: DTKK, UKM Kota Jambi 2021

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan turunan dari tujuan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Urusan Tenaga Kerja memiliki sasaran strategis yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial yang Harmonis, dengan indikator sasaran tingkat partisipasi angkatan kerja dan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 65,25% dan realisasi pencapaian sebesar 64,12%. Sementara untuk persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 57% terealisasi sebesar 61,85%. Adapun perhitungan Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah Kasus yang Dicatatkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{47}{76} \times 100\% = 61,85 \%$$

Untuk tahun 2020, jumlah kasus yang dicatatkan sejumlah 76 kasus, dari jumlah tersebut jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 47 kasus. Sehingga dapat dihitung persentase capaian sebesar 61,85%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 57%. Kemampuan dan kecakapan mediator dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam menengahi dan memberikan alternatif solusi permasalahan hubungan industrial dan adanya kesadaran para pemilik usaha/perusahaan dan pekerja untuk menyampaikan permasalahan hubungan industrial yang dihadapi serta bersedia menerima saran yang disampaikan mediator menjadi faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini.

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020 memiliki 1 (satu) program urusan yakni program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3.1.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan

Masyarakat Perkotaan, dengan 2 (dua) sasaran RPJMD yakni 1) Meningkatkan Kesetaraan Gender; 2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak. Adapun keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.17
Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,91	94,6
				Indeks Pemberdayaan Gender	68,2	69,83
		Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	80%

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2021

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 4.877.393.832	Rp. 4.693.419.956	(96,23%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.555.953.050</u>	<u>Rp. 3.314.926.973</u>	(93,22%)
Total Anggaran	Rp. 8.433.346.882	Rp. 8.008.346.929	(94,96%)

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah menetapkan tujuan Peningkatan pemberdayaan masyarakat disemua aspek pembangunan di Kota Jambi dan Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak menuju kesejahteraan keluarga. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Tercapainya standar Kota Layak Anak	Persentase standar KLA yang terpenuhi	80 %	80%
2.	Meningkatnya usaha ekonomi perempuan	Persentase peningkatan kesejahteraan perempuan	77 %	98,60%
3.	Meningkatnya perlindungan Terhadap Perempuan	Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	31	77

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2021

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 memiliki satu program urusan yakni program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3.1.1.9. Urusan Pangan

Urusan Pangan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Ketahanan Pangan. Adapun keterkaitan Urusan Pangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.19
Keterkaitan Urusan Pangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	91	91,5

Sumber: DPKP Kota Jambi 2021

Sasaran RPJMD pada tabel di atas digunakan juga sebagai tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan. Pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 hanya sedikit mengalami peningkatan karena terjadinya rasionalisasi akibat terdampak Covid19, sehingga sampel yang diambil juga tidak cukup mewakili jumlah penduduk yang ada di Kota Jambi. Demikian halnya dengan sampel untuk mengukur tingkat keamanan pangan aman konsumsi, dimana sampel yang ditetapkan baru sedikit yang terwakili.

Solusi untuk mencapai indikator sasaran tersebut diharapkan selain anggaran yang mendukung kinerja, juga SDM untuk mengukur tingkat keamanan pangan konsumsi juga perlu perhatian, sehingga sampel yang diambil benar-benar merata diseluruh pasar tradisional maupun modern yang ada di Kota Jambi, dengan jenis semua produk yang menjadi indikator yang bisa diuji.

Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 3.621.004.500	Rp. 3.408.833.463	(94,14%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 11.629.626.038</u>	<u>Rp. 11.027.369.156</u>	(94,82%)
Total Anggaran	Rp. 18.173.694.288	Rp. 17.275.099.787	(95,05%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pertanian Kota Jambi pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada Tahun 2020

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	1	Persentase Peningkatan SKOR PPH		
			a. PPH Ketersediaan	2.989 gr/kap/hr	3.012 gr/kap/hr
			- Energi dan		
			- protein perkapita	79 gr/kap/hr	99,14 gr/kap/hr
			- PPH Konsumsi	91	91,5
2.	Meningkatnya Keamanan pangan	2	Persentase peningkatan pangan aman konsumsi	83 %	100 %

Sumber: DPKP Kota Jambi 2021

Beberapa capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan pengolahan pangan lokal di 11 kecamatan;
2. Terlaksananya pengambilan sampel cabe giling merah keriting dari lima pelaku usaha di Pasar Angso Dua dan Talang Banjar yang terindikasi bahan kimia berahaa benzoat, ponceau 4R (zat pewarna) diatas ambang batas;
3. Terlaksananya pengambilan dan uji sampel Pangan segar hasil pertanian, peternakan dan perikanan di Pasar Tradisional dan Pasar Modern di 11 kecamatan dalam Kota Jambi;
4. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Kota Jambi dari 91 menjadi 91,5 dengan nilai angka kecukupan ketersediaan protein 99,14 gr/kapita/hari dan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 3.012 Kkal/Kap/hari.

Dalam melaksanakan urusan Pangan tersebut, ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi, seperti:

1. Pemenuhan cadangan Pangan Pemerintah Kota Jambi belum didukung oleh sarana dan prasarana yakni gudang dan pemenuhan cadangan pangan sesuai dengan amanat undang-undang yaitu 100 ton.
2. Implementasi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) melalui pangan lokal belum optimal. Hal ini ditandai Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras, dan konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah yang belum memenuhi anjuran, masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras ini dikarenakan masih sedikitnya pemahaman masyarakat tentang Menu Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan penerapannya

dalam konsumsi di rumah tangga dan belum berkembangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sumber pangan alternatif selain beras sebagai sumber karbohidrat yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi pangan keluarga. Adanya budaya ditengah masyarakat yang menyatakan bahwa beras merupakan pangan pokok yang lebih berkualitas dibandingkan pangan sumber karbohidrat lainnya yaitu mengurangi konsumsi makan beras;

3. Sosialisasi keamanan jajanan anak sekolah khususnya di Sekolah Dasar tidak maksimal dilakukan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi;
5. Belum ada petugas pengambil contoh (PPC) untuk melakukan uji sampel yang terlatih;
6. Koordinasi Tim Satgas Pangan belum optimal.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana prasarana penyimpanan ketersediaan pangan terutama bahan pokok masyarakat demi menjaga kestabilan harga dan pasokan;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pola konsumsi pangan rumah tangga sesuai anjuran nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) 2150 Kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kap/hari;
3. Melaksanakan penyuluhan secara berlanjut ditengah masyarakat Kota Jambi untuk tentang sumber pangan alternatif karbohidrat selain beras dan non terigu melalui Pembinaan dan Sosialisasi/edukasi;
4. Melakukan Promosi peningkatan Pola konsumsi sesuai anjuran yang berkualitas melalui kegiatan Display, Pameran/Expo, Gerakan Makan Diversifikasi Pangan Lokal dan Gerakan *One Day No Rice*;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pangan yang aman konsumsi melalui sosialisasi dan membentuk jejaring pangan daerah;
6. Meningkatkan koordinasi yang bersinergi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan, inovasi teknologi dalam rangka percepatan pengentasan daerah rawan pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 2 (dua) program urusan yakni Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani; dan Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

3.1.1.10. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan, dan memiliki indikator tujuan yakni Indeks Kepuasan Lingkungan Hidup (IKLH) dimana pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 52,39 dan terealisasi sebesar 55,16. Adapun keterkaitan DLH Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.21
Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	38,3	39,6
				Indeks Kualitas Udara	80,72	84,51
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,7	44,81

Sumber: DLH Kota Jambi 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 52.39 terealisasi sebesar 55.16, mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2019 yakni 52.46. Persentase peningkatan IKLH ini mencapai 105.3%. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini seiring dengan meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pencapaian peningkatan nilai kualitas air ini didapatkan dari pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar yang diketahui banyak berasal dari limbah domestik. Limbah domestik yang terakumulasi dari beberapa tahun sebelumnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai dan danau di Kota Jambi. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk mengurangi beban pencemaran air dengan melakukan pembangunan sarana prasarana fisik melalui kegiatan pembuatan *septic tank* komunal ataupun instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal dari kegiatan sanimas oleh Dinas PUPR Kota Jambi dan Program Padat Karya Kali Bersih (Pakar Kasih) yang dilakukan bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat untuk membersihkan kali atau anak sungai yang ada di Kota Jambi.

Adapun capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar 80.72, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 104,7% capaian ini melebihi dari target sebelumnya. Bila dibandingkan dari kondisi awal tahun 2019 sebesar 76.84 dapat direalisasikan dengan nilai 84.51 pada tahun 2020, maka terjadi kenaikan nilai sebesar 7,67, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 104,6%, hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sehingga tidak terjadi dampak kabut asap yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020 adalah sebesar 44,81 dari target sebesar 41,70, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 107,5%, melebihi dari target yang direncanakan. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Indeks Kualitas Tutupan Lahan" tahun ini adalah sebesar 107,5%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 yang juga sebesar 44,81, maka pada Tahun 2020 tidak terjadi kenaikan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan, hal ini disebabkan pada Tahun 2020 tidak ada penambahan lahan untuk RTH yang dapat mempengaruhi nilai IKTL. Hanya ada penambahan sebesar 0,04 ha untuk RTH taman dan RTH perumahan, bila dibandingkan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 105,4%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 57.806.992.111	Rp. 52.350.721.307	(90,56%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 8.191.449.175</u>	<u>Rp. 7.567.259.613</u>	(92,37%)
Total Anggaran	Rp. 65.998.441.286	Rp. 277.513.901.307	(97,26%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DLH Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	38,30	39,60
		Indeks Kualitas Udara	80,72	84,51
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,70	44,81
		Persentase jumlah Pengurangan Sampah ditingkat sumber	12,73	12,85
		Persentase jumlah Sampah yang ditangani	78,16	78,71

Sumber: DLH Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja indikator "Indeks Kualitas Air" adalah sebesar 39,60 dari target sebesar 38,30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga

- persentase capaian kinerjanya adalah 103,4%, capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan.
2. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar 80.72 dari kondisi awal tahun 2019 sebesar 76.84 dapat direalisasikan dengan nilai 84.51 pada tahun 2020, maka terjadi kenaikan nilai sebesar 7,67;
 3. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mengalami perubahan di nilai 44.81 dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Namun melebihi dari target tahun 2020 yaitu sebesar 41.70 atau 107,5%. Pada tahun 2020 tidak ada penambahan lahan untuk RTH yang dapat mempengaruhi nilai IKTL hanya ada penambahan sebesar 0,04 ha untuk RTH taman dan RTH perumahan.
 4. Capaian kinerja indikator "Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber" tahun ini adalah sebesar 100,9%, bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 dengan nilai 12,70% menjadi 12,85% pada tahun 2020, maka terjadi peningkatan sebesar 0,15%. Persentase sampah yang terkelola pada tahun 2019 sebesar 91,48% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 91,56% terjadi peningkatan sebesar 0,08 %.
 5. Capaian kinerja indikator "Persentase jumlah sampah yang ditangani" tahun ini adalah sebesar 100,7%, bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 78,78% dan tahun 2020 sebesar 78,71% maka terjadi penurunan sebesar 0,07%, hal ini dikarenakan diantaranya adanya peningkatan pengurangan sampah ditingkat sumber.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 3 (tiga) program urusan yakni Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam; dan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah.

3.1.1.11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.23
Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2021

Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor63/KEP/M.PAN/7/2003,yang berjumlah 9 indikator yakni kemudahan persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, Kecepatan waktu merespon tamu mendapat pelayanan, kemungkinan adanya pungutan biaya di dalam pelayanan, Kesesuaian antara jenis layanan yang diminta dengan yang diberikan, kompetensi/kemampuan petugas pelayanan, sikap dan prilaku petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan pengguna layanan. Survey dilaksanakan berdasarkan karakteristik responden dengan pengelompokan menurut umur, jenis kelamin, jenis pendidikan, jenis pekerjaan dan jenis pelayanan yang diurus.

Target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah 86. Dari hasil survey yang dilakukan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebesar 86,77 dengan mutu pelayanan pada katagori “B” dengan nilai kualitatif Baik. Kedepan, yang perlu ditingkatkan lagi adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan kemudahan prosedur pelayanan dan komitmen SDM tentang kecapatan, ketepatan dalam pemberian layanan yang sesuai dengan prosedur serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 6.121.936.000	Rp. 5.546.390.661	(90,59)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 5.502.111.844</u>	<u>Rp. 5.361.061.744</u>	(97,43)
Total Anggaran	Rp 11.624.047.844	Rp.10.907.452.405	(93,83)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kependudukan dan pencatatan sipil	86	86,77
		Cakupan layanan dokumen kependudukan	96	96,87
		Cakupan layanan dokumen pencatatan sipil	86,5	91,41
		Persentase validitas database kependudukan	89	87,03

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2021

Indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun 2020 sebagian besar telah melampaui target yang telah ditentukan, hanya satu indikator yang tidak memenuhi target yakni persentase validitas database kependudukan hal ini dikarenakan:

1. Masih banyaknya data ganda atau NIK ganda yang terjadi di masyarakat akibat kurang jujurnya masyarakat dalam melaporkan administrasi kependudukannya, data ganda tidak bisa dilakukan penghapusan apabila tidak ada laporan dari yang bersangkutan (azas Pelaporan);
2. Masih banyaknya *anomaly* data dan elemen data yang kosong tidak diisi oleh penduduk pada waktu pendaftaran penduduk;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perubahan elemen data apabila terjadi peristiwa penting kependudukan atau perubahan data kependudukan;
4. Belum terlaksananya pemutakhiran data kependudukan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2020 akibat dari wabah covid-19 dan rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan bencana wabah Covid-19;
5. Belum terlaksananya pendataan penduduk rentan dan non permanen yang berpengaruh terhadap jumlah riil dari penduduk KotaJambi.

Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan 7 (tujuh) kegiatan.

3.1.1.12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25
Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61,43	59,15

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2021

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 1.550.042.600	Rp. 1.488.539.600	(96,03%)
Belanja Tidak Langsung	Sudah dihitung pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan <u>Perlindungan Anak</u>		

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Tercapainya Persentase Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	39%	52,35%
2	Meningkatkan persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	81%	81,15%
		Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna	42%	43,94%

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2021

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 memiliki satu program urusan yakni Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

3.1.1.13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk. Adapun keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.27
Keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05	Data belum dirilis BPS
				Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,46%	96%

Sumber: DPPKB Kota Jambi 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk di Tahun 2020 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.
2. Target persentase jumlah keluarga sejahtera sebesar 96,46% pada tahun 2020 baru mencapai 96%, adapun hambatan tidak tercapainya target disebabkan oleh merebaknya pandemi Covid19 yang mengakibatkan pendapatan rata-rata masyarakat menengah kebawah mengalami penurunan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk DPPKB Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 6.525.472.100	5.824.856.436	(99,90%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.582.677.587</u>	<u>3.250.380.530</u>	<u>(90,72%)</u>
Total Anggaran	Rp.10.108.149.687	9.075.236.966	(89,78%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis DPPKB Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis PD DPPKB Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Terkendalnya angka kelahiran penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05	Data belum dirilis BPS
		Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,46%	96%

Sumber: DPPKB Kota Jambi 2021

Pada tahun 2020, DPPKB Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

3.1.1.14. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan merupakan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan, dimana indikator tujuan tersebut adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,67 dan terealisasi sebesar 7,44. Adapun keterkaitan Urusan Perhubungan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.29
Keterkaitan Urusan Perhubungan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	60,77%	65,56%

Sumber: Dishub Kota Jambi 2021

Dalam pencapaian sasaran RPJMD, dimana indikator sasarannya adalah Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas, pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 60,77% dan terealisasi sebesar 65,56%. Indikator sasaran RPJMD ini menjadi tanggung jawab 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah, yaitu DPUPR, DPRKP dan Dinas Perhubungan. Dalam menunjang sasaran RPJMD, indikator sasaran yang menjadi tanggungjawab Dishub dalam pembentuk indikator sasaran tersebut adalah Cakupan Pelayanan Transportasi dengan target pada Tahun 2020 sebesar 58,84% dan terealisasi sebesar 57,28%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 14.859.280.900,00	Rp. 14.458.322.980,00	(97,30%)
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.346.730.821,00	Rp. 8.904.912.696,00	(95,27%)
Total Anggaran	Rp. 24.206.011.721,00	Rp. 23.363.235.676,00	(96,51%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi
pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Handal	Cakupan Pelayanan Transportasi	58,84%	57,28%
		Persentase Pengendalian Lalu Lintas	60%	65,81%
		Cakupan Pelayanan Perparkiran	80,74%	98,23%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Target Cakupan Pelayanan Transportasi sebesar 58,84% pada tahun 2020 dan terealisasi sebesar 57,28%;

Capaian kinerja nyata indikator "Cakupan Pelayanan Transportasi" adalah sebesar 57,28% dari target sebesar 58,84% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 97,34%, capaian ini belum sesuai target yang diperjanjikan hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 kondisi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap operasional angkutan umum yang biaya operasi kendaraan tidak tertutupi karena jumlah penumpang yang diangkut sangat minim dan adanya pembatasan mobilisasi orang untuk melakukan aktifitas pada jam-jam tertentu.

2. Target Persentase Pengendalian Lalu Lintas sebesar 60% pada tahun 2020 dan terealisasi sebesar 65,81%;

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Pengendalian Lalu Lintas" adalah sebesar 65,81% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 109,68%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2020 adalah tahun ke-2 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Pengendalian Lalu Lintas" tahun ini adalah sebesar 109,68%, bila dibandingkan dengan target akhir renja tahun 2020 Dinas Perhubungan capaian kerjanya mencapai 60%.

3. Target Cakupan Pelayanan Perparkiran sebesar 80,74% pada tahun 2020 dan terealisasi sebesar 98,23%.

Capaian kinerja nyata indikator "Cakupan Pelayanan Perparkiran" adalah sebesar 98,23% dari target sebesar 80,74% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 121,67%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Cakupan Pelayanan Perparkiran" tahun ini adalah sebesar 121,67%, bila dibandingkan dengan target akhir renja tahun 2020 Dinas Perhubungan sebesar 80,74%.

Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 3 (tiga) program urusan yakni program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan; program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas; dan program Peningkatan Pelayanan Perparkiran.

Pada saat awal RPJMD Kota Jambi telah dilakukan identifikasi dan pengolahan data sesuai dengan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk mendukung terwujudnya Misi ke-3 sesuai dengan program yang ada pada Dinas Perhubungan Kota

Jambi kondisi awal tahun 2018 sebesar 45,75% merupakan kondisi titik awal dari program yang ada atau dasar untuk melakukan ukuran sasaran, tujuan, program agar dapat mengukur capaian tujuan OPD untuk mendukung terwujudnya Misi ke-3 RPJMD Kota Jambi.

Angka awal atau dasar tersebut diatas merupakan acuan dan diperoleh melalui kondisi saat disusunnya RPJMD Kota Jambi dan pada tahun 2020 yang merupakan tahun ke-2 RPJMD menargetkan sebesar 66,53%, target ini merupakan rata-rata dari tiga program pada Dinas Perhubungan Kota Jambi yang dihitung berdasarkan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan memperhatikan basis data yang ada serta kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Sesuai dengan hasil realisasi kinerja, fisik dan keuangan serta indikator-indikator yang telah ditetapkan pada tiga program yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Jambi setelah dilakukan Analisa dan pembagian rata-rata seluruh program yang ada didapat realisasi tahun 2020 sebesar 73,77% dengan capaian 109,56%. Capaian ini merupakan rata-rata tiap program yang melebihi target yang telah ditetapkan seperti Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran secara keseluruhan rata-rata sebesar 121,67% dan pada Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu lintas sebesar 109,68%.

3.1.1.15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat Berbasis Teknologi Informasi, dengan tujuan RPJMD yakni Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dimana indikator tujuan tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.31
Keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks SPBE	2,55	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 2021

Indikator sasaran Indeks SPBE pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2,55. Untuk pencapaian target sasaran tersebut diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dikarenakan tahun 2020 Indonesia dan dunia mengalami Pandemi COVID-19 maka proses penilaian terhadap indeks SPBE tidak dapat dilakukan oleh Kementerian.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 5.102.280.000	Rp. 4.940.760.342	(96,83%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.372.210.793</u>	<u>Rp. 2.926.764.889</u>	(86,79%)
Total Anggaran	Rp. 8.474.490.793	Rp. 7.867.525.231	(92,83%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Terwujudnya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informatika	55%	51%
2	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Rasio jumlah data/ informasi/statistik sektoral	20%	16%
3	Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi	Indeks kematangan keamanan informasi (IKKI)	35	33
4	Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan , capaian kinerja keuangan dan kepegawaian	Kinerja pengelolaan saran prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Target Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informatika sebesar 55% pada tahun 2020 telah mencapai 51%;
2. Target cakupan akses dan kualitas informasi publik pada tahun 2020 sebesar 20% dan telah mencapai sebesar 16%;
3. Target Indeks kematangan keamanan informasi (IKKI) sebesar 35 dan tercapai sebesar 33;
4. Target kinerja pengelolaan saran prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 100%.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 3 (tiga) program urusan yakni Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik; Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan Program Manajemen Data/Informasi/Statistik Daerah.

3.1.1.16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DTKK,UKM) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil. Adapun keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8,54%	8,54%
				Persentase koperasi berkualitas	19,27%	19,73%

Sumber: DTKK,UKM Kota Jambi 2021

Pada tahun 2020 capaian Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas ditargetkan sebesar 8,54% dengan realisasi 8,54%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah UKM Berkualitas}}{\text{Jumlah UKM}} \times 100\% = \frac{(870+50)}{10.763} \times 100\% = 8,54\%$$

Data sampai dengan 31 Desember tahun 2019, jumlah usaha mikro kecil yang berkualitas sebanyak 870 UKM, dengan target capaian UKM berkualitas pada tahun 2020 sebesar 50 UKM. Dan ditahun 2020, target yang ditetapkan telah dapat direalisasikan dengan capaian UKM berkualitas sebesar 50 UKM, sehingga total keseluruhan UKM berkualitas sebesar 920 UKM pada 31 Desember 2020. Sedangkan jumlah UKM yang diprioritaskan untuk dibina menjadi UKM berkualitas selama 5 (lima) tahun RENSTRA sebesar 10.763 UKM, sehingga didapatkan realisasi sebesar 8,54%.

Berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi No.135 Tahun 2020 Tanggal 24 November 2020, standar penilaian UKM Berkualitas adalah:

- Memiliki kelengkapan izin usaha dan sertifikat kelayakan usaha lainnya;
- Memiliki tempat usaha dan kelengkapan sarana dan prasarana usaha yang memadai;
- Mempunyai modal usaha dan telah melaksanakan manajemen pembukuan usaha;
- Telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen usaha dan memiliki rencana kerja;
- Mampu mengembangkan produk dan pemasaran produk.

Pada tahun 2020 capaian Persentase Koperasi Berkualitas ditargetkan sebesar 19,27% dengan realisasi 19,73%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\% = \frac{(36 + 7)}{218} \times 100\% = 19,73\%$$

Di akhir tahun 2019, jumlah koperasi berkualitas sebanyak 36 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 218 koperasi. Dan ditahun 2020, jumlah koperasi berkualitas bertambah 7 koperasi sehingga total jumlah koperasi berkualitas yaitu 43 koperasi. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung persentase capaian Koperasi berkualitas sebesar 19,73 %.

Berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi No. 43.a Tahun 2019 tanggal 11 Maret Tahun 2019, koperasi dikategorikan berkualitas, jika telah memenuhi persyaratan berikut:

- Memiliki sarana kantor dan usaha koperasi
- Tertib administrasi (memiliki buku 16)
- Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus, rapat pengawas, dan/atau rapat gabungan dalam 1 tahun
- Melaksanakan RAT
- Memiliki rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi (RAPBK)
- Peningkatan jumlah anggota
- Memiliki dana pendidikan
- Memiliki dana sosial
- Penyelenggaraan audit
- Laporan keuangan yang sehat untuk KSP/USP

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target indikator ini yaitu koperasi yang diarahkan untuk mencapai kategori berkualitas, telah tertib melaksanakan administrasi pembukuan usaha, telah mengupayakan adanya kantor sekretariat, tetap melaksanakan RAT sesuai jadwal meskipun ditengah pandemi covid 19, dan mampu menyajikan laporan keuangan yang sehat.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro Kecil yang Berkualitas	8,54 %	8,54 %
		Persentase Koperasi Berkualitas	19,27 %	19,73 %

Sumber: DTKK, UKM Kota Jambi 2021

Urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 2 (dua) program urusan yakni program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 848.648.250	Rp. 704.551.450	(83,02%)
Belanja Tidak Langsung	sudah dihitung pada BTL urusan Tenaga Kerja		

3.1.1.17. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada dua misi. Pertama, Misi 1 yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Kedua, Misi 4 yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Realisasi Investasi. Adapun keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.35
Keterkaitan Urusan Penanaman Modal
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi 2021

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 3.224.024.000	Rp. 2.957.857.679	(91,74)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.956.830.612</u>	<u>Rp. 3.660.330.157</u>	(92,51%)
Total Anggaran	Rp. 7.180.854.612	Rp. 6.618.187.836	(92,16%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	84,25%
2	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi	Rp. 430,5 M	Rp. 249,4 M

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi 2021

Selama Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Jambi mendapatkan nilai IKM yang tinggi ketika melakukan asistensi muncul asumsi bahwa pada saat masyarakat /pemohon merasa puas secara logis akan terjadi penurunan terhadap pengaduan yang berupa komplain, sebab komplain merupakan bentuk nyata adanya ketidakpuasan pelanggan. Tingginya IKM juga mengindikasikan bahwa layanan perizinan DPMPTSP sudah sesuai dengan ketentuan yang dijanjikan dalam SOP Penyelenggaraan Perizinan. Target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah 86. Dari hasil survey yang dilakukan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan terpadu pada DPMPTSP Kota Jambi pada tahun 2020 mendapat Nilai sebesar 84,25 % atau kategori BAIK "B". Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya mendapat nilai pada tahun 2020 sebesar " 84,25 " disebabkan dengan adanya pemberlakuan sistem OSS (*Online Single Submission*) oleh pemerintah pusat yang merupakan persyaratan mutlak dalam pengurusan perizinan dan disebabkan juga dengan adanya pandemi Covid 19 sehingga pelayanan untuk pendampingan untuk pengajuan ijin melalui OSS dilakukan melalui Online atau Via telepon maupun SMS.

Target Realisasi Investasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 430.500.000.000. Dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Realisasi Investasi di Kota Jambi untuk periode Januari s/d Desember 2020 sebesar RP. 249.446.980.393.- dengan status sudah disetujui dan sudah diverifikasi oleh BKPM dari 792 Perusahaan yang melapor. Realisasi Investasi tahun 2020 tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid19 yang mengakibatkan turunnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga juga mengakibatkan turunnya investasi pelaku usaha. Kondisi seperti ini tidak hanya dialami di Kota Jambi saja, tetapi hampir seluruh Indonesia yang mengalami penurunan.

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2020 memiliki 2 (dua) program urusan yakni program Program Peningkatan Realisasi Investasi; dan program Program Peningkatan Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan.

3.1.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan, dimana indikator sasaran tersebut adalah Indeks Pembangunan Pemuda yang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50. Adapun keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.37
Keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga
dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	50	Data belum tersedia

Sumber: Dispora Kota Jambi 2021

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50 dan realisasinya masih dalam proses perhitungan. Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda dihitung dari 5 domain, yaitu Domain 1. Pendidikan, Domain 2. Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain 3. Ketenagakerjaan dan Kesempatan, Domain 4. Partisipasi dan Kepemimpinan serta Domain 5. Gender dan Diskriminasi. Masing-masing domain memiliki persentase bobot yang sama, yaitu 20%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 5.219.624.516	Rp. 3.141.384.934	(60,18%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.280.769.038</u>	<u>Rp. 3.112.237.451</u>	<u>(94,86%)</u>
Total Anggaran	Rp. 8.500.393.554	Rp. 6.253.622.385	(73,57%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dispora Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispora Kota Jambi pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif dalam Organisasi	50%	55%
2.	Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Cabang Olahraga Prestasi	73,33%	73,33%

Sumber: Dispora Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama “Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan” memperoleh realisasi 55%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan menghitung jumlah pemuda kader organisasi dibagi jumlah pemuda yang berorganisasi di tingkat kota dikali 100%. Tahun 2020 pemuda kader yang ditargetkan 250 orang dan terealisasi 275 orang. Jumlah pemuda yang berorganisasi di tingkat kota di prediksi mencapai 500 orang;
2. Indikator kinerja utama “Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi” memperoleh realisasi 73,33%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan menghitung jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi jumlah cabang olahraga kota dikali 100%. Tahun 2020 jumlah cabang olahraga yang dibina ditargetkan sebanyak 33 cabang olahraga dan terealisasi pula 33 cabang olahraga. Jumlah seluruh cabang olahraga kota Jambi yang terdata sampai dengan 2020 adalah 45 cabang olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki satu (1) program urusan, yakni Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan.

3.1.1.19. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 2.438.010.800	Rp. 2.040.103.225	(83,68%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 3.292.772.004</u>	<u>Rp. 3.091.035.163</u>	(93,87%)
Total Anggaran	Rp. 5.730.782.804	Rp. 5.131.138.388	(89,54%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Kebudayaan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kebudayaan pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Terseleranya Even Seni dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya	5 Kali	3 Kali
2.	Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Persentase Cagar Budaya yg dilestarikan dan dikembangkan	50 %	60 %
3.	Meningkatnya Prosentase Seni Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	50 %	60 %

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2021

Tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini menunjukkan capaian yang sangat baik untuk memenuhi target dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, dimana hampir semua terget yang telah ditentukan atau ditetapkan dapat terpenuhi dan bahkan melebihi target.

1. Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan, Jumlah makam yang ada sebanyak 5 makam, Untuk kegiatan pemugaran tahun ini tidak terlaksana karena pengalihan dana untuk kegiatan penanganan Covid-19, namun Bidang Kebudayaan melakukan pendataan dan Survey mengenai Rumah Tua di seberang kota Jambi sebanyak 9 (delapan) buah rumah tua adat Kota Jambi dengan Pemilik Rumah:

- a. Bapak Apward RT.04 Kel.Tanjung Johor
- b. Ibu Aliza, RT.03 Kel. Tahtul Yaman
- c. Ibu M. Nahaziah RT.01 Kel. Mudung Laut
- d. Ibu Maimunnah RT.10 Kel Arab Melayu
- e. Ibu Patrianti, RT.02 Kel. Mudung Laut
- f. Ibu Rehana, RT.03 Kel. Tahtul Yaman
- g. Ibu Saripah. S, RT.02 Kel. Arab Melayu
- h. Ibu Suhaimi, RT.03 Kel Jelmu
- i. Bapak Zainal Bididn RT.10 Kel. Arab Melayu

2. Presentase Seni Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan, Sampai dengan akhir tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mencapai target melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan yang ada di kota Jambi dengan Penciptaan Kreasi dan Koreografer Tari sebanyak 6 (enam) Karya Seni dengan nama tarian:

- a. Tari Persembahan
- b. Tari Zapin Tekuluk
- c. Tari Kompang Bedana
- d. Tari Zapin Rentak Beayun
- e. Tari Zapin Pengikat
- f. Tari Kipas Sulanjana

Urusan Kebudayaan pada tahun 2020 memiliki 1 (satu) program urusan yakni Program Pembinaan, Peningkatan Dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan.

3.1.1.20. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Sumber

Daya Manusia yang Berdaya Saing. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Perpustakaan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan pada Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Nilai IKM Terhadap Pelayanan Perpustakaan	76,61	-
		Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	6,57	2,29

Sumber: DKP Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Urusan Perpustakaan Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Nilai IKM terhadap pelayanan perpustakaan memiliki target sebesar 76,61. Pada tahun 2020, penilaian IKM tidak dapat dilaksanakan karena terhambat oleh pandemi Covid 19. Dari 22 kegiatan Layanan hanya terdapat 5 layanan yang tetap berjalan, yaitu yaitu Layanan Kunjungan Perpustakaan, Layanan Pembuatan KTA / Kartu Anggota Perpustakaan, Layanan Sirkulasi, Layanan telusur literatur / OPAC / Katalog online, serta Layanan Pinjam Antar Perpustakaan (Interlibrary Loan Service). Layanan tersebut memang sudah terlaksana secara online sebelum pandemi Covid-19;
2. Indikator Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun memiliki target sebesar 6,57, dengan capaian realisasi 2,29. Presentase pengunjung tidak tercapai dikarenakan seluruh layanan di tutup untuk mengantisipasi penyebaran virus corona sehingga tidak ada kunjungan dari pemustaka selama pandemi berlangsung. Layanan pendaftaran dan peminjaman buku dialihkan ke layanan tertutup/online melalui *whatsapp*.

Total alokasi anggaran urusan Perpustakaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 2.887.727.925	Rp. 2.731.875.973	(94,60%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 5.044.743.406</u>	<u>Rp. 4.783.972.351</u>	<u>(94,83%)</u>
Total Anggaran	Rp. 7.932.471.331	Rp. 7.515.848.324	(94,75%)

Pada tahun 2020, urusan Perpustakaan melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan.

3.1.1.21. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Pada RPJMD

Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Kearsipan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kearsipan pada Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatkan Kepatuhan PD terhadap Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah PD yang menerapkan SIKD (Sistim Informasi Kearsipan Dinamis)	1	1
		Persentase PD yang Mengelola Arsip Sesuai Standar.	41	41

Sumber: DKP Kota Jambi 2021

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Urusan Perpustakaan Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja jumlah PD yang menerapkan SIKD pada tahun 2020 memiliki target 1 PD dengan realisasi 1 PD. Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis ini sudah mulai diterapkan pada Bagian Kerjasama;
2. Indikator Persentase PD yang mengelola arsip sesuai standar memiliki target 41% dengan capaian realisasi 41%.

Total alokasi anggaran urusan Kearsipan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 1.298.719.875	Rp. 1.297.314.875	(99,89%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Sudah dihitung pada urusan Perpustakaan</u>		

Pada tahun 2020, urusan Kearsipan melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Adapun capaian dan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Jumlah Perwal tentang Pengolahan Arsip sebanyak 4 Perwal;
- Jumlah Storyline sebanyak 1 Kegiatan;
- Jumlah Arsip yang diolah sebanyak 26828 Arsip;
- Jumlah Arsip yang terakuisisin pada LKD sebanyak 2 Buku;
- Jumlah PD yang diikutkan inhouse training oleh tim ANRI sebanyak 30 PD;
- Jumlah PD yang mendapat pendampingan teknis implementasi SIKD sebanyak 1 PD;
- Jumlah PD yang dievaluasi pelaksanaan SIKD sebanyak 1 PD;

- Alih Media Arsip sebanyak 1 Kegiatan;
- Pemusnahan Arsip sebanyak 1 Kegiatan;
- Jumlah Asistensi Pembinaan PD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan sebanyak 52 PD, Bag, Kelurahan;
- Jumlah Asistensi Pembinaan Ormas/Orpol, Perusahaan sebanyak 10 Ormas/Orpol;
- Jumlah PD, Bag, Kelurahan yang mendapat audit dan monitoring kearsipan sebanyak 20 PD, Bag, Kelurahan;
- Pendataan Ormas/Orpol dan Perusahaan sebanyak 10 Ormas/Orpol.

3.1.2. URUSAN PILIHAN

3.1.2.1. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB. Adapun keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.42
Keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target 2020	Realisasi 2019
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,38%	2,29%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2021

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Pariwisata pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pariwisata pada Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi daerah dari sector pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan dalam dan luar negeri;	500.000 Orang	297.710 Orang
2.	Meningkatnya Jumlah Destinasi Objek Wisata	Jumlah Destinasi Objek Wisata	5 Lokasi	6 Lokasi
3.	Meningkatkan PAD	PAD Sektor Pariwisata	Rp. 45,5M	Rp. 51,2M

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2021

Tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini menunjukkan capaian yang sangat baik untuk memenuhi target dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Jambi, dimana hampir semua target yang telah ditentukan atau ditetapkan dapat terpenuhi dan bahkan melebihi target kecuali Indikator Jumlah Wisatawan yang berkunjung.

Indikator Jumlah Wisatawan yang berkunjung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi pada awal tahun 2020 menargetkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun wisatawan luar negeri sebanyak 500.000 orang. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jambi sampai dengan akhir tahun 2020 berjumlah sekitar 297.710 orang. Hal ini mengalami penurunan menjadi 59,54% dari target yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah Hunian/Tamu Hotel ataupun penginapan yang ada di Kota Jambi.

Indikator Jumlah Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menargetkan pertumbuhan tempat atau destinasi wisata di Kota Jambi pada tahun 2020 berjumlah 5 tempat destinasi wisata. Pada akhir tahun 2020 permbangunan dan Pengembangan destinasi wisata telah melebihi sebagaimana yang ditargetkan, adapun tempat destinasi wisata yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun swasta pada tahun 2020 antara lain:

1. Rehab/pengembangan Taman Sepeda sepanjang jalan Sumantri Brojonegoro Sipin Jambi;
2. Pengembangan Destinasi Wisata Taman Remaja Kota Baru Kota Jambi;
3. Pengembangan Destinasi Wisata Tugu Keris signjai dan Taman Jomblo di seputaran kantor Walikota Jambi;
4. Pengembangan Destinasi Taman Kongkow Kota baru kota Jambi;
5. Pengembangan Destinasi Taman Hutan kota Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi;
6. Pembangun dan Pengembangan Taman Air Kota Baru kota Jambi.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 6.898.907.000	Rp. 5.498.498.300	(79,70%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Sudah dihitung pada urusan Kebudayaan</u>		

Urusan Kebudayaan pada tahun 2020 memiliki 1 (satu) program urusan yakni Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Pariwisata.

3.1.2.2. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Adapun capaian program/kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.44
Capaian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Target
Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan			
1	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Perikanan	Produktivitas perikanan budidaya Produktivitas perikanan perairan umum Peningkatan nilai tambah produk perikanan Peningkatan konsumsi ikan	290.000 ekor 0.73 ton/ha 1 % 33,6 Kg/kap/Th
2	Kegiatan Pengembangan Perbenihan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	1.410.000 Ekor

Sumber: DPKP Kota Jambi 2021

Capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya target PAD dari hasil penerimaan retribusi jasa usaha Produksi benih di UPTD PBAT sebesar 103,66 % dari target senilai Rp. 80.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 83.812.000;
2. Terlaksananya penyusunan *Site Plan* UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Terlaksananya *Restocking* benih ikan jelawat sebanyak 22.000 (Dua puluh dua ribu) ekor yang bertempat di Danau Sipin; dan
4. Terlaksananya kegiatan percontohan budidaya gurame pada Pokdakan Pancabakti Kecamatan Pelayangan.

Dalam melaksanakan urusan perikanan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Harga pakan ikan yang cenderung tinggi;
2. Kurangnya inovasi pada tenaga teknis perikanan;
3. Terbatasnya pasokan induk ikan untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas;
4. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah industri maupun limbah rumah tangga akibat tingginya bisnis property;
5. Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada petani pembudidaya ikan, petugas penyuluh perikanan maupun petugas teknis OPD sehingga dengan adanya penambahan ilmu yang didapat petugas dapat melakukan inovasi yang belum pernah diterapkan pada pembudidaya ikan;

2. Melakukan pelatihan gerakan pembuatan pakan ikan secara mandiri guna menekan cost pada usaha budidaya;
3. Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan pada pembudidaya ikan selama 5 tahun;
4. Mengoptimalkan hasil produksi benih ikan unggul di UPT PBAT Simpang rimbo dan Danau Teluk dengan cara meningkatkan kompetensi petugas teknis terlatih dengan menyeimbangkan jumlah petugas teknis untuk di dua UPTD tersebut;
5. Melakukan sosialisasi undang-undang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dengan efektif dan efisien.

Adapun realisasi anggaran urusan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan			
1	Pengembangan Agribisnis Perikanan	249.367.250	246.329.250	98,78
2	Pengembangan Perbenihan Ikan	1.616.010.000	1.578.186.600	97,66

Sumber: DPKP Kota Jambi 2021

3.1.2.3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Ketahanan Pangan.

Urusan pertanian pada Tahun 2020 memiliki satu program urusan yakni program Peningkatan Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, dengan 6 (enam) kegiatan. Adapun capaian program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2020 untuk urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46
Capaian Program/Kegiatan Urusan Pertanian
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Target
Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan			
1	Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luasan Pengenalan dan penggunaan varietas unggul bermutu dan Pengendalian hama terpadu Produktivitas Tanaman Pangan Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan hasil Pertanian	5 Ha Padi 5.1 Ton/Ha 180 Orang
2	Peningkatan Jumlah Bibit Buah Bersertifikat	Menghasilkan bibit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	5 Jenis (Jambu Mayang 1.500 btg, Alpukat 1.000 btg, Lengkek 500 btg, Durian 500 btg, Jeruk 500 btg)
3	Pengembangan Agribisnis Peternakan	- Jumlah Sampel PAH yang diperiksa - Jumlah pemeriksaan hewan yang berpotensi penular rabies - Peningkatan Mutu dan Jumlah Ternak Sapi melalui Kegiatan Inseminasi Buatan - Optimalisasi Pengolahan Produk Hasil Ternak - Optimalisasi Pelaku Usaha Peternakan	- 80 Sampel - 800 ekor - 60 ekor - 5.600 kg - 300 orang
4	Pengembangan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pematangan Hewan Sapi,kerbau dan babi	5.100 ekor
5	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan: 1. Jumlah hewan yang diberi vaksin Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan : a. Hewan Ternak Unggas b. Hewan Ternak Non Unggas c. Hewan Peliharaan	2 % 1. 600 ekor a. 10.000 ekor b. 500 ekor c. 500 ekor
6	Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	a. Peningkatan jumlah kelompok tani yang memanfaatkan irigasi dan sumber air pertanian b. Peningkatan jumlah kelompok tani yang memanfaatkan alsintan dan pupuk c. Jumlah kelompok tani yang naik kelas	20% 35 kelompok 54 Kelompok

Sumber: DPKP Kota Jambi 2021

Capaian yang dilakukan oleh bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengadaan paket percontohan untuk masyarakat dalam bentuk bibit/benih tanaman sayur daun dan buah; tanaman cabe dalam polybag 9000 Polybag, toga 1500 polybag; tanaman terong sebanyak 1500 polybag dan tanaman buah unggulan sebanyak 400 polybag;
2. Tercapainya produktivitas tanaman padi yang melebihi target yang ditetapkan tahun 2020 yaitu dari target 5,2% terealisasi 5,4% dengan menggunakan bantuan dari APBN Provinsi Jambi untuk 500 Ha benih padi.

Untuk capaian bidang Peternakan pada tahun 2020 antara lain adalah pelayanan kesehatan hewan, bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, seksi pengembangan agribisnis dan seksi keswan dan kesmavet adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya sosialisasi program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri);

2. Terlaksananya Inseminasi Buatan dan SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) sebanyak 387 ekor dan kelahiran sebanyak 265 ekor;
3. Terlaksananya pengawasan peredaran mutu pakan ternak di poultryshop dan kelompok tani penyedia pakan yang ada diwilayah Kota Jambi;
4. Pelaksanaan pendataan jumlah stok ketersediaan ternak (Sapi/kerbau, ayam da telur) pada saat men Hari besar Keagamaan;
5. Mengeluarkan rekomendasi usaha peternakan;
6. Melaksanakan kegiatan promosi produk peternakan sebanyak 2 (dua) kali dan dilaksanakan didalam Kota Jambi tepatnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Propinsi yang ke 63, dilaksanakan di Lapangan Gubernur dan dilapagan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi;
7. Terlaksananya pemeriksaan sampel penyakit, pengendalian dan penanggulangan peyakit hewan, serta pengambilan dan pemeriksaan sampel kesmavet dan Pangan Asal Hewan (PAH).

Dalam melaksanakan urusan pertanian terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020, diantaranya:

1. Berkurangnya luasan lahan produktif yang digunakan untuk kegiatan pertanian;
2. Penerapan teknologi baru budidaya tanaman yang belum optimal pada tingkat petani yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan kosisng atau pekarangan rumah;
3. Peran penyuluh yang dirasa belum optimal;
4. Tidak adanya jaminan pegaturan harga produk angan ang wajar dari pemerintah kecuali beras;
5. SDM yang kurang untuk mengevaluasi disemua kegiatan pertanian;

Dari permasalahan diatas, solusi yang dapat diambil sebagai alternative penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi oleh petugas terhadap lahan pertanian yang masih berproduksi, seperti melakukan gerakan pemanfaatan lahan sempit/lahan pekarangan;
2. Melakukan pendampingan atau bimbingan terhadap penggunaan pestisida/herbisida ramah ligkungan;
3. Optimalisasi peran penyuluh pertanian sebagai garis terdepan dalam rangka peningkatan pemahaman pertanian sempit berdaya, memberikan penyuluhan kepada petani dan kelompok tani dalam rangka penerapan teknologi pertanian perkotaan;
4. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis penambahan nilai produk pertanian;
5. Melakukan bimbingan pelatihan kepada ternak tentang budidaya yang benar dan penggunaan tatacara penggunaan yang baik dan ekonomis.

Adapun realisasi anggaran untuk urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Urusan Pertanian
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan			
1	Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	321.290.000	307.135.000	95,59
2	Peningkatan Jumlah Bibit Buah Bersertifikat	154.664.000	151.111.818	97,70
3	Pengembangan Agribisnis Peternakan	268.798.500	263.161.000	97,90
4	Pengembangan Rumah Potong Hewan	132.224.000	132.224.000	100
5	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan	63.500.000	63.300.000	99,69
6	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	117.210.000	97.449.500	83,14

Sumber: DPKP Kota Jambi 2021

3.1.2.4. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan. Adapun keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.48
Keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	52%	116,23%

Sumber: DPP Kota Jambi 2021

Pada tahun 2020 target persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan sebesar 52% dengan realiasi sebesar 116,23%.

Formulasi yang dipergunakan untuk mengukur indikator sasaran ini yaitu:

Jumlah realisasi seluruh indikator sasaran strategis yang mendukung urusan perdagangan pada renstra tahun pelaksanaan (tahun n)

Jumlah seluruh sasaran yang mendukung urusan perdagangan pada renstra tahun pelaksanaan (tahun n)

$$\frac{94,96 \% + 95,45 \% + 72 \% + 254 \% + 81 \% + 100 \%}{6} \times 100 \%$$

$$= 116,23\%$$

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 5.431.556.200	Rp. 4.890.724.888	(90,04%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 7.656.513.465</u>	<u>Rp. 6.915.814.943</u>	(90,32%)
Total Anggaran	Rp.13.088.069.665	Rp.11.806.539.831	(90,20%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Perdagangan pada tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perdagangan pada Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase realisasi retribusi	100%	94,96 %
		Persentase pasar yang bersih dan tertib	55%	95,45 %
		Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan	55%	72 %
		Persentase UTTP yang ditera tera ulang	54%	254 %
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina	57%	81 %
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan	52%	100 %

Sumber: DPP Kota Jambi 2021

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran urusan perdagangan yaitu : “meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan, pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan”, pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator persentase realisasi retribusi

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya sebesar 94,96%, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian $91 \leq$).

2. Indikator persentase pasar yang bersih dan tertib

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 55 % dan realisasinya sebesar 95,45%, dengan capaian kinerja sebesar 173,54%. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian $91 \leq$).

3. Indikator persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 55% dan realisasinya sebesar 72%, dengan capaian kinerja sebesar 131%. Suatu prestasi kerja yang kurang baik dengan realisasi kinerja tidak melampaui ditargetkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian $91 \leq$).

4. Indikator persentase UTTP yang ditera tera ulang

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 54% dan realisasinya sebesar 254%, dengan capaian kinerja sebesar 471%. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian $91 \leq$).

5. Indikator persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 57% dan realisasinya sebesar 81%, dengan capaian kinerja sebesar 143%. Suatu prestasi kerja yang baik dengan realisasi kinerja walaupun tidak melampaui dari yang ditargetkan. maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian $91 \leq$).

6. Indikator persentase sarana dan prasarana perdagangan

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2020, dimana ditargetkan sebesar 52% dan realisasinya sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 193%. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sasaran ini dengan tingkat nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian $91 \leq$).

Apabila dianalisis realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 diperbandingkan dengan capaian tahun 2019 terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, meskipun alokasi anggaran pada kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja sasaran ini sebagian besar dirasionalisasi untuk penanganan Covid19 disamping itu juga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan maksimal sebagai akibat adanya kekuatiran melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat karena pandemic Covid19 belum terkendali target kinerja dapat direalisasikan.

Urusan Perdagangan pada tahun 2020 memiliki satu program urusan yakni program program Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan.

3.1.2.5. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan. Adapun keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.50
Keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase Daya Saing Produk IKM	5,35%	2,8%

Sumber: DPP Kota Jambi 2021

Pada tahun 2020 target persentase daya saing produk IKM ditargetkan sebesar 5,35% dengan realisasi sebesar 2,8%.

Pengukuran realisasi indikator kinerja sasaran yaitu:

Menjumlahkan seluruh realisasi indikator sasaran strategis tahun pelaksanaan (tahun n) yang mendukung urusan perindustrian pada renstra dibagi dengan jumlah sasaran strategis yang mendukung urusan perindustrian tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan 100% dibagikan pertumbuhan IKM tahun pelaksanaan (tahun n)

Atau

Realisasi seluruh indikator sasaran strategis yang mendukung urusan perindustrian pada renstra (tahun n)

$$\frac{\text{Realisasi seluruh indikator sasaran strategis yang mendukung urusan perindustrian pada renstra (tahun n)}}{\text{Jumlah seluruh sasaran yang mendukung urusan perindustrian pada renstra (tahun n)}} \times 100\%$$

Jumlah seluruh sasaran yang mendukung urusan perindustrian pada renstra (tahun n)

Hasil penjumlahan

$$\frac{\text{Hasil penjumlahan}}{\text{Pertumbuhan IKM (tahun n)}} \times 100\%$$

Pertumbuhan IKM (tahun n)

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sasaran ini yaitu:

$$\frac{73\% + 86\%}{2} = 79,5\%$$

Pertumbuhan IKM :

$$\frac{4162 - 3255}{3255} \times 100\% = 27,86\%$$

Realisasi :

$$\frac{79,5\%}{27,86\%} = 2,82\%$$

Capaian kinerja :

$$\frac{2,82}{5,35} \times 100\% = 52,71\%$$

Dengan demikian adapun capaian realisasi kinerja sasaran meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil yang terdapat dalam RPJMD sebesar 52,71%.

Apabila dianalisis realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 terlihat adanya penurunan, hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terganggu akibat pandemic Covid19, sehingga sebagian besar anggaran dirasionalisasikan untuk penanganan Covid19, disamping itu pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal akibat kekuatan penularan Covid19. Dalam penentuan target ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak melakukan perubahan target kinerja pada rencana perubahan tahun 2020 masih tetap pada target tahun perencanaan awal, yang sudah pasti mempengaruhi realisasi dan capaian kinerja akibat Covid19.

Urusan Perindustrian pada tahun 2020 memiliki satu program urusan yakni Program Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil dan Menengah. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perindustrian pada tahun 2020 yaitu:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 1.696.249.500	Rp. 1.671.530.089	(98,54%)
Belanja Tidak Langsung	sudah dihitung pada BTL urusan perdagangan		

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Perindustrian pada tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.51
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perindustrian pada Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah	Persentase IKM yang dibina	55 %	73 %
		Persentase IKM yang bermitra	54 %	86 %

Sumber: DPP Kota Jambi 2021

Sasaran urusan Perindustrian yaitu: “meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah”, pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase IKM yang dibina

Menjumlahkan realisasi kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro, dan hasil hutan ditambah realisasi kinerja kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan dibagi dengan jumlah kegiatan yang mendukung sasaran tahun pelaksanaan (tahun n)

atau

Realisasi capaian kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro, dan hasil hutan + realisasi capaian kinerja kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan

Jumlah kegiatan yang mendukung sasaran (tahun n)

$$\frac{50 \% + 95 \%}{2} = 73 \%$$

Apabila dianalisis kinerja indikator sasaran ini pada tahun 2020 diperbandingkan dengan capaian tahun 2019 terlihat tidak adanya peningkatan bahkan cenderung menurun, hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pada ketercapaian sasaran ini sebagian besar anggarannya dirasionalisasi untuk penanganan Covid19, disamping itu juga dalam melaksanakan kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena masih diselimuti rasa kekuatiran akan akibat Covid19.

2. Persentase IKM yang bermitra

Menjumlahkan realisasi kinerja kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasas IKM ditambah realisasi kinerja kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta ditambah realisasi kinerja kegiatan promosi/pameran produk Jambi tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan jumlah kegiatan yang mendukung sasaran ini

atau

Realisasi kinerja kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasas IKM + realisasi kinerja kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta + realisasi kinerja kegiatan promosi/pameran produk Jambi (tahun n)

Jumlah kegiatan yang mendukung sasaran (tahun n)

$$\frac{174 \% + 34 \% + 50 \%}{3} = 86 \%$$

Apabila dianalisis capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 terlihat adanya penurunan, hal ini disebabkan capaian pada kinerja kegiatan terganggu akibat pandemi Covid19 dimana akibatnya dilakukan rasionalisasi anggaran serta pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

3.1.3 URUSAN PENUNJANG

3.1.3.1. Inspektorat

Dalam rangka menuju *good governance*, ada tuntutan Reformasi Birokrasi yang telah mendorong adanya konsekuensi logis, perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional, termasuk didalamnya jajaran Inspektorat Kota Jambi. Inspektorat Kota Jambi sebagai instansi yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Inspektorat mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan

Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan Inspektorat dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.52
Keterkaitan Inspektorat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	Belum ada pemberitahuan dari KemenPANRB RI
				Indeks survey persepsi Korupsi	3,69	Belum dipublikasikan oleh Kemenpan RB

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2021

Untuk realisasi Indikator Sasaran Nilai SAKIP dan Indeks Survey Persepsi Korupsi Tahun 2020, sampai saat ini Inspektorat Kota Jambi belum menerima informasi dari KemenPANRB RI.

Total alokasi anggaran untuk Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 4.173.856.000	Rp. 3.756.768.575	(90,00%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 6.874.184.645</u>	<u>Rp. 6.440.876.677</u>	(93,69%)
Total Anggaran	Rp 11.048.040.645	Rp. 10.197.645.252	(92,30%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.53
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan	80	89,53
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6	N/A
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3,25	N/A
		Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	1	N/A
		Level Kapabilitas APIP	Level III	Level III

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2021

Dari 5 indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi, baru 2 indikator yang ada realisasinya. Untuk melihat cara pengukuran dari masing-masing indikator kinerja di atas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran
dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Inspektorat Kota Jambi Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	Alasan	Formulasi/cara pengukuran	Keterangan/kriteria	Permasalahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	%	Peraturan BPK RI NO 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	Tingkat penyelesaian tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Temuan yang sudah lama susah ditelusuri; • Temuan kepada Pihak ketiga yang susah ditagih • Kurangnya kesadaran pihak ketiga
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen evaluasi internal)	Indeks	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penilaian Kemenpan RB	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Masih kurangnya pemahaman mengenai SAKIP pada PD
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Angka	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	Laporan Hasil penilaian dari BPKP RI	Masih kurangnya pemahaman penerapan SPIP
		Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK	Jumlah	Permenpan	Hasil Penilaian Kemenpan RB	Laporan Hasil penilaian dari Kemenpan RB	Adanya penambahan indikator yang tidak dibagikan oleh tim Kemenpan RB
		Level Kapabilitas APIP	Angka	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	Laporan Hasil penilaian dari BPKP RI	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2021

Pada tahun 2020, Inspektorat Kota Jambi melaksanakan 4 (empat) program yaitu 3 (tiga) program rutin dan 1 (satu) program urusan, yakni program peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan 21 kegiatan.

3.1.3.2. Perencanaan

Perencanaan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Bappeda mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran

RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun indikator sasaran RPJMD urusan ini adalah Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2020 adalah nilai BB, sampai saat ini Kota Jambi masih menunggu hasil penilaian yang dilakukan oleh KemenPANRB RI untuk realisasinya. Adapun keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.55
Keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	Menunggu Hasil Penilaian dari KemenPANRB RI

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2021

Total anggaran yang dialokasikan untuk Bappeda Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 5.128.520.000	Rp. 4.663.293.516	(90,92%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 4.151.220.751</u>	<u>Rp. 3.935.544.352</u>	(94,80%)
Total Anggaran	Rp 9.279.740.751	Rp. 8.598.837.868	(92,66%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.56
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi pada tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,01	Menunggu hasil penilaian dari Kemenpan
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,90	Menunggu hasil penilaian dari Kemenpan
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	99,78%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2021

Untuk realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Kota komponen perencanaan kinerja dan komponen pengukuran kinerja masih menunggu penilain dari KemenPANRB RI, sedangkan persentase realisasi capaian indikator sasaran RPJMD dan persentase hasil

kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dengan realisasi 100% dari target 100%.

Pada tahun 2020, Bappeda Kota Jambi melaksanakan 2 (dua) program urusan, yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta Program Penelitian dan Pengembangan.

Adapun beberapa hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dengan keluaran berupa pelaksanaan Forum Lintas OPD, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan penyusunan 6 dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Rancangan RKPD-Perubahan 2020, Penetapan RKPD-Perubahan 2020, Rancangan Awal RKPD 2021, Rancangan RKPD 2021, Rancangan Akhir RKPD 2021 dan Penetapan RKPD 2021.
2. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi dengan keluaran berupa rapat koordinasi terkait pengendalian dan evaluasi, koordinasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan RKPD Kota Jambi Tahun 2021, koordinasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Koordinasi dan monitoring pelaksanaan sistem e-SAKIP Kota Jambi, pengelolaan sistem KRISNA DAK Kota Jambi dan penyusunan 3 laporan terdiri dari LKPJ Walikota Jambi Tahun Anggaran 2019, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Jambi Tahun 2020 dan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Jambi Tahun 2020.
3. Melakukan koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan keluaran berupa Asistensi dengan OPD yang merupakan mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Rapat Koordinasi KOTA SEHAT 2020 yang dihadiri perwakilan dari seluruh Pokja Kota Sehat di kelurahan serta Kasi PMK di setiap kelurahan, rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta penyusunan 1 laporan yaitu laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Jambi.
4. Melakukan koordinasi dan supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dengan keluaran berupa koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi Jambi dalam hal penanganan infrastruktur dan pengembangan wilayah serta lingkungan hidup baik penanganan jalan, banjir, permukiman kumuh dan sanitasi, penyediaan perumahan serta pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan pangan serta Penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan Infrastruktur, selain itu juga melakukan koordinasi dan supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

5. Melaksanakan penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya dengan keluaran berupa koordinasi Tim Penelitian dan Pengembangan dan 2 kajian yaitu Kajian penyusunan E-gov 2020 Kota Jambi dan Kajian review penyusunan RISPAM Kota Jambi.
6. Melakukan pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan keluaran berupa rapat koordinasi tentang inovasi daerah, ikut serta dalam lomba Inovasi yang diadakan Kementerian/Lembaga serta terlaksananya evaluasi Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

3.1.3.3. Keuangan

Keuangan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 BPKAD mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Sedangkan BPPRD mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.57
Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB RI
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	-9,64%

Sumber: BPKAD dan BPPRD Kota Jambi 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, BPKAD mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK, dan indikator sasaran pada

Tahun 2020 yaitu Nilai SAKIP dengan target “BB” dan realisasi data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB RI.

Total anggaran yang dialokasikan untuk BPKAD Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp.14.398.049.692	Rp. 9.609.013.012	(66,73%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 4.571.476.010</u>	<u>Rp. 4.309.430.842</u>	(94,26%)
Total Anggaran	Rp.18.969.525.702	Rp.13.918.443.854	(73,37%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BPKAD Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Jambi pada tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu - APBD (paling lambat 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya) - APBDP (Paling lambat 3 Bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir	Tepat Waktu - APBD PERDA No. 10 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 - APBDP Perda No.9 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP	Menunggu hasil audit oleh BPK

Sumber: BPKAD Kota Jambi 2021

Pada tahun 2020, BPKAD Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan pelaporan, pengendalian dan penyuluhan, ketatausahaan/kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, BPPRD Kota Jambi mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator sasaran Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2020 mencapai Rp.355.505.051.145,93 atau 96,19% dari target penerimaan sebesar Rp.369.594.193.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 22,8% terhadap total

Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2019, yakni sebesar Rp.393.429.795.383,99, maka PAD Tahun 2020 menurun -9,64% atau turun sebesar Rp.37.924.744.238,06. Penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 dikarenakan aktivitas ekonomi yang melambat akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan di beberapa sektor pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak reklame.

Total alokasi anggaran BPPRD Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 5.425.592.000	Rp. 4.643.768.864	(85,59%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp.17.072.123.601</u>	<u>Rp.15.052.882.252</u>	(88,17%)
Total Anggaran	Rp.22.497.715.601	Rp.19.696.651.116	(87,54%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.59
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh BPPRD	Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD	100%	93,2%

Sumber: BPPRD Kota Jambi 2021

Indikator kinerja sasaran strategis BPPRD Kota Jambi, yaitu persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD, dimana pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BPPRD Kota Jambi pada Tahun 2020:

- Dari sektor pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 232.060.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 216.362.924.311 atau 93,50%;
- Dari sektor retribusi daerah (retribusi jasa usaha pemakaian billboard) yang dikelola oleh BPPRD ditargetkan sebesar Rp 23.100.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.600.000,00 atau 28,57%;

Dengan demikian, secara keseluruhan target pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD pada Tahun 2020 sebesar Rp. 232.083.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 216.369.524.311 atau 93,2%.

Pada tahun 2020, BPPRD Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan, yakni program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu:

1. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

- a. Persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan uang pajak;
 - b. Belum memiliki SDM berkualitas yang memahami masalah perpajakan;
 - c. Penegakan hukum (Low Infocement) yang lemah;
 - d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyajian data dan informasi;
 - e. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih rendah;
 - f. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak belum jelas;
 - g. Sistem administrasi penerimaan yang kurang optimal.
2. Hambatan dalam piutang:
- a. Piutang Pajak Daerah
 - Wajib Pajak mengalami pailit/kebangkrutan;
 - Wajib Pajak pindah tanpa pemberitahuan;
 - Wajib Pajak tutup usaha tanpa adanya laporan;
 - Belum adanya kebijakan dalam penghapusan piutang pajak.
 - b. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 - Data Tunggakan;
 - Wajib Pajak tidak diketahui (No Name);
 - Terdapatnya SPPT PBB ganda (double) dan Batal;
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

3.1.3.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.60
Keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Profesionalitas ASN	57,5	66,70

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi 2021

Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 57,5 dan terealisasi melebihi target, yakni sebesar sebesar 66,70. Perhitungan Nilai Indeks

Profesionalitas ASN didapatkan berdasarkan formulasi jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Masing-masing dimensi dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran;
- b. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran;
- c. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran;
- d. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Total anggaran yang dialokasikan untuk BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 6.283.964.000	Rp. 4.431.977.599	(70,53%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 12.178.192.681</u>	<u>Rp. 4.913.267.173</u>	<u>(40,34%)</u>
Total Anggaran	Rp. 18.462.156.681	Rp. 9.345.244.772	(50,62%)

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.61
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPSDMD Kota Jambi pada Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatnya kualitas penataan ASN	Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan	96	97,73
2	Terciptanya pelayanan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	89	93,07
3	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi ASN	Persentase Pendidikan Formal terakhir yang telah dicapai	12,46	13,15
		Persentase Pengembangan Kompetensi	21,24	23,65
5	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mendapatkan Nilai Baik	18,83	24,94
		Persentase Penurunan Hukuman Disiplin	4,97	4,98

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang ditempatkan dalam jabatan dengan target 96% pada tahun 2020 memperoleh realisasi 97,73%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus formulasi Jumlah ASN yang

ditempatkan dalam jabatan dibagi jumlah jabatan di lingkungan Pemkot Jambi dikali 100%;

2. Indikator kinerja persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu dengan target 89% pada tahun 2020 mencapai realisasi 93,07%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus jumlah administrasi pelayanan yg diproses dan diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan administrasi yang masuk dikali 100%;
3. Indikator Persentase Pendidikan Formal terakhir yang telah dicapai dengan target 12,46, mencapai realisasi tahun 2020 sebesar 13,15. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Rata-rata Jumlah Bobot Pendidikan Terakhir yang dicapai;
4. Indikator Persentase Pengembangan Kompetensi dengan target 21,24 mencapai realisasi sebesar 23,65. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus rata-rata Jumlah Bobot ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi;
5. Indikator Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan target sebesar 18,83 mencapai realisasi sebesar 24,94, dengan capaian kinerja 132,45%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Rata-rata Jumlah Bobot Prestasi Kinerja ASN;
6. Indikator Persentase Penurunan Hukuman Disiplin, dengan target sebesar 4,97 mencapai realisasi sebesar 4,98. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Rata-rata Jumlah Bobot ASN yang di jatuhi Hukuman Disiplin;

BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 2020 memiliki 1 (satu) program urusan yakni program Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

3.1.4. URUSAN PENDUKUNG

3.1.4.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melakukan urusan Pendukung. Sekretariat Daerah Kota Jambi terdiri dari 11 bagian merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Sekretariat Daerah mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.62
Keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB RI

Sumber: Setda Kota Jambi 2021

Total anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat Daerah Kota Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 49.105.174.325	Rp. 41.746.788.636	(85,01%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 14.184.845.575</u>	<u>Rp. 13.683.616.840</u>	(96,46%)
Total Anggaran	Rp. 63.290.019.900	Rp. 55.430.405.476	(87,58%)

Dalam hal pendapatan Sekretariat Daerah juga mengelola PAD dari Gedung Putro Retno dan Kantin Hijau dengan target Rp. 92.400.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 22.600.000,- atau 24,46%.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.63
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Setda Kota Jambi pada Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang pemerintahan, humas, hukum dan kerjasama	Preastasi EKPPD	Sangat tinggi	Data belum dikeluarkan oleh Kemendagri
	Persentase perjanjian kerjasama yang diimplementasikan	90%	90%
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ekonomi, administrasi pembangunan dan kesra	Komponen standar UKPBJ	6,00%	40,50%
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah bidang administrasi umum, kelembagaan dan pelayanan publik	Rata-rata IKM	B	C

Sumber: Setda Kota Jambi 2021

Pada capaian Indikator sasaran rata-rata IKM yang terealisasi dengan nilai C dari target B dengan capaian 97,00% (persen) dengan rumus rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat. Kelembagaan dan pelayanan publik mengalami penurunan dari target pada tahun 2020 adalah B dan terealisasi C. Hal ini dikarenakan permasalahan pertama lokasi penilaian berbeda, kedua unit kerja yang disurvei pada tahun 2019 belum sama sekali disurvei sehingga belum ada rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan pada tahun 2020

dan juga belum efektifnya penerapan standar pelayanan dan operasional prosedur pada beberapa Perangkat Daerah, solusi yang akan dilaksanakan adalah perbaikan pelayanan pada tahun 2021 sesuai dengan data survei pelayanan pada tahun 2020.

3.1.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang melakukan urusan Pendukung. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Sekretariat DPRD mengacu pada Misi 1, yakni Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.64
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Tertib Administrasi Sekretariat DPRD	Persentase pelaksanaan agenda kegiatan DPRD sesuai SOP dan tepat waktu	100 %	85,86 %

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi 2021

Tidak tercapainya realisasi dari indikator kinerja persentase pelaksanaan agenda kegiatan DPRD sesuai SOP dan tepat waktu sebesar 85,86% dikarenakan belum tersusunnya SOP yang ditargetkan sebanyak 400 SOP.

Pada tahun 2020, Sekretariat DPRD Kota Jambi melaksanakan 1 (satu) program urusan yaitu program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Pelayanan Kedinasan DPRD. Adapun alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2020:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Langsung	Rp. 44.769.249.000	Rp. 36.708.477.146	(81,99%)
Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. 29.942.661.864</u>	<u>Rp. 27.540.651.635</u>	(91,97%)
Total Anggaran	Rp. 74.711.910.864	Rp. 64.249.128.781	(85,99%)

3.1.5. URUSAN KEWILAYAHAN

3.1.5.1. Kecamatan

Urusan Kewilayahan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Kecamatan dalam Kota Jambi. Berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014, Kecamatan dalam Kota Jambi mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Jambi Timur Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah.

Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada 2 (dua) misi. Pertama, Misi 1 yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Kedua, Misi 5 yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan. Adapun keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.65
Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Sumber: Kecamatan dalam Kota Jambi 2021

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2020

NO	Kecamatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
1	Kota Baru	Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89%	98%
		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	75%	90%
2	Telanaipura	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	89%	89,21%
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	50%	56,57%
3	Jelutung	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74%	74%
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Presentase Realisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	75%	100%
4	Pasar	Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89%	84,10%
		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	60%	66,07%
5	Jambi Selatan	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	86%	86,06%
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	61,43%	75,08%
6	Jambi Timur	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	86%	90,37%
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	61,43%	85,73%
7	Danau Teluk	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88%	89%

NO	Kecamatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	65%	66%
8	Pelayangan	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	86%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	82%	80%
9	Alam Barajo	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	95,72%
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60%	63,92%
10	Danau Sipin	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85,02%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	72,72%	81,82%
11	Paalmerah	Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89%	92%
		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	75%	72%

Sumber: Kecamatan dalam Kota Jambi 2021

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.67
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2020

Kecamatan	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Kota Baru	5.345.434.251	4.813.870.741	90,05	7.534.766.966	6.822.530.286	90,54
Telanaipura	5.216.836.203	5.109.153.622	97,93	7.530.462.780	6.838.265.492	90,80
Jelutung	6.146.112.699	5.867.180.840	95,46	9.095.485.251	8.917.668.185	98,04
Pasar Jambi	3.354.498.674	3.132.283.725	93,38	5.187.927.525	4.685.949.957	90,32
Jambi Selatan	5.203.010.247	4.954.410.241	95,22	6.886.168.500	6.695.464.737	97,23
Jambi Timur	6.913.548.860	6.697.230.211	96,87	10.057.513.778	9.605.569.079	95,51
Danau Teluk	4.488.977.113	4.049.179.960	90,20	5.886.529.209	5.229.995.478	88,85
Pelayangan	5.568.236.160	5.377.882.667	96,58	6.193.277.749	4.798.240.928	77,47
Alam Barajo	6.166.744.016	5.717.547.510	92,72	8.214.640.650	7.951.574.735	96,80
Danau Sipin	4.774.974.928	4.649.880.899	97,38	7.241.608.258	6.728.690.000	92,92
Paalmerah	4.719.970.141	4.502.573.044	95,39	8.355.024.392	7.509.080.175	89,88

Sumber: Kecamatan dalam Kota Jambi 2021

Adapun tabel capaian kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2020 berdasarkan masing-masing urusan yang telah dibahas diatas, secara keseluruhan disajikan pada Lampiran III Buku LKPJ ini.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis yang dimaksud dalam Subbab ini adalah kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang diambil Kepala Daerah selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.68
Kebijakan Strategis yang Diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perusahaan Perseorangan Daerah Siginjai Sakti	Perda Nomor 1 Tahun 2020	Pembentukan BUMD
2	Penanggulangan Kemiskinan	Perda Nomor 2 Tahun 2020	Penanggulangan Kemiskinan
3	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi	Perda Nomor 3 Tahun 2020	Perumda Tirta Mayang
4	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perda Nomor 4 Tahun 2020	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Pengelolaan Sampah	Perda Nomor 5 Tahun 2020	Peningkatan pengurangan sampah (pengolahan sampah berbasis masyarakat), peningkatan penanganan sampah.
6	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Perda Nomor 6 Tahun 2020	Retribusi Jasa Umum
7	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Perda Nomor 7 Tahun 2020	Retribusi Jasa Usaha
8	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Usia Pada Pusat Kesehatan Masyarakat	Perwal Nomor 4 Tahun 2020	Pelayanan Kesehatan Lanjutan Usia
9	Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara intensif Dan Terpadu Yang Berazaskan Swadaya	Perwal Nomor 5 Tahun 2020	Pembangunan Kelurahan
10	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Ke Kelurahan Di Kota Jambi	Perwal Nomor 6 Tahun 2020	Pembangunan Kelurahan
11	Kota Layak Anak	Perwal Nomor 9 Tahun 2020	Perlindungan anak
12	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan	Perwal Nomor 11 Tahun 2020	Pencegahan korupsi
13	perubahan atas peraturan waliKota Jambi nomor 6 tahun 2020 tentang penunjukan teknis pengguna dana bantuan keuangan pemerintah provinsi jambi ke kelurahan di Kota Jambi	Perwal Nomor 14 Tahun 2020	Pembangunan Kelurahan
14	Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kota Jambi Tahun Anggaran 2020/2021	Perwal Nomor 19 Tahun 2020	Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru
15	Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi	Perwal Nomor 21 Tahun 2020	Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
16	Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kota Jambi Tahun Anggaran 2020	Perwal Nomor 22 Tahun 2020	Pembangunan Kelurahan
17	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Puskesmas Di Kota Jambi 2019-2023	Perwal Nomor 23 Tahun 2020	Pelayanan Puskesmas

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
18	Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Perwal Nomor 24 Tahun 2020	Pembangunan Kelurahan
19	Inovasi Daerah	Perwal Nomor 25 Tahun 2020	Pembangunan daerah
20	Pedoman Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Di Kota Jambi	Perwal Nomor 27 Tahun 2020	Pelayanan masyarakat
21	Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Kegiatan Non Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi	Perwal Nomor 31 Tahun 2020	Pelayanan masyarakat
22	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021	Perwal Nomor 35 Tahun 2020	Pembangunan daerah
23	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan padat karya tunai kali bersih	Perwal Nomor 37 Tahun 2020	Pembangunan daerah
24	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Perwal Nomor 39 Tahun 2020	Edukasi masyarakat
25	Perubahan kedua tas peraturan walikota nomor 8 tahun 2017 tentang tarif pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kegiatan non pelayanan pada badan layanan umum daerah puskesmas Kota Jambi	Perwal Nomor 43 Tahun 2020	Pelayanan Puskesmas
26	Perubahan Atas Peraturan WaliKota Jambi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020	Perwal Nomor 45 Tahun 2020	Pembangunan daerah
27	Penyelenggaraan perlindungan perempuan	Perwal Nomor 48 Tahun 2020	Perlindungan perempuan
28	Konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kota Jambi	Perwal Nomor 49 Tahun 2020	Konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting
29	Perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme di Kota Jambi	Perwal Nomor 51 Tahun 2020	Perlindungan anak
30	Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah laboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatan Kota Jambi	Perwal Nomor 62 Tahun 2020	Pelayanan masyarakat
31	Pendidikan anak usia dini Kota Jambi	Perwal Nomor 72 Tahun 2020	Pendidikan anak usia dini
32	Standar pelayanan minimal RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi	Perwal Nomor 76 Tahun 2020	Pelayanan masyarakat
33	Kelompok Informasi Masyarakat	Perwal Nomor 77 Tahun 2020	Pelayanan masyarakat
34	Pembentukan tim monitoring pengendalian dan pengawasan distribusi liquified petroleum gas tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi di Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 52 Tahun 2020	Pengawasan LPG
35	Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa (Kartu Jambi Cerdas) Bagi Siswa Kurang Mampu Di Kota Jambi Tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 53 Tahun 2020	Bantuan siswa kurang mampu
36	Pembentukan AD HOC esekusi penanganan tanah kosong putra retno I dan tanah kosong putra retno II milik pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 58 Tahun 2020	Pengamanan Aaset
37	Pembentukan tim terpadu penataan pedagang pasar daerah Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 63 Tahun 2020	Penataan pedagang
38	Pembentukan tim pembina Kota Jambi sehat	SK WaliKota Jambi Nomor 64 Tahun 2020	Kota Jambi sehat
39	Penunjukan penceramah pengajian di rumah dinas walikota dan rumah dinas wakil waliKota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 66 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
40	Penunjukan guru pondok pesantren dan diniyah takmilyah awaliyah Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 67 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
41	Penunjukan petugas syara' Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 68 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
42	Penunjukan tenaga pengajar pengajian keagamaan Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 69 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
43	Pembentukan pengelola sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 71 Tahun 2020	Pelayanan masyarakat
44	Penetapan tatanan dan kawasan Kota Jambi sehat	SK WaliKota Jambi Nomor 72 Tahun 2020	Kota Jambi sehat
45	Gugus tugas kota layak anak	SK WaliKota Jambi Nomor 74 Tahun 2020	Perlindungan anak
46	Pembentukan kelompok kerja kampung keluarga berencana Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 77 Tahun 2020	Kampung KB
47	Penetapan penerima kartu pelanggan LPG 3 kilogram bersubsidi bagi rumah tangga dan UMKM di kecamatan telanaipura	SK WaliKota Jambi Nomor 78 Tahun 2020	Pengawasan LPG
48	Pembentukan tim penilai kampung bersih aman dan pintar kelurahan se-Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 79 Tahun 2020	Kampung BANTAR
49	Pembentukan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 81 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
50	Pembentukan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan pemerintah daerah kota jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 82 Tahun 2020	organisasi kemasyarakatan
51	Pembentukan tim verifikasi serah terima prasarana,sarana dan utilitas perumahan di Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 87 Tahun 2020	PSU
52	Pembentukan sekretariat tim verifikasi serah terima prasarana,sarana dan utilitas perumahan di Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 88 Tahun 2020	PSU
53	Pembentukan kepengurusan pos pelayanan teknologi tepat guna kecamatan danau teluk Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 89 Tahun 2020	Pelayanan kecamatan
54	Pembentukan sekretariat tim pembina usaha kesehatan sekolah Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 89 Tahun 2020	UKS
55	Pembentukan tim pembina usaha kesehatan sekolah Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 91 Tahun 2020	UKS
56	Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 100 Tahun 2020	Penanganan konflik
57	Pembentukan komisi daerah lanjut usia Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 101 Tahun 2020	Perlindungan lanjut usia
58	Pembentukan panitia koordinasi pelaksanaan kegiatan swarna bumi culture and art Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 103 Tahun 2020	Pelestarian Adat Budaya
59	Pembentukan forum pengembangan ekonomi daerah Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 106 Tahun 2020	pengembangan ekonomi daerah
60	Pembentukan tim teknis pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 108 Tahun 2020	pelayanan perizinan
61	Penunjukan pengawas, dewan hakim dan panitera festival anak shaleh indonesia ke XIX tingkat Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 109 Tahun 2020	Pendidikan keagamaan
62	Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 113 Tahun 2020	Pengarusutamaan Gender
63	Pembentukan tim pencegahan dan penanggulangan narkoba, psicotropika dan zat adiktif lainnya tingkat Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 119 Tahun 2020	Pencegahan narkoba
64	Pembentukan panitia launching gedung graha lanjut usia Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 120 Tahun 2020	Perlindungan lanjut usia
65	Pembentukan tim persiapan pemekaran kelurahan dan penyesuaian kecamatan di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 122 Tahun 2020	pemekaran kelurahan
66	Penunjukan juri lomba kelurahan berprestasi tingkat Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 124 Tahun 2020	kelurahan berprestasi
67	Pemberian uang pembinaan kepada pemenang I, II, III dan pendamping kafilah Kota Jambi pada festival anak shaleh indonesia ke-17 tingkat provinsi jambi tahun 2019	SK WaliKota Jambi Nomor 128 Tahun 2020	Pendidikan keagamaan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
68	Pemberian uang pembinaan kepada pemenang I, II, III dan pendampingan dan anggota kafilah Kota Jambi pada musabaqah tilawatil quran ke-49 tingkat provinsi jambi di kabupaten bungo	SK WaliKota Jambi Nomor 129 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
69	Pembentukan panitia pelaksanaan gelar adat melayu tanah pilih pusako betuah Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 130 Tahun 2020	Pelestarian Adat Budaya
70	Penetapan besaran jenis bantuan dan kriteria korban kebakaran dan bencana lainnya di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 137 Tahun 2020	Penanggulangan bencana
71	Pembentukan Forum Kota Jambi Sehat Tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 138 Tahun 2020	Kota Jambi sehat
72	Penetapan susunan pengurus masjid raya magatsari Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 139 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
73	Pembentukan panitia seleksi calon pimpinan badan amil zakat nasional Kota Jambi periode 2020-2025	SK WaliKota Jambi Nomor 140 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
74	Pembentukan satuan tugas kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan covid-19 (corona virus disease 2019) Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 147 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
75	Pembentukan tim pencari dan pemberi gelar adat melayu tanah pilih pusako batuah Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 152 Tahun 2020	Pelestarian Adat Budaya
76	Pembentukan Tim Pengelola Balai Adat Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 154 Tahun 2020	Pelestarian Adat Budaya
77	Penetapan sekolah menengah pertama penerima rehabilitasi dan pembangunan prasarana belajar serta pengadaan sarana belajar dana alokasi khusus bidang pembinaan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 156 Tahun 2020	Prasarana pendidikan
78	Pembentukan tim teknis pelaksana tanggungjawab sosial perusahaan kotra jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 158 Tahun 2020	CSR
79	Penetapan status tanggap darurat corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 161.A Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
80	Penetapan pengguna APBD sebagai prioritas untuk antisipasi dampak penularan covid-19 di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 162 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
81	Penetapan pengguna APBD sebagai prioritas untuk penanganan dampak penularan covid-19 di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 163 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
82	Penggunaan APBD sebagai dana kegiatan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 163 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
83	Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Antisipasi, Penanganan Dan Dana Kegiatan Dampak Penularan Covid - 19 Di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 166 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
84	Penetapan Sekolah Dasar Penerima Rehabilitasi Dan Pembangunan Prasarana Belajar Serta Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Jambi Tahun Anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 167 Tahun 2020	Prasarana pendidikan
85	Penetapan besaran pajak bumi dan bangunan perkotaan Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 169 Tahun 2020	PBB
86	Penetapan Penerima Rehabilitasi Prasarana Belajar Serta Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar Kota Jambi Tahun Anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 171 Tahun 2020	Prasarana pendidikan
87	Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease (covid-19) di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 172 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
88	Operasi pembatasan masuk ke wilayah Kota Jambi dalam rangka antisipasi dan penanggulangan terhadap penyebaran covid-19	SK WaliKota Jambi Nomor 173 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
89	Penunjukan pengurus lembaga pengembangan tilawatil qur'an Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 175 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
90	Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan terhadap penularan covid-19 (corona virus disease 2019) dinas kesehatan Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 177 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
91	Pembentukan Tim Manajemen BOP PAUD Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kota Jambi Tahun Anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 179 Tahun 2020	PAUD
92	Pembentukan Panitia Kota Jambi Peduli COVID-19 Tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 180 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
93	Kegiatan pemberian bantuan sembako dan santunan jaringan pengaman sosial (JPS) untuk rumah tangga miskin dan rumah tangga terdampak corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 180.A Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
94	Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 182 Tahun 2020	Bansos pangan
95	Penetapan Pemenang Lomba Kelompok Kegiatan Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tingkat Kota Jambi Tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 183 Tahun 2020	Peningkatan kesejahteraan KB
96	Penetapan penempatan karantina tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan antisipasi terhadap penularan infeksi corona virus disease (covid-19)	SK WaliKota Jambi Nomor 187 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
97	Penetapan Pembebasan Kewajiban Sebagai Wajib Pajak Dengan Waktu Tertentu Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan Dan Pajak Air Tanah Di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 190 Tahun 2020	Stimulus ekonomi
98	Penetapan perpanjangan jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan bagi wajib pajak di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 193 Tahun 2020	Stimulus ekonomi
99	Penggunaan dana belanja tidak terduga untuk antisipasi, penanganan dan dana kegiatan dampak penularan covid-19 tahap II di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 194 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
100	Mekanisme perekrutan relawan tenaga kesehatan non kesehatan untuk penanganan corona virus disaese (covid-19) di rumah sakit umum daerah haji abdul manap Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 195 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
101	Penetapan relawan tenaga kesehatan untuk penanganan corona virus disaese (covid-19) di rumah sakit umum daerah haji abdul manap Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 196 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
102	Penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi covid-19 pemerintah Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 196 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
103	Penetapan status tanggap darurat siaga bencana banjir akibat meluapnya air sungai batanghari dan tingginya curah hujan di Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 200 Tahun 2020	Tanggap bencana
104	Penetapan penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional daerah Kota Jambi/program jambi bugar	SK WaliKota Jambi Nomor 202 Tahun 2020	Jambi BUGAR
105	Penetapan graha lansia pusako batuah Kota Jambi sebagai penempatan karantina dalam upaya pencegahan dan antisipasi terhadap penularan infeksi corona virus disease (covid-19)	SK WaliKota Jambi Nomor 205.A Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
106	Penggunaan dana belanja tidak terduga untuk bantuan korban bencana di 17 (tujuh belas) kelurahan dan di 9 (sembilan) kecamatan dalam Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 206 Tahun 2020	Bantuan korban bencana
107	Pembentukan tim teknis unit karantina graha lansia pusako batuah dalam penanganan corona virus disaese (covid-19) Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 206.A Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
108	Penetapan penerima kartu pelanggan LPG 3 kilogram bersubsidi bagi rumah tangga dan UMKM di Kecamatan jambi timur	SK WaliKota Jambi Nomor 207 Tahun 2020	Pengawasan LPG
109	Penetapan penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk rumah tangga miskin dan rumah tangga terdampak corona virus disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi jambi untuk Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 209 Tahun 2020	Stimulus ekonomi
110	Penetapan perpanjangan status tanggap darurat corona virus desease 2019 (COVID 19) di Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 209.A Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
111	Pembentukan tim pelaksana pemberlakuan relaksasi di area publik, lingkungan usaha dan sosial kemasyarakatan pada masa pendemi	SK WaliKota Jambi Nomor 211 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
112	Pembentukan tim kreatif lomba inovasi daerah Covid-19 di lingkungan pemerintah Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 213 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
113	Penetapan pemberlakuan pengurangan pajak hotel, pajak hiburan, dan pembebasan pajak air tanah di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 214 Tahun 2020	Stimulus ekonomi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
114	Penetapan pusat kegiatan belajar masyarakat penerima hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A paket B dan Paket C dana alokasu khusus non fisik tahap pertama tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 215 Tahun 2020	Penyelenggaraan pendidikan
115	Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 227 Tahun 2020	Pengurangan emisi
116	Pembentukan tim koordinasi penurunan beban pencemaran air Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 228 Tahun 2020	Pengelolaan lingkungan hidup
117	Penetapan penerima kartu pelanggan LPG 3 kilogram bersubsidi bagi rumah tangga dan UMKM di kecamatan danau sipin	SK WaliKota Jambi Nomor 228 Tahun 2020	Pengawasan LPG
118	Perubahan atas keputusan waliota Jambi nomor 202 tahun 2020 tentang penetapan penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional daerah Kota Jambi/program jambi bugar	SK WaliKota Jambi Nomor 237 Tahun 2020	Jambi BUGAR
119	Penunjukan pimpinan badan amil zakat nasional Kota Jambi periode 2015-2020	SK WaliKota Jambi Nomor 244 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
120	Penetapan pelaksanaan relaksasi dibidang pendidikan pada tahun pelajaran 2020/2021	SK WaliKota Jambi Nomor 245 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
121	Perubahan atas keputusan waliKota Jambi nomor 209 tahun 2020 tentang penetapan penerima bantuan jaringan pengamanan sosial corona virus diease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi jambi untuk pemerintah Kota Jambi tahun anggarn 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 246 Tahun 2020	Stimulus ekonomi
122	Pemberian hibah barang daerah yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan gizi untk lansia non potensial untuk kegiatan pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia di Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 264 Tahun 2020	Perlindungan lanjut usia
123	Pemberian hibah barang daerah yang diserahkan kepada masyarakat berupa kursi roda bagi penyandang disabilitas untuk kegiatan pelayanan dan rehabilitas disabilitas, korban napza di Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 265 Tahun 2020	Bantuan untuk masyarakat
124	Pemberian hibah barang berupa kompor gas, tabung gas dan wajan/kuali yang diserahkan kepada anggota asosiasi makanan dan minuman Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 266 Tahun 2020	Pembinaan IKM
125	Penetapan hibah alat bantuan sosialisasi program generasi berencana kepada kelompok kegiatan bina keluarga balita dan bina keluarga lansia dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 267 Tahun 2020	Pembinaan KB
126	Penunjukan bank penyalur dana bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBD Kota Jambi dan bantuan rumah swadaya cadangan dana alokasi khusus tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 268 Tahun 2020	Bedah rumah
127	Pembentukantim teknis kegiatan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBD Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 269 Tahun 2020	Bedah rumah
128	Penetapan penerima hibah lemari alat dan obat kontrasepsi untuk fasilitas kesehatan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 274 Tahun 2020	Pembinaan KB
129	Penetapan hibah sarana kerja kader pembantu pembina keluarga berencana desa dan sub pembantu pembina keluarga berencana dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 276 Tahun 2020	Pembinaan KB
130	Penetapan lembaga pusat kegiatan belanja masyarakat bina mandiri Kota Jambi penerima bantuan hibah peralatan pendidikan TIK tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 277 Tahun 2020	Hibah peralatan pendidikan
131	Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Korban Bencana Di 7 (Tujuh) Kelurahan Dan Di 6 (Enam) Kecamatan Dalam Kota Jambi Tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 280 Tahun 2020	Bantuan untuk masyarakat
132	Penetapan penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBD Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 282 Tahun 2020	Bedah rumah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
133	Penetapan relawan tenaga kesehatan untuk penanganan corona virus didaese (covid-19) di rumah sakit umum daerah haji abdul manap Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 283 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
134	Penetapan penerima bantuan sosial dana alokasi khusus fisik reguler bidang perumahan dan pemukiman Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 284 Tahun 2020	Bedah rumah
135	Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan gerakan masyarakat hidup sehat Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 285 Tahun 2020	GERMAS
136	Pengurangan secara kolektif sanksi administrasi berupa denda pajak restoran A.N. restoran dine and chat untuk masa pajak bulan maret 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 286 Tahun 2020	Keringanan pajak
137	Penetapan penerima kartu pelanggan LPG 3 kilogram bersubsidi bagi rumah tangga dan UMKM di kecamatan alam barajo	SK WaliKota Jambi Nomor 288 Tahun 2020	Pengawasan LPG
138	Penetapan penerima kartu pelanggan LPG 3 kilogram bersubsidi bagi rumah tangga dan UMKM di kecamatan Jambi Selatan	SK WaliKota Jambi Nomor 289 Tahun 2020	Pengawasan LPG
139	Penetapan penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk rumah tangga miskin dan rumah tangga terdampak corona virus disease 2019 (covid-19) yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi jambi untuk Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 290 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas keputusan waliKota Jambi nomor 246 tahun 2020	Stimulus ekonomi
140	Pengurangan secara kolektif sanksi administrasi berupa denda pajak restoran A.N. restoran siman and sons untuk masa pajak bulan maret 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 291 Tahun 2020	Keringanan pajak
141	Penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak restoran masa pajak bulan february 2020, maret 2020 dan juni 2020 serta pembebasan pajak restoran bulan juni 2020 A.N. restoran aroma kopithua and lounge	SK WaliKota Jambi Nomor 292 Tahun 2020	Keringanan pajak
142	Pembentukan tim kerja pelaksanaan kegiatan padat karya tunai kali bersih (pakar kasi) Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 296 Tahun 2020	Stimulus ekonomi
143	Penetapan status tugas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 297 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
144	Penetapan lokasi dan tenaga kerja kegiatan padat karya tunai keli bersih (pakar kasih) Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 298 Tahun 2020	Stimulus ekonomi
145	Penetapan pelayanan tenaga kesehatan untuk penanganan corona virus disease (covid-19) di rumah sakit umum daerah haji abdul manap Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 300 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
146	Penetapan relawan tenaga kesehatan dokter, perawat, radiografer dan penata/analisis laboratorium untuk penanganan corona virus disease (covid-19) di rumah sakit umum daerah H. Abdul Manap Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 302 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
147	Penetapan lokasi dan tenaga kerja kegiatan padat karya tunai kali bersih (pakar kasih) Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 302.A Tahun 2020 Tentang perubahan atas keputusan waliKota Jambi nomor 298 tahun 2020	Stimulus ekonomi
148	Pembentukan Tim Persiapan Pelaksana Eksekusi Terhadap Tanah Saming Gedung Putra Retno Sertifikat Hak Pengolongan Nomor 02 atas nama pemerintah Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 311 Tahun 2020	Pengamanan Aset daerah
149	Penetapan penerima bantuan beasiswa (kartu jambi cerdas) bagi siswa kurang mampu di Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 314 Tahun 2020 Tentang perubahan atas keputusan waliKota Jambi nomor 53 tahun 2020	Kartu Jambi Cerdas
150	Penetapan penerima dan besaran hibah berupa uang hibah dan non fisik bop paud tahap kedua Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 315 Tahun 2020	PAUD
151	Penetapan pusat kegiatan belajar masyarakat penerima hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesehatan paket A paket B dan paket C dana alokasi khusus non fisik tahap kedua tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 316 Tahun 2020	Penyelenggaraan pendidikan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
152	Penetapan relawan tenaga kesehatan dokter, peraeat, dan ahli teknologi laboratorium medik (ATLM) untuk penanganan corona virus disease (covid-10) rumah sakit umum daerah H.Abdul Manap Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 317 Tahun 2020	Pencegahan Covid-19
153	Penunjukan pimpinan badan amil zakat nasional Kota Jambi periode 2020-2025	SK WaliKota Jambi Nomor 323 Tahun 2020	Kegiatan keagamaan
154	Penetapan penerima kartu pelanggan LPG 3 kilogram bersubsidi bagi rumah tangga dan usaha mikro di kecamatan paal merah	SK WaliKota Jambi Nomor 328 Tahun 2020	Pengawasan LPG
155	Pembentukan tim proyek implementasi unit program hibah air limbah setempat Kota Jambi tahun anggaran 2021	SK WaliKota Jambi Nomor 329 Tahun 2020	Pengelolaan lingkungan hidup
156	Pembentukan local project management unit metropolitan sanitasion management and health project Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 330 Tahun 2020	Pengelolaan lingkungan hidup
157	Penggunaan dana belanja tidak terduga untuk bantuan korban bencana di 13 (tiga belas) kelurahan dan di 8 (delapan) kecamatan dalam Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 331 Tahun 2020	Bantuan untuk masyarakat
158	Penetapan standar pelayanan (SP) penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Jambi	SK WaliKota Jambi Nomor 338 Tahun 2020	pelayanan perizinan
159	Penetapan dasar penerima dan besaran hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 339 Tahun 2020	Stimulus ekonomi
160	Pelimpahan wewenang dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 340 Tahun 2020	Stimulus ekonomi
161	Pemberian hibah barang (peralatan produksi) yang diserahkan kepada kelompok industri kecil dan menengah Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 344 Tahun 2020	Pembinaan IKM
162	Pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 352 Tahun 2020	Penanggulangan Kemiskinan
163	Pembentukan tim pengamanan kegiatan eksekusi tanah samping gedung putro retno sertifikat hak pengelolaan nomor 01 dan sertifikat hak pengelolaan no 02 atas nama pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 356 Tahun 2020	Pengamanan Aset daerah
164	Penetapan daftar penerimaan dan besaran hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Kota Jambi tahun anggaran 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 361 Tahun 2020 Tentang perubahan atas keputusan waliKota Jambi nomor 339 tahun 2020	Stimulus ekonomi
165	Pemberian hibah barang berupa hand seller dan kemasan standing pouch yang diserahkan kepada anggota asosiasi makanan dan minuman (asmami) kota jabi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 362 Tahun 2020	Pembinaan IKM
166	Penggunaan dana belanja tidak terduga untuk bantuan korban bencana di 3 (tiga) kel;urahan dan di 3 (tiga) kecamatan dalam Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 364 Tahun 2020	Bantuan untuk masyarakat
167	Penggunaan dana belanja tidak terduga untuk bantuan korban bencana di 2 (dua) kelurahan dan di 2 (dua) kecamatan dalam Kota Jambi tahun 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 365 Tahun 2020	Bantuan untuk masyarakat
168	Pengurangan sanksi administrasi berupa denda pajak hotel a.n. Hotel odua weston untuk masa pajak bulan februari 2020, maret 2020, juni 2020 dan juli 2020	SK WaliKota Jambi Nomor 369 Tahun 2020	Keringanan pajak
169	Penetapan penetapan taman hutan kota muhammad sabki sebagai hutan ekowisata	SK WaliKota Jambi Nomor 370 Tahun 2020	Objek wisata
170	Intruksi WaliKota Jambi tentang Penutupan Sementara dan/atau penundaan kegiatan usaha pariwisata dalam upayaantisipasi terhadap penularan infeksi Corona Virus (Covid-19).	02/INS/III/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
171	Intruksi WaliKota Jambi tentang Pemberlakuan Jam Malam bagi Masyarakat dan pelaku usaha.	03/INS/III/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
172	Intruksi WaliKota Jambi tentang pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka penvegahan dan penanggulangan Covid-19 di perusahaan dalam Kota Jambi.	04/INS/IV/HKU/2020	Pencegahan Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
173	Intruksi WaliKota Jambi tentang Perpanjangan Instruksi WaliKota Jambi Nomor 02/INS/III/HKU/2020 tentang Penutupan Sementara dan/atau penundaan kegiatan usaha pariwisata dalam upaya antisipasi terhadap penularan infeksi Corona Virus (Covid-19).	05/INS/IV/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
174	Intruksi WaliKota Jambi tentang Panduan Ibadah Kegiatan Bulan Ramadhan 1441 H Di Kota Jambi.	06/INS/IV/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
175	Intruksi WaliKota Jambi tentang Perpanjangan Penutupan Sementara dan/atau penundaan kegiatan usaha pariwisata dalam upaya antisipasi terhadap penularan infeksi Corona Virus (Covid-19).	07/INS/IV/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
176	Intruksi WaliKota Jambi tentang Penggunaan Masker untuk mencegah penularan virus disease (Covid-19).	08/INS/IV/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
177	Intruksi WaliKota Jambi tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).	09/INS/V/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
178	Intruksi WaliKota Jambi tentang Perpanjangan Penutupan Sementara dan/atau penundaan kegiatan usaha pariwisata dalam upaya antisipasi terhadap penularan infeksi Corona Virus (Covid-19).	10/INS/V/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
179	Intruksi WaliKota Jambi tentang Pemberlakuan Jam Malam bagi Masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya antisipasi terhadap penularan infeksi Corona Virus (Covid-19).	11/INS/VI/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
180	Intruksi WaliKota Jambi tentang Kegiatan Pendidikan pada Akhir tahun 2019/2020.	12/INS/VI/HKU/2020	Pendidikan di Kota Jambi
181	Intruksi WaliKota Jambi tentang Pembukaan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Meeting, dalam upaya antisipasi terhadap penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).	13/INS/VII/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
182	Pembatasan dan Penghentian Sementara Kegiatan pada area Publik usaha ke Pariwisata, keagamaan dan social Kemasyarakatan dalam Upaya antisipasi dan pencegahan terhadap penularan Corona Virus Disease (Covid-19)	14/INS/IX/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
183	Pembatasan Pemberlakuan operasional dan penghentian sementara kegiatan pada gugus tugas area publik, usaha kepariwisataan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam upaya antisipasi dan pencegahan terhadap penularan corona virus disease (Covid-19)	15/INS/X/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
184	Pembatasan Pemberlakuan Operasional Gugus Tugas dan Penghentian Sementara Kegiatan pada area Publik, Usaha Kepariwisata, Keagamaan dan social kemasyarakatan dalam upaya antisipasi dan pencegahan terhadap penularan Corona Virus Disease (Covid-19)	16/INS/X/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
185	Pembatasan pemberlakuan operasional dan kegiatan pada area publik usaha kepariwisataan keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam upaya antisipasi dan pencegahan terhadap penularan corona virus disease (Covid-19)	18/INS/XII/HKU/2020	Pencegahan Covid-19
186	Surat Edaran Tentang Kewaspadaan Terhadap Pneumon Novel Corona Virus (nCoV).	01/HKU/EDR/2020	Pencegahan Covid-19
187	Surat Edaran Tentang Pemakaian Baju Adat.	03/HKU/EDR/2020	Pelestarian Adat Budaya
188	Surat Edaran Tentang Pemanfaatan Kebijakan Stimulus Perekonomian.	04/HKU/EDR/2020	Pemanfaatan Kebijakan Stimulus Perekonomian.
189	Surat Edaran tentang Pelaksanaan Aksi CLENUM dan Pilah Sampah dari Rumah	05/HKU/EDR/2020	Pengelolaan sampah
190	Surat Edaran tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya antisipasi dan Penanganan penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Jambi	06/HKU/EDR/2020	Pencegahan Covid-19
191	Peniadaan Kegiatan malam tahun Baru di wilayah Kota Jambi	08/HKU/EDR/2020	Pencegahan Covid-19

Sumber: Bagian Hukum PerUU dan OPD terkait, 2021.

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (TAHUN 2019)

Pada pembahasan LKPJ 2019 yang lalu, terdapat 4 (empat) Pansus DPRD Kota Jambi yang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2019. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2019 lalu disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.69
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2019 Lalu

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
Rekomendasi Pansus I (satu) DPRD Kota Jambi					
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	a	Pemenang Kampung Bantar agar terus dibina dan dipantau, tidak hanya mengejar menjadi juara dan mendapatkan hadiah.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi telah mengutus Penyuluh Swadaya Masyarakat Desa atau Kelurahan (11 Penyuluh) agar selalu melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala terhadap Pemenang Kampung Bantar .	Pemenang Kampung Bantar perlu dipantau supaya lingkungan yang sudah menjadi Kampung Bantar tetap terjaga sehingga masyarakat selalu merasa nyaman dengan lingkungannya dan dapat menjadi contoh bagi RT yang belum mengikuti lomba Kampung Bantar serta dapat mempertahankan predikat Kampung sebagai Juara 2 Program Inovasi Tingkat Nasional
		b	Pemenang Kampung Bantar supaya ada pembinaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah memerintahkan Penyuluh Swadaya Masyarakat Desa atau Kelurahan sebagai petugas lapangan yang melakukan pembinaan langsung ke RT yang sudah menang Kampung Bantar.	Pembinaan perlu dilakukan supaya Program Kampung Bantar tetap berjalan dan Program Kampung Bantar tidak hilang kota Jambi
		c	Untuk Persyaratan pendaftaran organisasi wanita agar disosialisasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Telah berkoordinasi dengan Badan KESBANGPOL mengenai prosedur dan tatacara persyaratan Pendaftaran Organisasi Wanita dengan skema terlampir 2. Melakukan sosialisasi prosedur tata cara pendaftaran organisasi wanita 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan sosialisasi prosedur dan tatacara pendaftaran melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Gabungan organisasi Wanita (GOW) b. Website DPMPPA Kota Jambi

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	a	Pansus I memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya IKM layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Jambi
		b	Pelayanan terhadap masyarakat agar lebih ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Menata sistem pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses layanan melalui pelayanan Whatsapp (WA) sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil cukup mengupload persyaratan melalui WA, seiring dengan penanggulangan dampak Covid-19 2 Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi pelaporan untuk mendapatkan data layanan yang kongkrit 3 Melakukan layanan jemput bola langsung turun ke masyarakat dan sekolah-sekolah untuk kegiatan perekaman data KTP-el dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti KK, KTP-el, akte kelahiran dan akte kematian 4 Melaksanakan sosialisasi melalui media elektronik, media sosial dan tatap muka langsung dengan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 2 Mempercepat proses perekaman data kependudukan KTP-el baru 3 Mempermudah perekaman bagi penyandang disabilitas 4 Mempermudah pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
		c	Pelayanan mobil keliling agar dapat direalisasikan	Telah dianggarkan pada kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan dinas/operasional tahun 2020 tetapi tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanggulangan dampak Covid-19	Pelayanan langsung di Kecamatan dan Kelurahan, Mall dan tempat-tempat keramaian
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP agar diberikan anggaran yang memadai	Akan diakomodir pada anggaran perubahan	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dengan adanya penambahan anggaran. b. Efektifnya tim Covid-19 Kota Jambi sebagai leading sektor penanganan pelanggaran prokes Covid-19 untuk itu diperlukan alokasi anggaran tambahan. <p>Masalah yang diselesaikan : Penindakan PERWAL 21 Tahun 2020 tentang Penanganan</p>	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				Covid-19 pada tahun 2020 pelanggaran terjadi sebanyak 1599 pelanggaran dan sanksi yang diberikan berupa : teguran lisan, sanksi fisik/sosial, denda masker, peringatan I, denda 5-10 juta, dan penyegelan sementara.
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<p>a Hasil dari kegiatan lelang kendaraan dinas dipublikasikan ke media, agar diketahui secara luas, dan berapa dana yang didapat dari hasil lelang tersebut.</p> <p>b Mendata aset Pemerintah Kota berupa tanah yang belum bersertifikat agar dapat segera diproses untuk dibuatkan sertifikat.</p> <p>c Aset Pemerintah Kota yang diperoleh dari sengketa dengan masyarakat agar segera diselesaikan melalui pengadilan tingkat pertama (PN), agar tidak merugikan masyarakat.</p>	<p>Dalam hal ini BPKAD Kota Jambi Setiap pelaksanaan lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Jambi, hasilnya telah dilaporkan Sekretaris Daerah (selaku Pengelola Barang) kepada Bapak Walikota Jambi dan telah disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun tersebut. Laporan tersebut menjabarkan apa saja yang laku terjual, dan berapa besaran PAD dari hasil penjualan BMD dimaksud. Selain itu setiap pelaksanaan lelang baik itu pengumuman lelang maupun pemberitahuan hasil pelaksanaan lelang telah dipublikasikan ke media cetak dan telah berkoordinasi dengan Bagian Humas Setda Kota Jambi.</p> <p>BPKAD Kota Jambi di Bidang Aset telah melakukan pendataan aset Pemerintah Kota Jambi berupa tanah, baik yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. Dari hasil pendataan diperoleh bahwa tanah yang telah bersertifikat sejumlah 427 persil dan yang belum bersertifikat sejumlah 209, dan Tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi telah mengurus pensertifikatan tanah ke BPN Kota Jambi sebanyak 25 persil dan ada 20 persil yang sudah terbit.</p> <p>Pemerintah Kota Jambi telah menyelesaikan sengketa samapai ke PN dan telah dilakukan eksekusi tanah yaitu Tanah Samping Putro Retno pada tahun 2020, Untuk tanah Pustu Tanjung Sari, Kantor Lurah Paal Merah dan Tanah SDN. 212 kota Jambi masih dalam proses di pengadilan.</p>	<p>Hasil dari kegiatan lelang kendaraan dinas dipublikasikan ke media, agar diketahui secara luas, dan berapa dana yang didapat dari hasil lelang tersebut.</p> <p>Pengamanan aset/BMD dapat terlaksana dengan baik dan resiko hilangnya aset/BMD milik Pemerintah Kota Jambi lebih diperkecil bahkan tidak ada.</p> <p>Pengamanan aset/BMD dapat terlaksana dengan baik dan resiko hilangnya aset/BMD milik Pemerintah Kota Jambi lebih diperkecil bahkan tidak ada serta adanya kepastian hukum atas aset/BMD tersebut.</p>

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
5	Bagian Humas Setda Kota Jambi	<p>a Informasi yang disampaikan tidak tumpang tindih antar Bagian Humas Sekretariat Kota Jambi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi</p> <p>b Berita yang disampaikan media disaring dahulu oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Jambi dan diklarifikasikan seandainya ada berita terkait DPRD Kota Jambi yang tidak benar</p>	Agar tidak terjadinya tumpang tindih antar Bagian Humas dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sehingga Bagian Humas ditiadakan tapi uraian tugas tersebut dipindahkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan telah diatur pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019	Telah dilakukan penggabungan Bagian Humas ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi
6	Bagian Organisasi	<p>a OPD yang tupoksinya tumpang tindih agar dibenahi, antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Komunikasi dan Informasi 4. Bagian Humas 	<p>Untuk menghindari adanya tumpang tindih uraian tugas pokok dinas PUPR dan Perkim, Diskominfo dan Humas, serta penyesuaian dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah kami tidak lanjut dengan perubahan SOTK masing-masing perangkat daerah tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi 2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi; 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (dimana bagian Humas yang semula berada dalam lingkup setda sejak awal tahun 2021 telah bergabung dengan dinas Kominfo Kota Jambi) 	Tidak ada lagi tupoksi yang tumpang tindih antar bagian-bagian dengan perubahan SOTK masing-masing bagian

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
7	Bagian Hukum dan PerUU	a	Naskah akademik yang disampaikan ke DPRD Kota Jambi berupa naskah akademi yang akurat	Memaksimalkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pengusung sesuai dengan kewenagannya	Pembentukan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
		b	Pembuatan naskah akademik disesuaikan dengan bidang keahliannya serta melibatkan KEMENKUMHAM		
8	Bagian Pemerintahan	a	Dalam hal pemekaran kelurahan, agar dikoordinasikan dengan kementerian terkait, tentang pemekaran kelurahan yang ada di wilayah Kota Jambi agar dapat di prioritas dengan mempertimbangkan persyaratan yang lain	Saat ini Ranperda Tentang Pembentukan Kelurahan Sedang Disusun, Naskah Akademis Sudah Diselesaikan, Juga telah dilaksanakan FGD (Forum Group Discussion) kepada masyarakat, dan telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, serta Biro Pemerintahan Provinsi Jambi terkait dengan pemekaran kelurahan	Agar terbentuknya Peraturan Daerah tentang pemekaran daerah
9	Inspektorat	a	Untuk meningkatkan kinerja, Inspektorat perlu penambahan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikutkan Pegawai yang belum menjadi JFT dalam proses Inpassing auditor; • Pengajuan penambahan pegawai 	Memenuhi jumlah Jabatan Fungsional Tertentu agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan
10	Kesbangpol	a	Bantuan ke Partai Politik disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2019 telah disalurkan Pemberian Batuan Keuangan Partai Politik diberikan selama 8 (bulan) 2. Untuk tahun berikutnya sudah disesuaikan dengan Hasil Penghitungan Suara KPU Kota Jambi hasil Pemilu Tahun 2019 	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Fungsi Partai Politik dalam meningkatkan fungsi partai politik dalam melaksanakan Pendidikan Politik 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola Keuangan Bantuan Keuangan Partai Politik 3. Meningkatkan kualitas Administrasi Partai Politik <p>Masalah yang diselesaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan Pemberian Bantuan pada Tahun 2019 diberikan selama 8 (delapan) bulan dikarenakan kesalahan dalam penganggaran tidak sesuai dengan hasil pemilihan umum serentak tahun 2019, penyelesaiannya dilakukan penghitungan ulang dan hasilnya Bantuan keuangan Partai Politik tersebut diberikan pada APBD Perubahan 2020 dan ini merupakan rekomendasi LHP BPK RI atas Pemeriksaan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2020. 2. Pengitungan kembali tersebut disesuaikan

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		<p>b Menjalin kerjasama serta melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang terdaftar di Kota Jambi</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi telah melakukan kerjasama, bersama forum ormas seperti melibatkan peran ormas dalam kegiatan penanggulangan Covid-19 dan program pemerintah yang pro rakyat seperti sunatan masal, senam sehat, goes, pembagian sembako dan pengobatan gratis.</p>	<p>dengan hasil Penghitungan KPU Kota Jambi Hasil Pemilu Tahun 2019, untuk sinkronisasi hasil Autentifikasi yang dikeluarkan KPU Kota Jambi untuk Bantuan Keuangan Parpol tersebut.</p> <p>3. Pemberian Bantuan Keuangan Parpol tersebut disesuaikan dengan Permendagri 36 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi selalu melakukan pembinaan terhadap forum ormas seperti sosialisasi tentang UU ke Ormasan, radikalisme, ideologi dan melakukan monev terhadap keberadaan kesekretarian ormas yang aktif dan setiap 6 (enam) bulan ormas wajib melaporkan kegiatannya yang telah dilakukan terhadap masyarakat.</p>
11	BKPSDMD	<p>a Agar menempatkan tenaga PNS yang handal dan yang menguasai IT pada Kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Jambi dan apabila ada pelantikan pejabat berikutnya untuk di kelurahan segera di isi SDM nya</p> <p>b Untuk meningkatkan status tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ada di kelurahan menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) supaya mendapatkan penghasilan memadai</p>	<p>Telah dilakukan pemetaan kebutuhan Pegawai di setiap OPD sampai dengan tingkat Kecamatan, Kelurahan yang dituangkan kedalam dokumen Peta Jabatan kebutuhan pegawai di OPD, Kecamatan masing-masing</p> <p>Untuk pengisian pejabat pada kelurahan telah dilakukan pendataan pejabat yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan apabila dilaksanakan pelantikan akan segera diisi</p> <p>Kepala kelurahan yang memiliki tenaga TKS di unit kerjanya untuk menaikkan nota dinas kepada Bapak Walikota untuk menambah anggaran kebutuhan TKK, akan tetapi disesuaikan kebutuhan TKK tersebut dengan kebutuhan pegawai yang ada pada Peta Jabatan</p>	<p>Kebutuhan pegawai tersebut akan dimasukkan kedalam usulan pengadaan CPNS dan sebagai acuan memberikan rekomendasi mutasi pegawai masuk ke kota jambi atau keluar dari kota jambi apakah telah memenuhi kriteria kebutuhan yang ditentukan</p> <p>Pengisian jabatan dilakukan sesegera mungkin agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang terlalu lama</p> <p>Kekosongan jabatan untuk sementara waktu dijabat oleh pelaksana tugas (plt) sesuai dengan surat edaran kepala BKN nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019</p> <p>Agar unit kerja/OPD memperkerjakan tenaga sesuai dengan kebutuhan pegawai</p> <p>Tertib administrasi kebutuhan tenaga pada unit kerja</p>

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c Untuk lebih teliti lagi dalam hal pengangkatan kepala sekolah yang ada di Kota Jambi agar mendapatkan Sumber Daya Manusia yang handal, berkualitas, serta sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan	Berkoordinas dengan Dinas Pendidikan agar lebih teliti dan mempedomani Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, dikarenakan Dinas Pendidikan mempunyai wewenang penuh dalam menseleksi calon kepala sekolah	Tidak terjadi pengangkatan kepala sekolah dilingkungan pemerintah kota jambi yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
12	DPMPPTSP	Agar Perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPPTSP harus melalui pre-audit terlebih dahulu agar mendapatkan izin yang berkualitas dan layak dipertanggung jawabkan sebelum UU Omnibus Law diberlakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti ulang setiap SK perizinan yang diterbitkan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh pemohon 2. Penerbitan perizinan oleh DPMPPTSP Kota Jambi tetap dilakukan pre-audit baik terhadap persyaratan dan kelayakan Izin yang akan diterbitkan bahkan harus mendapatkan rekomendasi dari OPD teknis sesuai dengan izin yang domohonkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPPTSP benar benar sesuai dengan per Undang-Undang yang berlaku 2. Agar perizinan berkualitas dan dapat dipertanggungjawab kan
		Agar melakukan kerjasama dengan pihak Satpol PP serta OPD terkait dalam hal pelaksanaan, penindakan perizinan yang telah dikeluarkan	Berbagai kegiatan dalam penanganan terhadap pelanggaran Perizinan baik pembinaan maupun pelanggaran selalu bersinergi dengan OPD terkait, apabila kan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah DPMPPTSP Kota Jambi telah dilakukan koordinasi dengan Pol PP Kota Jambi dalam Tim terpadu	Agar penindakan pelanggaran perizinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi terkait
		Agar menyelesaikan perizinan perizinan yang masih tertunda pada tahun sebelumnya yang telah memenuhi persyaratan untuk meningkatkan PAD tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelepon setiap pemohon yang izinnnya sudah terbit agar segera diambil 2. Memberikan usulan kepada pemohon untuk mengajukan pengurangan retribusi kepada Walikota Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supaya perizinan yang sudah diterbitkan diambil dan dibayarkan retribusinya oleh pemohom 2. Supaya ada negosiasi dan kesesuaian retribusi yang diinginkan oleh pemohon berdasarkan disposisi Walikota Jambi

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
13	Kecamatan dan Kelurahan	Memberi Apresiasi Kepada Camat dan Lurah atas kinerjanya mendukung program JambiTerkini	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Kelurahan yang telah mendukung program Jambi terkini dapat diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan mengikut sertakan para lurah dalam kegiatan pelaksanaan study komperatif ke luar Daerah (Kec. Kotabaru); - Untuk Kelurahan yang telah mendukung program Jambi Terkini dapat diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan mengikuti sertakan para lurah dalam kegiatan pelaksanaan study komperatif ke luar daerah (Kec. Telanaipura); - Terima kasih apresiasi yang diberikan tindak lanjut ke depan kami terus berbenah untuk peningkatan kinerja sesuai dengan program/ kegiatan Pemerintah Kota Jambi (Kec. Jelutung); - Untuk Kelurahan yang telah mendukung program Jambi terkini dapat diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan mengikut sertakan para lurah dalam kegiatan pelaksanaan study komperatif ke luar Daerah (Kec. Pasar) - Untuk Kelurahan yang telah mendukung program Jambi Terkini dapat diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan mengikuti sertakan para lurah dalam kegiatan pelaksanaan study komperatif ke luar daerah (Kec. Jambi Selatan); - Memberikan apresiasi kepada Camat dan Lurah maupun ASN yang telah mendukung Program kepala daerah dengan memberikan studi komperatif ke Kota lain untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan ASN dalam pengembangan kinerja ASN bersangkutan maupun instansinya (Kec. Jambi Timur); - Untuk Lurah diberikan reward sebagai apresiasi atas kinerjanya dalam mendukung program Jambi Terkini (Kec. Danau Teluk); - Untuk Kelurahan yang telah mendukung program Jambi terkini dapat diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan mengikut 	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			<p>sertakan para lurah dalam kegiatan pelaksanaan study komperatif ke luar Daerah (Kec. Pelayangan);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Kelurahan yang telah mendukung program Jambi Terkini dapat diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan mengikuti sertakan para lurah dalam kegiatan pelaksanaan study komperatif ke luar daerah (Kec. Alam Barajo); - Untuk Kelurahan yang telah mendukung program Jambi terkini dapat diberikan apresiasi atas kinerjanya dengan mengikut sertakan para lurah dalam kegiatan pelaksanaan study komperatif ke luar Daerah (Kec. Paal Merah). 	
		Meningat Lurah adalah KPA agar memperhatikan tenaga pengelolaan keuangan yang ada di Kelurahan Tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Sejauh ini dalam hal pengelola Keuangan di Kelurahan Khususnya di Kecamatan Paal Merah dapat berjalan dengan baik dan Lancar karena Pihak Kecamatan Selalu Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses Pengelola Keuangan Kelurahan (Kec. Kotabaru); - Kecamatan Telanaipura telah melakukan secara rutin Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pengelola Keuangan Kelurahan (Kec. Telanaipura); - Terkait dengan tenaga pengelola keuangan di kelurahan pihak kelurahan memperhatikan dari segi koordinasi dengan KPA baik dari segi perencanaan dan realisasi kegiatan (KEC. Jelutung); - Sejauh ini dalam hal pengelola Keuangan di Kelurahan Khususnya di Kecamatan Pasar dapat berjalan dengan baik dan Lancar karena Pihak Kecamatan Selalu Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses Pengelola Keuangan Kelurahan (Kec. Pasar); - telah melakukan secara rutin Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pengelola Keuangan Kelurahan (Kec. Jambi Selatan); - . Kecamatan Jambi Timur telah mengakomodir dalam Dokumen 	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			<p>perencanaan dan anggaran terkait pembentukan tim pengelola keuangan di kelurahan dalam Kecamatan Jambi Timur; Melakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi antara Tim Keuangan Kecamatan bersama KPA dan pengelola keuangan di Kelurahan (Kec. Jambi Timur);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lurah selaku KPA selalu memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan keuangan yang ada di kelurahan (Kec. Danau Teluk); - Sejauh ini dalam hal pengelola Keuangan di Kelurahan Khususnya di Kecamatan Pelayangan dapat berjalan dengan baik dan Lancar karena Pihak Kecamatan Selalu Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses Pengelola Keuangan Kelurahan (Kec. Pelayangan); - Kecamatan Alam Barajo telah melakukan secara rutin Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pengelola Keuangan Kelurahan (Kec. Alam Barajo); - Sejauh ini dalam hal pengelola Keuangan di Kelurahan Khususnya di Kecamatan Paal Merah dapat berjalan dengan baik dan Lancar karena Pihak Kecamatan Selalu Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses Pengelola Keuangan Kelurahan (Kec. Paal Merah). 	
		Mendidik Staff untuk mengelola DAK/ Dana Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Hal Pengelolaan DAK Khususnya bagi staf kelurahan telah diikutsertakan pada Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang diselenggarakan oleh BKPSDMD Kota Jambi (Kec. Kotabaru); - Dalam Hal Pengelolaan DAK Khususnya bagi staf kelurahan telah diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan pengelola keuangan yang diselenggarakan oleh BPKSDMD Kota Jambi (Kec. Telanaipura); - Mengikut sertakan para Staf Kelurahan yang mengelola keuangan pada kegiatan Bintek yang di adakan oleh Pemerintah 	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			<p>Kota Jambi pada tahun 2020 secara bergantian. (Kec. Jelutung);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Hal Pengelolaan DAK Khususnya bagi staf kelurahan telah diikutsertakan pada Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang - Diselenggarakan oleh BKPSDMD KotaJambi yang dihadiri oleh Sekertaris Lurah selaku PPK dan PPTK yaitu Kel. Sungai Asam(Susana. I, SE), Kel. OKH (Ena Yututi, SE), Kel. Pasar (Subandi, SE), Kel. Beringin (Nopriadi) (Kec. Pasar); - Dalam Hal Pengelolaan DAK Khususnya bagi staf kelurahan telah diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan pengelola keuangan yang diselenggarakan oleh BPKSDMD Kota Jambi (Kec. Jambi Selatan); - KecamatanJambi Timur melakukan koordinasi baik kepada Lurah selaku KPA maupun tim pengelola keuangan di kelurahan terkait perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan Dana Kelurahan; Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan olehtim kecamatan terhadap laporan penyerapan Dana Kelurahan semester 1 dan Semester 2; mengikutsertakan pejabat pengeloladana kelurahan ke dalam bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh BPKSDMD terkait pengelolaan keuangan, serta dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh Tim kecamatan terkait pelaporan DAKKelurahan (Kec. Jambi Timur); - Dalam hal pengelolaan DAK oleh staff kelurahan telah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada staf kelurahan (Kec. Danau Teluk); - Dalam Hal Pengelolaan DAK khususnya bagi staffkelurahan telah diikutsertakan pada Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang 	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
			<p>diselenggarakan oleh BKPSDMD Kota Jambi (Kec. Pelayangan);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Hal Pengelolaan DAK Khususnya bagi staf kelurahan telah diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan pengelola keuangan yang diselenggarakan oleh BPKSDMD Kota Jambi (Kec. Alm Barajo); - Dalam Hal Pengelolaan DAK Khususnya bagi staf kelurahan telah diikutsertakan pada Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang diselenggarakan oleh BKPSDMD Kota Jambi (Kec. Paal Merah). 		
Rekomendasi Pansus II (dua) DPRD Kota Jambi					
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a	Pembuatan Perda Ketersediaan Ketahanan Pangan	Setelah hearing dan esistensi dengan DPRD pembuatan Perda Keahanan Pangan dialihkan dan menjadi pokok pikiran Pansus II DPRD	Adanya perda menjadi payung hukum Kota Jambi atau Dinas Pertanian dalam menyusun program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat
		b	Tidak memberikan izin alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan dalam RTRW tidak ada lahan pertanian namun yang ada adalah Ruang Terbuka Hijau	Pemanfaatan ruang wilayah untuk kawasan perutukan pertanian.
		c	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuat Grad Design tentang Pertanian, Peternakan, Perikanan	Pembuatan Grand Design dari hasil hearing dan esistensi akan ditindaklanjuti oleh Bapeda Kota jambi	Kawasan yang dimaksud adalah kawasan untuk menjaga kelangsungan ketersediaan pangan,.
		d	Perlunya optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Balai Benih Hortikultura (BBH)	Akan ditindaklanjuti oleh DPKP pada kegiatan Tahun 2021	Grand Design dibuat bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan peran DPKP di masyarakat agar kegiatan yang ada bisa lebih terarah untuk berkembang dan menjadi lebih baik
		e	Pemkot Jambi memetakan lahan-lahan pertanian yang ada untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat memenuhi pangan untuk masyarakat serta dapat menekan angka inflasi	Akan ditindaklanjuti oleh DPKP pada tahun 2021 yaitu pembuatan data base pertanian	Menjaga kelestarian pohon induk lokal yang bersertifikat
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	a	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat meningkatkan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD	Pendataan Wajib Pajak baru, verifikasi pajak daerah	Untuk meningkatkan objek pajak baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
		b	Pendataan ulang untuk pemutakhiran data PBB di semua kecamatan di Kota Jambi	Sudah dianggarkan tetapi karena rasionalisasi anggaran terkait adanya pandemi covid-19 sehingga dibatalkan	Refocusing/ rasionalisasi anggaran
		c	Segera Menyelesaikan piutang-piutang pajak	- BPPRD secara aktif melakukan proses penagihan. - BPPRD telah melakukan langkah-langkah membuat regulasi tentang penghapusan piutang pajak macet.	- Terselesaikannya piutang pajak daerah - Terklasifikasi secara jelas piutang pajak yang tidak aktif dan yang aktif
		d	Untuk dapat melakukan sistem komputerisasi BPHTB yang terkoneksi antara BPPRD, BPN Kota Jambi dan Perbankan	MOU Nomor : 07/MOU/HKU/2019 212/SKB-15.UP.01/ VI/2019 antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kanwil BPN Provinsi Jambi tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan. PKS Nomor : 973/2012/PKS /BPPRD/2019 69/Kep.15.71.VI.2019 antara BPPRD Kota Jambi dengan Kantor Pertanahan Kota Jambi tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan PBB dan BPHTB Kota Jambi.	- Terintegrasinya data perpajakan dan pertanahan - Transparansi administrasi perpajakan dan pertanahan, akurasi nilai ketetapan pajak daerah
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi harus segera untuk menyelesaikan RIPDA dan membuat Program/Kalender kegiatan Pariwisata Kota Jambi	Untuk penyelesaian RIPDA kota Jambi terkendala anggaran biaya yang dialihkan ke penanganan Covid-19, untuk program/kalender kegiatan pariwisata masih dalam perumusan dengan Disbudpar Prov. Jambi	Pembahasan RIPDA Kota Jambi diagendakan kembali tahun 2021, untuk program/kalender kegiatan pariwisata masih dalam pembahasan perumusan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
		b	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jambi untuk pengelolaan objek wisata yang ada di kota Jambi	Telah dilaksanakan penjajakan/koordinasi secara lisan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Dalam koordinasi tersebut dibicarakan masalah pengelolaan Tugu Juang, Danau Sipin dan Pedestrian Gentala Asari, namun dari Pemerintah Provinsi menolak untuk menyerahkan pengelolaan Objek tersebut ke Pemerintah Kota Jambi.
		c	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi harus segera merubah nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jambi	Usulan perubahan Nomenklatur dinas telah diajukan ke Bapak Walikota melalui Bagian Organisasi Setda Kota Jambi dan masih dalam proses	Telah ditetapkan Perwal No. 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi
		d	Dalam hal pelaksanaan Festival budaya daerah dilakukan secara kontinuitas di setiap kecamatan yang ada di kota Jambi	Penjadwalan penampilan Grup seni yang ada di Kecamatan dalam kota Jambi untuk menampilkan tradisi etnis modern pada kegiatan Pentas seni di Tugu Keris Siginjai kota Jambi setiap malam Minggu	Penampilan seni tradisi etnis modern di Tugu Keris Siginjai Kota Jambi per kecamatan yang dijadwalkan setiap malam minggu, namun kegiatan tersebut sejak maret 2020 ditangguhkan kegiatannya karena Pandemi Covid-19

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		e Menggalakan program sadar wisata di setiap kelurahan yang ada di kota Jambi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi	Membentuk dan sosialisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) kelurahan dalam kota Jambi	Tahun 2020 telah terbentuk 7 (tujuh) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam kota Jambi
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	a BPKAD mengevaluasi perolehan pendapatan daerah dari OPD-OPD terkait.	Telah melakukan monitoring dan evaluasi ke semua OPD Pendapatan dan Melakukan Rapat Tim Setiap Triwulan yang dipimpin oleh Bapak Walikota Jambi.	Untuk menindaklanjuti Target Pendapatan setiap OPD agar mencapai target.
		b BPKAD mencatat aset yang direkolasi dan Penghapusan yang menggunakan APBD Kota Jambi	BPKAD selaku pembantu pengelola barang dalam hal ini Bidang Aset selalu menginventarisir dan mencatat BMD yang dilakukan relokasi/rehabilitasi begitu juga dengan penghapusan dan telah dituangkan di KIB OPD, DBMD Pemerintah Kota Jambi dan Neraca Pemerintah Kota Jambi (LKPD) setiap tahun. Setiap akhir tahun Bidang Aset selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Jambi dan OPD terkait untuk rencana relokasi/rehabilitasi tahun selanjutnya.	Agar Bidang Aset BPKAD dapat mengetahui lebih dulu apa yang menjadi rencana relokasi/rehabilitasi Dinas PUPR untuk tahun mendatang, sehingga Bidang Aset dapat mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD. Hasil relokasi dapat dimanfaatkan kembali atau dilakukan penjualan untuk material yang masih bernilai ekonomis dan dapat menambah PAD atas penjualan material BMD yang direlokasi/rehabilitasi.
		c Mendata ulang aset Pemerintah Kota Jambi terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya.	Dalam hal ini BPKAD Kota Jambi telah melakukan pendataan ulang/inventarisir terhadap BMD yang dapat dioptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya pada dan telah masuk dalam jadwal rencana kegiatan Tahun 2021. BPKAD menyusun kebijakan baru yaitu Perda tentang pengelolaan BMD yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru, di dalamnya termasuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang akan dijabarkan di Perwal.	
		d Memperjelas status kepemilikan aset yang masih menggunakan tanah masyarakat.	Dari data aset tanah yang belum bersertifikat, Bidang Aset melakukan penelusuran lokasi dan kelengkapan dokumen sebagai bahan untuk diajukan pensertifikatan. Saat ini BPKAD telah berkomunikasi dengan BPN Kota Jambi dan OPD terkait untuk mengajukan pengukuran untuk mengetahui luas tanah.	Agar status kepemilikan baik secara administrasi maupun secara hukum dapat dipertanggung jawabkan dan ada kepastian.
		e Evaluasi terhadap aset yang disewakan dengan harga tidak sesuai dan adanya aset yang dipindah tangankan ke pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Jambi.	Saat ini Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini BPKAD Kota Jambi sedang menyusun peraturan tentang pengelolaan BMD dan turunannya berupa Perwal yang mengatur	a. Agar evaluasi dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset/BMD dapat.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			tentang sewa BMD. Pemerintah Kota Jambi juga masih dalam tahap proses pendataan ulang/inventarisir BMD yang telah dipungut retribusi untuk dikaji ulang, jika memungkinkan dan memenuhi aturan yang ada untuk dilakukan sewa.	dilaksanakan dengan baik dan terkontrol. b. Meminimalisir hilangnya aset/BMD dari oknum yang memanfaatkan aset/BMD. c. Untuk mendeteksi dari awal ketika terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan, pemindahtanganan dan pemindahtanganan
		f Membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan aset-aset Provinsi yang ada di Kota Jambi.	BPKAD telah melakukan komunikasi ke Bagian Aset di Provinsi terkait data aset terutama tanah yang kemungkinan double catat antara provinsi dan kota, jika sudah jelas statusnya maka dieksekusi sesuai dengan data (dikembalikan pencatatannya sesuai data dan dokumen kepemilikan). Untuk aset P3D, BPKAD telah berkomunikasi dengan Bagian Aset provinsi terkait lanjutan penyerahan P3D yang belum diserahkan.	Agar dapat mengupdate dan kejelasan data dan informasi terkait permasalahan aset/BMD.
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	a Pada Bidang Pengelolaan Pasar agar Pemerintah secara tegas dapat dioptimalkan fungsi dan manfaat pasar yang sudah dibangun serta memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli	Telah ditindaklanjuti dimana usulan masyarakat Kelurahan Arab Melayu agar di jadikan pasar yang tidak terpakai untuk dijadikan sebagai gerai cenderamata, pada musrembang tingkat kecamatan pelayanan pada tanggal 21 Januari 2021. (terlampir Berita Acara)	Dimana permasalahan pasar pelayanan ini akan terpecahkan, dimana selama ini kurang bermanfaat dengan adanya maksud dan tujuan Pemerintah Kota Jambi menjadikan sebagai pasar cendera mata maka kegunaan pembangunan dapat difungsikan.
		b Melakukan optimalisasi penertiban pedagang yang berjualan di depan ruko-ruko di tepi jalan umum dan berkoordinasi dengan pihak terkait	Dalam penertiban melalui tim terpadu dengan melibatkan Polri dan TNI serta instansi terkait lainnya melalui Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim terpadu penataan pedagang pasar daerah Kota Jambi Tahun 2020.(terlampir SK Walikota Jambi)	Pedagang kaki lima yang ditertibkan agar masuk ke dalam pasar yang telah disediakan berupa kios dan atau lapak.
		c Mengoptimalkan peningkatan perolehan PAD di sektor perdagangan dan perindustrian	1. Dengan menambah juru tagih sebanyak 5 (lima) orang agar dapat melakukan penagihan (ter lampir SK penambahan juru tagih) 2. Menggali potensi PAD dari sektor PKL di Jl. DI Panjaitan, Rdn Wijaya, dan Jl. Gajah Mada, dengan mendata dan mensosialisasi bahwa PKL disekitar akan dijadikan objek retribusi pelayanan pasar baru (terlampir surat tugas)	Dengan dilakukannya upaya-upaya tindak lanjut tersebut sehingga pada tahun 2020 terealisasi PAD sebesar Rp. 4.259.395.644,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 72.995.373.000,- dari penerimaan tahun 2019 sebesar Rp. 4.186.400.271,- Dari tunggakan terealisasi sebesar Rp. 8.565.620,- (3 %)

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		d Meminta kepada Pemerintah Kota Jambi untuk memperhatikan, memastikan, pemeriksaan secara berkala sistem pengukuran dan alat-alat ukur (analog maupun digitalisasi), pengujian secara benar agar tidak merugikan konsumen	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut : 1. Telah ditindaklanjuti sesuai tufoksi yang terdapat pada UPTD Metrologi untuk secara intensif melakukan pengukuran dan pengujian alat-alat ukur serta pengawasan terhadap penggunaan alat-alat ukur. 2. Sehubungan dengan itu Kepala UPTD Metrologi telah menugaskan para penera melalui surat tugas selama tahun 2020 untuk melakukan tera tera ulang di pasar-pasar tradisional dan pasar modern serta pada UTTP lainnya seperti SPBU, mobil tangki minyak, dsb.	Tujuan untuk memastikan bahwa alat-alat ukur yang digunakan oleh pemilik/pengusaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai alat bukti bahwa pada tahun 2020 UPTD Metrologi telah melakukan tera tera ulang sebanyak 4.104 unit UTTP dan pengawasan terhadap pemilik UTTP sebanyak 1.264 pelaku usaha.
6	Dinas Perhubungan	a Peningkatan PAD dari sektor parkir salah satunya mempercepat pembangunan Gedung parkir di eks. Istana anak-anak dan penetapan tarif parkir progresif di Kawasan parkir	Pemda Kota Jambi mengajukan usulan pinjaman melalui kementerian keuangan	Untuk mengatasi kekurangan lokasi parkir dalam Kawasan dan kemacetan di Kawasan pasar
		b Merekomendasikan Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Bank Jambi untuk membuat e-money untuk transaksi non tunai guna menghindari kebocoran parkir	Telah ditetapkan Perwal No.32 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi tanggal 07 Juni 2018	Optimalisasi peningkatan penerimaan retribusi
		c Melakukan pendataan area lokasi parkir yang berpotensi dan melakukan penertiban juru parkir illegal	Telah ditetapkan SK Tim Razia Parkir Liar Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Razia Parkir Liar Dalam Wilayah Kota Jambi tanggal 02 Januari 2020	- Mendapatkan data potensi retribusi parkir - Mengurangi pelaku pungli parkir
7	PDAM Tirta Mayang	a Perumda Tirta Mayang meminta kepada Pemerintah kota Jambi untuk membentuk Tim Independent guna memberikan advis serta meningkatkan kinerja agar dapat memberikan PAD kepada Pemerintah Kota Jambi.	Hal ini belum dilaksanakan, selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah kota Jambi untuk membahas rencana pembentukan Tim Independent.	
		b Membangun komunikasi Perumda tirta Mayang dengan Dinas PUPR dalam penyusunan rencana APBD Kota Jambi.	Dalam melaksanakan ketersediaan akses Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Jambi, Perumda Tirta Mayang selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak PUPR guna mendapatkan kontribusi pembiayaan untuk pengembangan cakupan pelayanan air minum di Kota Jambi. Untuk tahun anggaran tahun 2019-2020 (terlampir).	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
		c	Meminta Perumda Tirta Mayang dapat menekan angka kebocoran air di Kota Jambi sampai dengan standar kelayakan/kewajaran.	Perumda Tirta Mayang Kota Jambi telah merenovasi dan penertiban jaringan pipa, serta penggantian meter air dalam rencana kerja Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, dengan Persentase penurunan NRW tahun 2019 sebesar 4,49%.	
		d	Melayani pendistribusian air ke masyarakat di fokuskan ke Kecamatan yang belum teraliri air Perumda Tirta Mayang Kota Jambi dengan melakukan pembuatan Booster.	Dalam meningkatkan pelayanan pendistribusian air Perumda Tirta Mayang telah berupaya memaksimalkan Booster-booster yang ada, namun untuk hal tersebut diperlukan optimalisasi Sistem Jaringan Pipa. Rencana penambahan pembuatan Booster di wilayah Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah yang belum teraliri secara maksimal.	
		e	Melakukan penagihan piutang-piutang pelanggan yang masih belum terbayar.	Perumda Tirta Mayang sesuai dengan ketentuan teknis apabila pelanggan menunggak dengan usia rekening lebih dari 2 bulan maka akan diputus. Dan dapat disambung kembali apabila telah membayar lunas seluruh tunggakan.	
8	Bagian Perekonomian	a	Lebih aktif dalam memonitoring dan evaluasi setiap OPD-OPD untuk berkoordinasi tentang perekonomian Kota Jambi yang aman dan terkendali	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan perangkat daerah terkait khusus dibidang perekonomian	Adanya Sinergi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait perekonomian
		b	Mengoptimalkan CSR yang ada di Kota Jambi terarah dan terukur, memonitoring serta mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan CSRnya ke Pemerintah Kota Jambi	Mengoptimalkan Forum CSR untuk peningkatan berkontribusi perusahaan dalam kegiatan CSR baik jumlah perusahaan dan nominalnya	Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang berkontribusi terkait CSR
Rekomendasi Pansus III (tiga) DPRD Kota Jambi					
1	Bappeda Kota Jambi	a	Pansus III merekomendasikan agar usulan hasil reses agar bisa dituangkan kedalam RAPBD berupa Pokok Pikiran Rakyat Pokir disampaikan sebelum penetapan Peraturan Kepala Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disampaikan pada waktu Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Pokok-pokok pikiran yang merupakan hasil reses telah dituangkan kedalam dokumen Perencanaan Tahunan (Bab V RKPD Kota Jambi)	Pokok-pokok pikiran telah dituangkan di dalam APBD 2021
		b	Agar Bappeda berkoordinasi dengan setiap OPD untuk mensinkronisasikan Pokir yang diajukan Anggota DPRD Kota Jambi	Melakukan Koordinasi dengan setiap OPD melalui bidang- bidang di Bappeda sesuai mitra masing-masing bidang	Telah melakukan koordinasi terkait pokok pikiran anggota DPRD Kota Jambi melalui asistensi dan sinkronisasi dengan OPD

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c Agar memprioritaskan anggaran dari program OPD untuk kepentingan masyarakat	Memprioritaskan anggaran pada OPD untuk kepentingan masyarakat	Secara umum prioritas anggaran OPD bertujuan untuk kepentingan masyarakat
2	Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	a Pansus III merekomendasikan pemasangan CCTV pada tempat-tempat yang rawan terjadi tindak kriminal	Untuk tahun 2020 anggaran pemasangan CCTV dibatalkan karena refocusing	Untuk tahun 2021 anggaran pemasangan tersebut tidak dianggarkan melainkan pemeliharannya saja
		b Pansus III merekomendasikan usaha hotel dan mall wajib memasang cctv di seputaran lingkungan hotel dan mall	Akan ditindaklanjuti	Akan ditindaklanjuti
3	Dinas Perhubungan Kota Jambi Dinas	a Pansus III mengapresiasi pengorbanan dan perjuangan seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam percepatan penanganan wabah Covid-19	Akan melanjutkan sesuai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Untuk mengurangi tingkat penyebaran dan mobilisasi orang dan kendaraan
		b Pansus III merekomendasikan penambahan kendaraan Derek	Telah diusulkan melalui KUAPPAS 2021	- Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas jalan dan meningkatkan ketertiban kelancaran lalu lintas - Keterbatasan anggaran akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya
		c Pansus III merekomendasikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir	Telah diusulkan pembuatan pos pemungutan retribusi di pasar rakyat talang banjar.	- Untuk meningkatkan PAD - Penataan juru parkir dan tempat parkir saat ini
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	a Pansus III mengapresiasi pengorbanan dan perjuangan seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam percepatan penanganan wabah Covid-19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dalam menjalankan tugas harian menjadi lebih bersemangat dan termotivasi atas apresiasi yang diberikan oleh DPRD Kota Jambi	Peningkatan performa Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Diberikannya fasilitas tambahan seperti yang tercantum dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan
		b Pansus III merekomendasikan penambahan anggaran, armada dan anggaran pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat kinerja Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah mendapatkan penambahan anggaran untuk pengadaan armada yang awalnya hanya 1 unit, terealisasi di Tahun 2020 sebanyak 3 unit	Dengan adanya penambahann armada pemadam kebakaran ini, akan memudahkan petugas untuk menjangkau daerah yang padat penduduk sehingga proses pemadaman dapat segera diatasi
		c Pansus III merekomendasikan agar memperhatikan kesejahteraan (insentif, asupan gizi dan multivitamin) sarana dan prasarana personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Penanganan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini	Di beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Tahun 2020 sudah menganggarkan dana untuk kebutuhan asupan gizi, multivitamin dan insentif untuk menunjang kesejahteraan petugas	Performa Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi meningkat seiring dengan adanya penambahan asupan gizi, multivitamin dan insentif. Hal ini tercermin dalam kegiatan Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				Rekrutmen Tenaga Sukarela Penganggulangan Bencana Peningkatan Pelayanan Penganggulangan Bencana Kebakaran
		d Pansus III merekomendasikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membuat grand design dengan merancang program kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana (salah satunya wabah Covid -19)	Di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sudah ada program kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana, akan tetapi untuk wabah COVID-19 belum terlaksana di Tahun 2020	Kesadaran masyarakat akan bencana sudah berangsur angsur terpenuhi. Tercantum dalam kegiatan Bimbingan Teknis, Diklat dan sosialisasi Penanganan Bencana, Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	a Pansus III merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meningkatkan penanganan sampah dan penebangan pohon yang berpotensi membahayakan masyarakat.	Dalam meningkatkan penanganan sampah, DLH telah melakukan optimalisasi kebersihan pasar-pasar rakyat seperti di Pasar Talang Banjar, TAC, Kasang, Aurduri dan Pasar Olak Kemang, pembersihan Danau Sipin dengan menggunakan perahu pembersih yang saat ini DLH telah memiliki 2 unit perahu pembersih, pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil dump truk pagi hari 2 ritasi dan sore hari 1 ritasi, pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil patrol dengan 2 ritasi pagi dan sore	Penanganan sampah dan penataan pohon pelindung
		b Pansus III merekomendasikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup baik perorangan maupun pelaku usaha.	Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan sanksi administrasi terhadap 14 pelaku usaha yang tidak taat.	Penegakan hukum lingkungan hidup
		c Pansus III mendesak DLH memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan penghasil limbah.	Selama tahun 2020 DLH telah melakukan pengawasan kepada 100 pelaku usaha/perusahaan, melakukan pembinaan kepada 40 pelaku usaha/perusahaan, pengawasan penanganan limbah B3 kepada 32 dunia usaha dan 11 fasilitas kesehatan	Pengawasan terhadap perusahaan penghasil limbah
		d Pansus III merekomendasikan DLH menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi sesuai Undang-Undang Lingkungan Hidup.	Ruang terbuka hijau sebanyak 30% sesuai amanah UU 26 tahun 2007 terdiri dari 10% private dan 20% publik, yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Jambi adalah memenuhi 20% RTH Publik. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi 20% publik selama ini adalah : • Melakukan pendataan lahan-lahan yang	Terkait penambahan RTH

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			<p>berada dikawasan sempadan jalan dan PSU-PSU dari perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Jambi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan hidup Kota Jambi telah melakukan upaya sosialisasi perlunya taman hijau dan perlunya resapan air melalui program Sekolah Adiwiyata yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan dan program kampung iklim, dimana untuk tahun 2019 DLH telah membina Sekolah Adiwiyata sebanyak 30 sekolah dan 5 lokasi penyuluhan Kampung Iklim. • Pada setiap pembahasan dokumen lingkungan, baik SPPL, UKL-UPL maupun AMDAL telah kita sarankan agar dalam pembangunan perumahan, ruko, gudang dan kantor serta bangunan lainnya, agar pemrakarsa melakukan pemanenan air hujan dengan membangun kolam retensi atau sumur resapan dan juga menyediakan lahan untuk ruang hijau atau melakukan penanaman pohon disekitar bangunan. Untuk lahan yang terbatas dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan dengan memakai media tambahan seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai dengan lahan yang tersedia 	
		<p>e Pansus III merekomendasikan DLH menginventarisir daerah resapan air yang bisa dipertahankan dan dikuasai oleh pemerintah Kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan lahan-lahan yang berada dikawasan sempadan sungai dan danau yang bisa digunakan untuk RTH/resapan air. • Berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dalam rangka membebaskan lahan/tanah milik masyarakat dengan upaya land banking yang di dalam RTRW masuk ke dalam kawasan RTH, dimana untuk pembebasan ini membutuhkan dana yang anggarannya ada di Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi. 	<p>Inventarisir daerah resapan air</p>

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	a	Agar meninjau kembali tarif pengurusan Izin Memndirikan Bangunan (IMB) karena akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Kota Jambi	Akan di koordinasikan dengan tim PAD Kota Jambi terkait dengan PAD yang telah di tetapkan untuk tahun berjalan	Akan membawa iklim investasi yang lebih baik baik di Kota Jambi
		b	Penambahan lampu penerangan jalan lingkungan	Penampahan Lampu penerangan Jalan Lingkungan Telah dilakukan sesuai dengan Anggaran yang tersedia yaitu sebanyak 1.929 Titik	Masalah yang diselesaikan yaitu meminimalisir kawasan – kawasan di kota jambi yang masih belum mempunyai fasilitas lampu jalan
7	Dinas PUPR	a	Pansus III merekomendasikan agar Dinas PUPR meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan lingkungan	Pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas & kuantitas Jalan Lingkungan dengan melaksanakan proses perencanaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis AHS Bina Marga tahun 2018 dan melakukan pengawasan dengan dibantu konsultan pengawas.	Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas Jalan Lingkungan yang baik
		b	Pansus III merekomendasikan agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR Kota Jambi terus berupaya meningkatkan pengawasan pekerjaan melalui pengawas teknis di Dinas dan juga konsultan pengawas yang dipilih melalui lelang lpse agar mendapatkan pengawasan yang maksimal. • Bidang SDA akan meningkatkan Pengawasan pelaksanaan dengan menempatkan pelaksana dan personel pengawas yang berkualitas dan berpngalaman untuk mendapatkan hasil yang maskimal/baik. • Seksi Air Bersih, merekomendasikan pengawas lapangan sesuai dengan keahlian di bidang tersebut, guna untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan. • Pada Seksi Air Limbah, menunjuk konsultan dan kontraktor yang profesional dan dengan melakukan pelatihan kepada personil-personil pelaksana dari pihak kontraktor untuk meningkatkan SDM dan meningkatkan koordinasi di lapangan dan mewajibkan konsultan pengawas 	<p>Untuk memenuhi pelaksanaan pekerjaan yang baik dengan meningkatkan pengawasan pada pekerjaan</p> <p>Untuk mendapatkan pelaksanaan pekerjaan fisik yang maksiman/baik.</p> <p>Agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, memiliki kualitas hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat secara langsung. Tercapainya kualitas pekerjaan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan berdasarkan spek yang di inginkan.</p> <p>Agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, memiliki kualitas hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat secara langsung.</p>

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			melakukan pelaporan setiap hari kerja untuk mengetahui progres dan mutu pekerjaan.	
		c Pansus III merekomendasikan menata Unit Pengelola Campuran Aspal (UPCA) yang lebih profesional, transparan, dana dapat menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD)	UPCA pada tahun 2020 telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan topoksi dan terus meningkatkan pelayanan prima untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Untuk dapat memenuhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		d Pansus III merekomendasikan pengelolaan, perencanaan, penataan dan pelaksanaan jalan lingkungan dalam perumahan diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Akan dipelajari dan koordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bappeda untuk rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	-
		e Pansus III merekomendasikan pengelolaan transportasi tinja diserahkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup	Penetapan UPTD SPALD (Layanan Sedot Tinja) pada Dinas PUPR Kota Jambi berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut untuk kegiatan pengelolaan air limba berada pada pogram Sanitasi yang berada pada Bidang Cipta Karya. Jika UPTD SPALD di pindahkan pada Dinas Lingkungan Hidup, maka akan terkendala dalam menetapkan anggaran untuk kegiatan UPTD SPALD tersebut. Karena kodefikasi anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah berada pada program Sanitasi yang berada pada Bidang Cipta Karya.	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya pelayanan sedot tinja dengan baik dalam upaya mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh air limbah • Untuk menjaga mutu air tanah yang berkelanjutan sesuai dengan standar mutu air layak konsumsi

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		f Pansus III merekomendasikan membuat studi kelayakan setiap rencana pembangunan terutama dari dana pinjaman.	<ul style="list-style-type: none"> Selayaknya setiap Kegiatan Pembangunan harus melalui kajian FS (Feasibility Study) hal tersebut guna mengetahui fungsi kelayakan Fungsi manfaat bangunan tersebut. Terkait keg pinjaman daerah ke PT. SMI sudah melalui proses kajian FS. Membentuk tim penyusunan studi kelayakan untuk setiap rencana pekerjaan, berupa konsultan yang berkompeten dalam bidang pekerjaan tersebut. 	<p>Untuk mengetahui fungsi kelayakan Fungsi manfaat bangunan tersebut</p> <p>Agar pembangunan suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan bermanfaat</p>
Rekomendasi Pansus IV (satu) DPRD Kota Jambi				
1	Dinas Kesehatan	a Dinas Kesehatan Kota Jambi harus segera mendorong dan mengevaluasi RSUD H.Abdurahman Sayoeti mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi diantaranya : SDM masih kurang, Bangunan dan sarana tidak standar oleh sebab itu harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk layaknya RSUD tipe D	Tahun 2021 telah di anggarkan pembangunan RS HAS dengan dana SMI	Meningkatnya sarana prasarana dan menuju akreditasi
		b Untuk program Jambi Bugar perlu adanya sinkronisasi and validasi data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih kepersertaan	Koordinasi Dengan Dinsos Kota Jambi	Validasi Data Maskin
		c Dalam melakukan pendataan calon peserta Program Jambi Bugar harus mengacu kepada data dari instansi/lembaga yang berwenang seperti data BPS, Dinas Sosial maka pemerintah kota jambi perlu verifikasi lapangan sehingga datanya akurat dan dapat diakses.	Koordinasi Dengan Dinsos Kota Jambi	Validasi data yang akurat
2	RSUD Abdul Manap	a Untuk meningkatkan pelayanan perlu penambahan tenaga keperawatan sesuai dengan dokter spesialis Radiologi, serta dokter spesialis paru	Pada tahun 2021 akan dilakukan Rekrutmen Tenaga Keperawatan sesuai dengan bidang Radiologi dan Paru	Tersedianya Tenaga Keperawatan sesuai dengan Bidang Radiologi dan paru
		b RSUD H. Abdul Manap sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) namun untuk mengoptimalkan pelayanan diperlukan support anggaran sebesar 15 Milyar dari APBD Kota Jambi	Pada Tahun Anggaran 2020 semua Belanja Operasional BLUD sudah ditutupi dari sumber dana BLUD. Namun, dalam memenuhi semua belanja operasional tersebut karena keterbatasan Dana BLUD kami laksanakan berdasarkan skala prioritas dan urgensi kebutuhan.	Tersedianya dana operasional RSUD H. Abdul Manap

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c Untuk Mengatasi kekurangan Dokter Spesialis, Pemerintah Kota Jambi harus membuat program untuk membiayai dokter umum ASN mengambil Pendidikan dokter Spesialis	Pada Tahun 2020 ada 2 orang Dokter Spesialis yaitu 1 orang Dokter mengikuti Program Sub Spesialis Kandungan dan 1 Orang Dokter mengikuti Program Spesialis Gigi dan Pada tahun 2021 ini ada 1 Orang Dokter mengikuti Program Spesialis Paru yang bersumber dana tugas belajar Kementerian Kesehatan.	Tersedianya kebutuhan dokter spesialis di RSUD H.Abdul Manap
3	RSUD Abdurrahman Sayoeti	a Perencanaan penganggaran tidak matang karena tidak adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Jambi dengan RSUD HAS sehingga terjadi silpa sebesar 3 milyar lebih	Perencanaan pada tahun 2020 telah dilaksanakan pada perencanaan RSUD HAS, sehingga perencanaan kebutuhan akan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut mengenai perencanaan RSUD HAS dengan Dinas Kesehatan	Menurunkan SILPA pada keuangan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti
		b Bangunan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti belum standar karena awalnya merupakan bangunan Puskesmas Olak Kemang yang ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Tipe D sehingga perlu adanya pembenahan yang lebih serius, seperti IPAL Komunal yang tidak standar yang tidak standar, daya listrik yang rendah, laboratorium, Ruang USG, instalasi air, Ruang IGD serta pintu masuk dan keluar masih satu tempat	Pembangunan IPAL Komunal telah dilaksanakan di tahun 2020 dengan sumber dana DAK Pusat. Daya Listrik telah dinaikkan pada tahun 2020 serta instalasi air telah diperbaiki pada tahun 2020. Penyediaan laboratorium, Ruang USG, serta akses berbeda pintu masuk dan keluar akan dilaksanakan pada pembangunan RSUD HAS pada tahun 2021	Tersedianya fasilitas RSUD HAS sesuai spesifikasi Rumah Sakit Tipe D
		c Karena sangat rendahnya jumlah kunjungan pasien maka pemerintah Kota Jambi harus segera mempercepat akreditasi sehingga bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan	Proses akreditasi sdh di persiapan namun terkendala pandemi covid. Adanya peraturan penundaan akreditasi hingga 1 thn pasca bebas covid baru dapat dilaksanakan akreditasi	Terlaksananya proses akreditasi RSUD HAS
		d Kekurangan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit paru dan dokter spesialis anak serta tenaga medis sbelumnya sudah ditempatkan, namun di pindahkan ke tempat lain	Melaksanakan koordinasi dengan BKPSDMD mengenai Pengajuan kebutuhan dokter spesialis untuk RSUD HAS	Tersedianya tenaga dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru dan anak serta tenaga medis lainnya di RSUD HAS
		e Belum tersedianya tunjangan kelangkaan di RSUD HAS	Tunjangan kelangkaan telah dianggarkan pada APBD 2020	Tersedianya tunjangan kelangkaan di RSUD HAS
4	Dinas Pendidikan	a Masih ada program yang perencanaannya tidak matang, sehingga menimbulkan silpa yang besar.	Memantapkan dan mematangkan perencanaan tahun 2020 dan selanjutnya.	Meminimalisir/mengurangi adanya SILPA dari kegiatan yang dilaksanakan.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
		b	Ada beberapa program dan anggaran DAK yang nilainya miliaran rupiah dikembalikan ke pusat akibat tidak terlaksana karena kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sehingga terjadi perencanaan yang tidak tepat	Perencanaan DAK sesuai dengan kondisi factual sekolah. Menyelaraskan isian DAPODIK sekolah Pembenahan aspek mengenai pengelolaan dana DAK.	Meningkatkan sarpras dan mutu pembelajaran.
		c	Untuk peningkatan kualitas pendidikan Kota Jambi Seberang diperlukan pemerataan sarana prasarana serta penempatan guru dan kepala sekolah berprestasi.	Pemetaan, Pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		d	Agar efektif pembangunan prasarana tepat sasaran, maka dalam perencanaan dan pengawasan harus melibatkan dinas pendidikan dan sekolah terkait serta harus sesuai dengan skala prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Menyelaraskan isian DAPODIK sekolah Pembenahan aspek mengenai pengelolaan dana DAK Mendata sekolah yang menjadi kebutuhan sarpras dengan kebutuhan yang ada Dari kebutuhan yang ada di ukur tingkat kebutuhan yang mendesak yang menjadi kebutuhan utama. 	Peningkatan Akses terhadap Satuan Pendidikan
		e	Terhadap bidang PAUD, banyaknya anggaran kegiatan yang tidak tepat sasaran (mayoritas menggunakan pihak ketiga) sehingga tidak sesuai dengan prinsip kebijakan umum anggaran, untuk itu ke depan anggaran di bidang PAUD untuk diprioritaskan terhadap kegiatan yang langsung tenaga pendidik dan peserta didik	Kegiatan yang dimaksud memang langsung kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan minat bakat peserta didik PAUD dan menanamkan cinta budaya kepada anak-anak sejak usia dini, dengan menghadirkan 1000 peserta didik (telah dikurangi dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4000 peserta didik	Tujuan : untuk menanamkan cinta budaya kepada anak dan mengembangkan minat bakat peserta didik sejak anak usia dini. Masalah : dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan menghadirkan 1000 peserta didik ditambah dengan orangtua serta menghadirkan pihakMURI dan FORKOMPIMDA diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga.
5	DPPKB Kota Jambi	a	Mengotimalkan Tugas dan Fungsi PLKB Agar Target DPPKB Tercapai	Melakukan Evaluasi dan Monitoring kepada para PLKB	Mutasi kepada para PLKB untuk penyegaran dan meningkatkan Kinerja PLKB
6	Dinas Sosial	a	Berdasarkan hasil pembahasan dengan Dinas Sosial tentang penggunaan dana APBD tahun 2019 dalam Penanganan dan pengentasan kemiskinan belum optimal	Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan upaya penanganan dan pemberdayaan PMKS dengan melaksanakan pendistribusian bantuan korban bencana, peningkatan kemampuan PSKS, melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS dan Peningkatan keterampilan berusaha membuat kuliner bagi keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan kube fakir miskin melalui bantuan perkotaan	Perlunya peningkatan kualitas SDM PSKS dalam menangani PMKS
		b	Agar pendistribusian bantuan untuk warga miskin merata, harus ada transparansi data PKH dan bantuan sembako dari pemerintah pusat harus disinergikan dengan data penerima bantuan pada program APBD Kota Jambi,	Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan koordinasi dengan Lurah dan Camat dalam melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat penerima bantuan di Kota Jambi	Pemberdayaan TKSK selaku ujung tombak Pendataan kesejahteraan sosial di setiap Kecamatan

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
		c	dan Data tersebut harus disampaikan dan dikoordinasikan ke Lurah		
		c	Dinas Sosial harus memperbaiki system data base terpadu untuk masyarakat miskin dan terkoneksi dengan instansi terkait	Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan koordinasi dengan Dinas DUKCAPIL dan Dinas Kominfo Kota Jambi dalam hal data base terpadu yang akurat dan transparan	Peningkatan sarana perangkat lunak dan SDM pengelola DTKS
7	Bagian Kesra	a	Untuk mensyiarkan dan menumbuhkan motivasi masyarakat agar lebih mencintai Alquran, maka LPTQ dalam merekrut peserta disetiap cabang harus mengutamakan qori/qoriah lokal dalam pelaksanaan MTQ disetiap tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Jambi dan Provinsi Jambi tanpa harus mengambil dari luar daerah	Optimalisasi Peran dan Fungsi LPTQ Kota Jambi dengan Program Pembinaan Kafilah Potensial Berkelanjutan	Terjadinya perubahan signifikan pada komposisi peserta kafilah Kota Jambi yang semuanya murni asal Kota Jambi
		b	Perlu ditingkatkan insentif untuk guru madrasah diniyah dan pondok pesantren yang besarnya disesuaikan dengan guru honor TTK Kota Jambi, meningkat kedua lembaga pendidikan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Jambi untuk membangun masyarakat yang berakhlak dan berbudaya	Mengajukan kenaikan besaran insentif Guru Ponpes-DTA dari Rp 100000/bulan menjadi Rp 200000/bulan dan memilah Guru yang benar-benar perlu dibantu	Untuk ukuran kesejahteraan belum maksimal dan perlu terus ditingkatkan
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	a	Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak standar karena Bocor, tidak ada partisi dan tata ruang yang kurang, maka Pemerintah Kota Jambi harus segera menganggarkan untuk perbaikan supaya optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Telah diusulkan kepada Pemerintah Kota Jambi Untuk Perbaikan dan Pembangunan Gedung Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Telah dianggarkan melalui Dinas PUPR untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 untuk Gedung Perpustakaan
		b	Perlu ditingkatkan sosialisasi program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi kepada Pelajar, Mahasiswa serta masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.	Telah di buat aplikasi jambikota, SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis), website, indislite.	Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Kearsipan dan Perpustakaan. Meningkatnya sosialisasi program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
9	Dinas Tenaga Kerja	a	Program pelatihan untuk penciptaan lapangan kerja harus Inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman dan dibutuhkan pasar	Jenis pelatihan yang dilaksanakan merupakan pelatihan yang dapat menambah keahlian pencaker untuk menciptakan lapangan kerja sesuai dengan perkembangan zaman dan yang dibutuhkan pasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tahun 2021 belum bisa menambah jumlah kuota peserta pelatihan dan jenis kegiatan pelatihan, tetapi jam pelatihan di tambah menjadi 200 jampel sebagai syarat minimal peserta pelatihan dapat mengikuti ujian kompetensi. 2. Ditahun 2021 pelatihan bagi anggota P2WKSS tetap dianggarkan tetapi pelaksanaannya menunggu koordinasi dengan DPMPPA Kota Jambi sebagai Leading Sektor. 3. Memilih peserta pelatihan dengan menerapkan priotas bagi pelaku UMKM yang telah memiliki IUMKM dan belum pernah mengikuti pelatihan serupa sebelumnya.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				4. Memberikan pelatihan berbasis IT bagi pengelola/ pengurus koperasi
		b Peserta yang sudah mendapatkan pelatihan harus tetap dibina, difasilitasi untuk mendapatkan legalitas usaha serta promosi agar mandiri dan profesional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap peserta yang telah mengikuti pelatihan. 2. Memfasilitasi legalitas usaha pelaku UMKM untuk mendukung usahanya (sertifikasi label halal) 3. Promosi produk UMKM melalui media sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan kegiatan monev, pembinaan dapat berkelanjutan. 2. Dengan adanya sertifikasi label halal, menambah kualitas produk UKM untuk mampu bersaing dipasaran. 3. Penyebar luasan informasi dan promosi produk UKM melalui media sosial, sebagai strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi.
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	a Karena keterbatasan lahan untuk sarana olahraga yang dimiliki Pemerintah Kota Jambi, maka Dinas Pemuda dan Olahraga harus merevitalisasi sarana yang ada agar bisa dimanfaatkan secara maksimal	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi telah melakukan revitalisasi terhadap sarana prasarana yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pekerjaan konstruksi rehab lapangan tenis, pengecatan tribun dan pagar persijam, pemasangan keramik tribun timur persijam, dan pengadaan peralatan olahraga	Revitalisasi sarana prasarana perlu dilaksanakan dikarenakan selain mengatasi permasalahan keterbatasan lahan, sarana prasarana perlu diperbaiki demi meningkatkan minat berolahraga bagi para pelaku olahraga sehingga sarana prasarana dapat dimanfaatkan secara maksimal
		b Terhadap para atlet kota Jambi yang berprestasi harus dibina dan di fasilitasi menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jambi	Sebagian besar Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang ada Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan atlet atlet berprestasi di Kota Jambi dan Dinas Pemuda dan Olahraga terus berupaya untuk menyalurkan atlet atlet berprestasi di Kota Jambi yang berminat untuk bekerja di ruang lingkup pemerintahan Kota Jambi	Atlet kota Jambi yang berprestasi perlu untuk dapat dibina dan difasilitasi Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai reward dari prestasi yang diperoleh oleh para atlet tersebut dalam membawa nama kota Jambi
		c Untuk menghasilkan atlet yang berprestasi dan membanggakan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga harus merekrut dan membina atlet asli Kota Jambi	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi telah melakukan pembinaan terhadap atlet atlet asli Kota Jambi sebagai kegiatan rutin dari bidang olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga juga telah melaksanakan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) guna mendukung pembinaan atlet, asisten pelatih, dan pelatih berprestasi Selain itu di masa pandemi COVID-19 ini, Dinas Pemuda dan Olahraga mengatasi permasalahannya dengan melakukan pembinaan cabang olahraga yang tidak mengumpulkan massa yaitu cabang olahraga e-sport	Perekutan dan pembinaan atlet asli kota Jambi perlu di lakukan demi meningkatkan mutu dan kualitas dari pelaku olahraga di Kota Jambi Selain itu pembinaan terhadap atlet asli kota Jambi juga perlu dilaksanakan untuk dapat membawa nama baik kota Jambi di ruang lingkup nasional

Sumber: OPD terkait, 2021.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi tidak mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB V PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

5.1. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan materi, narasi dan data pada bab-bab terdahulu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun 2020 ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.617.658.414.714,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.559.194.791.889,83 atau 96,39% (data sebelum audit BPK);
2. Jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaan Pendapatan Daerah, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 22,8% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020. Adapun Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 66,5% dan sisanya sebesar 10,7% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (data sebelum audit BPK);
3. Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.828.835.334.125,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.638.511.401.928,45 atau 89,59% (data sebelum audit BPK);
4. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah, bekerja serta mobilitas yang mengakibatkan turunnya aktivitas ekonomi. Adapun strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2020 dalam menghadapi kondisi pandemi tersebut, diantaranya adalah mengurangi (rasionalisasi) Belanja Daerah pada kegiatan yang tidak efektif pada fase pandemi; memastikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan daerah; meningkatkan sosialisasi, diseminasi dan komunikasi publik melalui berbagai media cetak elektronik dan media sosial. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga menyusun kebijakan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
5. Pemerintah Kota Jambi juga menyusun berbagai kebijakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan anggaran;
Re-focussing APBD Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 58.211.923.000,00.
 - b. Kebijakan Stimulus bagi Dunia Usaha dan Masyarakat;
 - Kebijakan pembebasan tagihan air minum Perumda Tirta Mayang Pembayaran bulan Mei dan Juni;

- Membebaskan 4 jenis pajak dari pelaku usaha. Jenis pajak tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah;
 - Memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga 31 Desember 2020.
- c. Kebijakan Ekonomi Sosial Kemasyarakatan
- Melibatkan UMKM dalam penyediaan masker dan APD serta konsumsi dan transportasi untuk tetap menjaga produktivitas dunia usaha;
 - Melakukan berbagai agenda dan aturan (Perwal, instruksi, edaran dan dan himbauan termasuk SKB) dalam rangka mencegah penyebaran covid19 dan diikuti dengan kegiatan implementatif di wilayah Kota Jambi;
 - Menyiapkan program-program padat karya yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak covid19.
6. Adapun capaian realisasi Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi pada tahun 2020 dapat terealisasi dengan baik, meskipun ada sebagian realisasi indikator berada di bawah target, hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Dari 34 (tiga puluh empat) Indikator Sasaran RPJMD, baru 29 (dua puluh sembilan) indikator yang tersedia data realisasinya. Secara rata-rata, capaian realisasi 29 indikator tersebut adalah sebesar 99,78%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan.

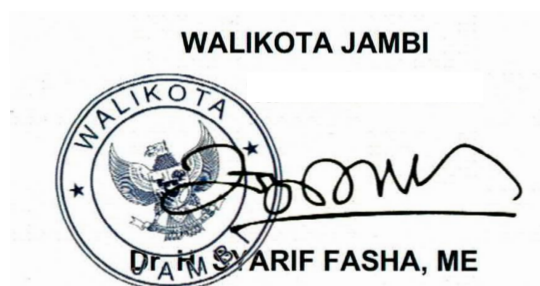
5.2. SARAN

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Memperkuat sektor-sektor perekonomian dan jasa seiring upaya optimalisasi sumber-sumber potensi PAD dalam rangka pemulihan ekonomi daerah di tengah kontraksi ekonomi global maupun nasional akibat pandemi. Upaya pemulihan ekonomi daerah ini diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan;
2. Dalam mewujudkan pencapaian Indikator Tujuan maupun Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi, setiap Perangkat Daerah harus mengetahui apa dan bagaimana mencapai setiap indikator tersebut, sesuai dengan peran dan porsi masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah maupun instansi lainnya agar terus ditingkatkan.

Demikianlah beberapa kesimpulan maupun saran sebagai penutup dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun 2020 ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. *Amin ya robbal alamin.*

Terima Kasih.



LAMPIRAN I INDIKATOR TUJUAN RPJMD KOTA JAMBI

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2020	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	6%	6%
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	100%	100%
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5,67	7,44
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,39	55,16
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,39	-3,28
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,42	10,49
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,54	78,37
			Indeks Pembangunan Gender	94,91	94,6
			Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	Nindya
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61,43%	59,15
			Persentase Penduduk Miskin	7,29	8,27

LAMPIRAN II INDIKATOR SASARAN RPJMD KOTA JAMBI

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase Capaian 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,55	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	
					Indeks Profesionalitas ASN	57,5	66,7	116,00%
					Nilai SAKIP	BB	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	
					Indeks survey persepsi Korupsi	3,69	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	86	85,51	99,43%
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	80%	75%	93,75%
					Penurunan Jumlah kasus atau pelanggaran per tahun	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	100,00%
					Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	48,71%
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	60,77%	65,56%	107,88%
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	38,3
			Indeks Kualitas Udara	80,72			84,51	104,70%
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,7	44,81	107,46%		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase Capaian 2020
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	52	116,23	223,52%
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	91	91,5	100,55%
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,38%	2,29%	96,22%
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	-9,64%	-107,11%
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430,5 M	249,4M	57,94%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,25%	64,12%	98,27%
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8,54%	8,54%	100,00%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	5,35%	2,80%	52,34%
					Persentase koperasi berkualitas	19,27%	19,73%	102,39%
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,35	72,65	100,41%
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,61	15,10	103,35%
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	17,32	17,32	100,00%
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,69	10,92	102,15%
			Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05	Data belum dikeluarkan oleh		
				Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,46%	96%	99,52%	
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,91	94,6	99,67%
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,2	69,83	102,39%
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	80%	100,00%
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61,43	59,15	96,29%
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	50,5	Data belum tersedia	
Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%	67,2%	96,0%			

LAMPIRAN III

TABEL CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

1. Tabel Capaian Urusan Wajib (Pelayanan Dasar Dan Non Pelayanan Dasar) Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.118.202.270		3.554.804.702			
				1 Penyediaan jasa surat menyurat dan perizinan	108 Unit	20.000.000	108 Unit	16.444.500	100%	Refocussing Covid-19	
				2 Penyediaan jasa dan komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 unit 6 unit 1 tahun	286.050.000	9 unit 6 unit 1 tahun	267.305.449	100%	Refocussing Covid-19	
				3 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan dan Aset	261 orang	1.073.410.000	261 orang	979.755.000	100%		
				4 Penyediaan jasa Tenaga Pendukung/ tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	62 orang	1.482.631.800	62 orang	1.180.983.052	100%		
				5 Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan, dan Penggandaan	1 Tahun	185.375.000	1 Tahun	183.455.240	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	77.278.750	12 Bulan	59.670.000	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	62 unit 1 tahun	139.734.520	62 unit 1 tahun	92.160.000	100%	Refocussing Covid-19	
				8 Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	108 unit 1 tahun	576.667.200	108 unit 1 tahun	503.377.200			
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	1 Keg	277.055.000	1 Keg	271.654.261	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		107.300.000		102.155.421			
				1 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	1 Kali	46.800.000	1 Kali	42.047.900	100%	Refocussing Covid-19	
				2 Perjalanan Dinas	1 tahun	60.500.000	1 tahun	60.107.521	100%	Refocussing Covid-19	
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		350.000.000		337.219.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Laporan	4.500.000	6 Laporan	4.500.000	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	3 Dokumen	4.250.000	3 Dokumen	4.250.000	100%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Bimtek 740 orang	341.250.000	Bimtek 740 orang	328.469.000	100%		
				Program Peningkatan Akses, Mutu, dan Tata Kelola Pendidikan		120.881.460.304		89.334.968.609			
				Penyelenggara Akreditasi PAUD dan PNF		-		-		Refocussing Covid-19	
				Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan PNF		-		-		Refocussing Covid-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				Peningkatan Kelembagaan serta Sarana Prasarana PAUD dan PNF	50% satuan Paud PNF	895.110.250	50% satuan Paud PNF	880.514.707	100%		
				Pengelolaan bantuan Operasional PAUD	100%	1.046.900.000	100%	987.000.000	100%		
				Peningkatan Minat Bakat Peserta Didik PAUD dan PNF					100%	Refocussing Covid-19	
				Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan PNF					100%	Refocussing Covid-19	
				Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Paket A 60 org Paket B 310 org Paket C 408 org	379.700.000	Paket A 60 org Paket B 310 org Paket C 408 org	331.250.000	100%	Refocussing Covid-19	
				Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup						Refocussing Covid-19	
				Penyelenggaraan Akreditasi SD	19 Sekolah	27.185.000	19 Sekolah	27.185.000	100%		
				Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SD						Refocussing Covid-19	
				Peningkatan Sarana Prasarana SD	35 Sekolah	19.799.182.905	35 Sekolah	19.706.211.694	100%		
				Pengembangan Kelembagaan SD	25 Sekolah	85.414.500	25 Sekolah	81.174.500	100%		
				Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD	164 Sekolah	62.359.989.314	164 Sekolah	41.866.484.448	100%		
				Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SD	24 Peserta 25 Sekolah	14.200.000	24 Peserta 25 Sekolah	14.200.000	100%	Refocussing Covid-19	
				Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD	10746 Peserta	146.875.000	10746 Peserta	50.875.000	100%	Refocussing Covid-19	
				Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SMP	25 Sekolah 100 Peserta	55.925.000	25 Sekolah 100 Peserta	42.475.000	100%	Refocussing Covid-19	
				Peningkatan Sarana Prasarana SMP	7 Sekolah	6.649.800.000	7 Sekolah	6.473.934.914	100%		
				Pengembangan Kelembagaan SMP						Refocussing Covid-19	
				Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP	25 Sekolah	28.574.922.335	25 Sekolah	18.343.837.346	100%		
				Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SMP						Refocussing Covid-19	
				Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP	100%	54.150.000	100%	53.150.000	100%	Refocussing Covid-19	
				Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru	100%	202.080.000	100%	199.580.000	100%		
				Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Peserta Didik Berprestasi Tingkat Nasional						Refocussing Covid-19	
				Orientasi Calon Kepala Sekolah serta Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	122 kepek 23 orang Pengawas	523.700.000	122 kepek 23 orang Pengawas	212.770.000	100%		
				Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF						Refocussing Covid-19	
				Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah dan Tenaga Perpustakaan SD						Refocussing Covid-19	
				Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Laboratorium SMP						Refocussing Covid-19	
				Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional						Refocussing Covid-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru	100%	46.326.000	100%	46.326.000	100%		
				Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS						Refocussing Covid-19	
				Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	164 SD 25 SMP	20.000.000	-	18.000.000	100%	Refocussing Covid-19	
JUMLAH						125.456.962.574		93.329.147.732			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		9.950.554.785		8.073.530.225			
				1 Penyediaan jasa Surat menyurat dan Perizinan	147 STNK/KIR	50.000.000	95,74%	47.867.600		Tidak Ada	
				2 Penyediaan jasa dan komponen/instalasi telekomunikasi sumber daya air dan listrik	63777 kwh, 1386 kubik, 115 mpbs, 1 thn	1.603.246.500	71,28%	1.142.781.695		Tidak Ada	
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	127 org	948.740.000	78,08%	740.748.000		Tidak Ada	
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	297 org	5.463.423.477	79,38%	4.336.791.910		Tidak Ada	
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	299.973.808	99,19%	297.534.750		Tidak Ada	
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	90.000.000	98,58%	88.722.500		Tidak Ada	
				7 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	36 unit, 2pkt 1thn	813.831.000	99,58%	810.409.600		Tidak Ada	
				8 Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	1 thn	481.340.000	84,93%	408.798.670		Tidak Ada	
				9 Pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	1 unit per tahun	200.000.000	99,94%	199.875.500		Tidak Ada	
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		587.535.000		553.127.718			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	180 stel	126.000.000	99,00	124.740.000		Tidak Ada	
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	20 pkm	81.535.000	99,82	81.385.000		Tidak Ada	
				3 Perjalanan Dinas	1 thn	380.000.000	91,32	347.002.718		Tidak Ada	
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		147.104.650		81.640.500			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10 dokumen	15.000.000	77,43	11.615.000		Tidak Ada	
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	12 dokumen	60.000.000	7,06	4.237.500		Tidak Ada	
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	aplikasi sikda generik, aplikasi komdat, website dinkes, buku profil, laporan	72.104.650	91,24	65.788.000		Tidak Ada	
				Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		211.961.610.375		185.615.856.049			
				1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	96	4.086.730.955	97,85	3.998.809.989		Tidak Ada	
				2 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	1	333.165.000	82,08	273.450.750		Tidak Ada	
				3 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	7pkm	7.609.358.500	91,64	6.973.472.759		Tidak Ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				4 Mitraan Asuransi Kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat	24.882 Jiwa	8.324.441.182	98,78	8.223.216.432		Tidak Ada	
				5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	17 RS	137.905.000	94,09	129.757.150		Tidak Ada	
				6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	77.778.000	99,39	77.306.000		Tidak Ada	
				7 Penyuluhan , Pengembangan Media Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	13440	259.595.000	52,04	124.440.500		Penyuluhan PHBS Tidak Dapat di Laksanakan Karena Covid-19 Sebab Berkaitan Dengan Mengumpulkan Masyarakat Banyak	Melaksanakan Penyuluhan Mobile, Melaksanakan Penyuluhan Medsos
				8 Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian sadar gizi	97.021Jiwa	154.526.000	89,60	134.499.500		Tidak Ada	
				9 Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu,bayi baru lahir,anak,remaja ,lansia dan keluarga berencana	43.991 Jiwa	1.074.760.700	93,04	999.993.800		Tidak Ada	
				10 Penyehatan lingkungan	3 Kelurahan	397.506.200	66,43	264.067.680		Kegiatan Tidak Dapat di Laksanakan Karena Covid-19 dan Belanja ATK di Sesuaikan Dengan Standar Harga Barang Jasa.	Kegiatan yang belum terlaksana tahun ini di laksanakan ditahun depan sesuai dengan perkembangan pandemi
				11 Peningkatan Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	20pkm	81.774.000	67,75	55.404.340		Kegiatan Tidak Dapat di Laksanakan Karena Covid-19 dan Belanja ATK di Sesuaikan Dengan Standar Harga Barang Jasa.	Kegiatan yang belum terlaksana tahun ini di laksanakan ditahun depan sesuai dengan perkembangan pandemi
				12 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	110focus,100 sekolah, 100%	2.107.842.715	96,36	2.031.158.461		Tidak Ada	
				13 Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa	103771 jiwa	837.159.935	95,76	801.671.170		Tidak Ada	
				14 Pencegahan Penyakit Yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) serta surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	11234 bayi, 7590 balita, 28741 anak sekolah, 20 pkm, 100%	354.135.800	93,69	331.787.400		Tidak Ada	
				15 Pengadaan sarana Prasarana puskesmas/Puskesmas Pembantu	6 PKM	14.056.040.234	88,41	12.426.444.988		Tidak Ada	
				16 Pembangunan /rehab Puskesmas /pustu	9 Pkm, 3 pustu	2.230.000.000	99,88	2.227.212.650		Tidak Ada	
				17 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)(DAN NON FISIK)	20pkm, dinkes	17.326.001.182	51,96	8.939.476.297		Adanya Covid-19 Maka Kegiatan Tidak Bisa Dilaksanakan	Kegiatan yang belum terlaksana tahun ini di laksanakan ditahun depan sesuai dengan perkembangan pandemi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				18 Operasional BLUD	20 pkm	33.169.874.674	71,01	24.612.365.491		- Dampak dari Covid-19 Mengakibatkan Menurunnya Kunjungan Pasien yang Datang ke Puskesmas Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan - Penetapan Target Pendapatan Terlalu Tinggi - Waktu Belanja yang Sudah Mendesak di Akhir Tahun	Kegiatan yang belum terlaksana tahun ini di laksanakan ditahun depan sesuai dengan perkembangan pandemi
				19 Operasional Rumah Sakit Abdurrahim Sayuti	0,6	22.227.336.664	95,57	21.242.985.685		Tidak Ada	
				20 Pendidikan dan pengembangan mutu tenaga kesehatan	60. Orang	132.595.000	97,92	129.842.500		Tidak Ada	
				21 Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Rujukan di Rumah Sakit yang Berfokus Pada Keselamatan Pasien.	Status akreditasi dari utama menjadi paripurna	96.983.083.634	94,47	91.618.492.507		Tidak Ada	
JUMLAH						222.646.804.810		194.324.154.492			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		3.386.272.400		3.085.631.759			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	1). Kendaraan R2 : 25 Unit 2). Kendaraan R3 : 2 Unit 3). Kendaraan R4 : 15 Unit 4). Kendaraan R6 : 9 Unit	37.150.000	1). Kendaraan R2 : 25 Unit 2). Kendaraan R3 : 2 Unit 3). Kendaraan R4 : 15 Unit 4). Kendaraan R6 : 9 Unit	24.066.600	100%		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Listrik : 118.000 Kwh 2. Air : 5000 M3 3. Internet : 5 Paket 4. Komponen alat listrik dan elektronik : 1 Tahun	428.800.000	1. Listrik : 118.000 Kwh 2. Air : 5000 M3 3. Internet : 5 Paket 4. Komponen alat listrik dan elektronik : 1 Tahun	283.779.399	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	1. Tim Pengadaan Barang dan Jasa : 15 Org/Bulan 2. Tim Pengelola Keuangan : 48 Org/Bulan 3. Tim Pengelola Barang Milik Daerah : 11 Orang/Bulan 4. Jasa Tenaga Perorangan : 18 Orang	1.488.880.800	1. Tim Pengadaan Barang dan Jasa : 15 Org/Bulan 2. Tim Pengelola Keuangan : 48 Org/Bulan 3. Tim Pengelola Barang Milik Daerah : 11 Orang/Bulan 4. Jasa Tenaga Perorangan : 18 Orang	1.440.829.330	100%		
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1. Cleaning Service : 1 Tahun, 2. Jasa Tenaga Pengaman : 6 Orang	265.396.000	1. Cleaning Service : 1 Tahun, 2. Jasa Tenaga Pengaman : 6 Orang	256.527.500	100%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	79.999.950	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	17.798.000	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	1). 10 Tabung 2). 1 Tahun	39.050.000	1). 10 Tabung 2). 1 Tahun	29.046.250	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	1. suku cadang dan pemeliharaan : 1 Tahun 2. Bahan Bakar R2 : 25 Unit, R3 : 2 Unit, R4 : 16 Unit, R6 : 1 Unit dalam 1 Tahun Pengaman : 6 Orang	590.800.000	1. suku cadang dan pemeliharaan : 1 Tahun 2. Bahan Bakar R2 : 25 Unit, R3 : 2 Unit, R4 : 16 Unit, R6 : 1 Unit dalam 1 Tahun Pengaman : 6 Orang	523.657.730	100%		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor	1). Rehabilitasi : 2 Paket 2). Pemeliharaan : 1 Paket 3). Perencanaan : 1 Paket 4). Pengawasan : 1 Paket	436.195.600	1). Rehabilitasi : 2 Paket 2). Pemeliharaan : 1 Paket 3). Perencanaan : 1 Paket 4). Pengawasan : 1 Paket	429.927.000	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		420.350.000		375.659.787			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya							
				2 Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kursus	Diklat/Bimtek Per UU-an 20 Kali/Tahun	50.000.000	Diklat/Bimtek Per UU-an 20 Kali/Tahun	49.300.000	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)				
			Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan	3 Perjalanan Dinas	100 Kali/ Tahun	370.350.000	100 Kali/ Tahun	326.359.787	100%	Memenuhi pelaksanaan pekerjaan dengan baik dengan meningkatkan pengawasan pada pekerjaan	Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR Kota Jambi terus berupaya meningkatkan pengawasan pekerjaan melalui pengawas teknis di Dinas dan juga konsultan pengawas yang dipilih melalui lelang Ipse agar mendapatkan		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		20.000.000		19.554.550					
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	5 Dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	100%				
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	4.773.800	100%				
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	1 Dokumen	10.000.000		9.780.750	100%				
				Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	91,79%	115.263.603.000	87,54%	114.127.603.858	95,37%				
					468.56 km		446.844 km						
				1 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan status kota	35 Ruas Jalan	48.423.290.000	35 Ruas Jalan	47.902.935.368	100%			memenuhi kualitas dan kuantitas Jalan Lingkungan yang baik	Pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas & kuantitas Jalan Lingkungan dengan melaksanakan proses perencanaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis AHS Bina Marga tahun 2018 dan melakukan pengawasan dengan
					1 Tahun		1 Tahun						
				2 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan non status kota (jalan lingkungan)	199 Ruas Jalan	63.611.980.000	199 Ruas Jalan	63.119.332.670	100%				
				1 Tahun		1 Tahun							
			3 Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan	3 Unit Pembangunan 1 Unit Rehab	2.540.165.000	3 Unit Pembangunan 1 Unit Rehab	2.525.559.450	100%					
				1 Tahun		1 Tahun							
			4 Peningkatan Operasional Peralatan dan Perbekalan (Alkal)	4 unit 5 unit 4 unit	688.168.000	4 unit 5 unit 4 unit	579.776.370	100%					
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/ Sungai	15,79 %	32.545.906.000,00	31,58%	32.224.907.295	200%					
			1 Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/Sungai dan Pengendalian Banjir	4.383 M'	32.545.906.000,00	7.169,83 M'	32.224.907.295	100%					
		Mengoptimalkan Penataan Kawasan Sunoai		11 Lokasi		11 Lokasi		100%	Mendapatkan pelaksanaan pekerjaan fisik yang maksimal/baik	UPCA pada tahun 2020 telah melaksanakan pekerjaan sesuai Bidang SDA akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan dengan menempatkan pelaksana dan personel pengawas yang berkualitas dan berpengalaman untuk Bidang SDA akan meningkatkan Pengawasan pelaksanaan dengan menempatkan pelaksana dan personel			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
			Mengoptimalkan Pengelolaan Air Minum Mengoptimalkan Cakupan Saluran Air Limbah Meningkatkan Pemeliharaan Bangunan Pemerintah Kota Sesuai Standar		57.250 M'		61.400 M'		100%	maksimal/baik.	pengawas yang berkualitas dan berpengalaman untuk Menunjuk konsultan dan kontraktor yang profesional dan dengan melakukan pelatihan kepada personil-personil pelaksana dari pihak kontraktor untuk meningkatkan SDM dan meningkatkan koordinasi di lapangan dan mewajibkan konsultan pengawas melakukan pelaporan setiap hari kerja untuk Pengawas lapangan sesuai dengan keahlian di bidang tersebut, guna untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.	
				Program Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan		69,39%		70,99%		102%		
						1,56%		1,00%		64,07%		
							135.512.259.850		133.607.536.504			
						61,46%		69,54%		113%		
				1	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Penduduk	11 lokasi	9.212.412.000	11 lokasi	9.129.150.650	100%		Kualitas hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat secara langsung
						1 Unit		1 Unit				
						1 Paket		1 Paket				
				2	Pengembangan System distribusi jaringan air bersih/air minum	6 Lokasi	6.229.744.000	6 Lokasi	6.013.769.400	100%		Kualitas hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat secara langsung
						300 SR		325 SR				
					7 Titik		7 Titik					
					6 Paket Pengawasan		6 Paket Pengawasan					
					1 Paket Peremajaan Pipa (Pinjaman Daerah)		Batal					
			3	Pembangunan dan Pemeliharaan gedung/ utilitas pemerintah	1) 12 Paket Pemb	118.501.718.600	1) 12 Paket Pemb Gedung, 3 Paket Pemb Gedung (hibah)	117.098.122.425	100%			
							2) 24 Paket Rehabilitasi Gedung, 9 Paket Rehabilitasi Gedung (Hibah)					
							3) Paket Pedestrian Jalan (Hibah), 1 Paket Pedestrian Jalan (Hibah)					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
							4) 26 Paket Pengawasan, 8 Paket Pengawasan (hibah)				
							5) Pemeliharaan Rutin 1 Tahun				
				4 Peningkatan Operasional SPALD (UPTD Air Limbah)	1) 1 Tahun	1.568.385.250	1) 1 Tahun	1.366.494.029	97,83%	pengelolaan transportasi tinja	
					2) 1 Paket		2) 1 Paket				
				Program Perencanaan Teknis ke-Pu an	84%	11.291.945.750	63%	11.108.021.820	67,29%	fungsi kelayakan Fungsi manfaat bangunan	tercapainya pelayanan sedot tinja dengan baik dalam upaya mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh air limbah - Untuk menjaga mutu air tanah yang berkelanjutan sesuai kelayakan setiap rencana pembangunan terutama dari dana
				43 Dok	89 dok						
				1 Perencanaan dan koordinasi Bidang Ke-PU an	1) 46 Dokumen F	10.709.780.750	1) 46 Dokumen Perencanaan	10.624.507.620	100%		
					2) 30 Dokumen Lingkungan		2) 29 Dokumen Lingkungan				
					3) 13 Dokumen Feasibility Study		3) 13 Dokumen Feasibility Study				
					4) 2 Dokumen		4) 2 Dokumen				
					5) 1 Dokumen SOP		5) Silva (Rasionalisa si				
					6) 1 Database		6) 1 Database				
				2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	93.200.000	1 Dokumen	92.577.500	100%		
					1 Dokumen		1 Dokumen				
					1 Dokumen		1 Dokumen				
					5 Dokumen		5 dokumen				
				3 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	120 Tenaga Kerja	488.965.000	90 Tenaga Kerja Konstruksi	390.936.700	100%		
					1 Tahun		1 Tahun (6 rekom)				
					1 Tahun		1 Tahun (225 Rekom)				
				Program Fasilitas, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	95,20%	1.473.181.000	92,20%	1.446.849.295	100%		
				1 Penataan Ruang Kota	1). 1 Dokumen	1.337.825.000	1). 1 Dokumen	1.315.831.795	100%		
					2). 1 Dokumen		2). 1 Dokumen				
				2 Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	135.356.000	1 Dokumen	131.017.500	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
JUMLAH						299.913.518.000		295.995.764.868			
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DPRKP		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.574.013.900		1.453.043.242			
				1 Penyediaan jasa surat menyurat dan Perizinan Kendaraan	21 Unit	25.425.000	21 Unit	25.370.100	99,78%		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.886 KWH, 1.224 Kubik dan	204.596.500	38.761 KWH, 1.010 Kubik dan	131.099.845	64,08%		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	41 OB	345.460.000	36 OB	322.506.117	93,36%		
				4 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	22 OB	480.051.400	25 OB	461.679.682	96,17%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	82.280.000	1 Tahun	82.223.608	99,93%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	18.218.000	91,09%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	6 Unit	64.600.000	6 Unit	64.014.890	99,09%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	31 Unit	351.601.000	30 Unit	347.931.000	98,96%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		306.000.000		198.964.472			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	66 Stel	76.000.000	66 Stel	75.724.000	99,64%		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	6 Kali/ Tahun	30.000.000	10 Kali/ Tahun	24.900.000	83,00%		
				3 Perjalanan Dinas	12 Kali/ Tahun	200.000.000	12 Kali/ Tahun	98.340.472	49,17%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		38.900.000		38.738.700			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10 Dokumen	11.500.000	10 Dokumen	11.416.261	99,27%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	9.972.176	99,72%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	1 Dok , 1 Website	17.400.000	1 Dok , 1 Website	17.350.263	99,71%		
				Program Pengembangan dan Fasilitas		1.388.424.600		1.348.336.470			
				1 Penyelenggaraan, Penyediaan dan Penataan Perumahan	38 Unit RTLH, 10,7 Ha	1.388.424.600	38 Unit RTLH, 11,41 Ha	1.348.336.470	97,11%		
				Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan		1.441.754.400		1.425.500.400			
				1 Penyelenggaraan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1 Dok, 2000 Unit Rumah, 67 Lokasi Perumahan	1.441.754.400	1 Dok, 2159 Unit Rumah, 45 Lokasi Perumahan	1.425.500.400	98,87%		
				Program Peningkatan , Pemeliharaan dan		28.260.402.100		27.912.662.201			
				1 Pembangunan, Pemeliharaan dan Penataan Penerangan Jalan Umum	14.700 Titik Lampu	26.080.142.600	15.429 Titik Lampu	25.788.433.851	98,88%		
2 Peningkatan Pelayanan Pemakaman dan Penataan TPU	13 Lokasi Pemakaman	2.180.259.500	13 Lokasi Pemakaman	2.124.228.350	97,43%						
JUMLAH						33.009.495.000		32.377.245.485			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan PERDA dan PERWAL 2. Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.156.885.100		1.030.064.688	1			
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Jumlah STNK = 29 Unit	57.000.000	Jumlah STNK = 29 Unit	39.138.900	1		
				2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa sumber daya listrik, air, dan internet	147.000.000	jasa sumber daya listrik, air, dan internet	74.300.788	1		
				3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	210.000.000	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	192.650.000	1		
				4	Penyediaan Jasa Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	43.200.000	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	43.200.000	1		
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan penggandaan	34.500.000	Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan penggandaan	34.500.000	1		
				6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya	12.000.000	Tersedianya	10.545.000	1		
				7	Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	50.090.100	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	50.090.000	1		
				8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan/Dinas Operasional	568.095.000	Pengadaan Kendaraan Jabatan/Dinas Operasional	550.695.000	1		
				9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Pengadaan Bangunan Utilitas Kantor	35.000.000	Pengadaan Bangunan Utilitas Kantor	34.945.000			
					Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		312.868.090		310.936.445			
				1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari Tertentu beserta Perlengkapannya	Kelengkapan pakaian dinas	193.104.000	Kelengkapan pakaian dinas	192.700.000	1		
				2	Perjalanan Dinas	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	119.764.090	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	118.236.445			
					Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		16.000.000		14.725.000			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan	9.000.000	Dokumen Perencanaan	8.075.000			
				2	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	7.000.000	Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	6.650.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUM, SERTA PENEGAKAN REGULASI DAERAH		5.132.918.400	-	5.004.471.900			
				1 SOSIALISASI, PENGAWASAN, PENYIDIKAN, DAN PENEGAKAN REGULASI DAERAH	Terlaksananya Pengaman, Pengawasan Dan Penertiban Serta Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibum dan Tranmas	4.522.918.400	Terlaksananya Pengaman, Pengawasan Dan Penertiban Serta Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibum dan Tranmas	4.482.753.900			
				2 PENGAMANAN DAN PENGAWALAN DAN PENERTIBAN SERTA PENYUSUNAN, PENDATAAN DAN PEMETAAN RAWAN TRANTIBUM DAN TRANMAS	Terlaksananya Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah	610.000.000	Terlaksananya Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah	521.718.000			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		447.535.800		365.514.600			
				1 PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENCITRAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pencitraan satuan Polisi Pamong Praja	178.705.000	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pencitraan satuan Polisi Pamong Praja	145.249.000			
				2 PENDATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI MASYARAKAT	Terlaksananya Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	268.830.800	Terlaksananya Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	220.265.600			
JUMLAH						7.066.207.390		6.725.712.633			
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.206.579.000		981.722.628			
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100	68.500.000	100	57.209.200				
			2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91	225.000.000	100	150.496.493				
			3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100	230.000.000	100	204.118.000				
			4 Penyediaan Jasa Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100	58.640.000	100	58.640.000				
			5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100	49.000.000	100	49.000.000				
			6 Penyediaan Makanan dan Minuman	100	5.000.000	100	4.965.000				
			7 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	100	192.439.000	100	180.568.935				
			8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	100	362.400.000	100	262.050.000				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	100	15.600.000	100	14.675.000			
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		513.030.000		506.410.171			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari Tertentu beserta Perlengkapannya	100	357.530.000	100	351.815.000			
				2 Perjalanan Dinas	100	155.500.000	100	154.595.171			
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		9.750.000		9.750.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100	5.750.000	100	5.750.000			
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	100	4.000.000	100	4.000.000			
				Program Peningkatan Kesiagaan Dini Dan Manajemen Logistik Kebencanaan		9.212.135.500		9.050.526.820			
				1 Bimbingan Teknis, Diklat dan sosialisai Penanganan Bencana	100	74.136.000	90	38.417.316		Tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan masih dalam kondisi pandemic COVID-19	Tidak maksimalnya kegiatan ini di Tahun 2020, maka akan lebih dimaksimalkan di Tahun 2021
				2 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	100	16.500.000	100	15.948.325			
				3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	100	5.015.265.000	100	4.973.462.400			
				4 Pengadaan Logistik dan Mitigasi Bencana	100	20.315.000	40	500.000		Tidak adanya bencana sehingga posko untuk pelayanan bencana tidak bias berjalan sebagaimana mestinya	Berkurangnya bencana di Tahun 2020 merupakan pencapaian yang dilakukan Disdamkar Kota Jambi, ini berarti kegiatan preventif terhadap bencana sudah
				5 Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan	100	334.100.000	100	334.100.000			
				6 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100	2.570.000	100	1.470.000			
				7 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	100	355.402.500	100	326.805.585			
				8 Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan	100	27.900.000	100	12.547.819			
				9 Rekrutmen Tenaga Sukarela Penganggulangan Bencana	100	3.134.547.000	100	3.134.547.000			
				10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebencanaan	100	200.750.000	100	198.175.375			
				11 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Kebencanaan	100	14.650.000	-	-		Tidak terlaksana dikarenakan masih dalam kondisi pandemic COVID-19	Tidak maksimalnya kegiatan ini di Tahun 2020, maka akan lebih dimaksimalkan di Tahun 2021
				12 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	100	16.000.000	100	14.553.000			
JUMLAH						10.941.494.500		10.548.409.619			
	Urusan Ketentrangan dan	Badan Kesatuan Bangsa dan		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		933.072.000		862.864.829			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN			
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)					
Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Politik			1 Penyediaan jasa Surat menyurat dan Perizinan	6 unit kendaraan roda 4 (empat), 10 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 200 materai	11.860.000	6 unit kendaraan roda 4 (empat), 10 unit kendaraan roda 2 (dua) dan 200 materai	6.562.000						
				2 Penyediaan jasa dan komponen/instalasi telekomunikasi sumber daya air dan listrik	Telepon local, internet 20 Mbps, air 360 m3, listrik 13.200 Kwh, dan 6 item komponen	66.650.000	Telepon local, internet 20 Mbps, air 360 m3, listrik 13.200 Kwh, dan 6 item komponen	48.699.558						
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	41 orang	208.288.000	41 orang	191.454.400						
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	14 orang	255.974.000	14 orang	235.043.000		1 orang TTKK mengundurkan diri karena pindah				
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan	60 item ATK, 6 item cetak dan sesuai kebutuhan	72.000.000	60 item ATK, 6 item cetak dan sesuai kebutuhan	72.000.000						
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Kali rapat	20.000.000	11 Kali rapat	20.000.000						
				7 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	20 Item alat dan bahan pembersih, 2 unit deskbook, unit laptop, 2 unit UPS, 2 unit printer, 2 unit AC, 1 buah papan informasi, 1 unit speaker portable, 6 unit dispenser, 6 unit rak arsip, 20 unit kursi stanles, 6 unit meja kerja, 1 unit brankas, 1 unit proyektor, servis peralatan dan perlengkapan kantor dan pemeliharaan gedung	70.200.000	20 Item alat dan bahan pembersih, unit laptop, 2 unit UPS, 2 unit printer, 20 unit kursi stanles, 1 unit brankas, servis peralatan dan perlengkapan kantor dan pemeliharaan gedung	70.200.000						
				8 Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	Pengadaan 2 unit kendaraan roda 2 (dua), Pergantian suku cadang kendaraan roda 4 fsn tofs 2, dan pemeliharaan 6 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	228.100.000	Pengadaan 2 unit kendaraan roda 2 (dua), Pergantian suku cadang kendaraan roda 4 fsn tofs 2, dan pemeliharaan 6 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	218.905.871						
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						214.250.000		213.665.148		
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	45 Stell PDH, dan 5 stell PSR	38.750.000	45 Stell PDH, dan 5 stell PSR	38.750.000						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				2 Perjalanan Dinas	50 kali PDL D dan 200 kali PDD D	175.500.000	30 kali PDL D, 203 kali PDD D	174.915.148			
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		15.750.000		15.750.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dokumen	9.200.000	6 Dokumen	9.200.000			
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	4 Dokumen	6.550.000	4 Dokumen	6.550.000			
				PROGRAM PENINGKATAN KARAKTER, IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SERTA PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		642.619.500		395.095.800			
				1 FASILITASI, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN	4 kali rapat, 20 orang, 5 kali rapat, 15 orang, 5 kali rapat, 45 laporan	39.845.000	1 kali rapat FKDM, 2 kali rapat Rim Orang Asing, 1 kali rapat Penanganan Konflik Sosial	39.680.000			
				2 PENINGKATAN KETAHANAN SENI, BUDAYA,	8 kali rapat dan 14 kali pemantauan	83.360.000	9 kali rapat dan 15 kali pemantauan	79.325.000			
				3 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	2 kali Rapat Pengurus FPK dengan Pengurus Dewan Pembina FPK 1 kali Rapat Panitia Silaturahmi Kebangsaan, 1 kali Rapat Koordinasi Pengurus FPK TK. Kota dan Kecamatan dengan Pengurus Dewan Pembina FPK, 2 kali rapat Pengurus Pusat Pendidikan Wasbang (PPWK), 2 kali Rapat Tim Pembinaan Ideologi Pancasila, 75 orang Peserta Silaturahmi Kebangsaan, 75 orang Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan, 75 peserta Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	166.648.500	1 kali Rapat Pengurus FPK dengan Pengurus Dewan Pembina FPK 1 kali Rapat Panitia Silaturahmi Kebangsaan, 2 kali rapat Pengurus Pusat Pendidikan Wasbang (PPWK), 1 kali Rapat Tim Pembinaan Ideologi Pancasila, 75 orang Peserta Silaturahmi Kebangsaan, 75 orang Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan, 75 peserta Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	150.437.500		Kegiatan yang sudah ditargetkan tidak dapat terlaksana 100% karena situasi Pandemi Covid 19 karena jumlah orang untuk berkumpul dan rapat dibatasi, adanya kendala WFH, sehingga staf pelaksana tidak dapat hadir secara lengkap untuk melaksanakan kegiatan, dan adanya rasionalisasi terhadap pagu anggaran. Sehingga anggaran yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				4 PEMBINAAN KARAKTER DAN PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	2 kali rapat tim pencegahan dan penanggulangan Narkoba, 2 kali rapat persiapan tes urine Narkoba, 1 kali rapat persiapan sosialisasi Narkoba, 2 kali Rapat Forkopimda, 200 orang peserta tes urine Narkoba, 100 orang peserta Sosialisasi Narkoba	352.766.000	1 kali rapat tim pencegahan dan penanggulangan Narkoba, 2 kali rapat persiapan tes urine Narkoba, 1 kali rapat persiapan sosialisasi Narkoba, 2 kali Rapat Forkopimda, 200 orang peserta tes urine Narkoba, 100 orang peserta Sosialisasi Narkoba	125.653.300		Bela Negara yang pada Rencana Kerja 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 disamping itu juga pihak penyelenggara keberatan dengan budget kegiatan Bela Negara yang tidak memadai.	
				PROGRAM PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN FASILITASI BAGI ORKEMAS DAN PARPOL		312.338.000		288.752.809			
				1 KOORDINASI, PEMANTAUAN SITUASI DAN PENDIDIKAN POLITIK	4 kali rapat pemantauan situasi politik, 115 orang peserta sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula, 80 orang peserta sosialisasi UU Pemilu, 150 orang Jumlah peserta Rakor pemantapan Pemilu, 25 kali surey pemantauan situasi politik ke lapangan dan pemantauan PILGUB	136.002.000	2 kali rapat pemantauan situasi politik, 1 kali rakor peantapan PILGUB, 1 kali Tim Desk/Peninjauan Lapangan PILGUB, 80 orang Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, 115 peserta Sosialisasi Undang-Undang Pemilu	135.066.500			
				2 PEMBINAAN PERTANGGUNG-JAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARPOL	13 parpol yang menerima bantuan keuangan parpol, 26 orang peserta sosialisasi, 4 kali pembinaan langsung ke Parpol	25.061.000	1 kali rapat Tim Verifikasi parpol, 26 orang peserta sosialisasi, 4 kali pembinaan langsung ke Parpol	18.649.900			
				3 PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN ORKEMAS	5 kali rapat, 1 kali sharing, 6 kali pamantauan Orkemas, dan 1 kali pembinaan	151.275.000	5 kali rapat, 1 kali sharing, 6 kali pamantauan Orkemas, dan 1 kali pembinaan	135.036.409			
JUMLAH						2.118.029.500		1.776.128.586			
6	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatkan Pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.748.600.000		1.631.407.620			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	2 orang dan 1200 surat keluar dan perizinan kendaraan R2= 15 Unit, R4= 22	29.000.000	100%	24.957.100	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air 1 rekening, internet 5 rekening, listrik 5 rekening, telepon 3 rekening dan tv 2rekening dan komponen listrik	250.000.000	100%	179.942.484	100%		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	PA, PPK, PPKOM, PPBJ, PPHP, PPTK pengurus barang, pembantu pengurus barang pembantu, operator SIPKD dan Admin Pembangunan	184.000.000	100%	171.148.000	100%		
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Barang kebersihan kantor, 3 orang cs. 4 orang satpam, 3 orang sopir, 3 orang penjaga malam, 12 Tenaga administrasi/teknis	427.329.600	100%	420.967.200	100%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Kertas, tinta, printer pena,buku dan ATK lainnya,116,384, pengadaan dan cetakan	100.000.000	100%	100.000.000	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	40 kali	40.000.000	100%	39.612.000	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Perlengkapan kantor dan aula sekretariat PKH	290.000.000	100%	286.657.000	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional	Pemeliharaan R2= 25 unit, R4= 16 unit	350.000.000	100%	329.853.836	100%		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Gedung kantor dan taman	78.270.400	100%	78.270.000	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas		166.490.000		149.328.442			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	60 stell	42.000.000	100%	42.000.000	100%		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	6 Orang	0	-	0	-		
				3 Perjalanan Dinas	40 Kali	124.490.000	100%	107.328.442	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		22.200.000		22.200.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 dokumen	12.500.000	100%	12.500.000	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	5.500.000	100%	5.500.000	100%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Pemeliharaan Website	4.200.000	100%	4.200.000	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				Program Penanggulangan Kimiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		2.508.483.250		2.435.102.650			
				1 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat	100kk	540.770.000	100%	540.520.000	100%		
				2 Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	300 Orang	553.425.250	100%	553.425.250	100%		
				3 Pemberdayaan dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	48 Orang	177.490.000	100%	176.570.000	100%		
				4 Pembinaan dan Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar	225 Orang	150.000.000	100%	141.527.400	100%		
				5 Pelayanan dan Pembinaan Sosial Bagi Anak yang Bermasalah Sosial dan Lansia	300 Anak dan 110 Lansia Terlantar	315.878.000	100%	299.338.000	100%		
				6 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial	20%	282.970.000	100%	273.270.000	100%		
				7 Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Korban Napza	20%	87.550.000	100%	85.487.000	100%		
				8 Pelayanan dan Pembinaan Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	150 Orang	112.030.000	100%	81.245.000	100%		
				9 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial	85 Orang	50.000.000	100%	50.000.000	100%		
				10 Pendataan dan Informasi Fakir Miskin	12.000 KK	165.000.000	100%	160.800.000	100%		
				11 Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	100 Orang	-	-	-	-		
				12 Pembinaan dan Pelayanan Sosial Fakir Miskin	38 E-Warong	73.370.000	100%	72.920.000	100%		
JUMLAH						4.445.773.250		4.238.038.712			
7	Tenaga Kerja	DTKK, UKM		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana		1.526.270.150		1.301.453.132			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	3000 lbr Surat, Pembayaran Pajak 7 Unit Kendaraan Roda 4 dan 17 Unit Kendaraan Roda 2	11.250.000	3098 lbr surat, pembayaran pajak 7 unit kendaraan roda 4 dan 17 unit kendaraan roda 2	10.554.600		Kelebihan Penganggaran	Penganggaran lebih efisien
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	telepon lokal, 3 rekening internet (100 mbps, 100 mbps, 50 mbps), 1 rek air 435 M3, 1 rek listrik 27.500 KWH	247.500.000	telepon lokal, 3 rekening internet (100 mbps, 100 mbps, 50 mbps), 1 rek air 435 M3, 1 rek listrik 27.500 KWH	126.868.182		1. Kelebihan Penganggaran; 2. Penganggaran direncanakan untuk mendukung operasional Job Center tetapi pembuatan Job Center tidak terealisasi karna anggaran pembuatan Job Center dialihkan untuk	Penganggaran lebih efisien

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	30 orang	219.904.000	30 orang	171.220.000		1. Kelebihan Penganggaran karna honor PPKom tidak diambil; 2. Jumlah PPTK yang dianggarkan 6 orang yang terealisasi 5 orang, jumlah staf pengelola dianggarkan 9 orang di realisasikan 7 orang	
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	23 orang	406.014.700	22 orang	391.083.600	1	1. Karna pembayaran premi asuransi di anggarakan 12 bulan di realisasikan 9 bulan (periode april- desember 2020) 2. Karna 1 orang tenaga pengaman mengundurkan diri	
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	111.801.450	1 tahun	102.972.450	1	1. Untuk spanduk kelebihan penganggaran, untuk video publikasi menyesuaikan standar harga; 2. Menyesuaikan standar harga	
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	26.000.000	12 bulan	26.000.000	1		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Pengadaan 1 unit mesin penghancur kertas, 3 unit AC, 7 unit kunci pengaman pintu, 2 unit komputer PC, 1 unit laptop, 4 unit printer, 1 unit kamera, 1 unit sound system dan perlengkapannya	213.100.000	1 tahun	203.990.000	1		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	7 unit kendaraan roda 4, 17 unit kendaraan roda 2	290.700.000	7 unit kendaraan roda 4, 17 unit kendaraan roda 2	268.764.300	1	Kelebihan penganggaran	Penganggaran lebih efisien
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas		278.806.900		253.180.850			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	56 stel	36.400.000	56 stel	36.400.000	1		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	10 kali/tahun	5.000.000	10 kali/tahun	1.950.000	1	Penghematan anggaran	Penganggaran lebih efisien
				3 Perjalanan Dinas	100 kali dalam daerah, 30 kali luar daerah	237.406.900	30 Kali	214.830.850	1		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		93.100.000		80.100.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10 dokumen	16.500.000	10 dokumen	16.500.000	1		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	10 dokumen	10.000.000	10 dokumen	10.000.000	1		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	5 Aplikasi, 3 Medsos	66.600.000	7 Aplikasi	53.600.000	1		
			Meningkatkan Keahlian Pencari Kerja	Program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja		962.730.000		722.181.950			
			Meningkatkan akses layanan informasi pasar kerja	1 Pemberian Fasilitas dan Pengadaan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	180 orang	560.000.000	130 orang	481.845.000	1	1. Terbatasnya jumlah kuota peserta pelatihan 2. Terbatasnya jenis kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 3. Tidak terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat bagi anggota P2WKSS karna kondisi pandemi covid-19	1. Untuk tahun 2021 belum bisa menambah jumlah kuota peserta pelatihan dan jenis kegiatan pelatihan, tetapi jam pelajaran pelatihan ditambah menjadi 200 jampel sebagai syarat minimal peserta pelatihan dapat mengikuti ujian kompetensi 2. Ditahun 2021 pelatihan bagi anggota P2WKSS tetap dianggarkan tetapi pelaksanaannya menunggu koordinasi dengan DPMPPA Kota
				2 Penyusunan dan Perluasan Informasi Tenaga Kerja	0,4	64.705.000	0	56.204.650	1	1. Lowongan kerja yang tersedia sebagian besar kurang diminati pencari (lowongan marketing) 2. Tidak terlaksananya job fair sehingga tidak bisa mempertemukan pihak perusahaan dan	1. Memberikan motivasi kepada pencari untuk mencoba menerima lowongan yang ada 2. Penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui media sosial
				3 Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	0,57	324.775.000	1	170.956.700		1. Kurangnya SDM ASN sebagai mediator	1. Mengajukan nota dinas ke BKPSDMD Kota Jambi untuk mengakomodir penambahan ASN untuk menjadi mediator di bidang Hubungan Industrial
				4 Fasilitas Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	13.250.000	-	13.175.600			
JUMLAH						2.860.907.050		2.356.915.932			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPMPPA		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.554.498.280		2.508.889.297			
				1 Penyediaan jasa Surat menyurat dan Perizinan	1	17.716.000	1	12.571.000	1		
				2 Penyediaan jasa dan komponen/instalasi telekomunikasi sumber daya air dan listrik	1	272.155.200	1	259.084.302	1		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	1	301.828.700	1	295.478.950	1		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1	1.235.698.400	1	1.219.748.000	1		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan	1	45.000.000	1	44.712.900	1		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	1	30.000.000	1	29.955.000	1		
				7 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	1	328.979.620	1	325.767.145	1		
				8 Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	1	272.620.360	1	271.672.000	1		
				9 Pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	1	50.500.000	1	49.900.000	1		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		194.315.502		194.097.659			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	1	60.000.000	1	59.812.500	1		
				2 Perjalanan Dinas		134.315.502		134.285.159			
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		70.880.000		68.552.400			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1	6.000.000	1	5.973.400	1		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	1	10.000.000	1	9.999.000	1		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	1	54.880.000	1	52.580.000	1		
				Program Peningkatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak		2.057.700.050		1.921.880.600			
				1 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,7	554.175.000	1	550.334.500	1	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
				2 PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	281.775.000	1	280.557.200	1	1. Anggaran dirasioanalisis untuk penanggulangan Covid 19, 2. Tidak ada penilaian KLA	1. Melakukan kegiatan secara daring.2.Pengumpulan data secara online
				3 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK (PPA)	1	99.571.500	1	91.536.500	1	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas olahraga	Adanya Lomba Posyantek TTG ditingkat Kecamatan /Kelurahan. Melaksanakan Kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
				4 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	1.122.178.550	1	999.452.400	1		
				JUMLAH		4.877.393.832		4.693.419.956			
9	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.723.267.000		2.535.799.179			
				1 Penyediaan jasa surat menyurat dan perizinan	Jumlah STNK/KIR Kendaraan	45.200.000	60,06%	27.148.600	60,06%	Biaya pembayaran pajak STNK kendaraan sesuai dengan yang diajukan	
					* Roda 2(unit)		57	128			
					* Roda 4 (unit)		10	22			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
					Biaya Ongkos kirim paket/sampel				22	Paket pengiriman sampel tidak ada	
				2 Penyediaan jasa dan komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa sumber daya listrik (kwh)	362.020.000	580.374	324.583.479	100%		
					Jasa sumber daya air (m3)		8.460				
					Jasa sumber Telepon		6				
					Jasa sumber daya telekomunikasi/wifi (mbps/bln)		240				
					Pembelian komponen/instalasi telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik (tahun)		240				
				3 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa(org)	286.692.000	50 orang	264.582.000	100%	Pembayaran honor keuangan dibayar berdasarkan besaran anggaran kegiatan setelah rasionalisasi anggaran, adanya mutasi dan honor yang tidak dibayarkan	
				4 Penyediaan jasa Tenaga Pendukung/ tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung/tenaga administrasi/teknis perkantoran (org)	947.049.600	56 orang	943.432.400	100%		
				5 Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan, dan Penggandaan	Pembelian Alat Tulis Kantor, barang Cetak dan Penggandaan (bulan)	105.114.400	12	102.789.000	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman		43.000.000	99,63%	42.839.000	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor		164.031.000	96,79%	158.763.700	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/ Dinas/Operasional		770.160.000	87,21%	671.661.000	100%		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas		0	0				
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		475.645.000		458.954.599			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya		128.500.000	94,99%	122.068.000	100%		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus		43.990.000	80,47%	35.396.600	100%	Dampak Pandemi bitek melalui virtual sehingga tidak ada	
				3 Perjalanan Dinas		303.155.000	99,45%	301.489.999	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		37.600.000		37.455.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10	15.000.000	10	14.950.000	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	9 laporan	7.000.000	9 laporan	6.905.000	100%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	5	15.600.000	5	15.600.000	100%		
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani		384.492.500		376.624.685			
				1 Pengembangan Diversifikasi dan Keamanan Pangan		187.837.500	99,99	187.817.500	100%		
				2 Pengembangan Cadangan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	100%	139.055.000	94,67%	131.645.385	100%		
				3 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluh	361	57.600.000	361 klpk	57.161.800	100%		
JUMLAH						3.621.004.500		3.408.833.463			
10	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		3.221.870.011		3.056.605.868			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	161 unit	194.693.500	186 unit	151.132.600	115%		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening : telpon, air, listrik, dan belanja kawat/faksimili/internet/tv kabel	417.756.400	4 rekening : telpon, air, listrik, dan belanja kawat/faksimili/internet/tv kabel	361.685.174	100%		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	44 orang	400.410.000	44 orang	386.210.000	100%		
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	79 orang	1.304.600.800	79 orang	1.285.961.200	100%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	137.430.791	1 tahun	137.240.000	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	57.000.000	12 bulan	54.800.065	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	1 unit AC, 6 unit komputer, 1 unit laptop 1 unit notebook 1 paket tablet 1 unit printer 1 buah hardisk 1 set hordeng 1 tahun pemeliharaan	207.468.520	1 unit AC, 6 unit komputer, 1 unit laptop 1 unit notebook 1 paket tablet 1 unit printer 1 buah hardisk 1 set hordeng 1 tahun pemeliharaan	195.482.500	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	7 unit mobil dan 9 unit motor, 1 unit genset, 1 unit gerobak motor, 1 tahun bbm/gas dan pelumas	179.460.000	7 unit mobil dan 9 unit motor, 1 unit genset, 1 unit gerobak motor, 1 tahun bbm/gas dan pelumas	161.686.829			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor	1 paket, rehabilitasi gapura, 1 paket rehabilitasi gedung kantor	323.050.000	1 paket, rehabilitasi gapura, 1 paket rehabilitasi gedung kantor	322.407.500	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		459.392.500		372.477.369			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	145 stel PDH, 6 stel PSR	114.750.000	145 stel PDH, 6 stel PSR	113.662.500	100%		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	60 kali/tahun	74.642.500	5 kali/tahun	10.006.800	8,30%	Bintek terkendala pandemi Covid19	
				3 Perjalanan Dinas	281 kali	270.000.000	213 kali	248.808.069	75,85%	Tidak tercapai dikarenakan terkendala pandemi	
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		115.000.000		40.999.800			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	8 dokumen	5.000.000	8 dokumen	5000000	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	1000000	100%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	1 tahun, perawatan web, 1 paket pembuatan aplikasi WIS	105.000.000	1 tahun, perawatan web	34999800	50%	Pembuatan aplikasi WIS	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	153 kegiatan usaha	2.043.676.000	201 kegiatan usaha	1.968.215.500	131,40%		
				1 Kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan	2 sungai, 40 usaha, 1500 kendaraan	578.200.000	2 sungai, 40 usaha, 1500 kendaraan	551.902.500	100%		
				2 Kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	300 sampel	978.051.000	306 sampel	968.977.000	102%		
				3 Kegiatan pengkajian dampak lingkungan	50 dokumen lingkungan, 1 Dokumen DIKPLHD, 1 Dokumen KLHS revisi RTRW	387.075.000	670 dokumen, 1 dokumen DIKPLHD, 1 Dokumen KLHS	384.680.000	1292%		
				4 Kegiatan penegakan Hukum Lingkungan	100 perusahaan	100.350.000	100	62.656.000	100%		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SUMBER DAYA ALAM	14% kecukupan RTH publik	8.584.359.000		8.172.316.900			
				1 Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim	4 lokasi kampung iklim, 1 dokumen	175.489.000	4 lokasi kampung iklim, 1 dokumen	88.959.000	100%		
				2 Kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan taman	13.77 ha	7.179.390.000	13.77 ha	6.878.197.950	100%		
				3 Kegiatan pengelolaan hutan kota	3 lokasi	1.229.480.000	3 lokasi	1.205.159.950	100%		
				PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	43.382.694.600	1	38.740.105.870			
				1 Kegiatan pengurangan sampah dan peningkatan kinerja bank sampah	10 ton/bulan 7500 KK	1.242.641.500	10 ton/bulan 7500 KK	1.008.925.850	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				2 Kegiatan peningkatan kinerja penanganan sampah	72% jalan yang terlayani penyapuan, 1 dokumen	15.013.588.550	90% jalan yang terlayani penyapuan, 1 dokumen	14.412.515.105	125%		
				3 Kegiatan peningkatan pengelolaan B3	30 dunia usaha, 20 fasilitas kesehatan	171.000.000	32 dunia usaha, 11 fasilitas kesehatan	170.411.300	86%	Pembatasan perjalanan dinas dikarenakan pandemi Covi19 dimana fasilitas kesehatan salah satu tempat dengan resiko	
				4 Kegiatan peningkatan pengelolaan angkutan dan mobilisasi	78.16% sampah tertangani	20.231.550.400	78,71%	19.411.580.540	100,70%		
				5 Kegiatan peningkatan kinerja operasional TPA Talang Gulo	60% tutupan zonasi, 1 dokumen, 10 ton /hari 60 KK	6.723.914.150	0% tutupan zonasi, 1 dokumen, 10 ton/hari 60 KK	3.736.673.075	55,57%	Untuk tutupan zonasi tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan. Adanya sisa anggaran di karenakan operasionalnya TPA sanitas landrill.	
JUMLAH						57.806.992.111		52.350.721.307			
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada aparaturnya pengelola administrasi kependudukan tingkat kecamatan, kelurahan dan RT dengan demikian diharapkan informasi pelayanan dan syarat administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat tersampaikan kepada masyarakat paling bawah. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggandeng	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		3.030.433.000		2.663.316.914			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100	22.400.000	43,3	9.712.300	88		Mengusulkan kepada Walikota Jambi untuk pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang representative guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	320.600.000	100	223.538.632	70		Mengusulkan penambahan Pegawai yang berstatus PNS terutama untuk penempatan sebagai operator SIAK
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100	207.976.000	100	183.492.000	88		Mengusulkan perekrutan tenaga ADB Database Kependudukan dan programmer yang benar-benar mempunyai kualifikasi dibidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berstatus PNS
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	100	877.062.000	100	727.144.400	83		Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara continue kepada masyarakat melalui ketua RT, media massa, media elektronik dan media social (FB, IG,WA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			skpd atau instansi lain yang memerlukan atau yang menggunakan data kependudukan serta melakukan pengembangan sys-tem pelayanan melalui inovasi-inovasi pelayanan yang lebih kreatif dan dinamis untuk mendukung Pencapaian target capaian Kepemilikan Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan melaksanakan perbaikan system pelayanan (SOP), penertiban pendaftaran penduduk sesuai dengan ketentuan, perekaman database jempit bola, pengadaan blanko/form pendaftaran penduduk, Meningkatkan Kapasitas SDM Operator SIAK melalui kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Sistem In-formasi Administrasi Kependudukan.	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100	197.942.000	100	197.872.000	100		melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas operator pengelola SIAK
		6 Penyediaan Makanan dan Minuman		100	20.000.000	45,73	9.146.000	46		melakukan peningkatan pelayanan dengan menciptakan inovasi-inovasi pelayanan salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan sistem pelayanan terintegrasi	
		7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor		100	935.853.000	100	871.180.582	93		mengagalkan mobil pelayanan keliling untuk percepatan layanan adminduk di kota jambi	
		8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional		100	263.600.000	100	256.333.000	97		meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengelolaan adminduk seperti kecamatan dan	
		9 Pembangunan Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor		100	185.000.000	100	184.898.000	99,94			
		Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			221.000.000		140.453.538				
		1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu beserta perlengkapannya		112 Stel	69.000.000	100	57.000.000	82,61			
		2 Pendidikan dan pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus		4 Orang	18.000.000	100	18.000.000	100			
		3 Perjalanan Dinas		40 x	134.000.000	48,85	65.453.538	48,85			
		Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			143.000.000		142.980.000				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		7 Lap	8.000.000	100	8.000.000	100			
		2 Penyusunan Laporan Keuangan		3 Lap	5.000.000	100	5.000.000	100			
		3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi		1 Aplikasi	130.000.000	100	129.980.000	99,98			
		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		96,0% 86,5% 89,0%	2.727.503.000	96,87% 91,41% 87,03%	2.599.640.209	84,77			
		1 Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang kependudukan		96,0%	101.600.000	97	101.500.000	99,9			
		2 Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Pencatatan Sipil		86,5%	111.845.000	91	111.745.000	99,91			
		3 Pemutakhiran Data Kependudukan		89,0%	307.000.000	87	306.999.170	100			
		4 Peningkatan kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		33,3%	50.200.000	33	50.200.000	100			
		5 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100,0%	150.000.000	100	150.000.000	100			
		6 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK		100,0%	-	-	-	0			
		7 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK-APBN)	100,0%	2.006.858.000	100	1.879.196.039	93,64				
JUMLAH						6.121.936.000		5.546.390.661			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
12	Pembudayaan Masyarakat dan Desa	DPMPPA		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	100%	1.550.042.600	100%	1.488.539.600	100%		
				1 PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT BERSIH AMAN DAN	100%	1.073.325.000	100%	1.072.657.000	100%		
				2 PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	100%	19.625.000	100%	19.525.000	100%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas olahraga	Adanya Lomba Posyantek TTG ditingkat Kecamatan /Kelurahan. Melaksanakan Kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
				3 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	100%	357.550.000	100%	297.315.000	100%		
				4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN TTG	100%	99.542.600	100%	99.042.600	100%	Kurangnya Minat Masyarakat Untuk Berinovasi. Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk penanggulangan Covid 19 sehingga target kegiatan PUEM tidak	Adanya Lomba Posyantek TTG ditingkat Kecamatan /Kelurahan. Melaksanakan Kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
JUMLAH						1.550.042.600		1.488.539.600			
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DPPKB		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.943.755.000		1.749.731.893			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100	25.000.000	84,12	21.029.800	100%		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	153.360.000	66,22	101.556.744		Adanya WFH sehingga kebutuhan akan listrik, air dan Internet berkurang	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk internet listrik dan air
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100	180.620.000	78,42	141.649.000		Honor untuk PPKom tidak di realisasikan dan pengurangan honor PPTK karena anggaran	Menyesuaikan peraturan yang ada
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	100	909.580.000	97,08	882.988.700	100%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100	74.487.000	100	74.487.000	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	Pada TW II di lakukan Raionalisasi untuk Pandemi Covid	Dikarenakan Pandemi Covid tidak ada kegiatan bersifat pengumpulan masa
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	100	87.178.800	93,66	81.654.800	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	100	513.529.200	86,92	446.365.849	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		176.468.600		175.785.800			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	100	63.000.000	100	63.000.000	100%		
	2 Perjalanan Dinas	100	113.468.600	99,40	112.785.800	100%					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		-		-			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan							
				2 Penyusunan Laporan Keuangan							
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi							
				Program Pembinaan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	80	4.405.248.500	100	3.901.392.743	100%		
				1 Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	100	52.330.000	95,44	49.946.000	100%	Selama Pandemi Covid 19 Pelaynan di Klinik KB dibatasi	Memakai APD lengkap saat melakukan Pelayanan
				2 Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE	100	87.890.000	100	87.890.000	100%		
				3 Bantuan Operasional KB	100	2.717.978.000	87,72	2.384.361.243		Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas pengumpulan massa	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
				4 Pembinaan dan Operasional Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	58.445.000	100	58.445.000	100%		
				5 Pengendalian penduduk dan pengembangan data/informasi	100	192.405.500	100	192.405.500	100%		
				6 Pengadaan barang dan jasa/konstruksi (DAK)	100	1.296.200.000	87,05	1.128.345.000		Sesuai dengan Efisiensi HPS dari rekanan	Sesuai harga standar dari Rekanan
JUMLAH						6.525.472.100		5.826.910.436			
14	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Mendorong Pembangunan dan Penyiapan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.903.520.200		2.812.749.972			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	1 Tahun	99.350.000	1 Tahun	88.466.300	100%		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	310.200.000	1 Tahun	291.902.177	100%		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	1 Tahun	409.380.000	1 Tahun	381.600.100	100%		
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1 Tahun	809.987.500	1 Tahun	781.943.845	100%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	138.300.000	1 Tahun	138.065.500	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	49.291.200	1 Tahun	49.180.650	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	1 Tahun	444.500.000	1 Tahun	440.905.500	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	1 Tahun	555.000.000	1 Tahun	554.454.000	100%		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	1 Tahun	87.511.500	1 Tahun	86.231.900	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		764.855.200		751.147.283			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	353 Stel	488.350.000	353 Stel	475.328.300	100%		
			Mendorong Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalulintas								
			Mendorong Keteraturan dan Penerimaan PAD Parkir								

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				2 Perjalanan Dinas	1 Tahun	276.505.200	1 Tahun	275.818.983	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		14.500.000		13.655.550			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1 Tahun	7.500.000	1 Tahun	7.167.950	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	7.000.000	1 Tahun	6.487.600	100%		
				Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan		6.236.150.500		6.071.475.095			
				1 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan	73,50%	3.311.950.000	92,39%	3.249.202.062	100%		
				2 Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	17.000 Unit	2.770.700.500	91,77%	2.669.086.133	100%		
				3 Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	5 Dokumen	153.500.000	99,36%	153.186.900	100%		
				Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas		1.693.093.500		1.652.825.270			
				1 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	36 Titik 95 Kali	1.072.235.500	99,79%	1.068.112.300	100%		
				2 Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan dan Angkutan Jalan	40 Kali	590.858.000	86,93%	555.012.970	100%	Terbatasnya kendaraan derek	Mengoptimalkan penggunaan derek yang ada
				3 Sosialisasi dan Bimbingan Peraturan Lalulintas dan Angkutan Jalan	40 Kali	30.000.000	99,00%	29.700.000	100%		
				Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran		3.247.152.500		3.156.469.810			
				1 Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	92%	470.500.000	93,12%	462.688.272	100%	Belum optimalnya PAD parkir	Penerapan e-money
				2 Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Parkir	11 Unit	1.289.720.000	89,74%	1.236.899.220	100%	Minimnya sarpras parkir	Peningkatan dan pengadaan sarpras
				3 Penertiban dan Penataan Parkir	513 Titik	1.486.932.500	94,92%	1.456.882.318	100%	Jukir Liar	Telah dilaksanakannya penindakan jukir liar oleh tim yang terdiri dari anggota Polri dan Anggota TNI
JUMLAH						14.859.271.900		14.458.322.980			
15	Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.293.877.000		1.251.830.883			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	a. 650 Buah b. 13 Unit	17.950.000	a. 650 Buah b. 13 Unit	9.975.900	100		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. 53.000 Kwh b. 40 Kubik	129.580.000	a. 53.000 Kwh b. 40 Kubik	115.973.793	100		
				3 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset	33 Orang	169.777.000	33 Orang	168.577.000	100		
				4 Penyediaan jasa tenaga pendukung/tenaga administrasi/Teknis Perkantoran	16 Orang	257.370.000	16 Orang	255.008.600	100		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	79.995.750	100		
				6 Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	31.000.000	12 Bulan	30.720.500	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
				7	pengadaan, Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	pengadaan :	78.500.000	pengadaan :	68.445.340	100		
					a. 1 Unit Tablet			a. 1 Unit Tablet				
					b. 5 Buah Meja			b. 5 Buah Meja				
					Pemeliharaan :			a. 20 Unit Komputer/PC/Not ebook				
					a. 20 Unit Komputer/PC/Not ebook			b. 5 Unit Printer				
					b. 5 Unit Printer			c. 15 Unit AC				
					c. 15 Unit AC							
				8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional	Pengadaan :	329.700.000	Pengadaan :	323.533.000	98,13		
					a. 4 Unit Roda			a. 4 Unit Roda				
					Pemeliharaan :			Pemeliharaan :				
					a. 1 Unit Kendaraan dinas Kadis			a. 1 Unit Kendaraan dinas Kadis				
					b. 5 Unit Kendaraan dinas eselon III			b. 5 Unit Kendaraan dinas eselon III				
					c. 2 Unit kendaraan dinas Operasional			c. 2 Unit kendaraan dinas Operasional				
					d. 10 Unit kendaraan dinas roda dua			d. 10 Unit kendaraan dinas roda dua				
				9	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor	1 Paket	200.000.000	1 Paket	199.601.000	100		
					Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		313.161.000		311.534.231			
				1	Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	a. 6 Stel	60.750.000	a. 6 Stel	59.482.500	100		
						b. 65 Stel		b. 65 Stel				
						c. 2 Stel		c. 2 Stel				
				2	Pendidikan dan pelatihan/Bimbingan Teknis/kursus	20 Kali	42.330.000	20 Kali	42.329.940	100		
				3	Perjalanan dinas	40 kali	210.081.000	40 kali	209.721.791	100		
					Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		77.650.000		62.549.890			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	7 Jenis	5.400.000	7 Jenis	5.400.000	100		
				2	Penyusunan laporan keuangan	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	2.250.000	100		
				3	Pengembangan Data/Informasi dan inovasi	1 Unit	70.000.000	1 Unit	54.899.890	100		
					Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik		3.375.342.000		3.272.807.338			

Implementasi pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, keuangan dan kepegawaian

Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Kota Jambi smartcity

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
			Memperluas cakupan infrastruktur jaringan TIK dan Sistem Informasi terintegrasi	1 Tata Kelola Teknologi Informatika dan Komunikasi	1 Dokumen	201.460.000	1 Dokumen	188.731.800	100			
				2 Pengelolaan Aplikasi Informatika	a. 23 OPD, 11 Kecamatan, 10 Kelurahan		2.692.286.000	a. 23 OPD, 11 Kecamatan, 10 Kelurahan	2.614.119.948	100		
					b. 1 Paket			b. 1 Paket				
					c. 1 Paket			c. 1 Paket				
					d. 1 Paket			d. 1 Paket				
					e. 1 Paket			e. 1 Paket				
					f. 1 Unit			f. 1 Unit				
				3 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	g. 1 Paket			g. 1 Paket				
					h. 1 Unit			h. 1 Unit				
					a. 1 Tahun		481.596.000	a. 1 Tahun	469.955.590	100		
			b. 1 Kali				b. 1 Kali					
			Mendorong pemanfaatan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah	c. 2 Kali			c. 2 Kali					
				d. 1 Tahun			d. 1 Tahun					
				Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		25.000.000		24.849.000				
				1 Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	a. 1 Tahun	25.000.000	a. 1 Tahun	24.849.000	100			
			Mendorong penyajian data statistik sektoral yang terintegrasi	b. 1 Kali			b. 1 Kali					
				c. 1 Kali			c. 1 Kali					
				d. 1 Tahun			d. 1 Tahun					
				Program Manajemen Data/Informasi/Statistik Daerah		17.250.000		17.189.000				
			1 Pengkoordinasian pelaksanaan survey, Verifikasi, Kompilasi dan Diseminasi Data Statistik	a. 1 Kali	17.250.000	a. 1 Kali	17.189.000	100				
				b. 1 Kali			b. 1 Kali					
JUMLAH						5.102.280.000		4.940.760.342				
16	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DTKK, UKM	1. Meningkatkan manajemen pengelolaan UKM 2. Meningkatkan kualitas SDM pengelola UKM 3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	49,69%	417.754.750	50,39%	349.581.650	100%	1. Tingginya minat pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan tetapi belum seimbang dengan jumlah kuota peserta pelatihan 2. Banyaknya pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi covid-19 3. Tidak terlaksananya	1. Memilih peserta pelatihan dengan menerapkan prioritas bagi pelaku UMKM yang telah memiliki IUMKM dan belum pernah mengikuti pelatihan serupa sebelumnya 2. Akurasi data pelaku UMKM yang terkena dampak covid-19 untuk	
				1 Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi	80 UMKM	19.654.750	80 UMKM	17.654.750				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan strategi pemasaran produk UMKM	2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	260 UMKM	250.000.000	260 UKM	238.209.400	100%	kegiatan jambi ekspo dan beberapa pameran di luar daerah sebagai sarana promosi dan pemasaran produk UMKM	diprioritaskan mendapat bantuan dari program Kementerian Koperasi dan UKM RI 3. Melaksanakan promosi dan pemasaran produk UMKM melalui media sosial 4. Meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam
		3 Penguatan Pemasaran Bagi Produk UMKM		15.000 UKM	148.100.000	19.099 UKM	93.717.500				
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		57,33%	430.893.500	48,17%	354.969.800	100%	1. Masih lambatnya regenerasi pengelola/pengurus koperasi 2. Masih terbatasnya koperasi yang memiliki fasilitas IT dan SDM pengelola IT 3. Belum adanya aturan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Koperasi UKM RI) terkait peran OPD yang membidangi koperasi dalam pendirian dan	1. Memberikan penyuluhan sosialisasi pentingnya regenerasi dalam pengelolaan koperasi 2. Memberikan pelatihan berbasis IT bagi pengelola/ pengurus koperasi 3. Berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait untuk menegaskan peran OPD yang membidangi koperasi dalam pendirian dan penegasan badan	
		1 Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi		120 Koperasi	413.500.000	120 Koperasi	337.593.000				
		2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100 kop	17.393.500	100 kop	17.376.800				
JUMLAH						848.648.250		704.551.450			
17	Penanaman Modal	DPMPTSP	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja keuangan 2. Penerapan penyusunan anggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, Analisa standar belanja dan standar satuan 3. Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.214.216.000		2.073.666.435			
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan		100	15.500.000	100	12.155.300	78,42			
		2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	391.700.000	100	319.451.835	81,56			
		3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset		100	216.384.000	100	190.297.000	87,94			
		4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran		100	652.143.000	100	647.984.000	99,36			
		5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan		100	169.250.000	100	169.225.750	99,99			
		6 Penyediaan Makanan dan Minuman		100	34.446.000	100	16.512.500	47,94			
		7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor		100	297.850.000	100	286.630.500	96,23			
		8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional		100	199.800.000	100	194.690.500	97,44			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
			1. Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis IT yang terkoneksi dengan berbagai lembaga di lingkungan KotaJambi khususnya dan dengan lembaga di lingkungan Provinsi umumnya, Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop, bimbingan teknis	9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor	100	237.143.000	100	236.719.050	99,83			
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				199.611.000		155.135.494		
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	100	38.680.000	100	38.680.000	99,99			
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	100	-		-	-			
				3 Perjalanan Dinas	100	160.931.000	100	116.455.494	72,36			
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				31.000.000		30.946.200		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100	20.000.000	100	19.946.500	99,73			
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	100	11.000.000	100	10.999.700	99,98			
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	100	-		-				
				Program Peningkatan Realisasi Investasi				372.414.000		298.466.750		
				1 Pengembangan potensi unggulan daerah	100	44.494.000	100	40.620.000	91,29			
				2 Penyusunan Rencana Penanaman Modal daerah	100	60.795.000	100	59.915.000	98,55			
				3 Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100	96.525.000	50	39.924.200	41,36	Tidak dapat dilaksanakannya bimbingan teknis LKPM karena pandemi Covid 19	Dilaksanakan di tahun 2021	
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100	406.792.000		399.642.800				
				1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial	100	134.365.000	100	132.193.300	98,38			
				2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	100	168.100.000	100	163.260.000	97,12			
				3 Pengelolaan data dan Penataan Arsip Perizinan	100	38.415.000	100	38.365.000	99,87			
				4 Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan perizinan	100	65.912.000	100	65.824.500	99,87			
JUMLAH						3.224.033.000		2.957.857.679				
18	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga			Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.269.130.000		1.180.918.338	100%		
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	R4 5 Unit, R4 14 Unit	10.000.000	R4 5 Unit, R4 14 Unit	6.217.400	100%			
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	146.580.000	1 Tahun	103.460.591				
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	28 Orang	213.680.000	28 Orang	210.470.000	100%			
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	17 Orang	302.870.000	17 Orang	291.109.947	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	138.620.000	100%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya kegiatan bidang	Belanja publikasi disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	29.990.000	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	7 Paket	161.000.000	7 Paket	159.562.800	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	R4 5 Unit, R2 14 Unit	220.000.000	R4 5 Unit, R2 14 Unit	216.500.000	100%		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor	1 Paket	25.000.000	1 Paket	24.987.600			
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		288.412.816		275.723.079	100%		
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	52 Stel	33.800.000	49 Stel	31.360.000	100%		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	7 Kali	10.000.000	-	-	100%		
				3 Perjalanan Dinas	60 Kali	244.612.816	40 Kali	244.363.079	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		44.000.000		43.600.000	100%		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10 Dokumen	20.000.000	10 Dokumen	20.000.000	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	100%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	1 Website	20.000.000	1 Website	19.600.000	100%		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN		3.618.081.700		1.641.143.517	100%		
				1 Pembinaan Kepemudaan	8 Kegiatan	1.136.510.250	3 Kegiatan	535.110.367		Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
				2 Pembinaan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	33 Cabor	697.130.000	33 Cabor	562.881.850		Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas olahraga	Melakukan pembinaan cabang olahraga yang tidak mengumpulkan massa yaitu cabang olahraga e-sport
				3 Pemassalan Olahraga	13 Kegiatan	1.421.005.000	3 Kegiatan	180.024.300		Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas olahraga	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
				4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	2 Dokumen	7.750.000	2 Dokumen	7.705.000	1		
				5 Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda	4 Paket	355.686.450	4 Paket	355.422.000			
JUMLAH						5.219.624.516		3.141.384.934			
19	Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata dan		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.212.585.000		1.103.206.781			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
		dan Kebudayaan		1 Penyediaan jasa surat menyurat dan perizinan	12 Unit STNK/KIR	22.824.000	23 Unit STNK/KIR	6.611.700	100%	Kelebihan Penganggaran	Pengurangan Anggaran
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	16.100 Kwh (Listrik), 1310 M3 552900 MB (Telp & Wifi), utk Satu tahun	117.050.000	16.100 Kwh (Listrik), 1310 M3 552900 MB (Telp & Wifi), utk Satu tahun	81.314.983	100%	Kelebihan Penganggaran	Pengurangan Anggaran
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset .	22 Orang Tenaga Adm Keuangan, Aset & Pengadaan	191.824.500	22 Orang Tenaga Adm Keuangan, Aset & Pengadaan	183.208.500	100%	-	-
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran kantor	19 Orang Tenaga Pendukung/Adm/ Teknis Perkantoran	320.882.000	19 Orang Tenaga Pendukung/Adm/ Teknis Perkantoran	301.447.500	100%	-	-
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengandaan	ATK dan Barang Cetakan & Pengandaan 1 Tahun	51.860.000	ATK dan Barang Cetakan & Pengandaan 1 Tahun	50.957.500	75%	Kelebihan Penganggaran	Pengurangan Anggaran
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Harian utk 1	25.000.000	Makan dan Minum Rapat, Tamu dan Harian utk 1	21.780.000	86%	-	-
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor 13 Unit dan Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun	230.230.000	Peralatan Kantor 13 Unit dan Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Tahun	228.705.000	85%	-	-
				8 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/ Dinas/Operasional	Pemeliharaan dan Rehabilitasi 22 Unit Mobil dan motor, BBM 1	234.694.500	Pemeliharaan dan Rehabilitasi 22 Unit Mobil dan motor, BBM 1	229.181.598	100%	-	-
				9 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Sewa Gedung Kantor	18.220.000	Gedung Kantor	0	85%	Pengunaan Gedung Milik Pemerintah kota Jambi	Pengurangan Anggaran
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		225.190.800		163.155.595			
				1 Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	1PDH/PSL,PSR 62 Stel	41.000.000	1PDH/PSL,PSR 62 Stel	38.802.500	100%		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	Diklat/Bintek/Kursus selama 1 Tahun utk 6	25.000.000	Diklat/Bintek/ Kursus selama 1 Tahun utk 6	16.500.000	70%		
				3 Perjalanan Dinas	Rakor dan Konsultasi dam/luar daerah utk 1 Tahun	159.190.800	Rakor dan Konsultasi dam/luar daerah utk 1 Tahun	107.853.095	75%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		87.485.000		82.693.750			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	8 Dokumen dan Konsultasi Perencanaan & Pelaporan 1	5.000.000	8 Dokumen dan Konsultasi Perencanaan & Pelaporan 1	1.995.000	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Pelaporan Keuangan & Aset Perangkat daerah	5.000.000	Dokumen Pelaporan Keuangan & Aset Perangkat daerah	3.300.000	90%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	1 Aplikasi, Jenis data dan 1 Dokumen Profil	77.485.000	1 Aplikasi, Jenis data dan 1 Dokumen Profil	77.398.750	100%		
				Program Peningkatan Akses, Mutu, dan Tata		912.750.000		691.047.099			
				1 Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	Even Seni Budaya 4 Kali, Pelatihan Tim Kesenian 15 Kali, Penyambutan Tamu 30 Kali, Promosi Budaya	847.750.000	- Even Seni Budaya 1 Kali,	626.354.599	50%	Beberapa even tidak terlaksana dikarenakan Pandemi Covid-19	
							- Pelatihan Tim Kesenian 15 X,				
							- Penyambutan Tamu 30 Kali,				
				2 Penyusunan Profil Seni Budaya	1 Dokumen Profil Seni Budaya	65.000.000	1 Dokumen Profil Seni Budaya	64.692.500			
JUMLAH						2.438.010.800		2.040.103.225			
20	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.901.156.675		1.774.744.373			
				1 Penyediaan Jasa Surat	100%	17.600.000	80%	14.143.400	100%		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	336.868.000	85%	286.863.058	100%		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100%	191.152.800	95%	181.552.800	100%		
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100%	675.103.200	98%	659.809.100	100%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	39.190.875	100%	39.102.340	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	31.500.000	100%	31.500.000	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	100%	293.241.800	100%	291.786.550	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasion	100%	316.500.000	85%	269.987.125	100%		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	100%	-	0%	-	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		194.370.000		189.621.200			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	100%	55.200.000	92%	51.000.000			
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	100%	7.300.000	93%	6.790.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				3 Perjalanan Dinas	100%	131.870.000	100%	131.831.200			
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		3.572.150		2.122.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	2.700.000	46%	1.250.000			
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	100%	872.150	100%	872.000			
				Peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan	100%	788.629.100	14,078	765.388.400			
				1 Pengembangan koleksi perpustakaan, layanan dan pelestarian bahan pustaka		591.863.700		568.864.100			
					500 eksemplar		1611 eksemplar				
					110 judul		723 judul				
					40336 pengunjung		14078 pengunjung				
					3533 judul		1311 judul				
					100 eksemplar		110 eksemplar				
				Pengembangan Koleksi Perpustakaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka		196.765.400		196.524.300			
					50 Orang		50 Orang				
					3 MOU		3 MOU				
					4 Keg		8 Keg				
					76perpus/pojok baca		76 perpus/pojok baca				
					59perpus/Pojok baca		59 perpus/Pojok baca				
JUMLAH						2.887.727.925		2.731.875.973			
21	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	100%	1.298.719.875	100%	1.297.314.875			
				1 Akuisisi, pengolahan dan layanan kearsipan Kota Jambi		1.043.633.875		1.042.328.875			
					4 Perwal		5 Perwal				
					1 Kegiatan		1 Kegiatan				
					1200 Arsip		26828 Arsip				
					1 Buku		2 Buku				
					30 PD		30PD				
					1 PD		1 PD				
					1 PD		1 PD				
					1 Kegiatan		1 Kegiatan				
					1 Kegiatan		1 Kegiatan				
				2 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		255.086.000		254.986.000			
					22 PD, Bag, Kelurahan		52 PD, Bag, Kelurahan				
					20 PD, Bag, Kelurahan		20 PD, Bag, Kelurahan				
					10 Ormas/orpol, perusahaan		10 Ormas/orpol, perusahaan				
					10 Ormas/orpol, perusahaan		10 Ormas/orpol, perusahaan				
JUMLAH						1.298.719.875		1.297.314.875			

2. Tabel Capaian Urusan Pilihan Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Pariwisata		6.898.907.000		5.498.498.300			
				1. Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	Haul 2 Kali, Lomba Perahu & Ketek Hias 1 Kali, Pelayanan TDUP 80 Kali, Pengembangan Kampung Wisata 1 Kali dan Sosialisai Pokdarwis 1 Kali	2.777.460.000	Haul 2 Kali, , Pelayanan TDUP 40 Kali, Sosialisasi Pokdarwis 1 Kali	2.506.948.600	45%	Beberapa sub kegiatan tidak terlaksana dikarenakan Pandemi Covid-19	-
				2. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Promosi Luar Daerah 1 Kali, Pemilihan Budis 1 Kali, Penampilan Budis 10 kali, Carnaval Pariwisata 1, Festival Kuliner, Analisa pasar 1 Dok, Pengembangan Kerjasama 1 Kali	4.040.447.000	- Penampilan Budis 21 kali,	2.913.699.700	70%	Beberapa sub kegiatan tidak terlaksana dikarenakan Pandemi Covid-19	-
							- Pengembangan Kerjasama 1 Kali (Masih dlm Penjajakan)				
				3. Monitoring dan Evaluasi Kepariwisataan	Monitoring Tempat Usaha Pariwisata 28 Kali	0	-	0	0%	Pengalihan Anggaran	-
				4. Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah	Perencanaan pariwisata 1 Dokumen	81.000.000		77.850.000		-	-
JUMLAH						6.898.907.000		5.498.498.300			
2	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)		Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan		1.865.377.250		1.824.515.850			
				1 Pengembangan Agribisnis Perikanan		249.367.250		246.329.250			
					Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya		290000 ekor			Mahalnya harga pakan ikan	Sosialisasi secara persuasif kepada pembudidaya ikan untuk membuat paka buatan berbahan baku lokal
							50.779.549			Masih terbatasnya bibit ikan yang	Pengadaan induk ikan unggul

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
					Peningkatan Produktivitas Hasil Perikanan Bernilai Tambah dan Konsumsi Ikan						
					- Peningkatan nilai tambah produk perikanan (Ton)		1%				
					- Peningkatan konsumsi ikan (kg/Kap/Th)		33,6 kg/kap/th				
					Peningkatan produktivitas perikanan perairan umum		0,73 ton/ha			Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang	Melakukan sosialisasi mengenai penangkapan ikan yang baik
				2 Pengembangan Perbenihan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan (1410000 ekor)	1.616.010.000	813370 ekor	1.578.186.600		Masih kurangnya tenaga tehknis perikanan	Menambah atau mengirim ASN mengikuti bimtek thknis perikanan
JUMLAH						1.865.377.250		1.824.515.850			
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)		Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan		1.057.686.500		1.014.381.318			
				1 Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura		321.290.000		307.135.000			
					- Luas pengenalan dan penggunaan varietas unggul bermutu dan pengendalian hama terpadu (Ha)		0			Terjadi Pandemi dan Rasionalisasi Anggaran Tn. 2020	Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada petani Kegiatan Uji varietas dan PHT sangat diperlukan oleh petani dan masyarakat maka diajukan kembali untuk Th. 2021
					Uji Varietas melon		0,25 ha			Kultur tanah (Lokasi) tidak cocok sehingga hasil produksi tidak optimal	
					- Produktivitas Tanaman pangan dan Hortikultura (Ton/Ha)		5,4 ton/ha			Terjadi Pandemi dan Rasionalisasi Anggaran Tn. 2020	Melaksanakan swadaya Benih padi oleh petani dan bantuan dari APBN juga meningkatkan pembinaan, pendampingan dna pengawasan di kelompok Tani

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
					- Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan hasil Pertanian (org)			50 orang			Terjadi Pandemi sehingga harus mengikuti anjuran dari Pemkot untuk tidak mengadakan pertemuan dan pengumpulan orang banyak dan sebagian Anggaran Kegiatan di Rasionalisasi Tahun 2020	Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi para petani, pelaku usaha, KWT dan masyarakat
				2	Peningkatan Jumlah Bibit Buah Bersertifikat	Peningkatan produksi bibit unggul bersertifikasi (batang)	154.664.000	4000 batang	151.111.818			
				3	Pengembangan Agribisnis Peternakan		268.798.500		263.161.000			
						Jumlah PAH yang diperiksa		80				
						Jumlah PAH yang pemeriksaan hewan yang berpotensi penular rabies		800			belum maksimalnya kesadaran pelaku usaha untuk memotivasi diri untuk mengembangkan produk olahannya	Perlunya peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memotivasi diri untuk mengembangkan produk olahannya
						Peningkatan Mutu dan Jumlah Ternak Sapi melalui Keg.		60				
						Optimalisasi Pengolahan Produk Hasil Ternak		5.600 kg				
						Optimalisasi Pelaku Usaha Peternakan		300 orang				
				4	Pengembangan Rumah Potong Hewan	Jumlah pemotongan hewan ternak besar di RPH(ekor)	132.224.000	5.100 ekor	132.224.000	100%		
				5	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan		63.500.000		63.300.000		Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas olahraga	Adanya Lomba Posyantek TTG ditingkat Kecamatan /Kelurahan. Melaksanakan Kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
						Jumlah hewan yang diberi vaksin		600				
						Jumlah hewan yang diperiksa dan diberi obat						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
					a. Hewan ternak unggas		10.000				
					b. Hewan ternak non-unggas		500				
					c. Hewan peliharaan		500				
				6 Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		117.210.000		97.449.500			
				Peningkatan jumlah kelompok Tani yang memanfaatkan irigasi dan sumber air pertanian (%)			20			Belum optimalnya jumlah dan pemanfaatannya alat pertanian	Melakukan pembinaan kepada poktan dan penataan UPJA
				Peningkatan jumlah kelompok tani yang memanfaatkan alsintan dan pupuk (klp)			35			Belum semua kelompok tani membuat rencana kerja	Melakukan sosialisasi kepada petani agar tetap melaksanakan budidaya padi
				Jumlah kelompok tani yang naik kelas (klpk)			54			Pemupukan modal kelompok tani masih lemah	
JUMLAH						1.057.686.500		1.014.381.318			
4	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		3.391.985.200		3.126.301.688			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dan Perizinan	100 %	21.000.000	73,03 %	15.336.200	100 %		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen /Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	417.000.000	71,03 %	296.193.472	100 %		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100 %	262.468.000	89,09 %	233.843.200	100 %		
				4 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	100 %	1.568.494.800	96,54 %	1.514.287.400	100 %		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	116.143.700	99,96 %	116.098.050	100 %		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	100 %	61.658.700	78,84 %	48.609.740	100 %		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	100 %	265.500.000	88,24 %	234.266.500	100 %		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	100 %	360.000.000	97,41 %	350.665.426	100 %		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	100 %	319.720.000	99,15 %	317.001.700	100 %		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		558.500.000		334.015.570			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Hari-hari Tertentu Beserta Perlengkapannya	100 %	176.000.000	86,79 %	152.752.000	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			1.Pembuatan Kartu Gas 3 Kg bersubsidi 2.Membuat Siharko (sistim informasi harga sembako Kota Jambi)	2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis /Kursus	100 %	0	0 %	0	0 %		
				3 Perjalanan Dinas	100 %	382.500.000	47,39 %	181.263.570	100 %		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		16.150.000		16.070.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	14.650.000	99,52 %	14.579.400	100 %		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	100 %	1.500.000	99,37 %	1.490.600	100 %		
				Program Pembinaan, Peningkatan Dan Pengawasan Perdagangan	80	1.464.921.000	100	1.414.337.630	100%		
				1 Peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar	3,955 M	100.000.000	4,259 M	86.696.100	100 %		
				2 Penyelenggaran pendataan objek retribusi pasar	750 izin	50.960.000	537 izin	43.437.550	100 %		
				3 Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	11 unit pasar	10.000.000	9 unit pasar	9.850.000	100 %		
				4 Penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah	11 unit pasar	251.350.000	12 unit pasar	250.176.800	100 %		
				5 Pemantauan distribusi barang	50 pelaku Usaha	16.765.000	40 pelaku usaha	16.463.000	100 %		
				6 Pembinaan, pengawasan dan penigkatan pelaku usaha formal	200 pelaku usaha	36.535.000	150 pelaku usaha	33.745.500	100 %		
				7 Penyuluhan dan pemberdayaan konsumen	125 pelaku usaha	15.725.000	75 pelaku usaha	15.579.000	100 %		
				8 Tera/tera ulang dan Pengawasan Kemetrolagian	1620 unit UTTP	67.400.000	4104 unit UTTP	63.587.080	100 %		
				9 Pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan	130 pelaku usaha	65.790.000	60 pelaku usaha	52.799.000	100 %		
			10 Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	100 %	800.396.000	100%	795.210.100	100 %			
			11 Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	26 Pelaku usaha	50.000.000	30 pelaku usaha	46.793.500	100 %			
JUMLAH						5.431.556.200		4.890.724.888			
5	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.Penarikan retribusi terhadap jasa kemasan.	Program Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil dan Menengah		1.696.249.500		1.671.530.089		1. Tingginya harga cetak kemasan di pasar sehingga perlu dibantu pemerintah, disamping itu agar pemerintah tidak terlalu terbebani maka perlu dikenakan taris retribusi	1.Maka dibuat kebijakan dengan mengenakan tariff retribusi jasa kemasan, dimana disamping membantu IKM juga pemerintah tidak terlalu terbebani
				1 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan	120 unit IKM	62.170.000	60 unit IKM	61.295.000	100 %		
				2 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan ILMEA	38 unit IKM	72.100.000	36 unit IKM	71.826.550	100 %		
				3 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	80 unit IKM	1.115.499.500	17 unit IKM	1.094.983.939	100 %		
				4 Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM	80 unit IKM	70.390.000	139 unit IKM	70.034.100	100 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				5 Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah	50 unit IKM	0	0 unit		100 %		
				6 Promosi/Pameran Produk Jambi	16 unit	376.090.000	8 unit	373.390.500	100 %		
JUMLAH						1.696.249.500		1.671.530.089			

3. Tabel Capaian Urusan Penunjang Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspektorat	Inspektorat		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.074.216.000		993.508.485			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	4 Jenis	13.500.000	4 Jenis	8.718.800	100%	Estimasi pajak mobil dinas baru (3 unit) melebihi pembayaran	dalam perencanaan anggaran kedepannya agar lebih cermat
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 4 Rekening - 10 Jenis	124.375.000	- 4 Rekening - 10 Jenis	100.884.870	100%		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	192 OB	177.000.000	96 OB	171.675.000	100%	karena refocusing anggaran menyebabkan turunnya honor PPTK	
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	- 14 Jenis - 12 kali Retr - 120 OB	168.695.000	- 7 Jenis - 6 Kali - 60 OB	167.237.700	100%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor , Barang Cetak dan Penggandaan	47 Jenis	178.445.000	27 Jenis	175.263.875	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- 3.000 Kotak nasi - 5.000 Kotak Kue	25.895.000	- 80 Kotak nasi - 100 Kotak Kue	11.585.600	45%	Serapan anggaran rendah karena masa pandemi sehingga berkurangnya jumlah pertemuan rapat sosialisasi dan kunjungan tamu	
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	20 Jenis	142.580.000	12 Jenis	135.762.765	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan jabatan/Dinas/operasional	50 Unit	194.340.000	50 Unit	182.394.875	100%		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor	1 Paket	49.386.000	100%	39.985.000	100%	Karena ada refocusing anggaran	
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		350.250.000		265.499.090			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	65 stell	43.000.000	63 stell	37.400.000	97%	karena pengadaan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada	
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	11 Orang	77.000.000	6 orang	28.150.000	54%	karena masih dalam kondisi pandemi, sehingga serapan anggaran kecil	Penambahan JFT melalui insipassing dan promosi serta adanya penambahan melalui cpns
				3 Perjalanan Dinas	46 Kali	230.250.000	24 Kali	199.949.090	52%	karena masih dalam kondisi pandemi	
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		4.800.000		648.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Laporan	3.600.000	6 Laporan	648.000	100%	Efisiensi, kinerja 100% dengan tidak menggunakan anggaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020	2 Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	1.200.000	0	-	100%	Efisiensi, kinerja 100% dengan tidak menggunakan anggaran	
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	0	0	0	-			
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	2.744.590.000	90%	2.497.113.000	90,00%		
				1 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal	461 Laporan	1.486.595.000	401 Laporan	1.405.050.000	86,99%	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pemeriksa/ Jabatan fungsional tertentu (JFT) dalam pelaksanaan PKPT	Penambahan JFT melalui inpassing dan promosi serta adanya penambahan melalui cpns, serta peningkatan kualitas melalui diklat
				2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	25 Kasus	350.000.000	25 Kasus	313.575.000	100%		
				3 Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah	83 Laporan	100.000.000	83 Laporan	99.650.000	100%		
				4 Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintah	12 Laporan	240.000.000	12 Laporan	172.288.000	100%	Giat aksi saber pungli berkurang karena Covid-19	meningkatkan koordinasi antar tim satgas saber pungli
				5 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	230 Temuan	463.250.000	247 Temuan	438.900.000	107,30%	Kesulitan dalam menagih tindak lanjut, karena kurangnya kesadaran Pihak	Lebih mengintensifkan pembinaan dan penagihan
				6 Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi	- 1 kali	104.745.000	1 Kali	67.650.000	100%	Kurangnya pemahaman mengenai RB	meningkatkan pembinaan dan pendampingan
JUMLAH						4.173.856.000		3.756.768.575			
2	Perencanaan	BAPPEDA		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.778.700.000		2.629.501.457			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	16 Unit Motor dan 7 Unit Mobil	25.000.000	100%	16.753.400	100%		
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik: 20000 KWH (3 meteran), PDAM: 50 M3, Telekomunikasi 100 Mbp, Komponen/instalasi : 1 tahun	264.000.000	100%	236.531.357	100%		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	26 Orang	260.312.000	100%	221.043.000	100%		
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	25 orang	602.668.000	100%	585.689.600	100%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	100.000.000	100%	100.000.000	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	85.000.000	100%	73.318.600	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	4 unit PC, 10 unit Notebook, 7 printer, 1 unit kulkas, 1 UPS, 3 Perlengkapan Komputer dan 1 Tahun	536.000.000	100%	532.670.000	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	1 Unit Mobil, 2 Unit Motor dan 16 Unit Motor/Tahun serta 7 Unit	691.720.000	100%	649.885.500	100%		
				9 Pembangunan Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor	1 tahun	214.000.000	100%	213.610.000	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		497.780.000		424.527.559			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	72 stel dan 21 stel	75.000.000	100%	69.750.000	100%		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	35 kali/tahun	25.000.000	100%	3.450.000	100%		
				3 Perjalanan Dinas	60	397.780.000	100%	351.327.559	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		358.400.000		258.006.500			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	4 dokumen	25.000.000	100%	18.899.500	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	6 dokumen	35.000.000	100%	28.775.000	100%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Aplikasi/dokumen/buku	298.400.000	100%	210.332.000	100%		
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	96,0% 86,5% 89,0%	1.016.975.000	96,87% 91,41% 87,03%	885.908.000	84,77		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	6 dokumen	436.500.000	100%	373.113.000	100%		
				2 Monitoring dan Evaluasi	5 kali 3 kali 4 kali 3 Laporan	130.000.000	100%	121.250.000	100%		
				3 Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	11 urusan dan 1 laporan	166.400.000	100%	134.635.000	100%		
				4 Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	7 urusan	61.000.000	100%	47.530.000	100%		
				5 Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12 kali, 2 kali dan 2 dokumen	223.075.000	100%	209.380.000	100%		
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		476.665.000		465.350.000			
				1 Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya	10 kali dan 2 dokumen	429.665.000	100%	418.620.000	100%		
				2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	10 kali dan 2 kali	47.000.000	100%	46.730.000	100%		
JUMLAH						5.128.520.000		4.663.293.516			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
3	Keuangan	BPKAD	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah 2. Penerapan penyusunan penganggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, Analisa standar belanja dan standar satuan harga 3. Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Optimalisasi Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah 5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah 6. Peningkatan Pengamanan dan pemanfaatan aset daerah 7. Penerapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu dan	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		4.513.696.144		3.862.172.018	100%		
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	-3800 surat masuk, 800 surat keluar, -7 Kendaraan Roda 4, 18 Kendaraan Roda	29.000.000	- 3969 surat masuk - 1.023 surat keluar. -7 Kendaraan Roda 4, 18 Kendaraan Roda	15.308.800	100%		- Penyediaan dana untuk administrasi materai dan Pembayaran STNK/Perizinan kendaraan dinas berstatus BMD yang berada di SKPD
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 63.000 KWh, - 100 Mbps, - 1 Tahun	477.710.450	- 63.000 KWh, - 100 Mbps, - 1 Tahun	321.735.958	100%		- Belanja Listrik Kantor tidak bisa direalisasikan terkait status belanja listrik kantor yang masih di bagian Umum.
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	PA,PPK,PPKOM, PPBJ,PPHP, Staf Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pemb Pengurus barang (30 orang)	1.019.400.000	PA,PPK,PPKOM, PPBJ,PPHP, Staf Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pemb Pengurus barang (30 orang)	932.936.000	100%		-
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	2 petugas kebersihan, 29 Orang Tenaga Pendukung, 1 petugas Pengaman kantor, 1 Pengemudi dan Penjaga Malam	869.725.694	2 petugas kebersihan, 29 Orang Tenaga Pendukung, 1 Pengemudi	651.491.000	100%		- Penyediaan dana untuk tenaga keamanan kantor tidak terealisasi karena pengamanan kantor di bantu oleh tenaga oleh Satpil pp
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	119.839.575	100%		-
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	44.375.240	100%		-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			sesuai sistem	7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Pengadaan: - 4 Unit - 1 Paket - 1 Tahun - 10 Unit - 1 Paket - 20 unit - 5 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Tahun - 1 Paket - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 paket - 2 unit - 2 unit - 1 unit - 7 unit - 23 unit - 9 unit - 5 unit - 8 unit - 2 unit - 1 unit - 2 unit - 1 unit - 1 unit - 3 unit - 1 unit - 3 unit - 1 paket - 1 unit - 3 unit - 1 paket - 2 Unit - 1 Unit	1.329.800.000	Pengadaan: - 4 Unit - 1 Paket - 1 Tahun - 10 Unit - 1 Paket - 20 unit - 5 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Tahun - 1 Paket - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 paket - 2 unit - 2 unit - 2 unit - 1 unit - 7 unit - 23 unit - 9 unit - 5 unit - 8 unit - 2 unit - 1 unit - 2 unit - 1 unit - 1 unit - 3 unit - 1 unit - 3 unit - 1 paket - 1 unit - 3 unit - 1 paket - 2 Unit - 1 Unit	1.166.727.794	100%		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	- Roda 2 (18 Unit/Tahun) dan 4 (8 Unit/Tahun) - Roda 2 (18 Unit/Tahun) dan 4 (8 Unit/Tahun)	345.060.000	- Roda 2 (18 Unit/Tahun) dan 4 (8 Unit/Tahun) - Roda 2 (18 Unit/Tahun) dan 4 (8 Unit/Tahun)	334.385.851	100%		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	- 1 unit/Tahun - 1 unit	278.000.000	- 1 unit/Tahun - 1 unit	275.371.800	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		632.250.000		624.456.701	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	-160 PDH, - 6 PSL, - 80 Jilbab	135.000.000	-160 PDH, - 6 PSL, - 80 Jilbab	131.094.800	100%		
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	15 kali	97.250.000	12 kali	93.450.000	100%		
				3 Perjalanan Dinas	75 kali	400.000.000	96 Kali	399.911.901	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		41.000.000		38.763.300	100%		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	- 1 Dok Renja, - 1 Dok KUA PPAS, - 1 Dok RKA, - 1 Dok DPA, - 1 Dok IKU, - 1 Dok PK, - 1 Dok LKJ, - 1 Dok LPPD, - 1 Laporan Tahunan	11.000.000	- 1 Dok Renja, - 1 Dok KUA PPAS, - 1 Dok RKA, - 1 Dok DPA, - 1 Dok IKU, - 1 Dok PK, - 1 Dok LKJ, - 1 Dok LPPD, - 1 Laporan Tahunan	9.769.300	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	LRA, Neraca, CaLK, LO, LPE, RK, KIB A, KIB B, KIB C, dll (9 Dokumen)	10.000.000	LRA, Neraca, CaLK, LO, LPE, RK, KIB A, KIB B, KIB C, dll (9 Dokumen)	8.994.000	100%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	1 Aplikasi	20.000.000	1 Aplikasi	20.000.000	100%		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	1. 35 OPD 2. 80 % 3. 20 OPD 4. 40 OPD dan 11 BLUD 35 OPD	9.211.103.548	1. 35 OPD 2. 80 % 3. 20 OPD 4. 40 OPD dan 11 BLUD 35 OPD	5.083.620.993			
				1 Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Regional	- 1 Perwal ASB, - 1 Laporan - 1 Keputusan Walikota	257.691.069	- 1 Perwal ASB, - 1 Laporan - 1 Keputusan Walikota	254.286.000	100%	- Makanan dan Minuman untuk rapat yang tidak sesuai rencana awal - Perjalanan dinas dalam daerah yang sesuai dengan pelaksanaan	- SILPA - Lebih menjadwalkan pelaksanaan kegiatan lebih baik dan mematangkan perencanaan kegiatan
				2 Penyusunan Ranperda dan Ranperkada APBD	- 1 Perda, - 1 perkada APBD	2.319.811.900	- 1 Perda, - 1 perkada APBD	2.090.157.300	100%	- Makanan dan Minuman untuk rapat yang tidak sesuai rencana awal - Perjalanan dinas dalam daerah yang sesuai dengan pelaksanaan	- SILPA - Lebih menjadwalkan pelaksanaan kegiatan lebih baik dan mematangkan perencanaan kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				3 Penyusunan Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD	- 1 Perda, - 1 perkada Perubahan APBD	228.551.902	- 1 Perda, - 1 perkada Perubahan APBD	200.405.000	100%	- Makanan dan Minuman untuk rapat yang tidak sesuai rencana awal - Perjalanan dinas dalam daerah yang sesuai dengan pelaksanaan	- SILPA - Lebih menjadwalkan pelaksanaan kegiatan lebih baik dan memantapkan perencanaan kegiatan
				4 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	4 Laporan	3.138.544.100	4 Laporan	136.700.500	100%	- Tidak adanya MOU antara Pemerintah Daerah dengan PT. SMI	- Hasil Koordinasi dengan PT. SMI sesuai dengan surat No. S-976/SMI/DBI/2020 tanggal 28 Desember 2020 Perihal : Tindak lanjut permohonan pinjaman daerah akan diproses lebih lanjut pada awal tahun 2021, mempertimbangkan sisa waktu tahun 2020.
				5 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Aplikasi	523.059.500	1 Aplikasi	163.930.000	100%	- Bimtek yang tidak terlaksana dikarenakan Pandemi Covid - 19	- SILPA - Lebih menjadwalkan pelaksanaan kegiatan lebih baik dan memantapkan perencanaan kegiatan tahun anggaran selanjutnya.
					80%		80%			-	-
				6 Pengelolaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah	- 4500 Dokumen SP2D, - 480 Register SPP, SPM, SP2D	189.050.000	4.783 Dokumen SP2D dan 480 Register	189.050.000	100%	-	-
				7 Operasional Majelis Pertimbangan TGR	- 22 Kasus - 22 SK	118.912.500	- 9 Kasus - 9 SK	112.336.600	100%	- Belum di bentuk TPKD (Tim Penyelesaian Kerugian Daerah)	- Membentuk TPKD (Tim Penyelesaian Kerugian Daerah)
				8 Pembinaan Penatausahaan Bendahara	- 2 Kali - 2 Dokumen	175.850.600	- 2 Kali - 2 Dokumen	175.838.500	100%	-	-
				9 Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah	- 144 Dokumen - 480 Dokumen - 480 Dokumen - 17 SK	80.612.500	- 144 Dokumen - 480 Dokumen - 480 Dokumen - 17 SK	74.641.375	100%	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				10 Penatausahaan Barang Milik Daerah	20 OPD - 1 Kali sosialisasi - 40 Berita Acara, - Laporan aset LBMD dan DBMD 40 OPD - Pembinaan Pelaporan aset untuk SD dan SMP dan Puskesmas	261.675.000	20 OPD - 40 Berita Acara. - Laporan aset LBMD dan DBMD 40 OPD	133.644.400	100%	- Dikarenakan adanya pandemi Covid - 19 yang tidak memungkinkan untuk mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan Pelaporan Aset untuk SD, SMP dan Puskesmas.	- Menunggu Pandemi Covid - 19 mereda

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				11 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- 10 OPD untuk Penertiban Aset , - Penerbitan Buku Hasil Penilaian Tanah, PM, GB dan JJJ, - Pemusnahan PM untuk 10 OPD dan 5 Puskesmas	183.159.000	a. Lebih dari target yaitu ada 32 OPD dan 20 puskesmas yang telah dilakukan penertiban, namun belum sampai ke penghapusan, karena baru tahap penilaian BMD di KPKNL Jambi b. Telah diterbitkan penilaian PM dan GB c. Telah dilakukan pemusnahan barang persediaan obat-obatan di Farmasi, namun untuk PM baru sampai penelusuran dan inventarisasi	148.106.650	100%	a. Tidak terlaksananya kegiatan pemindahtanganan dan pemusnahan BMD (seperti pengumuman lelang di media cetak, makan minum pelaksanaan pembukaan lelang di Kantor KPKNL dan penjiilidan laporan pelaksanaan lelang), hal ini dikarenakan banyaknya BMD yang rusak berat yang harus dilakukan penertiban baik itu untuk dipindahtanganan maupun dimusnahkan. b. Tahapan pemindahtanganan menurut peraturan adalah harus dilakukan inventarisasi (pengecekan fisik), persetujuan, penilaian dan pelaksanaan. Sementara BMD yang harus dilakukan pemindahtanganan dan pemusnahan tersebar di 32 OPD dan 20 puskesmas jadi ada 52 Kantor/Dinas/Badan dengan jumlah barang ± 1400 jenis barang, sehingga sampai desember 2020 kegiatan tersebut hanya sampai tahap	a. Membangun komunikasi dengan pihak KPKNL untuk segera melakukan penjualan/lelang untuk BMD yang sudah dilakukan penilaian oleh KPKNL sehingga dapat diselesaikan di tahun 2021. b. Peningkatan kapasitas para pihak yang mengurus aset baik ditingkat pengguna maupun ditingkat pengelola. c. Upayakan setiap OPD bahkan Bidang Aset untuk memiliki gudang agar lebih terkontrol, terkendali dan mempermudah proses penertiban aset, terutama barang yang rusak berat dan tidak digunakan lagi.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				12 Pengamanan Barang Milik Daerah	- Penertiban SK Penetapan Status Pengguna 20 OPD, - Pemsangan 50 Papan Plang, Penertiban 25 Sertifikat , - Terciptanya Aplikasi Database Tanah, 1 aplikasi GIS	1.046.636.250	- Telah dihasilkan aplikasi database tanah dengan spesifikasi (Alamat ,Luas, Penggunaan dan Status Sertifikat. - Penerbitan Sertifikat yaitu 20 Sertifikat yang telah terbit di Tahun 2020. - Telah dipasangnya Papan Plank sebanyak 50 pada Tahun 2020. - Telah diterbitkannya SK Penetapan Status BMD sebanyak OPD Tahun 2020	736.176.285	100%	- Permasalahan Sertifikat karena sulitnya mendapatkan Data Alas hak Tanah	- Melakukan Koordinasi Intens dengan OPD terkait dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Kambi.
					40 OPD dan 11 BLUD		40 OPD dan 11 BLUD				
				13 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- 1 Ranperda, - 1 Perda, - 1 Ranperkada, dan - 1 Perkada.	174.370.000	- 1 Ranperda, - 1 Perda, - 1 Ranperkada, dan - 1 Perkada.	169.342.450	100%	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				14 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	1) 1 LKPD (Un Reviu, Un Audited, Audited), 2) 12 LRA Bulanan, 2 LRA Triwulanan dan 2 LRA Semesteran, 3) 24 Laporan Simpatik (Posisi Kas dan Rencana Belanja) Bulanan, 4) 180 Laporan DAK Fisik 3 Tahap, 5) 10 Laporan DAK Non Fisik Semesteran dan Tahunan, 6) 2 Laporan DID 2 Tahap, 7) 4 Laporan DAU Tambahan Tahapan dan Semesteran, 8) 12 LKT Bulanan, 9) 4 LRT Triwulanan, dan 10) 1 Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	182.880.601	1) 1 LKPD (Un Reviu, Un Audited, Audited), 2) 12 LRA Bulanan, 2 LRA Triwulanan dan 2 LRA Semesteran, 3) 24 Laporan Simpatik (Posisi Kas dan Rencana Belanja) Bulanan, 4) 180 Laporan DAK Fisik 3 Tahap, 5) 10 Laporan DAK Non Fisik Semesteran dan Tahunan, 6) 2 Laporan DID 2 Tahap, 7) 4 Laporan DAU Tambahan Tahapan dan Semesteran, 8) 12 LKT Bulanan, 9) 4 LRT Triwulanan, dan 10) 1 Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	180.682.973	100%	-	-
				15 Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD	- 3 kali pembinaan untuk 40 OPD 1 Kali Pembinaan untuk 21 BLUD, - 40 Penyusutan Aset tetap dan Amortisasi OPD, 2 Kali Supervisi Pendampingan Penyusunan Neraca OPD, Pemeliharaan Aplikasi e-SILOLA	251.239.300	- 3 kali pembinaan untuk 40 OPD 1 Kali Pembinaan untuk 21 BLUD, - 40 Penyusutan Aset tetap dan Amortisasi OPD, 2 Kali Supervisi Pendampingan Penyusunan Neraca OPD, Pemeliharaan Aplikasi e-SILOLA	245.484.000	100%	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				16 Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 42 Laporan - 42 Laporan - 11 Laporan - 42 Berita Acara Rekon	79.059.326	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 42 Laporan - 42 Laporan - 11 Laporan - 42 Berita Acara Rekon	72.838.960	100%	-	-
JUMLAH						14.398.049.692		9.609.013.012			
	Keuangan	BPPRD	Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi pajak daerah Melaksanakan tindakan pengendalian dan penagihan terhadap pajak daerah Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		3.380.767.000		2.967.441.064			
				1 Penyediaan jasa surat menyurat dan perizinan	100%	55.395.000	35,65%	19.749.800	100%	Pembayaran STNK sesuai dengan kebutuhan	
				2 Penyediaan jasa dan komponen/ instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	496.700.000	84,70%	420.684.850	100%	Pemakaian jasa dan komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai dengan kebutuhan	
				3 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan asset	100%	246.700.000	84,50%	208.472.000	100%		
				4 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ tenaga administrasi/ teknis perkantoran	100%	1.021.903.200	93,33%	953.713.200	100%	Jasa tenaga pendukung tidak terisi sebanyak 3 orang sejak bulan September 2020 dan tidak terisi lagi sebanyak 4 orang dikarenakan ada	
				5 Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	100%	641.835.000	92,76%	595.359.700	100%		
				6 Penyediaan makanan dan minuman	100%	65.000.000	75,37%	48.992.800	100%	Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu sesuai dengan kebutuhan	
				7 Pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	100%	446.033.800	88,38%	394.197.279	100%		
				8 Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/ dinas/ operasional	100%	377.200.000	78,57%	296.374.435	100%	Belanja suku cadang sesuai dengan kebutuhan	
				9 Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/ bangunan utilitas kantor	100%	30.000.000	99,66%	29.897.000	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		166.500.000		54.230.500			
				1 Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Kursus	100%	1.500.000	20,00%	300.000	100%	Silpa karena pelaksanaan bimtek secara virtual	
				2 Perjalanan Dinas	100%	165.000.000	32,69%	53.930.500	100%	Silpa dikarenakan tidak dilaksanakan perjalanan dinas akibat pandemik covid-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		40.200.000		17.900.000			
				1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	33.000.000	41,82%	13.800.000	100%	Silpa dikarenakan sisa anggaran belanja	
				2 Penyusunan laporan keuangan	100%	7.200.000	56,94%	4.100.000	100%	Silpa disebabkan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah	
				Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.838.125.000		1.604.197.300			
				1 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	100%	277.000.000	79,67%	220.688.800	100%	Silpa anggaran belanja cetak Rp.55.211.200,- dikarenakan kegiatan tidak seluruhnya terlaksana akibat	
				2 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	100%	168.000.000	95,27%	160.050.000	100%		
				3 Pengembangan system informasi pajak daerah	100%	377.000.000	99,29%	374.320.000	100%		
				4 Penyusunan pelaporan pendapatan daerah	100%	72.250.000	89,43%	64.615.000	100%		
				5 Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	100%	24.700.000	78,25%	19.328.000	100%	Silpa anggaran belanja makanan dan minuman rapat dikarenakan efisiensi	
				6 Pengendalian dan penagihan pajak daerah	100%	919.175.000	83,25%	765.195.500	100%	Silpa anggaran (1) belanja cetak Rp.87.375.000,- dikarenakan berkurangnya permintaan pemasangan reklame sebagai akibat pandemi covid-19 (2) belanja jasa kerja (penyampaian kopelan SPPT PBB oleh RT) sebesar Rp. 66.454.500,-	
JUMLAH						5.425.592.000		4.643.768.864			
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDMD		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.344.535.250		1.978.171.506	100%		
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	6200 dok, 19 motor, 7 mobil	32.000.000	4995 dok, 16 motor, 7 mobil	31.901.100	80,56 %	2 STNK Hilang, 1 motor dana kurang	STNK akan segera diurus
				2 Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45000 KWH, 80 MBPS, 620 Kubik, 8 Jenis	337.000.000	72159 KWH, 79Mbps, 454 Kubik, 8 Jenis	144.408.170	100%	Tidak Ada	Pembayaran Tagihan tepat Waktu
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100%	230.000.000	100%	219.840.000	88%	Tidak Ada	Memperdayakan tenaga pengelola
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	100%	575.234.400	100%	546.925.200	83%		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	126.800.000	100%	125.030.000	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	800 orang	75.000.000	2	66.435.300	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	54 Unit , 62 unit	350.400.350	53 Unit , 45 unit	288.430.990	97%		Disesuaikan dengan kerusakan peralatan
				8 Pengadaan , Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	19 motor, 7 mobil	335.700.500	19 motor, 7 mobil	272.800.746	100%		
				9 Pembangunan Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor	2 Paket	282.400.000	2 Paket	282.400.000	100%		
				Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		751.740.000		452.523.293	100%		
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	81 Stel	53.900.000	79 Stel	52.500.000	97,53%		
				2 Pendidikan dan pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	15 Orang	63.600.000	5 Orang	6.790.000	33,33%		
				3 Perjalanan Dinas	12 Bulan	634.240.000	12 Bulan	393.233.293	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		16.350.000		16.036.300	100%		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	7 Lap	12.100.000	7 Dok	11.786.300	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	3 Lap	4.250.000	3 Dok	4.250.000	100%		
			Pelaksanaan Assesment Allent pool secara bertahab dan	PROGRAM PENATAAN, PELAYANAN PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR		3.171.338.750		1.985.246.500	100%		
				1 Penyusunan Kebutuhan dan seleksi Penerimaan Calon ASN	100%	781.325.000	39 OPD	719.906.300	99,9 %	Karena adanya Pandemi Copid- 19 sehingga pelaksanaan SKB mengalami	
				2 Pembinaan Karis ASN	100%	521.120.000	91	285.595.000	99,91 %	Pelaksanaan Assesment terkendala karena Pandemi Covid-19 sehingga baru bisa	
			Peningkatan sistim pengelolaan kepegawaian berbasis IT	3 Seleksi Mutasi Pindah datang PNS	150 orang	38.505.000	21 orang	3.900.000	14%	Perubahan Peraturan Kepala BKN pusat terhadap pindah datang PNS, 2.	Akan di perbaiki perencanaannya
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam rangka	4 Pelayanan Administrasi Pangkat PNS	89%	25.795.500		22.835.500	100%	Pelayanan Administrasi pangkat dilaksanakan dalam periode April telah	
				5 Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai	100%	27.193.500	100%	22.693.500	100%		
				6 Pengembangan Administrasi Kepagawaian	5 Aplikasi	346.247.000	5 Aplikasi	263.332.000	100%	Masih terdapat data PNS yang belum lengkap dan belum terupdate.	Himbauan ASN melalui Kasubbag Umpeg OPD tentang Update dan Simpeg
			Pembinaan Disiplin, kode etik dan perilaku pegawai	7 Pembinaan ASN	39 OPD	51.187.500	235 ASN	23.042.500	100%		
			Peningkatan Pengukuran kinerja berbasis IT secara bertahap	8 Penegakan Disiplin dan Peningkatan Kinerja ASN	100%	48.185.000	100%	36.332.000	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			1. Pelaksanaan Diklat Struktural dan Diklat Tekhnis / Fungsional. 2.	9 Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis dan Fungsional	31%	341.295.000	32%	299.477.650	100%	Pada Diklat Standar Pelayanan Minimal yang di anggarkan menghadirkan	Berkoordinasi dengan BKPSDMD Kemendari untuk meminta narasumber Diklat SPM
				10 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN	63%	660.485.250	63%	308.132.050	100%	Pembatalan salah saltu agenda pembelajaran Pelatihan	Pelaksanaan Stula dilakukan oleh OPD Pemerintah Kota Jambi yang didasarkan surat
				11 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi							
				12 Penilaian Kompetensi dan potensi (Talent Pool).	12%	330.000.000	-			Adanya Honorarium penceramah, instruktur pembatalan fasilitas pelaksanaan kegiatan assesment oleh P4KASN LAN RI di karenakan pandemi Covid-19 dan belum adanya petunjuk teknis dari BKN selaku instansi pembina kompetensi.	Melakukan Koordinasi ke P4KASN LAN RI terkait kemungkinan untuk melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi (Talent Pool) dan berkirim surat ke BKN untuk memfasilitasi pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi 9 Talent
				13 Pendidikan dan pelatihan pengkaderan formal	-	-	-	-	-	Rasionalisasi	Pemberian surat izin belajar sebanyak 81 dan pemberian Tugas Belajar sebanyak 4
JUMLAH						6.283.964.000		4.431.977.599			

4. Tabel Capaian Urusan Pendukung Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		Program Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	100%	8.654.395.000	98,48%	8.522.847.625	98,48%		
				1. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	100%	158.445.000	99,72%	157.995.000	99,72%	Efisiensi anggaran	
				2. Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%	460.000.000	85,95%	395.373.400	85,95%	Kegiatan tidak terlaksana terhalang pandemi Covid-19	
				3. Pengadaan Tanah	100%	7.366.650.000	99,21%	7.308.400.525	99,21%	Kelebihan Perhitungan Anggaran	
				4. Fasilitasi Percepatan Tapal Batas Wilayah	100%	669.300.000	98,77%	661.078.700	98,77%	Efisiensi anggaran	
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah	100%	1.148.247.200	93,12%	1.069.284.150	93,12%		
				1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	100%	692.191.000	90,39%	625.674.500	90,39%	karena pengadaan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada	
				2. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	100%	234.140.200	98,69%	231.065.150	98,69%	karena masih dalam kondisi pandemi, sehingga serapan anggaran kecil	Penambahan JFT melalui inpassing dan promosi serta adanya penambahan melalui cons
				3. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	221.916.000	95,78%	212.544.500	95,78%	karena masih dalam kondisi pandemi	
				Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	6.147.825.000	100,00%	6.147.524.821	100,00%		
				1. Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah	100%	204.950.000	99,86%	204.670.000	99,86%	Efisiensi anggaran	
				2. Pengembangan Data Informasi dan Komunikasi Sosial	100%	796.875.000	100,00%	796.874.821	100,00%		
				3. Publikasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi Daerah	100%	5.146.000.000	100,00%	5.145.980.000	100,00%		
				Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Bidang Perekonomian	100%	601.818.500	83,30%	501.287.610	83,30%		
				1. Pemantauan dan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, CSR dan BUD	100%	216.331.000	61,66%	133.390.000	61,66%	Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Komisaris dan Direksi sesuai dengan arahan dan petunjuk	Dana dikembalikan ke kas daerah
				2. Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Ekonomi	100%	173.035.000	90,03%	155.781.110	90,03%	Tidak terlaksananya dikarenakan dampak Covid-19	
				3. Pengendalian Produksi dan Distribusi	100%	212.452.500	99,84%	212.116.500	99,84%	Dikarenakan TKK belum membuat BPJS Ketenagakerjaan	TKK akan segera membuat BPJS Ketenagakerjaan
				Program Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	100%	1.903.974.000	97,47%	1.855.837.899	97,47%		
				1. Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan	100%	44.228.000	99,79%	44.135.000	99,79%	Efisiensi anggaran	
				2. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	1.453.606.000	99,01%	1.439.282.700	99,01%	Honorarium Tim Pengelola UKPBJ tidak terealisasi 100% dikarenakan kelebihan dalam penganggaran dan sisa belanja makan minum badan pegawai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				3. Pengembangan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)	100%	109.015.000	99,75%	108.747.000	99,75%	Efisiensi anggaran	
				4. Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang /Jasa	100%	297.125.000	88,74%	263.673.199	88,74%	Perjalanan Dinas tidak terealisasi 100% dikarenakan pandemi	
				Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan dan Kelembagaan Keagamaan	75%	9.285.910.000	58,70%	5.450.892.500	58,70%	Pandemi Covid-19	
				1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan	100%	8.905.910.000	57,29%	5.101.867.500	57,29%	Pandemi Covid-19	
				2. Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Kesejahteraan	100%	189.000.000	88,37%	167.025.000	88,37%		
				3. Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	100%	191.000.000	95,29%	182.000.000	95,29%		
				Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.107.128.000	93,56%	1.035.862.550	93,56%		
				1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100%	1.107.128.000	93,56%	1.035.862.550	93,56%		
				Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1.725.018.200	79,07%	1.364.005.252	79,07%		
				1. Perjalanan Dinas	100%	1.725.018.200	79,07%	1.364.005.252	79,07%	Kegiatan Perjalanan Dinas pada Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dengan optimal yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah	
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	388.979.000	98,14%	381.745.744	98,14%		
				1. Penyusunan Laporan Keuangan	100%	388.979.000	98,14%	381.745.744	98,14%		
				Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	70.257.500	82,61%	64.174.900	82,61%		
				1. Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	23 ASN	70.257.500	19 ASN	64.174.900	91,34%	Pandemi Covid 19	
				Program Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan	100%	1.141.951.000	97,86%	1.117.509.870	97,86%		
				1. Penyusunan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	100%	213.576.000	99,93%	213.416.425	99,93%		
				2. Peningkatan Ketatalaksanaan Pelayanan	100%	781.625.000	96,94%	757.694.745	96,94%		
				3. Penataan Perangkat Daerah	100%	146.750.000	99,76%	146.398.700	99,76%		
				Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	12.267.350.525	81,57%	10.006.597.116	81,57%		
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100%	12.000.000	86,93%	10.432.000	86,93%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				2. Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	2.890.000.000	81,75%	2.362.439.802	81,75%		
				3. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100%	1.952.124.000	84,61%	1.651.744.886	84,61%		
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	170.000.000	93,01%	158.124.400	93,01%		
				5. Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	1.963.000.000	46,03%	903.638.375	46,03%	Pandemi Covid-19	
				6. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Kota Jambi dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	100%	1.942.480.400	93,80%	1.822.131.788	93,80%		
				7. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100%	637.167.385	82,65%	526.617.054	82,65%		
				8. Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	100%	2.275.578.740	97,24%	2.212.816.651	97,24%		
				9. Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	100%	135.000.000	83,82%	113.162.500	83,82%		
				10. Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan/Dinas	100%	290.000.000	84,65%	245.489.660	84,65%		
				Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	234.920.400	92,63%	217.595.400	92,63%		
				1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	100%	234.920.400	92,63%	217.595.400	92,63%		
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan	100%	35.805.000	4,19%	1.500.000	4,19%	Pandemi Covid-19	
				1. Pemberdayaan dan Kapasitas Staf Ahli Walikota Jambi	100%	35.805.000	4,19%	1.500.000	4,19%	Pandemi Covid-19	
				Program Peningkatan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan	100%	1.313.500.000	94,68%	1.243.645.921	94,68%		
				1. Belanja Pemeliharaan Kesehatan	100%	17.500.000	93,11%	16.294.872	93,11%		
				2. Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.296.000.000	94,70%	1.227.351.049	94,70%		
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan	100%	2.398.800.000	93,40%	2.240.592.578	93,40%		
				1. Pelayanan Administrasi Kepala Daerah	100%	479.400.000	73,43%	352.046.000	73,43%		
				2. Pelaksanaan Keprotokolan Kepala Daerah	100%	494.000.000	94,85%	468.580.000	94,85%		
				3. Fasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah	100%	1.425.400.000	99,62%	1.419.966.578	99,62%		
				Program Peningkatan Kerjasama Daerah	100%	679.295.000	77,42%	525.884.700	77,42%		
				1. Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	100%	161.400.000	80,23%	129.484.500	80,23%	Silpa pembayaran iuran keanggotaan dan pandemi Covid-19	
				2. Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama	100%	226.277.000	87,98%	199.084.200	87,98%	Efisiensi Anggaran dan Narasumber secara virtual	
				3. Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri	100%	291.618.000	67,66%	197.316.000	67,66%	Pandemi Covid-19	
JUMLAH						49.105.174.325		41.746.788.636			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		11.922.846.300		10.887.520.942		<p>Pelaksanaan medical check up, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Anggota DPRD tidak berkenan melaksanakan medical check up di RSUD Abdul Manaf pada masa pandemi covid-19 karena RSUD Abdul Manaf dijadikan sebagai rujukan bagi pasien covid-19</p> <p>Pelaksanaan Badan Kehormatan, untuk pelaksanaan rapat Badan Kehormatan ditargetkan 1 kali dalam tahun 2020 dikarenakan belum ditetapkannya Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara</p> <p>Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Komisi, kegiatan kunjungan lapangan terealisasi sebanyak 32 kali dari target 96 kali, hal ini dikarenakan masa pandemi covid-19 dan lebih fokus melaksanakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja terkait penanganan covid-19</p> <p>Pelaksanaan rapat-rapat komisi, kegiatan rapat-rapat komisi dari target 170 kali terealisasi sebanyak 192 kali</p> <p>Pelaksanaan studi banding Badan Kehormatan, pelaksanaan studi banding Badan Kehormatan terlaksana 2 kali</p> <p>Pembuatan Buku Tata Tertib DPRD Kota Jambi belum ada realisasinya dari target 100 buku disebabkan Ranperda tersebut masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur sehingga belum bisa ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.</p> <p>Pelaksanaan Rapat Pansus yang terealisasi sebanyak 50 kali dari target 70 kali karena tidak</p>	<p>Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan OPD Pengusung Ranperda sehingga draft Ranperda dapat diselesaikan tepat waktu</p> <p>Meningkatkan koordinasi antar Bagian di Sekretariat DPRD di dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan melakukan rapat evaluasi yang berkelanjutan</p> <p>Selain mengajukan permintaan tambahan tenaga ASN, Sekretariat DPRD Kota Jambi juga meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan mengikut sertakan kursus-kursus (legal drafting Peraturan Perundang-Undangan, PP, Permendagri, Permenpan dan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengadaan barang/jasa).</p>	
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100%	76.000.000	100%	42.088.800			100%
				2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	977.200.000	100%	922.662.969			100%
				3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100%	362.652.000	100%	317.128.000			100%
				4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100%	3.377.498.300	100%	3.152.785.405			100%
				5	Penyediaan Alat Tulis, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	794.500.000	100%	754.863.560			100%
				6	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	315.000.000	100%	207.515.290			100%
				7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	100%	3.848.566.000	100%	3.524.574.516			100%
				8	Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas Operasional	100%	942.700.000	100%	738.197.802			100%
				9	Pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	100%	1.228.730.000	100%	1.227.704.600			100%
					Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3.509.298.700		2.961.044.415			
				1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-Hari Tertentu Beserta Perlengkapannya	100%	194.100.000	100%	190.217.500			100%
				2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	100%	146.000.000	100%	39.500.000			27%
				3	Perjalanan Dinas	100%	3.169.198.700	100%	2.731.326.915			100%
					Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		21.000.000		3.000.000			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	5.500.000	100%	3.000.000			100%
				2	Penyusunan Laporan Keuangan	100%	5.500.000	100%	-			100%
				3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	100%	10.000.000	100%	-			100%
					Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Pelayanan Kedinasan DPRD		29.316.104.000		22.856.911.789			
				1	Penyediaan Kebutuhan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah	100%	2.498.037.000	100%	1.823.486.023			75%
				2	Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	1.335.300.000	100%	1.136.661.296			100%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				3 Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD	100%	2.649.737.000	100%	2.332.072.933	100%	ada pembahasan Ranperda	
				4 Penyediaan Kebutuhan Rapat-Rapat Paripurna Istimewa	100%	318.690.000	100%	153.575.500	100%	Pelaksanaan rapat Bapemperda hanya direalisasikan sebanyak 11 kali dari target sebanyak 40 kali, hal ini disebabkan rapat Bapemperda dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	
				5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan	100%	530.000.000	100%	529.400.000	100%		
				6 Pelayanan Keprotokolan DPRD	100%	322.500.000	100%	33.501.700	15%	Pelaksanaan rapat paripurna telah direalisasikan sebanyak 14 kali dari target 24 kali karena rapat paripurna penyampaian Ranperda hanya dapat dilaksanakan apabila ada Ranperda yang akan disahkan	
				7 Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Kelengkapannya	100%	297.800.000	100%	216.067.500	100%		
				8 Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Anggaran	100%	3.868.290.000	100%	2.063.145.068	75%	Penerbitan Ranperda telah terealisasi sebanyak 3 Ranperda dari target sebanyak 7 Ranperda, hal ini disebabkan OPD pengusung Ranperda tidak bisa menyelesaikan draft Ranperda sampai batas waktu yang ditentukan	
				9 Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan	100%	16.313.950.000	100%	14.013.962.700	90%	Kebutuhan pejabat fungsional sebanyak 6 formasi pejabat fungsional baru terisi sebanyak 2 pejabat dan ada 4 ASN yang telah lulus ujian untuk tenaga fungsional arsiparis pratama serta kekurangan ASN yang baru terpenuhi sebanyak 38 orang dari kebutuhan sebanyak 128 ASN, untuk mengatasi hal tersebut terus diusulkan untuk meminta tambahan ASN	
				10 Penyelenggaraan Kebutuhan Reses dan Penerimaan Aspirasi Masyarakat	100%	1.181.800.000	100%	555.039.069	100%		
JUMLAH						44.769.249.000		36.708.477.146			

5. Tabel Capaian Urusan Kewilayahan Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kewilayahan	Kecamatan Kotabaru	Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.375.418.060	95,49 %	1.313.467.882	100%	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Membangun Sistem Pelayanan Prima yang murah ,Aman, Cepat, efisien.
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100%	11.000.000	59,32 %	6.526.200	100%	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	177.449.260	86,65 %	153.772.882	100%	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100%	315.120.000	95,16%	299.880.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP	4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis	100%	337.504.000	100,00%	337.504.000	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Peggandaan	100%	53.000.000	100,00 %	53.000.000	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	60.500.000	88,34%	53.450.000	100%	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung	100%	289.244.800	99,13%	286.734.800	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	100%	131.600.000	93,16%	122.600.000	100%	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	152.750.000	99,95%	152.677.500	100%	Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.	Membangun komitmen aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	100%	45.500.000	100,00%	45.500.000	100%		
			Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi	2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	100%	12.000.000	100,00%	12.000.000	100%		
			Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi	3 Perjalanan Dinas	100%	95.250.000	99,92%	95.177.500	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	71.550.000	100,00%	71.550.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	10.000.000	100,00%	10.000.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	2 Penyusunan Laporan Keuangan	100%	5.000.000	100,00%	5.000.000	100%		
			Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi	3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	100%	56.550.000	100,00%	56.550.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Program Pelayanan Umum Kecamatan	100%	188.000.000	94,13%	176.974.400	100%	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Membangun Sistem Pelayanan Prima yang murah ,Aman, Cepat, efisien,
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	1 Kegiatan Peningkatan kaulitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan		53.200.000		52.949.400			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	2 Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	100%	56.850.000	89,88%	51.100.000	100%	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Membangun Sistem Pelayanan Prima yang murah ,Aman, Cepat, efisien,
				3 Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	100%	77.950.000	93,55%	72.925.000	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	471.026.140	59,53%	280.425.000	100%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat Kecamatan	1 Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	100%	250.355.000	35,31%	88.425.000	70%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat Kecamatan	2 Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	100%	220.671.140	87,00%	192.000.000	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	1.838.781.966	90,07%	1.656.319.513	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sukakarya	100%	363.317.893	98,12%	356.520.400	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Simpang III Sipin	100%	380.011.845	72,54%	275.687.082	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Paal Lima	100%	387.954.448	98,58%	382.482.727	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	4 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kenali Asam Bawah	100%	322.862.133	97,14%	313.649.236	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	5 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kenali Asam Atas	100%	384.635.647	85,27%	327.980.068	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	3.437.240.800	92,25%	3.171.115.991	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukakarya	100%	465.587.600	95,07%	442.655.600	100%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang III Sipin	100%	826.843.400	87,24%	721.418.400	100%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paal Lima	100%	647.400.200	91,35%	591.457.687	100%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenali Asam Bawah	100%	941.399.600	96,38%	907.374.304	100%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenali Asam Atas	100%	553.910.000	91,74%	508.210.000	100%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	6 Bangkit Berdaya di Kelurahan Sukakarya	100%	-	0%	-	0%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	7 Bangkit Berdaya di Kelurahan Simpang III Sipin	100%	-	0%	-	0%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	8 Bangkit Berdaya di Kelurahan Paal Lima	100%	-	0%	-	0%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	9 Bangkit Berdaya di Kelurahan Kenali Asam Bawah	100%	-	0%	-	0%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktivitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	10 Bangkit Berdaya di Kelurahan Kenali Asam Atas	100%	2.100.000	0%	-	0%	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas masyarakat aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
JUMLAH						7.534.766.966		6.822.530.286			
	Kewilayahan	Kecamatan Telanaipura	Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.406.412.140	95,49 %	1.310.133.969		Tuntutan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Mambangun Sistem Pelayanan Prima yang murah, aman cepat dan efisien
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	1 Penyediaan Jasa Surat menyurat dan perizinan	100%	6.100.000	97,71%	5.960.900			
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	2 Penyediaan Jasa dan komponen/ instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	137.940.000	79,92%	110.242.629			
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan aset	100%	328.464.000	97,62%	320.664.000			
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	4 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi perkantoran/ Teknis perkantoran	100%	498.303.600	89,13%	444.171.900			
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	41.554.540	100%	41.554.540			
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	6 Penyediaan Makanan dan minuman	100%	40.000.000	100%	40.000.000			
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	7 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung	100%	231.950.000	99,90%	231.740.000			
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	100%	122.100.000	94,84%	115.800.000			
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	207.550.000	87,07%	180.728.800		Adanya Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan	Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	100%	54.850.000	100%	54.850.000			
			optimalisasi dan inovasi Teknologi Informasi Layanan	2 Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/kursus	100%	6.600.000	100%	6.000.000			
			optimalisasi dan inovasi Teknologi Informasi Layanan	3 Perjalanan Dinas	100%	146.100.000	82,05%	119.878.800			
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%	26.550.000	100%	26.550.000		Perkembangan IPTEK yang pesat tidak diiringi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuan	Meningkatkan Komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	10.550.000	100%	10.550.000			
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	2 Penyusunan Laporan Keuangan	100%	15.000.000	100%	15.000.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	100%	1.000.000	100%	1.000.000		
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan		Program Pelayanan Umum Kecamatan	100%	51.250.000	100%	51.250.000	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Mambangun Sistem Pelayanan Prima yang murah, aman cepat dan efisien
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	1	Kegiatan Peningkatan kaulitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	100%	8.000.000	100%	8.000.000		
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	2	Kegiatan Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum	100%	3.000.000	100%	3.000.000		
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Masyarakat	3	Kegiatan Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	100%	18.500.000	100%	18.500.000		
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Masyarakat	4	Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	100%	21.750.000	100%	21.750.000		
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Masyarakat Kecamatan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	402.935.000	58,04%	233.880.000	Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol Kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Masyarakat	1	Kegiatan Pemeberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	100%	263.025.000	43,39%	114.150.000		
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Masyarakat	2	Kegiatan Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	100%	139.910.000	85,57%	119.730.000		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	2.610.731.780	93,30%	2.436.032.700	Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol Kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Simpang IV Sipin	100%	418.687.080	65,12%	272.660.000		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	2	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Buluran Kenali	100%	428.203.000	100%	428.203.000		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	3	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Teluk Kenali	100%	482.485.500	94,55%	456.226.500		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	4	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Telanaipura	100%	424.093.200	99,94%	423.853.200		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	5	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Penyengat Rendah	100%	436.170.000	100%	436.170.000		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	6	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pematang Sulus	100%	421.093.000	99,48%	418.920.000		
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	2.825.033.860	92,02%	2.599.690.023	Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol Kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan	1 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Simpang IV Sipin	100%	493.008.480	92,11%	454.158.480			
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan	2 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Buluran Kenali	100%	329.673.920	85,84%	283.006.900			
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan	3 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Teluk Kenali	100%	165.518.080	76,98%	127.418.080			
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan	4 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Telanaipura	100%	252.375.520	87,57%	221.025.520			
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan	5 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Penyengat Rendah	100%	598.310.080	91,10%	545.080.080			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Pematang Sulur	100%	402.311.680	95,92%	385.911.680			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Simpang IV Sipin	100%	22.476.500	96,67%	21.729.683			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Buluran Kenali	100%	45.393.500	100%	45.393.500			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Teluk Kenali	100%	49.234.000	100%	49.234.000			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Telanaipura	100%	83.482.100	100%	83.482.100			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Penyengat Rendah	100%	184.250.000	100%	184.250.000			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Pematang Sulur	100%	199.000.000	100%	199.000.000			
JUMLAH						7.530.462.780		6.838.265.492			
	Kewilayahan	Kecamatan Jelutung		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.314.851.775	95,49 %	1.243.923.479			
				1 Penyediaan Jasa Surat menyurat dan perizinan	100%	12.450.000	25%	6.254.000			
				2 Penyediaan Jasa dan komponen/ instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	163.353.000	100%	156.847.991	93,09		
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan aset	100%	390.072.000	100%	345.588.000	90,56		
				4 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi perkantoran/ Teknis perkantoran	100%	382.586.400	100%	381.407.800	90,56		
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	28.415.375	100%	28.414.688	100		
				6 Penyediaan Makanan dan minuman	100%	17.775.000	100%	17.775.000	100		
				7 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung kantor	100%	178.400.000	100%	177.236.000	100		
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	100%	106.800.000	100%	95.400.000	100		
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	151.851.000	87,07%	151.730.174			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	100%	46.750.000	100%	46.750.000	90,64		
				2 Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/kursus	100%	26.343.000	100%	26.343.000	100		
				3 Perjalanan Dinas	100%	78.758.000		78.637.174	99,60		
				Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%	31.060.000	100%	30.815.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	100%	3.560.000	100%	3.560.000	90,64		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	100%	24.500.000	100%	24.255.000	100		
				Program Pelayanan Umum Kecamatan	100%	258.469.400	100%	258.468.800			
				1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	100%	52.200.000	100%	52.200.000	100		
				2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	100%	8.450.000	100%	8.450.000	100		
				3 Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	100%	181.919.400	100%	181.918.800	89,87		
				4 Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Fasilitas Bencana	100%	15.900.000	100%	15.900.000	89,87		
				Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	351.700.000	58,04%	264.650.000			
				1 Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan		158.800.000	100%	72.500.000	100		
				2 Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		192.900.000	100%	192.150.000	36,36		
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	2.959.512.726	93,30%	2.952.545.382			
				1 Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Talang Jauh	100%	543.128.724	100%	543.128.724	88,41		
				2 Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Cempaka Putih	100%	324.444.328	100%	321.537.028	88,41		
				3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebun Handil	100%	444.387.321	100%	444.387.321	97,37		
				4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lebak Bandung	100%	361.154.921	100%	361.154.921	93,62		
				5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Payo Lebar	100%	398.233.465	100%	398.233.465	97,45		
				6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jelutung	100%	463.335.841	100%	463.335.841	97,68		
				7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Jaya	100%	424.828.126	100%	420.768.082	98,43		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	4.028.040.350	92,02%	4.015.535.350			
				1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Jauh	100%	183.878.750	100%	183.878.750	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih	100%	450.927.950	100%	445.327.950	100%		
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Handil	100%	382.132.400	100%	382.127.400	100%		
				4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lebak Bandung	100%	640.963.150	100%	640.963.150	100%		
				5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payo Lebar	100%	518.570.200	100%	515.420.200	100%		
				6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelutung	100%	717.898.050	100%	717.898.050	100%		
				7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Jaaya	100%	398.695.250	100%	394.945.250	100%		
				8 Bangkit Berdaya di Kelurahan Talang Jauh	100%	50.800.000	100%	50.800.000	100%		
				9 Bangkit Berdaya di Kelurahan Cempala Putih	100%	89.800.000	100%	89.800.000	100%		
				10 Bangkit Berdaya di Kelurahan Kebon Handil	100%	135.520.000	100%	135.520.000	100%		
				11 Bangkit Berdaya di Kelurahan Lebak Bandung	100%	131.132.000	100%	131.132.000	100%		
				12 Bangkit Berdaya di Kelurahan Payo Lebar	100%	85.220.600	100%	85.220.600	100%		
				13 Bangkit Berdaya di Kelurahan Jelutung	100%	146.042.000	100%	146.042.000	100%		
				14 Bangkit Berdaya di Kelurahan Handil Jaya	100%	96.460.000	100%	96.460.000	100%		
JUMLAH						9.095.485.251		8.917.668.185			
	Kewilayahan	Kecamatan Pasar		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.604.547.360	95,49 %	1.522.641.272			
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100%	9.000.000	44,95 %	4.045.700	100%	Tuntunan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	251.000.000	75,91 %	190.537.172	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100%	261.132.000	97,99 %	255.874.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis	100%	567.583.200	98,80 %	560.788.800	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100.532.160	100,00%	100.532.000	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	30.000.000	99,18 %	29.755.000	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	100%	227.500.000	99,51 %	226.390.600	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	100%	140.800.000	97,87 %	137.800.000	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas	100%	17.000.000	99,52 %	16.918.000	100%		
				Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	151.000.000	87,07%	146.281.700			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	100%	42.000.000	90,51 %	38.016.000	100%		
			Optimalisasi Penggunaan Tejnologi Informasi	2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%		
			Optimalisasi Penggunaan Tejnologi Informasi	3 Perjalanan Dinas	100%	103.000.000	99,29 %	102.265.700	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%	16.750.000	100%	16.750.000			
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	7.250.000	100,00 %	7.250.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Penyusunan Laporan Keuangan	100%	5.000.000	100,00 %	5.000.000	100%		
			Optimalisasi Penggunaan Tejnologi Informasi	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	100%	4.500.000	100,00 %	4.500.000	100%		
				Program Pelayanan Umum Kecamatan	100%	143.624.600	100%	124.193.100			
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1 Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	100%	46.200.000	90,98 %	42.033.100	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	2 Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum	100%	33.424.600	62,60 %	20.925.000	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	3 Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	100%	29.500.000	91,36 %	26.950.000	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat Kecamatan	4 Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	100%	34.500.000	99,38 %	34.285.000	100%		
				Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	499.729.400	58,04%	322.434.000			
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	1 Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	100%	327.029.400	49,10 %	160.572.000	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	2 Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	100%	172.700.000	93,72 %	161.862.000	100%		
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	1.791.150.075	93,30%	1.603.272.705			
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Beringin	100%	410.376.675	95,94 %	393.735.000	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Orang Kayo Hitam	100%	407.128.950	97,83 %	398.283.415	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasar Jambi	100%	566.193.625	71,67 %	405.784.290	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	4 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Asam	100%	407.450.825	99,51 %	405.470.000	100%		
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	981.126.090	92,02%	950.377.180			
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beringin	100%	266.074.140	95,40 %	253.847.200	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Orang Kayo Hitam	100%	155.807.130	99,83 %	155.540.880	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Jambi	100%	109.756.730	99,74 %	109.472.400	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Asam	100%	349.488.090	99,44 %	347.516.700	100%		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	5	Bangkit Berdaya di Kelurahan Beringin	100%	100.000.000	84,00 %	84.000.000	100%		
JUMLAH							5.187.927.525		4.685.949.957			
	Kewilayahan	Kecamatan Jambi Selatan	Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		100%	1.555.738.400	95,49 %	1.466.098.016		Tuntutan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Membangun Sistem Pelayanan Prima yang murah, aman, cepat dan efisien
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100%	10.600.000	100%	8.552.200	100%	Tuntutan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	178.000.000	100%	120.207.716	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100%	341.032.000	100%	324.128.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung /Tenaga Administrasi /Teknis	100%	290.217.600	100%	290.217.600	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	33.000.000	100%	33.000.000	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	28.000.000	100%	27.990.000	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	100%	493.138.800	100%	492.050.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	100%	153.300.000	100%	141.502.500	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	100%	28.450.000	100%	28.450.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	269.854.600	87,07%	269.672.221		Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan	Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	100%	120.200.000	100%	120.200.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%		
				3	Perjalanan Dinas	100%	137.654.600	100%	137.472.221	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%	14.800.000	100%	14.800.000		Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya	Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	14.800.000	100%	14.800.000	100%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	Program Pelayanan Umum Kecamatan	100%	245.100.800	100%	231.100.800		Tuntutan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Membangun Sistem Pelayanan Prima yang murah, aman, cepat dan
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1 Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	100%	74.750.800	100%	74.750.800	100%	Tuntutan Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Prima	Membangun Sistem Pelayanan Prima yang murah, aman, cepat dan efisien
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	2 Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan	Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pembinaan sesuai kebutuhan masyarakat
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	3 Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	100%	76.300.000	100%	62.300.000	100%		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	4 Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	100%	90.550.000	100%	90.550.000	100%		
			Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina ditingkat Kecamatan	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	408.141.200	58,04%	337.399.500		Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina ditingkat Kecamatan	1 Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	100%	279.516.200	100%	220.434.500	100%	Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina ditingkat Kecamatan	2 Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	100%	128.625.000	100%	116.965.000	100%	Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelurahan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	1.646.881.000	93,30%	1.646.451.700			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasir Putih	100%	345.500.000	100%	345.464.000	100%	Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tambak Sari	100%	318.500.000	100%	318.500.000	100%	Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Thehok	100%	343.500.000	100%	343.500.000	100%	Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan Melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Wijayapura	100%	331.000.000	100%	331.000.000	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pakuan Baru	100%	308.381.000	100%	307.987.700	100%		
			Meningkatkan Kinerja Pemerintah	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100%	2.745.652.500	92,02%	2.729.942.500			
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih	100%	565.059.200	100%	564.549.200	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambak Sari	100%	604.967.200	100%	604.967.200	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Thehok	100%	643.537.000	100%	643.537.000	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wijayapura	100%	439.160.700	100%	432.560.700	100%		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuan Baru	100%	492.928.400	100%	484.328.400	100%		
					Bangkit Berdaya di Kelurahan Pasir Putih	100%		100%		100%		
					Bangkit Berdaya di Kelurahan Tambak Sari	100%		100%		100%		
					Bangkit Berdaya di Kelurahan Thehok	100%		100%		100%		
					Bangkit Berdaya di Kelurahan Wijayapura	100%		100%		100%		
					Bangkit Berdaya di Kelurahan Pakuan Baru	100%		100%		100%		
JUMLAH						6.886.168.500		6.695.464.737				
	Kewilayah an	Kecamatan Jambi Timur	Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		100%	1.829.765.000	95,49 %	1.790.472.167			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	29 kend	8.000.000	29 kend	3826600		Keterbatasan sarana dan prasarana aparaturnya khususnya di Kelurahan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan kelancaran pelayanan perkantoran. 2. Melakukan pendataan rincian kebutuhan barang pada setiap kelurahan dan mengusulkan ke pemda kota melalui nodis.
			2 Penyediaan jasa dan komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	166.000.000	12 bulan	140454167				
			3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	62 orang	436.360.000	62 orang	434715000				
			4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis	52 orang	753.520.000	52 orang	746721400				
			5 Penyediaan Alat Tulis kantor Barang Cetak dan Pengandaan	20 Paket	149.150.000	20 paket	149150000				
			6 Penyediaan Makanan dan Minuman	72 kali	53.935.000	72 kali	53550000				
			7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung	1 paket, 50 Unit, 2 Unit, 53 Unit	45.400.000	1 paket, 50 Unit, 2 Unit, 53 Unit	44705000				
			8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	29 unit	162.400.000	29 unit	162400000				
			9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas	1 paket	50.000.000	1 paket	49950000				
			10 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan/Dinas	1 paket	5.000.000	1 paket	5000000				
			Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	263.592.600	87,07%	253.395.306		1. belum adanya SOP penerapan reward dan punishment bagi aparaturnya / SDM Kecamatan dan Kelurahan 1. SDM Aparatur yang sekarang melaksanakan tugas perbidangannya belum dilatarbelakangi oleh pendidikan yang sesuai	1. Melakukan koordinasi antar bidang bersama kepala OPD maupun dinas BPKSDMD Kota Jambi untuk menentukan reward dan punishment bagi ASN kecamatan 1. Dilakukannya bimbingan teknis bagi ASN khususnya bidang keuangan agar lebih capable di tata kelola keuangan	
			1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	130 stel	87.000.000	130 stel	87000000				
			2 Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kursus	1 Tahun	11.000.000	1 tahun	6000000				
			3 Perjalanan Dinas	1 Tahun	165.592.600	1 tahun	160395306				
			Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%	18.000.000	100%	14.000.000				
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	7 Dok	11.000.000	7 dokumen	11000000				
			2 Penyusunan laporan keuangan	1 lap	3.000.000	2 Laporan	3000000				
			3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	2 sistem	4.000.000	2 sistem	0				
			Program Pelayanan Umum Kecamatan	100%	231.601.000	100%	221.300.000				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan Pelaksanaan SOP Pelayanan	1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	90%	53.450.000	90%	48510000	100%	1. Pelayanan Prima yang harus oleh diterima oleh masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan
			Meningkatkan sarana dan prasarana layanan public	2 Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	6 kali	9.001.000	6 kali	8995000	100%		
			optimalisasi penggunaan teknologi infomasi	3 Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	15 kali	76.450.000	15 kali	73595000	100%		
				4 Kegiatan Koordinasi Pembinaan , Pengawasan Kententraman, Ketertiban Umum dan Fasilitasi Bencana	65%	92.700.000	68,09%	90200000	100%		
				Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	374.924.600	58,04%	276.024.600			
			1. Melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat, 2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan aparatur masyarakat, 3. Memfasilitasi usulan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mendorong dan Meningkatkan	1 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	8 Lembaga	242.100.000	8 lmbaga	164850000	100%	. adanya rasionalisasi anggaran dikarenakan pandemi covid 19 sehingga anggaran maupun pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat di wilayah kecamatan jambi timur tidak dapat sesuai dengan perencanaan.	Mengurangi target pembinaan lembaga masyarakat pada tahun 2020 ini. Melakukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga masyarakat yang masih bisa dijalankan.
			1. Melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat, 2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan aparatur masyarakat, 3. Memfasilitasi usulan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mendorong	2 Kegiatan Koordinasi penggunaan kelembagaan masyarakat Kecamatan	8 kali	132.824.600	6 kali	111174600	100%		
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	3.332.825.704	93,30%	3.179.457.051		Masih terdapat kekeliruan dalam pelaporan dan pengelolaan dana DAK Kelurahan	adanya rapat koordinasi antara pihak kecamatan maupun kelurahan dalam pengelolaan dana DAK Kelurahan
				1 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Tanjung Pinang	6 sarana	364.229.000	5 sarana	276118950			
				2 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Tanjung Pinang Kelurahan Tanjung Sari	7 sarana	337.880.000	5 sarana	324050450			
				3 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rajawali	6 sarana	374.309.437	5 sarana	358728537			
				4 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Banjar	7 sarana	320.920.847	5 sarana	300548875			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				5 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijenjang	8 sarana	386.736.625	4 sarana	385956625			
				6 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budiman	5 sarana	342.145.707	6 sarana	337558020			
				7 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang Jaya	9 sarana	418.056.000	3 sarana	417933000			
				8 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selanjana	7 sarana	379.097.494	5 sarana	378957494			
				9 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang	6 sarana	409.450.594	5 sarana	399605100			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	4.006.804.874	92,02%	3.870.919.955			
				1 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Pinang	10 lembaga	573.398.200	7 lembaga	543473200			
				2 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Sari	10 lembaga	497.832.105	8 lembaga	496698105			
				3 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Rajawali	10 lembaga	425.635.000	7 lembaga	422624950			
				4 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Talang Banjar	10 lembaga	613.654.000	8 lembaga	606184000			
				5 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sijenjang	10 lembaga	306.754.769	7 lembaga	259687375			
				6 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Budiman	10 lembaga	346.608.000	8 lembaga	346605675			
				7 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kasang Jaya	10 lembaga	314.348.500	8 lembaga	300048500			
				8 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sulanjana	10 lembaga	273.694.600	8 lembaga	273694600			
				9 Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kasang	10 lembaga	309.879.700	8 lembaga	297754700			
				10 Kegiatan Bangkit Berdaya Tanjung pinang	7 lokasi	20.000.000	2 lokasi	19513500			
				11 Kegiatan Bangkit Berdaya Tanjung sari	5 lokasi	15.000.000	1 lokasi	14993450			
				12 Kegiatan Bangkit Berdaya Rajawali	5 lokasi	15.000.000	1 lokasi	14816000			
				13 Kegiatan Bangkit Berdaya Talang ban jar	9 lokasi	200.000.000	11 lokasi	199992100			
				14 Kegiatan Bangkit Berdaya Sijenjang	6 lokasi	30.000.000	1 lokasi	30000000			
				15 Kegiatan Bangkit Berdaya Budiman	5 lokasi	15.000.000	1 lokasi	15000000			
				16 Kegiatan Bangkit Berdaya Kasang Jaya	7 lokasi	20.000.000	0 lokasi	0			
				17 Kegiatan Bangkit Berdaya Sulanjana	3 lokasi	15.000.000	2 lokasi	15000000			
				18 Kegiatan Bangkit Berdaya Kasang Jaya	5 lokasi	15.000.000	1 lokasi	14833800			
JUMLAH						10.057.513.778		9.605.569.079			
	Kewilayah an	Kecamatan Danau Teluk		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.063.317.700	95,49 %	1.010.417.254			
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100	10.000.000	38,1	3810900	100		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	81.380.000	88,1	71697654	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100	302.880.000	97,2	294387000	100		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	4	Penyediaan Jasa Pendukung/ Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	100	342.495.200	96,31	329859200	100		
			Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100	30.000.000	100	30000000	100		
			Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	100	24.200.000	100	24200000	100		
			Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung	100	129.162.500	97,16	125492500	100		
			Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	100	143.200.000	91,46	130970000	100		
				Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	121.300.000	87,07%	105.547.362			
			Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	38.400.000	89,06	34200000	100		
			Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	100	11.900.000	50,42	6000000	100		
			Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	3	Perjalanan Dinas	100	71.000.000	92,04	65347362	100		
				Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah		100%	9.000.000	100%	9.000.000			
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100	3.000.000	100	3000000	100	Perlu penyusunan perencanaan dan pelaporan untuk transparansi dan akuntabilitas	Menyusun rencana kerja dan laporan kinerja
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	2	Penyusunan Laporan Keuangan	100	3.000.000	100	3000000	100	Adanya tuntutan transparansi pelaporan keuangan pemerintah	Menyusun Laporan Keuangan Kecamatan
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	3	Pengembangan Data/ Informasi dan Inovasi	100	3.000.000	100	3000000	100	-	-
				Program Pelayanan Umum Kecamatan		100%	111.760.800	100%	98.984.800			
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	100	36.500.800	97,76	35684800	100	Tuntutan Masyarakat untuk memberikan pelayanan prima	Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat dan efisien
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	2	Pembinaan Administrasi Pemerintah umum	100	19.000.000	42,63	8100000	100	Tuntutan Masyarakat untuk memberikan pelayanan prima	Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat dan efisien
			Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina Tingkat	3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	100	51.260.000	47,93	50200000	100		
			Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina Tingkat Kecamatan	4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	100	5.000.000	100	5000000	100		
				Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		100%	453.992.400	58,04%	169.692.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	100	315.847.400	18	56847000	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	100	138.145.000	81,69	112845000	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	2.643.742.709	93,30%	2.566.732.662			
			Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Kecamatan dan Kelurahan	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasir Panjang	100	480.511.000	86,88	417464212	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Kecamatan dan Kelurahan	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Raden	100	472.880.909	100	472865000	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Kecamatan dan Kelurahan	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Olak Kemang	100	683.637.800	98,11	670690450	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Kecamatan dan Kelurahan	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Pasir	100	494.483.000	100	494483000	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Kecamatan dan Kelurahan	5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Ulu Gedong	100	512.230.000	99,8	511230000	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100%	1.483.415.600	92,02%	1.269.621.400			
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang	100	159.672.400	85,6	136672400	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Raden	100	222.054.000	91,4	202954000	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Olak Kemang	100	276.165.200	92,4	255165200	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir	100	314.140.400	94,28	296165400	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong	100	278.883.600	92,75	258664400	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Pasir Panjang	100	-	100	0	0	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	7 Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Raden	100	120.000.000	100	120000000	100	Pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat	Melakukan kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	8 Bangkit Berdaya di Kelurahan Olak Kemang	100	-	0	0	0		
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	9 Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Pasir	100	112.500.000	0	0	0		
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat	10 Bangkit Berdaya di Kelurahan Ulu Gedong	100	-	0	0	0		
JUMLAH						5.886.529.209		5.229.995.478			
	Kewilayahan	Kecamatan Pelayangan		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.303.179.350	95,49 %	1.175.221.423		Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima	Membangun Sistem Pelayanan Prima yang murah, aman, cepat dan efisien
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100%	4.500.000	0%	0	0%			
			2 Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	168.160.000	100%	97018823	57,69%			
			3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan dan Aset	100%	309.210.000	100%	300162000	97,07%			
			4 Penyediaan Jasa tenaga pendukung/tenaga administrasi/teknis perkantoran	100%	245.643.600	100%	244024800	99,34%			
			5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang cetakan dan penggandaan	100%	81.145.750	100%	81145000	99,99%			
			6 Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	36.000.000	100%	7660000	21,27%			
			7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Perkantoran dan Gedung	100%	306.920.000	100%	303709500	98,95%			
			8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Kendaraan Jabaran/Dinas/Operasional	100%	151.600.000	100%	141501300	93,33%			
			Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	228.525.000	87,07%	197.297.170				
			1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-Hari Tertentu Beserta Perlengkapannya		44.000.000	100%	43965000	99,92%			
			2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus		45.000.000	100%	14650000	32,55%			
			3 Perjalanan Dinas		139.525.000	100%	138682170	99,39%			
			Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%	10.450.000	100%	10.450.000				
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		5.500.000	100%	5500000	100%			
			2 Penyusunan Laporan Keuangan		4.950.000	100%	4950000	100%			
			Program Pelayanan Umum Kecamatan	100%	163.500.000	100%	160.830.000				
			1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan		28.180.000	100%	28180000	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	2	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum		12.220.000	100%	12220000	100%	Adanya tuntunan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan	Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pembinaan sesuai kebutuhan masyarakat
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	3	Pengendalian kebersihan di wilayah Kecamatan		113.950.000	100%	111280000	97,65%		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	4	Koordinasi, pembinaan, pengawasan, ketertiban, ketertiban umum dan fasilitas bencana		9.150.000	100%	9150000	100%		
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		100%	523.634.500	58,04%	225.475.000				
			1	Pemberdayaan masyarakat Kecamatan		345.059.500	100%	52300000	15,15%	Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan	
			2	Koordinasi Penguatan kelembagaan masyarakat Kecamatan		178.575.000	100%	173175000	96,97%	Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	2.666.803.824	93,30%	2.018.307.560				
			1	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Arab Melayu		493.194.000	100%	126352000	25,61%	Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan	
			2	Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Mudung Laut		407.000.000	100%	396000000	97,29%	Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan	
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jelmu		447.062.514	100%	288705000	64,57%	Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan	
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tengah		440.284.810	100%	430284810	97,72%	Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan	
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahtul Yaman		407.000.000	100%	407000000	100%	Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)			
				6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Johor		472.262.500	100%	369965750	78,33%	Adanya pandemik COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktifitas kepemudaan	Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	1.297.185.075	92,02%	1.010.659.775					
			1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arab Melayu		324.331.200	100%	210294800	64,83	Terlaksana 100% (Keu dan Fisik)			Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mudung Laut		202.013.600	100%	195263600	96,65	Terlaksana 100% (Keu dan Fisik)			Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelmu		135.612.600	100%	88201200	65,03	Terlaksana 100% (Keu dan Fisik)			Melakukan kegiatan dengan menerapkan kesehatan serta menyesuaikan tempat pelaksanaan kegiatan
			4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tengah		124.116.475	100%	79366475	63,94	Terlaksana 100% (Keu dan Fisik)			
			5 Pemberdayana Masyarakat di Kelurahan Tahtul Yaman		283.474.800	100%	249624800	88,05	Terlaksana 100% (Keu dan Fisik)			
			6 Pemberdayana Masyarakat di Kelurahan Tanjung Johor		227.636.400	100%	187908900	82,54	Terlaksana 100% (Keu dan Fisik)			
JUMLAH						6.193.277.749		4.798.240.928				
	Kewilayahan	Kecamatan Alam Barajo	Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.718.960.800	95,49 %	1.669.341.294				
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	1 Penyediaan Jasa Surat menyurat dan perizinan	100%	9.000.000	34,64%	3.117.900				
			Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan	2 Penyediaan Jasa dan komponen/ instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	230.000.000	87,46%	201.159.548				
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan aset	100%	327.920.000	99,30%	325.610.000				
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	4 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi perkantoran/ Teknis perkantoran	100%	488.540.800	99,70%	487.074.000				
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	120.000.000	99,97%	119.968.000				
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	6 Penyediaan Makanan dan minuman	100%	45.000.000	99,98%	44.992.500				
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	7 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan gedung	100%	297.100.000	98,40%	292.354.100				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	100%	151.400.000	95,90%	145.191.686		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas	100%	50.000.000	99,75%	49.873.560		
				Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	123.268.890	87,07%	122.216.812		
				1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	100%	69.000.000	99,47%	68.637.250		
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	2	Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/kursus	100%	-	-			
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	3	Perjalanan Dinas	100%	54.268.890	98,73%	53.579.562		
				Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah		100%	80.900.000	100%	80.802.000		
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	7.250.000	100,00%	7.250.000		
				2	Penyusunan Laporan Keuangan	100%	13.650.000	100,00%	13.650.000		
				3	Pengembangan Data/Informasi	100%	60.000.000	99,84%	59.902.000		
				Program Pelayanan Umum Kecamatan		100%	284.350.000	100%	282.165.020		
				1	Kegiatan Peningkatan kaulitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	100%	100.000.000	98,66%	98.659.300		
				2	Kegiatan Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum	100%	52.500.000	99,90%	52.450.000		
				3	Kegiatan Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	100%	80.000.000	99,55%	79.640.720		
				4	Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	100%	51.850.000	99,16%	51.415.000		
				Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		100%	832.607.700	58,04%	823.025.350		
				1	Kegiatan Pemeberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	100%	518.435.700	99,84%	517.627.700		
				2	Kegiatan Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	100%	314.172.000	97,21%	305.397.650		
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	1.762.599.885	93,30%	1.600.600.149		
				1	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kenali Besar	100%	334.425.080	76,25%	255.013.980		
				2	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Rawasari	100%	335.108.360	98,45%	329.923.660		
				3	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mayang Mangurai	100%	327.203.545	94,00%	307.579.272		
				4	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Bagan Pete	100%	343.842.550	93,44%	321.285.200		
				5	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Beliang	100%	422.020.350	91,65%	386.798.037		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	3.411.953.375	92,02%	3.373.424.110			
				1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenali Besar	100%	976.491.700	92,11%	961.134.700			
				2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawasari	100%	505.807.800	85,84%	500.357.800			
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mayang Mangurai	100%	737.102.100	76,98%	730.282.100			
				4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bagan Pete	100%	639.215.365	87,57%	633.738.100			
				5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beliang	100%	354.200.300	91,10%	348.775.300			
				6 Bangkit Berdaya di Kelurahan Mayang Mangurai	100%	199.136.110	95,92%	199.136.110			
				7	100%		96,67%				
				8	100%		100%				
				9	100%		100%				
				10	100%		100%				
				11	100%		100%				
				12	100%		100%				
JUMLAH						8.214.640.650		7.951.574.735			
	Kewilayahan	Kecamatan Danau Sipin		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.551.552.358	95,49 %	1.448.928.084			
				1 Penyediaan Jasa surat menyurat dan perizinan	Jumlah 2 unit roda 4, 1 unit roda 3, 15 unit roda 2	10.800.000	43,27	4.673.600	100%		
				2 Penyediaan Jasa dan komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	42,552 kwh, 1.740 kubik, 220 Mbps, 1 Tahun	194.800.000	89,35	174.048.109	100%		
				3 Penyediaan jasa administasi keuangan dan asset	46 Orang	348.824.000	90,71	316.425.000	100%		
				4 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ Teknis administrasi/teknis perkantoran	35 Orang	505.798.000	92,85	469.635.500	100%		
				5 Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan, dan pengadaan	1 Tahun	45.000.000	97,77	43.997.000	100%		
				6 Penyediaan Makanan dan minuman	12 Bulan	18.500.000	99,97	18.494.675	100%		
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Perqalatan dan Perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	3 unit, 4 unit, laptop 7 unit, printer 5 unit, tahun	262.630.358	98,05	257.507.700	100%		
				8 Pengadaaanm pemeliharaan dan Rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional	1 unit roda 2, 1 Tahun, 15 unit roda 2, dan 2 unit roda 4	135.200.000	99,26	134.196.500	100%		
				9 Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor	1 Paket	30.000.000	99,83	29.950.000	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			1.Meningkatkan Profesionalisme dalam Pelayanan	Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	185.100.000	87,07%	177.846.900			
				1 Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	PSL 7 Stell, PSH 90 Stell	77.000.000	90,91	70.000.000	100%		
				2 Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/kursus	1 Tahun	6.000.000	100	6.000.000	100%		
				3 Perjalanan Dinas	1 Tahun	102.100.000	99,75	101.846.900	100%		
				Program Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%	43.938.000	100%	43.938.000			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	10 Dokumen	7.000.000	100	7.000.000	100%		
				2 Penyusunan Laporan Keuangan	23 Dokumen	9.000.000	100	9.000.000	100%		
				3 Pengembangan Data/Informasi dan inovasi	1 orang, 8 papan data	27.938.000	100	27.938.000	100%		
				Program Pelayanan Umum Kecamatan	100%	324.238.000	100%	314.471.890			
				1 Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	50%	58.688.000	98,72	57.938.000	100%		
				2 Pembinaan Administrasi Pemerintah umum	2 Kali	25.900.000	98,44	25.495.000	100%		
				3 Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	20 Kali	91.970.000	94,88	87.265.590	100%		
				4 Koordinasi pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	50%	147.680.000	97,35	143.773.300	100%		
				Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100%	375.986.642	58,04%	268.487.100			
				1 Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	15 Kali	188.750.000	45,56	85.992.600	100%		
				2 Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	6 Lembaga	187.236.642	97,47	182.494.500	100%		
			1.Meningkatkan Pembedayaan dan Pembinaan Lembaga	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	2.283.179.587	93,30%	2.101.218.126			
				1 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Putri	Penanganan Covid	477.069.650	99,91	476.619.850	100%		
				2 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Murni	RT	495.403.444	100	495.403.000	100%		
				3 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Legok	42 RT	429.387.747	96,37	413.819.747	100%		
				4 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selamat	32 RT	446.019.146	95,7	426.849.146	100%		
				5 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Solok Sipin	31 RT	435.299.600	66,28	288.526.383	100%		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	2.477.583.671	92,02%	2.373.728.900			
			3.Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kelurahan	1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Putri	6 Lembaga	400.391.225	99,9	399.987.300	100%		
				2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Lembaga	314.968.550	97,34	306.596.750	100%		
				3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Legok	6 Lembaga	630.063.600	96,57	608.451.800	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
				4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selamat	6 Lembaga	452.340.496	92,1	416.623.800	100%		
				5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Solok Sipin	6 Lembaga	479.819.800	92,14	442.108.400	100%		
				6 Bangkit Berdaya Kelurahan Sungai Putri	5 Titik Lokasi	200.000.000	99,98	199.960.850	100%		
				7 Bangkit Berdaya Kelurahan Murni							
				8 Bangkit Berdaya Kelurahan Legok							
				9 Bangkit Berdaya Kelurahan Selamat							
				10 Bangkit Berdaya Kelurahan Solok Sipin							
JUMLAH						7.241.578.258		6.728.619.000			
	Kewilayahan	Kecamatan Paal Merah		Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	1.478.367.300	95,49 %	1.437.690.080			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	100%	10.000.000	28,20 %	2.820.100			
				2 Penyediaan Jasa dan Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	156.650.500	87,07 %	136.390.603			
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	100%	303.956.000	97,68 %	296.916.000			
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis	100%	422.860.800	100,00%	422.860.800			
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100%	46.500.000	100,00 %	46.500.000			
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	58.500.000	99,98 %	58.490.000			
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Perkantoran dan Gedung Perkantoran	100%	316.100.000	99,04%	313.053.077			
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	100%	153.800.000	97,96%	150.659.500			
				9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas	100%	10.000.000	100,00%	10.000.000			
				Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas	100%	153.500.000	87,07%	151.510.870			
				1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	100%	65.500.000	97,25%	63.700.000			
				2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	100%	6.000.000	100,00%	6.000.000			
				3 Perjalanan Dinas	100%	82.000.000	99,77%	81.810.870			
				Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	100%	18.504.000	100%	17.202.600			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	100%	8.480.000	99,91%	8.472.600			
				2 Penyusunan Laporan keuangan	100%	5.530.000	100,00%	5.530.000			
				3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	100%	4.494.000	71,21%	3.200.000			
				Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	100%	103.343.000	100%	102.943.000			
				1 Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	100%	21.900.000	99,09%	21.700.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Optimalisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan	2	Pembinaan Admistrasi Pemerintah Umum	100%	1.000.000	100,00%	1.000.000		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	100%	19.018.000	100,00%	19.018.000		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	100%	61.425.000	99,67%	61.225.000		
			Persentase Kelompok masyarakat yang	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat		100%	959.088.000	58,04%	283.030.000		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan Koordinasi penguatan	100%	811.608.000	16,70%	135.550.000		
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat	2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	100%	147.480.000	100,00%	147.480.000		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	1.928.178.282	93,30%	1.856.999.615		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Talang Bakung	100%	342.752.482	100,00%	342.743.715		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Payo Selincah	100%	413.600.500	99,92%	413.261.050		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Eja Jaya	100%	453.342.000	99,99%	453.310.450		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di KelurahanLingkar Selatan	100%	371.442.000	99,98%	371.367.550		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Paal Merah	100%	347.041.300	79,62%	276.316.850		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100%	3.714.043.810	92,02%	3.659.854.010		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Bakung	100%	701.983.600	99,15%	696.033.600		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payo Selincah	100%	601.421.200	98,43%	591.981.800		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Eka Jaya	100%	883.770.600	99,31%	877.670.600		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkar Selatan	100%	755.529.810	95,70%	723.029.410		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paal Merah	100%	571.338.600	99,96%	571.138.600		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	FISIK (%)		
			Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	6 Bangkit Berdaya di Kelurahan Talang Bakung	100%	-	0%	-			
				7 Bangkit Berdaya di Kelurahan Payo Selincah	100%	-	0%	-			
				8 Bangkit Berdaya di Kelurahan Eka Jaya	100%	-	0%	-			
				9 Bangkit Berdaya di Kelurahan Lingkar Selatan	100%	200.000.000	100,00%	200.000.000			
				10 Bangkit Berdaya di Kelurahan Paal Merah	100%	-	0	-			
JUMLAH						8.355.024.392		7.509.230.175			

LAMPIRAN IV : DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA TAHUN 2020

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
1	Penghargaan Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas SPIP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI	Pemerintah Kota Jambi meraih Penghargaan Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) Level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Sebelumnya pada tahun 2019, Pemerintah Kota Jambi melalui Inspektorat Kota Jambi meraih penghargaan yang sama untuk lingkup Inspektorat Pemerintah Daerah	Kota Jambi, 22 Januari 2020	Walikota Jambi
2	Penghargaan atas Partisipasi dan Kepedulian Pemkot Jambi Melunasi Tagihan Rekening Listrik Tepat Waktu	PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan dari PT. PLN Persero, atas Partisipasi dan Kepedulian Pemkot Jambi Melunasi Tagihan Rekening Listrik Tepat Waktu, selama tahun 2019	Kota Jambi, 04 Februari 2020	Wali Kota Jambi
3	Penghargaan SAKIP Tahun 2019	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahjo Kumolo	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan atas Laporan Akhir Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 dengan Nilai B	Batam, 10 Februari 2020	Wali Kota Jambi
4	Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahjo Kumolo	Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME meraih penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Peringkat Memuaskan berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2019	Solo, 26 Februari 2020	Wali Kota Jambi
5	Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP	Menteri Dalam Negeri RI Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D	Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME meraih penghargaan nasional Karya Bhakti Peduli Satpol PP pada puncak acara HUT ke-70 Satpol PP dan HUT ke-58 Satlinmas Tahun 2020	Mataram, 3 Maret 2020	Wali Kota Jambi
6	Penghargaan Top Digital Innovation Awards 2020	Menristek/BRIN Prof. Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro	Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME meraih penghargaan nasional Penghargaan Top Digital Innovation Awards 2020, Kategori Top Strategy and Leadership in Government 2020	Jakarta, 29 April 2020	Wali Kota Jambi
7	Juara 3 Nasional Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19	Menristek/BRIN Prof. Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro	Kota Jambi meraih penghargaan nasional Juara 3 Nasional Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, untuk kategori Restoran	Jakarta, 22 Juni 2020	Wali Kota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
8	Penghargaan Inovasi TOP-99 Kemenpan-RB untuk program inovasi Bangkit Berdaya	Menpan RB H. Tjahjo Kumolo, S.H.	Wali Kota Jambi dianugerahi Penghargaan Inovasi TOP 99 Kemenpan RB untuk inovasi Bangkit Berdaya		Wali Kota Jambi
9	Natamukti Award Tahun 2020	Menteri Koperasi dan UKM RI bersama ICSB (International Council for Small Business)	Kota Jambi meraih penghargaan nasional Natamukti Award Tahun 2020	Jakarta, 17 September 2020	Wali Kota Jambi
10	<i>Indonesia Tourism, Trade, Investment and Industry Awards 2020 Virtual, Silver Winner of Indonesia Tourism Award 2020</i>	Menteri Koperasi dan UKM RI bersama ICSB (International Council for Small Business)	Kota Jambi meraih penghargaan nasional <i>Indonesia Tourism, Trade, Investment and Industry Awards 2020 Virtual, Silver Winner of Indonesia Tourism Award 2020</i>	Jakarta, 17 September 2020	Wali Kota Jambi
11	<i>Indonesia Tourism, Trade, Investment and Industry Awards 2020 Virtual, Silver Winner of Indonesia Investment Award 2020</i>	Menteri Koperasi dan UKM RI bersama ICSB (International Council for Small Business)	Kota Jambi meraih penghargaan nasional <i>Indonesia Tourism, Trade, Investment and Industry Awards 2020 Virtual, Silver Winner of Indonesia Investment Award 2020</i>	Jakarta, 17 September 2020	Wali Kota Jambi
12	<i>Indonesia Tourism, Trade, Investment and Industry Awards 2020 Virtual, Silver Winner of Indonesia Industry Award 2020</i>	Menteri Koperasi dan UKM RI bersama ICSB (International Council for Small Business)	Kota Jambi meraih penghargaan nasional <i>Indonesia Tourism, Trade, Investment and Industry Awards 2020 Virtual, Silver Winner of Indonesia Industry Award 2020</i>	Jakarta, 17 September 2020	Wali Kota Jambi
13	Penghargaan atas dedikasi dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan seleksi CPNS formasi tahun 2019 wilayah kerja kantor regional BKN Palembang	BKN Palembang	Pemerintah Kota Jambi Menerima Penghargaan atas dedikasi dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan seleksi CPNS formasi tahun 2019 wilayah kerja kantor regional BKN Palembang	Palembang, 03 November 2020	
14	Penghargaan Atas Opini WTP Terhadap LKPD Pemkot Jambi Tahun 2019	Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indarwati	Pemerintah Kota Jambi meraih piagam penghargaan dan Dana Insentif Daerah dari Menteri Keuangan RI atas Capaian Opini WTP Terhadap LKPD Pemkot Jambi Tahun 2019	Kota Jambi, 4 November 2020	Wali Kota Jambi
15	Penghargaan Atas Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018	Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Tito Karnavian, Ph.D	Pemerintah Kota Jambi meraih piagam penghargaan Atas Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 terhadap Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Jambi Tahun 2019 dengan status Kinerja Sangat Tinggi (Skor 3,44420/8 Besar Tertinggi Nasional Kategori Kota)	Kota Jambi, 11 November 2020	Wali Kota Jambi

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/LEMBAGA YANG MENERBITKAN/MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA
16	Penghargaan Produktivitas Sidhakarya	Pjs. Gubernur Jambi Ir. Restuardy Daud, M.Sc	Walikota Jambi Menerima Penghargaan Produktivitas Sidhakarya Tahun 2020 atas dukungan dan pembinaan Kepada Perusahaan Kecil dan Menengah	Jambi, 27 November 2020	
17	Nusantara Award 2020, Kota Terbaik Dalam Bidang Teknologi	IPM Bekerjasama dengan Kemristekdikti	Pemerintah Kota Jambi meraih penghargaan Nusantara Award 2020 sebagai Kota Terbaik Dalam Bidang Teknologi	Jakarta, 7 Desember 2020	Wali Kota Jambi
18	Nusantara Award 2020, Kepala Daerah Inovatif	IPM Bekerjasama dengan Kemristekdikti	Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME meraih penghargaan Nusantara Award 2020 sebagai Kepala Daerah Inovatif	Jakarta, 7 Desember 2020	Wali Kota Jambi
19	Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2019	Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasona Laoli	Pemerintah Kota Jambi kembali meraih Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia untuk Tahun 2019, serta Pelayanan Publik Berbasis HAM, pada puncak acara Peringatan ke-72 Tahun Hari HAM Sedunia Tahun 2020	Kota Jambi, 13 Desember 2020	Wali Kota Jambi
20	Piala dan Piagam Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kemendagri RI dengan Kategori Kota Sangat Inovatif	Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Tito Kamavian, Ph.D	Pemerintah Kota Jambi kembali meraih penghargaan tingkat nasional, Piala dan Piagam Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kemendagri RI dengan Kategori Kota Sangat Inovatif.	Jakarta, 18 Desember 2020	Wali Kota Jambi
21	Nirwasita Tantra "Green Leadership" Tahun 2020	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar	Wali Kota Jambi meraih penghargaan tingkat nasional, Nirwasita Tantra "Green Leadership" Tahun 2020 Kategori Kota Sedang, atas inovasi dan kepemimpinan dalam merespon persoalan lingkungan hidup didaerahnya	Jakarta, 21 Desember 2020	Wali KotaJambi
22	Top Digital Awards 2020, Top Digital Implementation 2020 on District Government Level Stars 4	Majalah IT Works (PT. Madani Solusi Internasional (MSI Group)	Pemerintah Kota Jambi kembali meraih penghargaan tingkat nasional, Top Digital Awards 2020, Top Digital Implementation 2020 on District Government Level Stars 4	Jakarta, 22 Desember 2020	Wali Kota Jambi
23	Top Digital Awards 2020, Top Leader on Digital Implementation 2020	Majalah IT Works (PT. Madani Solusi Internasional (MSI Group)	Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha ME kembali meraih penghargaan tingkat nasional, Top Digital Awards 2020, Top Leader on Digital Implementation 2020	Jakarta, 22 Desember 2020	Wali Kota Jambi

LAMPIRAN V DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

NO	NAMA OPD	Nomor Inovasi	INOVASI	KELENGKAPAN DOKUMENTASI	Tahun	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
1	DISKOMINFO	1	Aplikasi Berita Pemkot Jambi (Versi Web dan Android)	https://play.google.com/store/apps/details?id=goid.jambikota.site&hl=in	2016		Aplikasi Android Kota Jambi memberikan Anda Informasi Terbaru seputar Informasi Seputar Kota Jambi. Baik itu dari Segi Ekonomi, Pembangunan, Sosial, Wisata dan sebagai nya. Berita akan selalu di update setiap hari nya, dan fitur fitur baru akan selalu di tambahkan sesuai kebutuhan.
		2	Aplikasi Dataset Kota Jambi	http://data.jambikota.go.id/	2017		Portal Data Terpadu Pemerintah Kota Jambi yang menyajikan data-data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk menyediakan satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi.
2	Bappeda Kota Jambi	3	E-PLANNING	http://bappeda.jambikota.go.id/ep/anning	2017	Pelayanan Publik	Penggunaan dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) ini bertujuan untuk :Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan;Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dana kuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik;Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten
		4	Bangkit Berdaya (Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu Yang Berazaskan Swadaya)		2017	Pelayanan Publik	Dengan adanya inovasi Bangkit Berdaya ini mampu mengakselerasi pembangunan serta mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah yang ada di Kota Jambi. Bangkit Berdaya merupakan program percepatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah.
3	Puskesmas Putri Ayu	5	Klinik Lansia "One Room Service"		2017	Pelayanan Publik	untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan secara tersendiri dan terpisah dari poli umum sebelumnya. Sasaran utama Klinik Lansia ini adalah pasien dengan umur di atas 56 tahun ke atas.
4	DISKOMINFO	6	Sikesal	https://play.google.com/store/apps/details?id=goid.jambikota.sikesal&hl=in	2017	Pelayanan Publik	SiKesimal sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan atau menyampaikan keluhan seputar permasalahan yang ada dikota jambi.
		7	Sipadek	https://sipadek.jambikota.go.id/	2017	Pelayanan Publik	Sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna menunjang kelancaran tugas penyelenggaraanpemerintahan dibidang tata surat masuk dan surat keluar agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengankondisi dan kebutuhan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
		8	Aplikasi e-Agenda (Versi Web dan Android)	http://agenda.jambikota.go.id/med.php	2018		Aplikasi Agenda digunakan untuk pencatatan data jadwal kegiatan pimpinan. Data yang tersedia antara lain waktu, kegiatan, lokasi dan file dokumen terkait kegiatan.
		9	Aplikasi Desk Pilkada (Versi Web dan Android)		2018		Aplikasi yang bertujuan untuk menghitung cepat hasil pemilihan umum kepala daerah di Kota Jambi. Aplikasi ini hanya lah sebagai pembanding, bukan hasil resmi.
5	BPPRD	10	Klik Pajak Kota Jambi		2018	Pelayanan Publik	Klik Pajak Kota Jambi adalah terobosan BPPRD Kota Jambi berupa sistem informasi terpadu yang terdiri dari e-payment (sebagai database) dan simpareda (sebagai core kerja dari pelayanan Pajak Daerah Kota Jambi) yang dipadukan sehingga berbentuk suatu pelayanan berbasis data elektronik pajak kepada masyarakat Kota Jambi terkhusus para pelaku usaha di Kota Jambi selaku Wajib Pajak.

LAMPIRAN V DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

NO	NAMA OPD	Nomor Inovasi	INOVASI	KELENGKAPAN DOKUMENTASI	Tahun	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
4	Kecamatan Pasar	11	Pelayanan JETAR (Jemput Antar)		2018	Tata Kelola Pemerintah	Layanan "JETAR" merupakan layanan dimana masyarakat hanya menyiapkan berkas-berkas persyaratan khususnya pengurusan surat perizinan, dan petugas akan menjemput berkas persyaratan tersebut ke kediaman yang bersangkutan. setelah persyaratan lengkap maka akan diproses lalu jika dokumen telah selesai maka akan diantar oleh petugas yang telah ditunjuk.
		12	Kecapsarabi	http://www.kecpasarjambi.jambikota.go.id/			
6	Puskesmas Kebun Handil	13	Menuju Puskesmas ODF (Open Defecation Free)		2018	Pelayanan Publik	Dari kegiatan tersebut diperoleh data bahwa masih ada masyarakat di Kelurahan Kebun Handil, Handil Jaya dan Jelutung yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Berdasarkan hal tersebut maka Puskesmas Kebon Handil membuat inovasi yang berjudul "Menuju Puskesmas ODF (Open Defecation Free)". Kemudian inovasi ini disampaikan di setiap pertemuan Lintas Sektor Dalam menjalankan pemenuhan inovasi ini, Puskesmas Kebon Handil mendapatkan dukungan penuh dari Lintas Sektor, yaitu;1. Dinas Kesehatan Kota Jambi (sebagai motivator melalui pemicuan, yang berperan dalam merubah perilaku masyarakat dari yang Buang air Besar Sembarangan (BABS) menjadi tidak BABS lagi;2. Camat, Lurah dan RT (berperan dalam hal mengkoordinir warga/masyarakat bersama-sama dengan petugas Puskesmas berusaha merubah perilaku masyarakat dengan cara memotivasi melalui sosialisasi);3. Dinas PU (memberikan bantuan Sarana berupa pembangunan IPAL Komunal dan Septictank Individu.Inovasi ini membuahkan hasil, yaitu dengan adanya Deklarasi ODF di 2 (dua) kelurahan, Kelurahan Handil Jaya dan kelurahan Kebun Handil pada Bulan November 2018, dan untuk Kelurahan jelutung direncanakan akan Deklarasi ODF pada Tahun 2020.
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	PAKWO (Pelayanan Pelaporan Akta Kematian Melalui Aplikasi Whatsapp Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi)		2018	Tata Kelola Pemerintah	inovasi "PAKWO" pelayanan pelaporan akta kematian melalui aplikasi WhatsApp Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	KARTU PELANGGAN LPG 3 KG DI KOTA JAMBI		2018	Pelayanan Publik	Pemberian Kartu Pelanggan dimaksudkan untuk pemerataan dan menjamin ketersediaan LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Jambi.
9	Dinas Pendidikan	16	Supik Dompeng SD Negeri I		2018	Tata Kelola Pemerintah	mengumpulkan kepingan-kepingan uang receh yang dilakukan oleh seluruh siswa mulai dari kelas I sampai Kelas VI. Di Indonesia kita memiliki dua macam uang, yaitu uang kertas dan uang logam (receh). Uang kertas biasanya berguna untuk transaksi sehari-hari dengan segala nominal, dari sekedar beli jajanan murah meriah sampai membeli barang elektronik sekalipun (jika mau bayar cash). Sebaliknya, uang receh sering dianggap sebagai "pembuat susah" karena membuat dompet menjadi berat.

LAMPIRAN V DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

NO	NAMA OPD	Nomor Inovasi	INOVASI	KELENGKAPAN DOKUMENTASI	Tahun	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
		17	MEMBANGUN KARAKTER DUNIA PENDIDIKAN KOTA JAMBI MELALUI KEARIFAN LOKAL "TANAH PILIH"		2018	Tata Kelola Pemerintah	"Membangun Karakter melalui Kearifan Lokal "Tanah Pilih Pusako Batuah" merupakan Program Kegiatan yang dilaksanakan dalam menjawab tantangan globalisasi, dimana proses pembangunan seringkali dimaknai secara sederhana sebagai perubahan kehidupan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.
10	PDAM Tirta Mayang	18	Metode Streaming Current Meter (SCM)		2018	Pelayanan Publik	Streaming Current Meter (SCM) adalah metode pengendalian proses koagulasi di Instalasi Air Minum (IPA), dengan menggunakan prinsip nilai zeta potensial di dalam partikel koloida di dalam air baku.
		19	Layanan SMS Centre	https://www.pdamtirtamayang.com/index.php/topmenulayanan/186-layanan-sms-centre			
11	DISKOMINFO	20	City Operation Center (COC)		2018	Pelayanan Publik	City Operation Center (COC) di Kantor Walikota Jambi merupakan ruang kendali. Ruang COC tidak hanya mengawasi jalur lalu lintas tetapi juga memberikan informasi pergerakan harga, pengaduan masyarakat dan pergerakan ASN di Kota Jambi termasuk di Kecamatan dan Kelurahan. Fasilitas ini memberikan kemudahan untuk mengawasi untuk pergerakan yang terjadi di Kota Jambi bahkan COC ini dapat membantu dalam mengungkap kejadian,
11	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	21	Pewiston (Pengendalian dan pengawasan melalui		2018	Pelayanan Publik	Untuk memudahkan tenaga pengawas melakukan pengawasan angkutan persampahan dan mengurangi pembiayaan pengawasan, dengan adanya sistem ini pengawasan dapat dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien dan dilakukan pengawasan dimanapun.
		22	Gerakan Diet Plastik Kota Jambi		2018	Tata Kelola Pemerintah	Plastik merupakan salah satu elemen sampah yang paling hangat dibicarakan masyarakat dunia saat ini. karena sulitnya penguraian sampah tersebut dijadikan alasan pemerintah untuk menyoroti permasalahan penggunaan kantong plastik di masyarakat khususnya masyarakat kota Jambi.
		23	SIIT (Sistem Inventarisasi Tanaman)	http://sitt.kemkes.go.id/sitt/login_index.php	2018	Tata Kelola Pemerintah	Adapun tujuan di adakan inovasi ini untuk mempermudah masyarakat, bahkan mahasiswa mendapatkan informasi tentang pohon kota jambi dan menjadi media informasi yang efektif dan efisien. Karna kurangnya pencerahan tentang Memperkenalkan Inovasi dalam inventarisasi tanaman.
		24	SIPPOLING (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Berbasis Elektronik)		2019	Pelayanan Publik	Untuk memudahkan usaha dan/atau kegiatan melaporkan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara manual setiap triwulan dan semester kepada dinas lingkungan hidup kota jambi, dengan adanya sistem ini jumlah usaha yang melaporkan kewajiban dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup lebih banyak, lebih efisien dan efektif (mengurangi pembiayaan ATK)
12	DISKOMINFO	25	Sikoja	https://play.google.com/store/apps/details?id=goidjambikota.sikoja&hl=en	2019	Pelayanan Publik	Untuk menyatukan berbagai WEB dan Aplikasi dari berbagai OPD lingkup Kota Jambi
		26	Sipaten	https://sipaten.jambikota.go.id/	2019	Pelayanan Publik	agar pelayanan adminstrasi umum di Kecamatan dan Kelurahan dapat ditangani dengan cepat, efektif dan efisien.

LAMPIRAN V DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

NO	NAMA OPD	Nomor Inovasi	INOVASI	KELENGKAPAN DOKUMENTASI	Tahun	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi	
13	Sekretariat DPRD	27	Aplikasi SIDAK		2019	Pelayanan Publik	Aplikasi SIGAP ini sangat membantu pengguna dalam menggunakan data informasi yang dibutuhkan Anggota DPRD Kota Jambi, dan membuat komunikasi antara Sekwan dan Anggota bisa berjalan dengan cepat melalui aplikasi ini.	
14	Bagian Organisasi Setda Kota Jambi	28	SIBABA	http://sibaba.jambikota.go.id	2019	Tata Kelola Pemerintah	Sistem Analisis Jabatan dan Beban Kerja yang selanjutnya disingkat SIBABA, adalah Aplikasi yang digunakan untuk membantu proses penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkup Pemerintah Kota Jambi.	
		29	E-SAKIP		2019	Tata Kelola Pemerintah	SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	
		30	SIKO	https://siko.jambikota.go.id/	2019	Tata Kelola Pemerintah	Aplikasi SIKO memudahkan Perangkat Daerah untuk menyusun Inovasi dengan Prinsip dasar tidak menyulitkan dan memenuhi setiap perlombaan inovasi dari berbagai kementerian dan lembaga sebagai bukti penerapan inovasi sudah berjalan di KotaJambi.	
15	BKPSDMD	31	Fit and proper test		2019	Tata Kelola Pemerintah	Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih serta Kepemimpinan yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang dapat membawa yang baik pada Tata kelola Pemerintahan, perlu adanya pelaksanaan Fit and Proper Test khusus nya untuk Jabatan Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.	
		32	Pelayanan administrasi diklat berbasis online		2019	Tata Kelola Pemerintah	Tersedianya layanan pendaftaran diklat secara online bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah KotaJambiEfisiensi, efektifitas waktu, tenaga dan biayaMemberikan kecepatan pelayanan yang lebih baikMemberikan kemudahan pendaftaran, karena tidak perlu datang ke instansi yang bersangkutan, asalkan memilikakses internetStatus pendaftaran dapat diketahui setiap saat	
		33	Penghargaan Manajemen Kepegawaian OPD terbaik		2019	Tata Kelola Pemerintah	Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja aparatur sipil negara (ASN), di lingkungan pemerintah kotajambi, khususnya di bidang tertib administrasi Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing masing.	
		34	Aplikasi e-Yantur					
		35	Aplikasi SIMPEG	http://bkd.jambikota.go.id/simpeg/login.php				
		36	Aplikasi e-Kinerja	http://e-kinerja.jambikota.go.id/				
		37	Aplikasi e-Absensi	http://absen.bkd.jambikota.go.id/				
		38	Aplikasi Pengaduan ASN					
39	Arsip ASN Kota Jambi (Versi Web dan Android)	https://play.google.com/store/apps/details?id=goid.jambikota.arsipasn&hl=in						
16	Puskesmas Payo Selincah	40	GRABB TB		2019	Pelayanan Publik	inovasi GRABB TB dapat membantu dan memberikan perhatian serta motivasi eksternal kepada penderita Tuberkulosis. Selain itu, dapat menjalin komunikasi dan hubungan silaturahmi antara petugas kesehatan ngan pasien Tuberkulosis	

LAMPIRAN V DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

NO	NAMA OPD	Nomor Inovasi	INOVASI	KELENGKAPAN DOKUMENTASI	Tahun	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
17	Kecamatan Jambi Timur	41	SIUMK Jambi Timur Keren Jualan di Pasar		2019	Pelayanan Publik	Guna menjamin rasa aman dan legalitas berusaha dan meningkatkan pendapatan maka munculah ide untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para pedagang dan pelaku usaha melalui Inovasi di bidang pelayanan Publik dengan Judul " SIUMK Jambi Timur Keren Jualan di Pasar". Inovasi ini dilaksanakan dengan menjemput bola dimana para pihak langsung mendatangi para pedang dan menggunakan sistem koperasi dan kekeluargaan.
18	Kecamatan Jambi Selatan	42	Jamsel Smart		2019	Pelayanan Publik	JAMSEL SMART adalah Seksi yang melayani Masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat yang bertujuan agar warga masyarakat berperilaku taat dan patuh dengan aturan yang ada baik itu Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Walikota
		43	Jamsel Care		2019	Pelayanan Publik	Jamsel Care adalah suatu Program yang dibentuk oleh Kecamatan Jambi Selatan yang bersifat Kepedulian Sosial terhadap Masyarakat sekitar dan juga menumbuhkan rasa simpati dan empati. Program ini juga berupaya membantu meringankan beban masyarakat yang membuntuhkan dan bertujuan untuk berbagi kebahagiaan terhadap sesama. Jamsel Care dapat menjalin tali silaturahmi antar manusia dan dapat membangaun solidaritas. Para penerima Jamsel Care adalah Kaum Dhuafa, Lansia, faKIR Miskin, Keluarga yang terkena musibah, dan Juga Keluarga yang sedang berduka (Meninggal dunia), anak yatim piatu. Bantuan yang kami berikan adalah berupa sembako (Beras, Minyak, Gula, Susu, Telur, Teh, Roti, Mie Instant dll)
		44	Jambi selatan Service		2019	Pelayanan Publik	JAMBI SELATAN Service adalah sebuah pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan maupun non perizinan.
		45	SILAT		2020	Pelayanan Publik	Silat adalah program inovasi Kecamatan Jambi Selatan sebagai penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat. Program ini muncul karna rasa kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Silat juga berusaha memberikan yang terbaik terhadap masyarakat. Melalui Kegiatan Silat ini sebagai penghubung antara aparat dan masyarakat khususnya lembaga-lembaga seperti LAM, LPM, RT yang ada dikelurahan.
		46	Jambi Timur Information Center & Service (JAMTICS) (Versi Web dan Android)	http://www.kecjambitmur.com/			
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Inovasi Lingkungan Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR)		2019	Tata Kelola Pemerintah	Program Kampung BANTAR bertujuan mengakselerasi percepatan pembangunan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan kualitas kesejahteraan khususnya di lokasi RT Kampung BANTAR.

LAMPIRAN V DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

NO	NAMA OPD	Nomor Inovasi	INOVASI	KELENGKAPAN DOKUMENTASI	Tahun	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
20	Kecamatan Kota Baru	48	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GOTONG ROYONG SYSTEM ARISAN FORUM RT DI KASAMBA “ ARGO KASAMBA”		2019	Pelayanan Publik	Kegiatan Gotong Royong di Masyarakat merupakan upaya untuk menggelorakan semangat kerja bhakti dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat kita, agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam melaksanakan, memanfaatkan dan melestarikan semangat dan jiwa gotong royong yang saat ini sudah mulai luntur dalam dinamika masyarakat yang modern
22	DKP	49	Transformasi Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Berbasis Jaringan (Online)		2019	Tata Kelola Pemerintah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi sebagai salah satu instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat saat ini telah bertransformasi menuju perpustakaan berbasis jaringan (online). Adapun layanan tersebut diantaranya berbasis otomasi perpustakaan dengan aplikasinya bernama INLIS Lite, berbasis digital / android dengan aplikasinya bernama iJambiKota, dan berbasis website
21	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	50	PORTAL UKPBJ		2019	Tata Kelola Pemerintah	aplikasi tentang monitoring dan evaluasi di seluruh indonesia sudah banyak tersedia, namun aplikasi Portal UKPBJ tidak hanya berbasis program dan kegiatan namun sampai pada paket pekerjaan, dokumen pengadaan untuk pertanggungjawaban bukti pembelian, kuitansi dan SPK/Kontrak telah tersedia di dalam sistem, bukti dokumen tersimpan dalam server pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, data rekanan meliputi rekanan perorangan maupun badan hukum terinventarisir dalam sistem.
22	Puskesmas Tanjung Pinang	51	Sarana Pelayanan Inovatif Dengan RaMah ANak (SPIDERMAN)		2019	Pelayanan Publik	SPIDERMAN (Sarana Pelayanan Inovatif Dengan RaMah ANak) adalah suatu inovasi yang mengintegrasikan kegiatan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM), yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak yang masih belum tercapai.
23	Kecamatan Jelutung	52	SIMPELAJA		2019	Pelayanan Publik	Simpel Aja Kecamatan Jelutung Kota Jambi memudahkan para lansia dan penyandang disabilitas dapat memiliki dokumen kependudukan secara cepat dan tepat dalam pengurusan serta menunjang kelengkapan data kependudukan di kecamatan dan Kota Jambi.
		53	Capsule Bus Koja Trans		2019	Pelayanan Publik	Bus kapsul berbasis aplikasi ini pertama kali diluncurkan oleh Pemerintah Kota Jambi di tengah pengusungan Kota Pintar Jambi.
		54	Dishub Smart (Versi Andoid)	https://play.google.com/store/apps/details?id=megatama.dishub.smart&hl=in			
		55	Dishub Single Sign-On (Versi Andoid)	https://play.google.com/store/apps/details?id=goid.jambikota.dishub.signon			
		56	KojaTrans	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.live.capsulebus.pasenger&hl=en			
24	DISKOMINFO	57	Aplikasi LPSE	http://lpse.jambikota.go.id/eproc4			
		58	Pusat Informasi Covid19 Kota	https://covid19.jambikota.go.id/	2020		Aplikasi Pusat Informasi Covid19 Kota Jambi adalah aplikasi yang ditujukan untuk memantau perkembangan Covid-19 Dikota Jambi
		59	Info Kedatangan Bandara	https://info-bandara.jambikota.go.id/	2020		Info Kedatangan Bandara adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata setiap orang yang datang melalui bandara kota jambi

LAMPIRAN V DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

NO	NAMA OPD	Nomor Inovasi	INOVASI	KELENGKAPAN DOKUMENTASI	Tahun	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
		60	Info Kedatangan Orang	https://info-kedatangan.jambikota.go.id/	2020		Info Kedatangan Orang adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata setiap orang yang datang melalui jalur darat.
		61	Stok APD Gugus Tugas Covid19	http://data-umum.jambikota.go.id/	2020		Stok APD Gugus Tugas Covid19 adalah aplikasi yang menyediakan data ketersediaan stok APD Gugus Tugas Covid19
		62	Laporan Penyemprotan Disinfektan	http://data-umum.jambikota.go.id/	2020		Laporan Penyemprotan Disinfektan adalah aplikasi untuk melaporkan daerah-daerah yang telah dilakukan penyemprotan disinfektan
		63	Laporan Patroli Kecamatan	http://data-umum.jambikota.go.id/	2020		Laporan Patroli Kecamatan adalah aplikasi yang menyediakan data laporan daerah yang telah dilakukan patroli
		64	Tracing Pasien Covid	http://data-umum.jambikota.go.id/	2020		Tracing Pasien Covid adalah aplikasi yang digunakan untuk melacak kontak erat pasien covid di Kota Jambi
		65	Form Izin Usaha	http://relaksasi.jambikota.go.id/	2020		Form Izin Usaha adalah aplikasi yang digunakan untuk para pelaku usaha menerbitkan izin usaha mereka di keadaan covid
		66	Aplikasi e-Office Sistem Surat Masuk Surat Keluar (SISUMAKER) (Versi Web dan Android)	http://sisumaker.jambikota.go.id/			
		67	Aplikasi Kliping Digital	http://klipingdigital.jambikota.go.id/			
		68	Mail PNS	https://mail.jambikota.go.id/			
		69	Open Data Pemkot Jambi	http://data.jambikota.go.id/			
		70					
		71	Aplikasi PPID Kota Jambi (Versi Web dan Android)	http://ppid.jambikota.go.id/	2020		
		72	Aplikasi info PBB (Versi Web dan Android)	http://infotagihan.pbb-p2.com/			
		73	BPPRD Kota Jambi SignOn (Versi Web dan Android)	https://play.google.com/store/apps/details?id=megatama.bpprd&hl=id			
		74	e-Payment Kota Jambi	https://epayment.kotajambi.web.id/			
		75	Simpareda Kota Jambi	https://simpareda.kotajambi.web.id/			
25	Kecamatan Telanaipura	76	One Heart		2020	Pelayanan Publik	Inovasi ini dibuat untuk mempercepat pelayanan masyarakat yang sekiranya tidak dapat ke kantor langsung dengan katagori faktor ekonomi, fisik, dan keterbatasan waktu. dan masyarakat akan merasa puas dengan layanan yang kecamatan berikan.

LAMPIRAN V DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

NO	NAMA OPD	Nomor Inovasi	INOVASI	KELENGKAPAN DOKUMENTASI	Tahun	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
26	Kecamatan Alam Barajo	77	GEMARASAPEKA NINI		2020	Tata Kelola Pemerintah	pendidikan anak usia dini dan perlu adanya satu kata dari kelompok organisasi Dengan adanya Inovasi tersebut diharapkan mereka berperan aktif memperkenalkan PAUD ke para orangtua, dan anak usia 3 tahun tidak ada yang tidak mendapatkan pendidikan.
27	Kecamatan Danau Sipin	78	Sentra Remaja		2020	Pelayanan Publik	Sentra Remaja sebagai pusat kegiatan remaja di kecamatan danau sipin untuk meminimalisir pengaruh negatif dengan kegiatan yang positif dan banyak di bina oleh lintas sektoral pada kecamatan danau sipin oleh Puskesmas Putri Ayu, PKK Kecamatan Danau Sipin, KUA, PLKB dan Babinsa Babinkamtibmas.
28	DTKK, UKM	79	Layanan Informasi Publik	http://www.disnakerkopjambikota.com/			
		80	Aplikasi Laporan Koperasi	http://silakop.jambikota.go.id/			
29	DINAS KESEHATAN	81	Aplikasi Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA)	http://siha.depkes.go.id/login_index.php			
30	DPUPR	82	Aplikasi EMON DAK	emonitoring.pu.go.id/dak/			
31	BPKAD	83	SIPKD				
		84	eSILOLA	185.201.8.99/esilola			
		85	SIRUP	http://sirup.jambikota.go.id/			
		86	SIRAJA KOJA	http://www.sirajakoja.jambikota.go.id/			
		87	TEPRA				
32	BAGIAN HUKUM	88	JDIH Kota Jambi	https://jdih.jambikota.go.id/			
33	Dinas Perdagangan dan	89	Aplikasi Harga Pasar(SiHarko)	https://harga-pasar.jambikota.go.id/			
34	DPMPSTP	90	Aplikasi Perizinan Online (Versi Web dan Android)	https://dpmptsp.jambikota.go.id/wBSITE/?halm=3			
35	Bappeda Kota Jambi	91	Pakar Kasih (Pendaftaran Tenaga Kerja)	http://www.pakarkasih.jambikota.go.id/	2020		

LKPJ 2020



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021